



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, sehingga sebagai legitimasi dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II RKPD TAHUN 2027

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2027 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Selain mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD Tahun 2027 memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027.
- (3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan landasan dan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. sebagai pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Tahun 2027 dan Rencana APBD tahun anggaran 2027.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RKPD Tahun 2027.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2027 mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi dan kegiatan prioritas Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2027 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif.
- (4) Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2027 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.

- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

M. AGUS NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Triadi RD, SH., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820313 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan pembangunan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Melalui proses perencanaan yang sistematis, Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta target-target kinerja yang menjadi dasar pengambilan keputusan, pengalokasian sumber daya, dan evaluasi capaian pembangunan daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai landasan utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan tersebut meliputi RPJPD, RPJMD, serta RKPD yang disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan.

RKPD Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Tahun 2025–2029. RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA PPAS, serta rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, sehingga menjadi jembatan antara proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politis diwujudkan melalui integrasi visi dan misi Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dirumuskan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang berbasis data dan analisis. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan guna menjaring aspirasi masyarakat dan memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Sementara itu, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas diwujudkan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

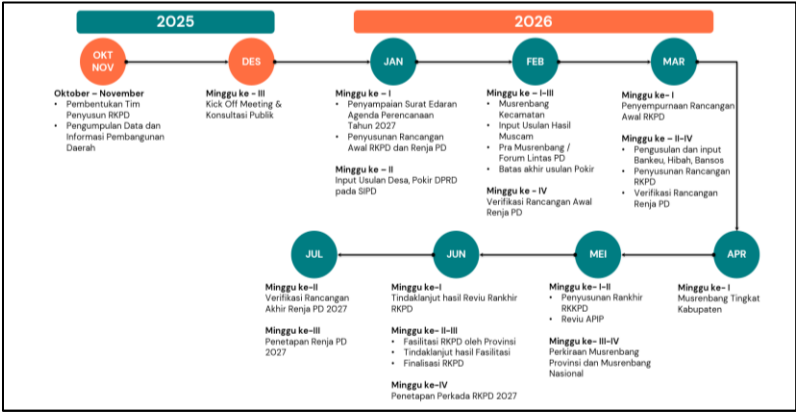
Selain pendekatan di atas, penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga menggunakan pendekatan penganggaran berbasis *money-follow* program serta pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, menyeluruh, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun pendekatan spasial menitikberatkan pada karakteristik dan potensi masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang, dan pemerataan pembangunan antar kawasan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi pembangunan daerah.

Sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029, pembangunan Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu Pembangunan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia Dengan Menitikberatkan pada Pendidikan Agama dan Karakter. Visi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan prioritas pembangunan agar pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan tema pembangunan Tahun 2027 yaitu “Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata.” Tema ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan daerah yang didukung oleh sektor-sektor lainnya, seperti perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah, pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akselerasi perekonomian berbasis pariwisata diarahkan tidak hanya pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kualitas destinasi, penguatan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi lokal, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Adapun jadwal penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RKPD



Sumber: Olahan Penulis, 2026

RKPD Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 guna menjamin sinkronisasi dan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Daerah. Keterpaduan ini diharapkan dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan daerah secara selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 dalam penyusunan RKPD menjadi dasar sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan, konsistensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan prioritas pembangunan agar lebih berorientasi pada hasil (*result-based planning*) serta mampu menjawab dinamika dan kebutuhan masyarakat secara adaptif. Seluruh proses perencanaan dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen integrasi perencanaan dan penganggaran.

RKPD Tahun 2027 sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang terdiri dari 15 (lima belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu diwujudkan melalui integrasi dalam kebijakan Daerah, termasuk dalam Program pengentasan kemiskinan, penyediaan pendidikan berkualitas, penguatan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, RKPD Tahun 2027 diharapkan menjadi instrumen perencanaan yang fokus, terarah, dan adaptif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah sekaligus mengoptimalkan potensi unggulan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2027 serta mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat ketercapaiannya maka perencanaan juga didampingi oleh manajemen risiko sebagai bagian integral dalam kerangka perencanaan dan pengendalian pembangunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan Antardokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan suatu mekanisme terpadu dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan melibatkan unsur penyelenggara negara serta partisipasi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan pembangunan terbagi ke dalam perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, serta perencanaan jangka pendek yang bersifat tahunan. Ditinjau dari struktur penyusunannya, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas dokumen perencanaan tingkat nasional dan dokumen perencanaan tingkat daerah, yang penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, selaras, dan saling mendukung.

Ruang lingkup Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

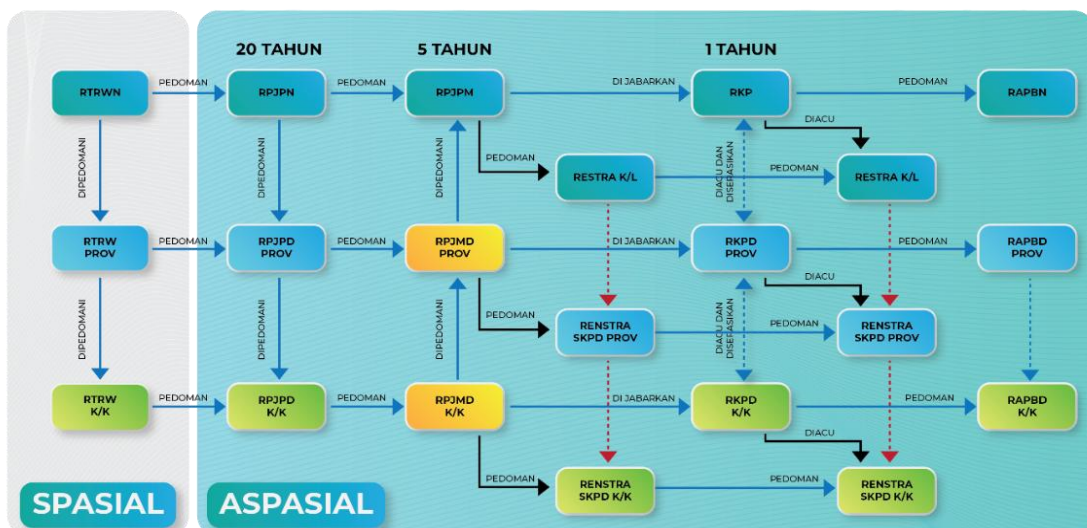
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2045;
- Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027; dan
- Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2027.

Sejalan dengan kerangka perencanaan di tingkat nasional tersebut, dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- RPJPD Tahun 2025-2045;
- RPJMD Tahun 2025-2029;
- Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- RKPD Tahun 2027; dan
- Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, didasarkan pada landasan hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua regulasi tersebut menegaskan keterkaitan yang erat antara proses perencanaan dan penganggaran, sehingga setiap dokumen perencanaan harus selaras dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagaimana pada Gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Hubungan antar dokumen RKPD Tahun 2027 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 dan RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta kerangka pendanaan daerah, dengan tetap mengacu dan selaras terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029. RKPD Tahun 2027 memuat sasaran pembangunan tahunan, arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dengan demikian, RKPD menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Selanjutnya, program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2027, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, RKPD berfungsi sebagai penghubung utama antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah, sehingga terwujud keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, dan pengelolaan keuangan daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah:

- a. menjaga keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2029 dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD Tahun 2027;
- b. memastikan kesinambungan dan keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. mendorong pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan;
- d. memperkuat peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah; dan
- e. meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027 yaitu sebagai pedoman dalam:

- a. penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- b. penyusunan KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2027;
- c. penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027; dan
- d. menjaga keselarasan dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sistematika penyusunan RKPD Tahun 2027 yaitu sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan RKPD sebagai pengantar untuk memahami substansi pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan dasar pemikiran, urgensi dan arah penyusunan RKPD Tahun 2027.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan RKPD.

1.3 Hubungan Antardokumen

Menjelaskan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan Pembangunan lainnya di tingkat nasional, provinsi dan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Menguraikan susunan bab dan garis besar isi dokumen RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2027.

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan kondisi umum daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai dasar perumusan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Bab ini terdiri atas:

2.1. Kondisi Umum Daerah;

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD; dan

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.

c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah sebagai dasar penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, yang meliputi:

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah; dan

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 yang diselaraskan dengan RPJMD Tahun 2025-2029 serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, meliputi:

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan; dan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027.

e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjabarkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah beserta kebutuhan pendanaannya, yang meliputi:

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2027; dan

5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2027

f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tolok ukur pencapaian pembangunan daerah.

g. BAB VII PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan serta penegasan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah dan APBD Tahun Anggaran 2027.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

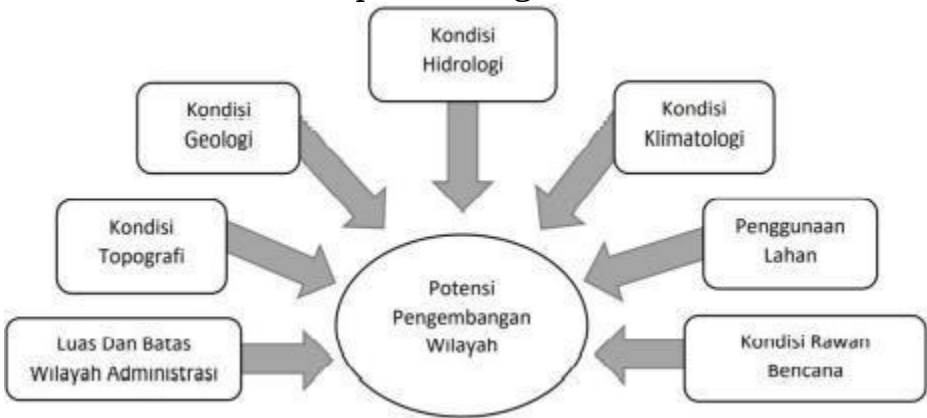
2.1 Kondisi Umum Daerah

Bab ini berisi informasi kondisi umum daerah, potensi pengembangan wilayah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Bab ini juga menjadi acuan dalam perumusan arah kebijakan dan pengambilan keputusan penting pada masa mendatang.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi umum daerah terbagi menjadi tiga, yaitu aspek geografi, aspek demografi, dan potensi pengembangan wilayah. Keadaan Kabupaten Pangandaran secara umum potensi pengembangan wilayahnya dipengaruhi oleh beberapa kondisi wilayah eksisting yang disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran dan Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Pangandaran



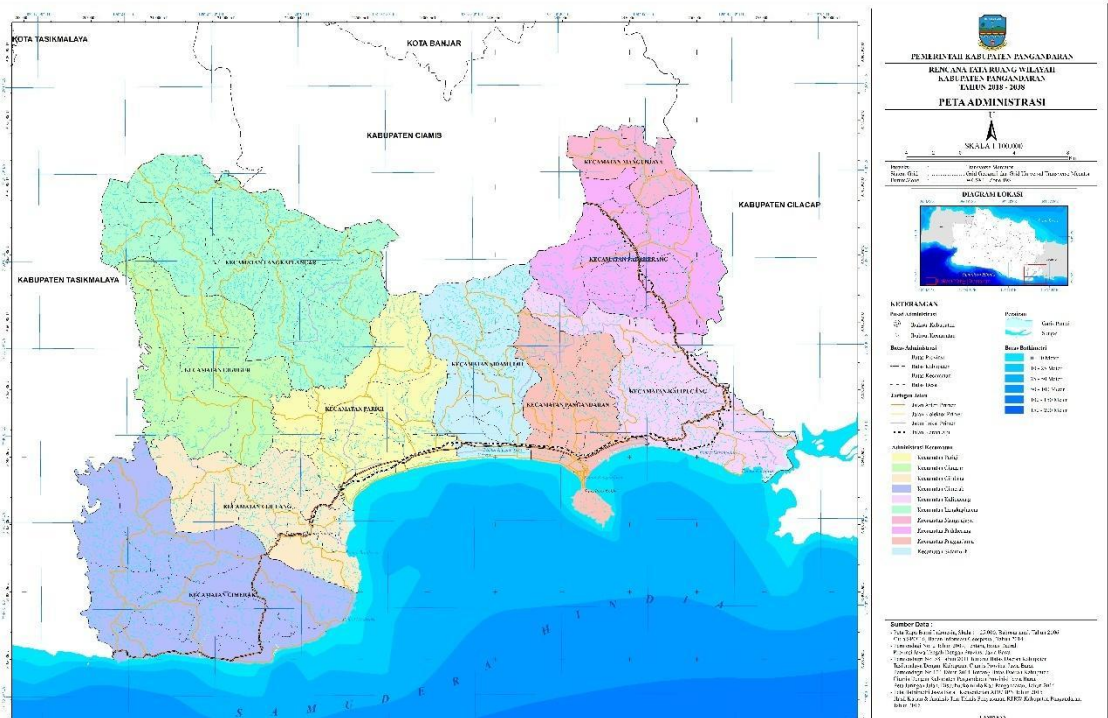
Berdasarkan Gambar 2.1. terdapat enam kondisi yang mempengaruhi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pangandaran yaitu batas wilayah administrasi, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, kondisi klimatologi, kondisi penggunaan lahan, dan kondisi daerah rawan bencana.

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pangandaran ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Kabupaten Pangandaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak pada 108°8'0" sampai dengan 108°50'0" Bujur Timur dan 7°24'0" sampai dengan 7°54'20" Lintang Selatan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- A. Sebelah Utara : Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
- B. Sebelah Timur : Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
- C. Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- D. Sebelah Barat : Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari, Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Ibu Kota Kabupaten Pangandaran terletak di Kecamatan Parigi, yang memiliki cakupan wilayah terdiri dari 10 kecamatan dan 93 desa. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.134,23 Km². Pembagian luas wilayah per-kecamatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Parigi	111,23	10	53	122	399
2	Cijulang	94,37	7	38	90	252
3	Cimerak	190,22	11	51	99	357
4	Cigugur	117,82	7	39	64	200
5	Langkaplancar	205,54	15	66	115	414
6	Mangunjaya	31,98	5	28	47	233
7	Padaherang	112,76	14	60	142	443
8	Kalipucang	104,27	9	29	80	291
9	Pangandaran	75,57	8	33	90	344

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
10	Sidamulih	90,47	7	33	68	263
Jumlah		1.134,23	93	430	917	3.196

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran 2018-2038, diolah 2026

b. Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 - 700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi dari arah selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst. Kondisi masing-masing kecamatan tercantum dalam tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2. 2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	• Kondisi geografis: bagian selatan dominan pesisir bertebing curam dan ke bagian utara merupakan perbukitan kapur. • Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah dataran rendah atau pantai.
2	Cijulang	• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. • Ketinggian: 2-185 mdpl dengan daerah dataran rendah/pantai.
3	Cigugur	• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir melainkan perbukitan dan dataran tinggi. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Cigugur relatif sama antara 200-500 mdpl.
4	Langkaplancar	• Wilayah ini merupakan dataran tertinggi di Kabupaten Pangandaran. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Langkaplancar relatif sama antara 400-1.000 mdpl.
5	Parigi	• Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500 mdpl. • Desa yang berada di dataran rendah yakni Desa Parigi, Karangjaladri, Cibenda, Karangbenda dan Ciliang.
6	Sidamulih	• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. • Ketinggian: 3-250 mdpl dengan daerah dataran tingginya yakni desa Kersaratu dan Kalijati.
7	Pangandaran	• Merupakan daerah pesisir pantai, merupakan ODTW Nasional dan memiliki Cagar Alam yang dilindungi. • Ketinggian: 3.500 mdpl.

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
8	Kalipucang	• Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400 mdpl, dengan desa yang berada di dataran tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl) dan Emplak (160 mdpl). • Daerah lainnya merupakan dataran rendah berkisar antara 2-8 mdpl.
9	Padaherang	• Wilayah ini bukan pesisir. Ketinggian wilayah di Kecamatan Padaherang bervariasi antara 13-600 mdpl. • Daerah yang berada di dataran tinggi yakni Desa Panyutran (600 mdpl) dan Bojongsari (245 mdpl). • Sedangkan daerah lainnya merupakan dataran yang relatif sama berkisar antara 13-24 mdpl.
10	Mangunjaya	• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Mangunjaya relatif sama antara 13-17 mdpl.

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038, diolah 2025

Kabupaten Pangandaran berdasarkan kondisi tingkat kemiringan lerengnya, memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat garis sesar di bagian tengah timur Kabupaten Pangandaran yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Kondisi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

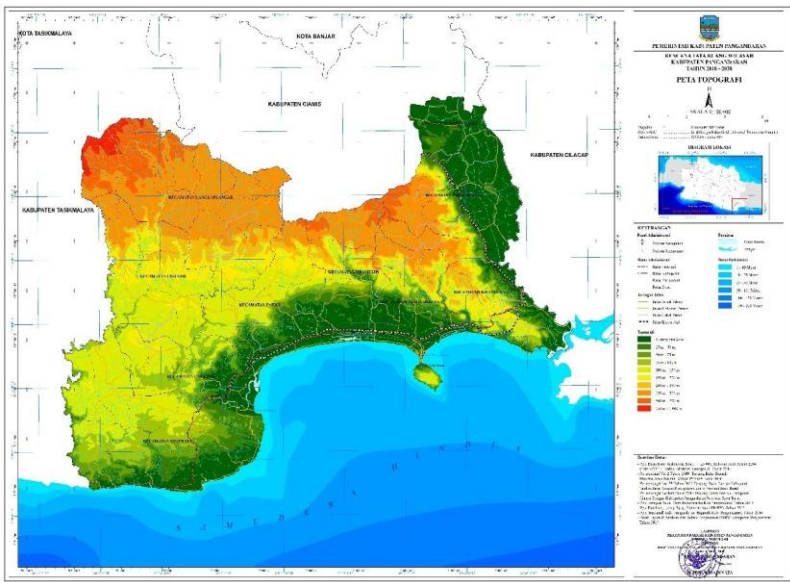
N o	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	• Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5% - 15%.
2	Cijulang	• Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5% - 15%. • Sebagian kecil wilayah di Desa Kertayasa dan Margacinta memiliki kemiringan lereng 15% - 25%.
3	Cigugur	• Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Harumandala dan Pagerbumi.
4	Langkaplancar	• Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian besar Desa Jayasari, Pangkalan, Bojongkondang, Bangunjaya, Langkaplancar, dan Cimanggu.
5	Parigi	• Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Selasari.

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
6	Sidamulih	• Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Kalijati, Sidamulih, dan Kersaratu.
7	Pangandaran	• Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Pagergunung dan Sukahurip.
8	Kalipucang	• Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. • Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil wilayah Desa Putrapinggian.
9	Padaherang	• Kemiringan lereng bervariasi antara 0% - 40%. • Wilayah pada bagian timur jalan provinsi hampir merata memiliki kemiringan lereng 0% - 8%. • Wilayah pada bagian barat jalan provinsi memiliki Kemiringan lereng yang bervariasi antara 8% - lebih dari 40%.
10	Mangunjaya	• Kemiringan lereng merata hampir pada seluruh desa dengan kisaran kemiringan lereng antara 0% - 5%.

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

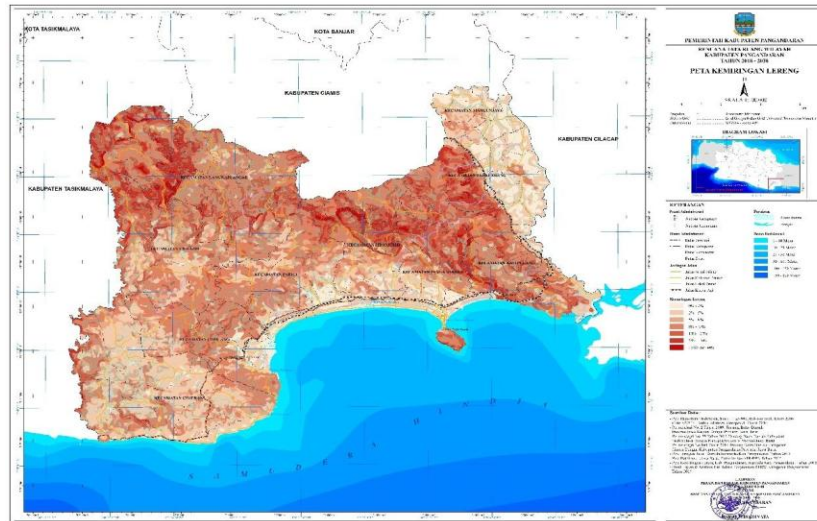
Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu dikelola dengan baik, salah satunya adalah dengan upaya mempertahankan tanaman tegakannya untuk mengurangi risiko bencana longsor. Gambaran sebaran topografi dan kemiringan lereng di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sebagai gambaran topografi dan kemiringan lereng wilayah Kabupaten Pangandaran, dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Gambar 2. 4 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

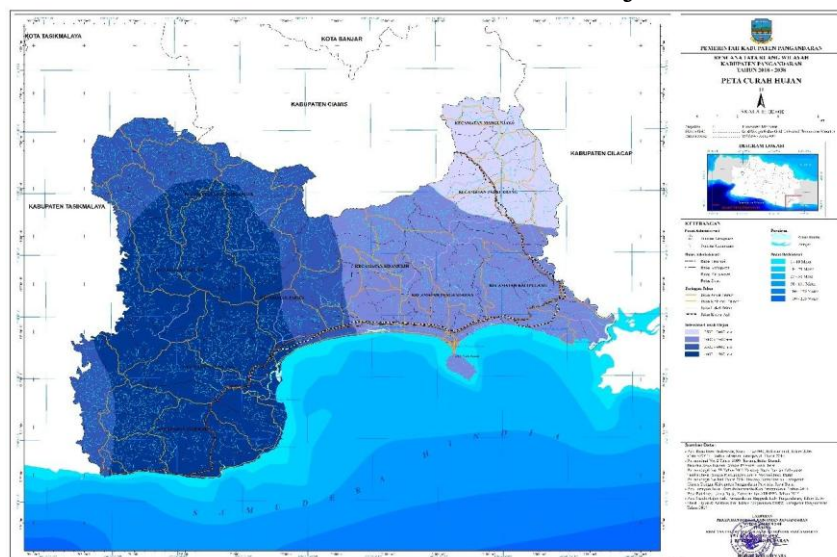
c. Kondisi Klimatologi

Iklm tropis yaitu musim kemarau (musim timur) dan musim penghujan (musim barat) di Kabupaten Pangandaran memiliki curah hujan rata-rata per tahun sekitar 1.647 mm, kelembaban udara antara 85-89% dengan suhu 20-30⁰C. Musim kemarau dan musim hujan secara langsung akan mempengaruhi musim penangkapan ikan di perairan Pangandaran.

Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Oktober, dimana pada saat musim ini laut tidak berombak besar dan perairan dalam keadaan tenang, sehingga operasi penangkapan ikan di laut tidak terganggu. Pada saat musim timur angin bersifat kering, karena membawa massa udara kering yang berdampak terjadi musim kemarau. Angin musim timur bergerak dari Australia ke Asia.

Pada saat musim hujan angin bertiup dari wilayah Asia kemudian melewati samudra Hindia menuju ke benua Australia. Pada kondisi ini, kedudukan semu matahari berada di belahan bumi selatan dan akan menyebabkan tekanan tinggi di kawasan Asia termasuk Indonesia, namun tekanan menjadi rendah di kawasan Australia. Peta sebaran curah hujan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2. 5 Peta Curah Hujan

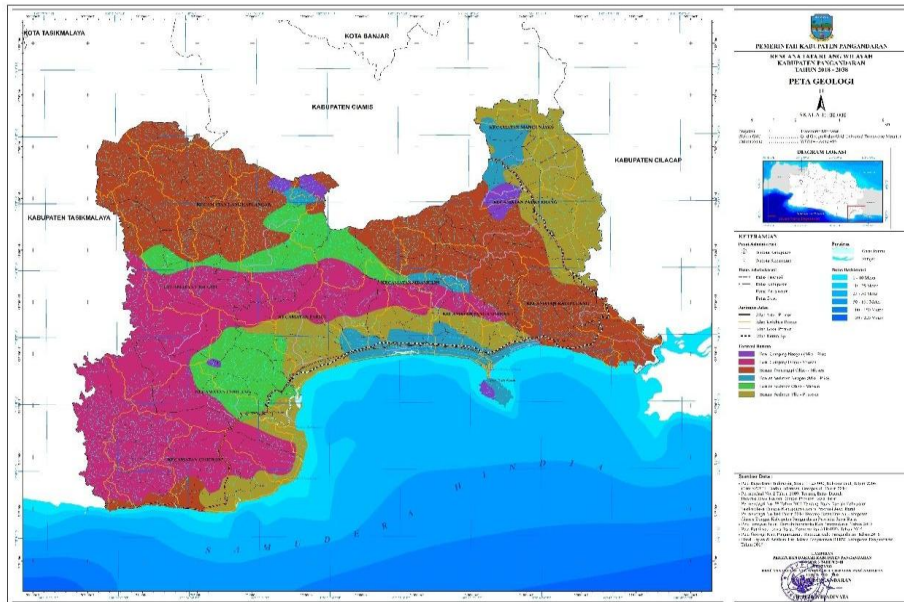


Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

d. Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, Kabupaten Pangandaran merupakan daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di bagian tengah-timur terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan- lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa.

Gambar 2. 6 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam lingkungan tertentu, diantaranya:

1. Satuan Geologi Lingkungan Dataran: Satuan berupa dataran dengan kemiringan lereng $< 5\%$. Ketinggian antara 0-50 mdpl. Melempar di pesisir pantai antara Pangandaran - Parigi - Cijulang dan Kalipucang.
2. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal: Kemiringan lereng $> 25\%$, ketinggian antara 100 - 700 mdpl, tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan tufa. Menghampar di bagian tengah memanjang ke arah Barat Daya Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian zona pemisah air. Adapun yang paling banyak dijumpai yaitu di Kecamatan Langkaplancar.
 - a. Perbukitan Terjal Padaherang-Kalipucang
 - 1) Tanah lapukan berupa lempung pasir-kerikil, pasir lempungan, tebal berkisar antara 10-50 cm, daya dukung sedang- tinggi, agak kompak-kompak, permeabilitas sedang, porositas sedang. Muka air tanah berkisar antara 3-10 m, debit sumur gali < 5 l/detik. Mata air debit < 10 l/detik. Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna air agak kekuningan.
 - 2) Longsoran mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya untuk pengembangan hutan produksi dan yang lebih baik adalah untuk hutan lindung atau sebagai konservasi lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan baik pula untuk pengembangan komoditas perkebunan tanaman keras atau tanaman tahunan sebagai penguat tanah yang akan mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang - Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil. Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung sebagai bahan bata merah, tras, dan tanah urug serta batu kapur.
 - b. Perbukitan Terjal Pananjung

Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai obyek wisata. Fungsi kawasan lindung

sangat baik yang berfungsi sebagai daerah resapan.

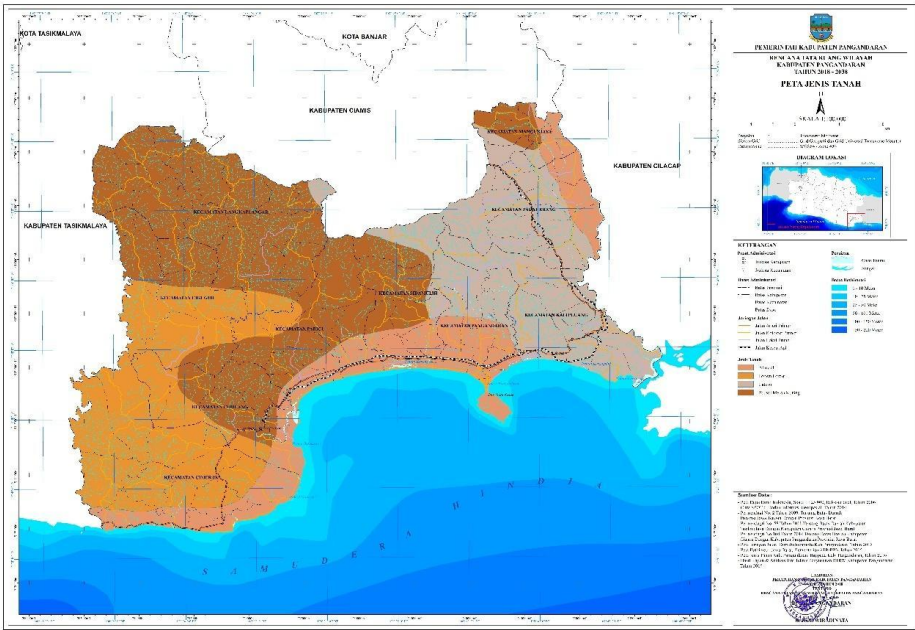
3. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping): Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasir, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini terhampar cukup luas di sekitar Pangandaran-Cijulang-Parigi hingga Cimerak dan meluas ke utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagai daerah resapan. Debit air mata air >50 l/detik. Tanah lapukan umumnya berupa lempung berkerikil yang sangat subur untuk budidaya pertanian pada lahan kering. Ketebalan umumnya <1 m daya dukung sedang sampai dengan tinggi. Badan jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi jalan yang amblas, karena jenis batuan ini sangat labil. Adapun jenis batuan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping Neogen (Mio – Plio)	1.649,77
2	Batu Gamping Oligo – Miosen	35.296,43
3	Batuan Gunungapi Oligo – Miosen	37.349,30
4	Batuan Sedimen Neogen (Mio – Plio)	6.869,57
5	Batuan Sedimen Oligo – Miosen	11.800,95
6	Batuan Sedimen Plio – Plistosen	20.358,12
Total		113.324,15

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Gambar 2. 7 Peta Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Terdapat 4 jenis tanah di Kabupaten Pangandaran, di antaranya adalah alluvial, brown forest, latosol, dan podsol merah kuning. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang masih muda, belum mengalami perkembangan, berasal dari bahan induk aluvium, tekstur beraneka ragam, belum terbentuk struktur, konsistensi dalam keadaan basah lekat. Penyebarannya di daerah dataran aluvial sungai, dataran aluvial pantai dan daerah cekungan (depresi). Jenis tanah brown forest merupakan jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil, solum agak tebal, warna agak coklat kekelabuan hingga hitam, kandungan organik tinggi, tekstur geluh berdebu, struktur remah,

konsistensi gembur dan bersifat licin berminyak (*smeary*), dan peka terhadap erosi. Tanah ini berasal dari batuan induk abu atau tuff vulkanik.

Jenis tanah latosol telah berkembang atau terjadi diferensiasi horizon, kedalaman dalam, tekstur lempung, struktur remah hingga gumpal, konsistensi gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga kuning. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300-1000 meter, batuan induk dari tuff, material vulkanik, breksi batuan beku intrusi.

Jenis tanah podsol merah kuning merupakan tanah mineral yang telah berkembang, solum (kedalaman) dalam, tekstur lempung hingga berpasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, bersifat agak asam (pH kurang dari 5,5), kesuburan rendah hingga sedang, dan peka erosi. Tanah tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih dari 2.500 mm/tahun. Luasan jenis tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Jenis Tanah di Kabupaten Pangandaran

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Alluvial	17.789,60
2	Brown Forest	26.458,61
3	Latosol	25.848,21
4	Podsol Merah Kuning	43.228,93
Total		113.325,35

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

e. Kondisi Hidrologi

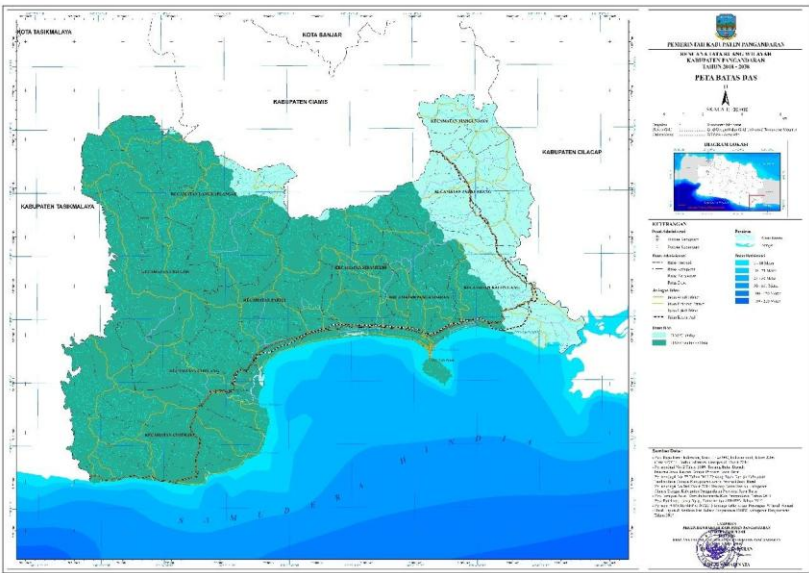
Terdapat satu sungai besar yang melalui Kabupaten Pangandaran, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang. Kabupaten Pangandaran berada dalam dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu, DAS Ciwulan-Cilaki dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 6 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Ciwulan – Cilaki	91.250,39
2	DAS Citanduy	22.074,72
	Jumlah	113.325,11

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018- 2038

Gambar 2. 8 Peta Batas DAS Kabupaten Pangandaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air tanah, yaitu:

1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer dengan produktifitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, lava dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akuifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.
2. Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10-100 liter/detik. Terdapat ada fisiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi aluvium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara 2-9 m, pH berkisar antara 6-9 menunjukkan angka yang cukup tinggi. Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu gamping dan breksi vulkanik. Debit mata air bervariasi di antara 0,2 liter/detik hingga 20 liter/detik bahkan ada juga yang mencapai 100 liter/detik.

Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi sudah dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemerintah Daerah yaitu:

1. Mata air Kalisodong yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0 C/det;
2. Mata air Guha Hawu yang terdapat di Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;
3. Mata air Madasari yang terdapat di Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det; dan
4. Mata air Cijumleng yang terdapat di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.

f. Kondisi Penggunaan Lahan

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran sangat bervariasi dengan penggunaan lahan terbesar untuk lahan hutan rakyat yaitu seluas 30.202,04 ha, kedua untuk lahan perkebunan negara atau swasta yaitu seluas kurang lebih 4.342,35 ha. Berikutnya penggunaan untuk lahan pekarangan dan bangunan seluas 24.678 Ha. Untuk lebih rinci penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Tabel 2.7

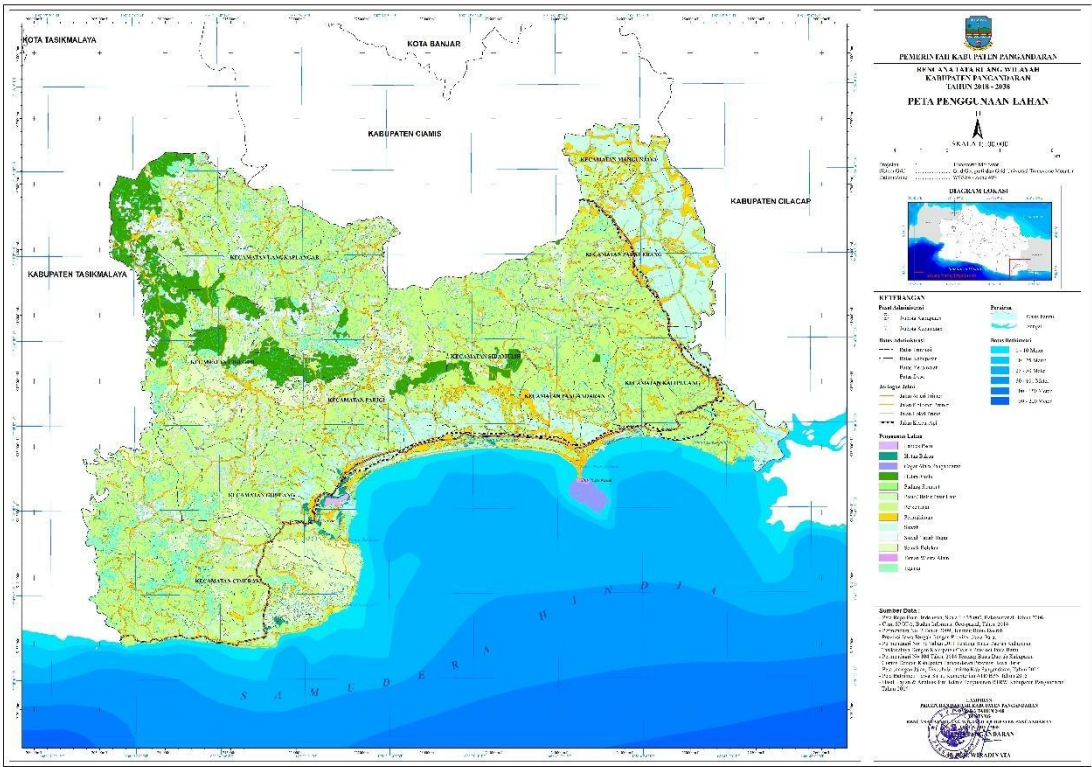
Tabel 2. 7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Irigasi teknis	9.651,00
2	Irigasi setengah teknis	3.578,98
3	Irigasi sederhana PU	1.950,00
4	Irigasi sederhana Non-PU	-
5	Tadah hujan	8.906,00
6	Pasang surut	9,00
7	Lebak	607,00
8	Rawa	-
9	Pekarangan dan bangunan	24.678,00
10	Tegal/kebun/ladang/huma	24.917,00

11	Penggembalaan/padang rumput	1.758,00
12	Sementara tidak diusahakan	9.031,00
13	Hutan Rakyat	30.202,04
14	Hutan Negara	17.047,56
15	Hutan Mangrove	310,00
16	Perkebunan negara/swasta	4.342,35
17	Rawa yang ditanami	-
18	Tambak	-
19	Kolam/empang	13.272,00
20	Lain-lain	-
Grand Total		150.259,93

Sumber: LKPJ Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, diolah 2026

Gambar 2. 9 Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

2.1.1.2 Kondisi Rawan Bencana

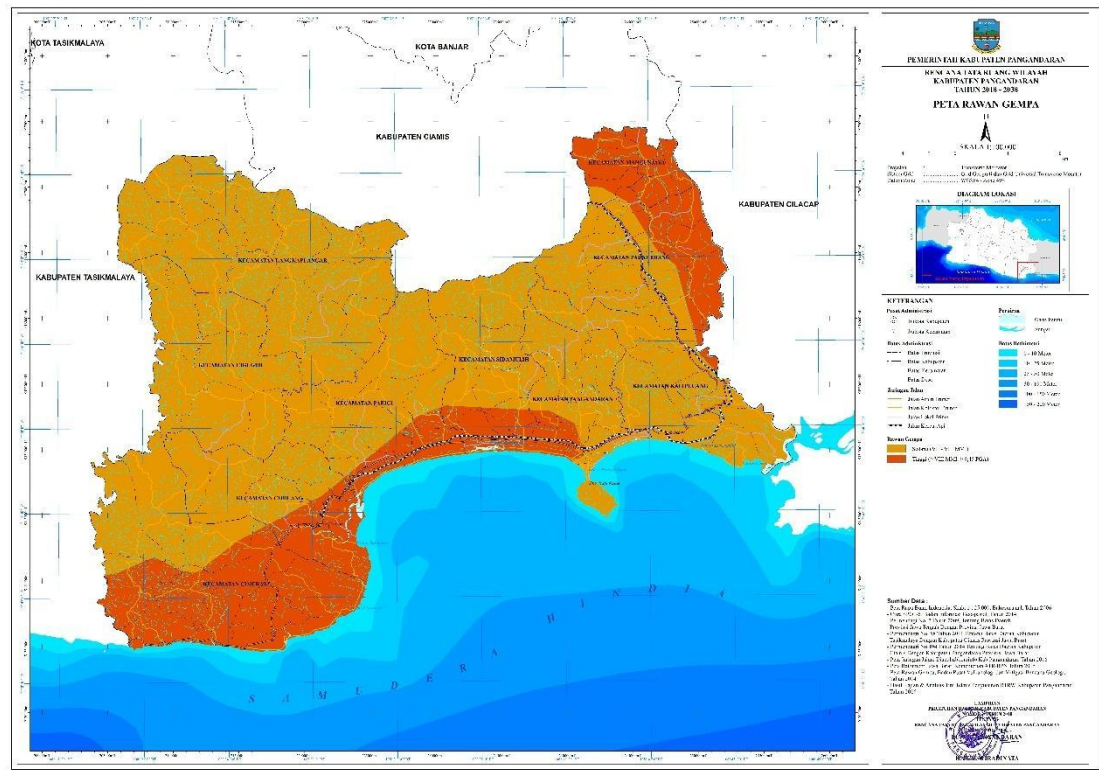
Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang rawan terhadap kejadian bencana alam yang sering terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran. Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pangandaran diantaranya tsunami, gempa bumi, longsor, dan banjir. Tsunami rawan terjadi karena wilayah selatan Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sementara banjir sering terjadi karena wilayah Kabupaten Pangandaran dilewati sungai besar dengan debit air yang cukup tinggi. Gempa bumi juga rawan terjadi karena terdapat patahan-patahan di wilayah Kabupaten Pangandaran, sementara bencana longsor dapat terjadi akibat jenis tanah yang memang rawan dan kemiringan terjal di beberapa tempat di Kabupaten Pangandaran.

1. Rawan Bencana Gempa Bumi Tektonik dan Tsunami

Terdapat patahan yang membentang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut di bagian tengah-timur Kabupaten Pangandaran. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa. Letak Kabupaten Pangandaran

yang rawan gempa dan berbatasan langsung dengan laut mengakibatkan Kabupaten Pangandaran juga sangat rawan terkena bencana tsunami.

Gambar 2. 10 Peta Rawan Gempa



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Pantai Pangandaran yang berbentuk teluk dan memanjang dengan kemiringan lereng yang landai menjadi semacam “kantung tsunami” sehingga kawasan pesisirnya rawan bencana tsunami. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan tsunami:

Tabel 2. 8 Luasan Potensi Gempa di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Gempa	Luas (Ha)
1	MMI. VII – VIII	84.879,54
2	MMI. > VII	28.445,56
Total		113.325,10

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Tabel di atas menunjukkan bahwa potensi terbesar gempa di Kabupaten Pangandaran berada di skala MMI. VII – VIII dengan luas wilayah sebesar 84.879,54 Ha. Sedangkan 28.445,56 Ha ada di skala MMI. > VII.

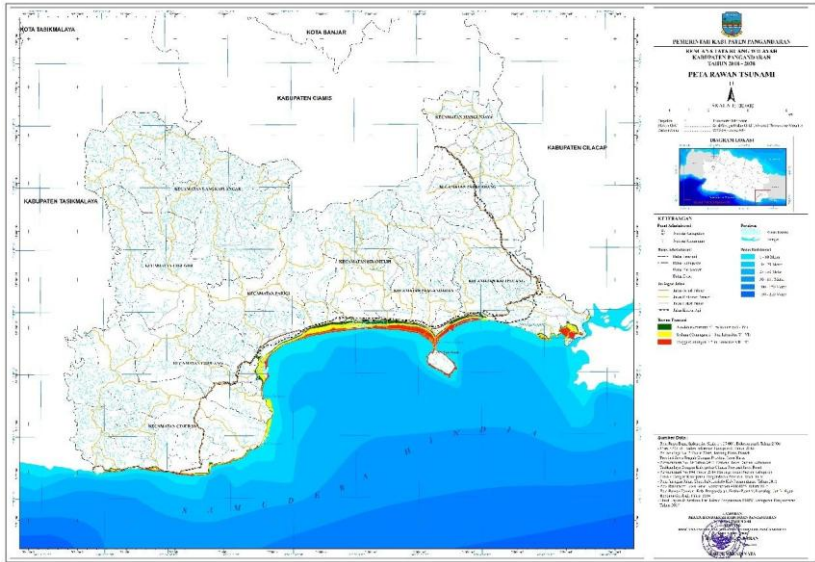
Tabel 2. 9 Luasan Potensi Tsunami di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Tsunami	Luas (Ha)
1	Zona Rawan Rendah Total	691,25
2	Zona Rawan Menengah Total	1.148,45
3	Zona Rawan Tinggi Total	1.425,42
Total		3.265,12

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Tabel di atas menunjukkan bahwa total luasan potensi tsunami di Kabupaten Pangandaran sebesar 3.265,12 Ha. Luas potensi tsunami ini dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni zona rawan rendah total dengan luas sebesar 691,25 Ha, zona rawan menengah total dengan luas sebesar 1.148,45 Ha, dan zona rawan tinggi total dengan luas sebesar 1.425,42 Ha.

Gambar 2. 11 Peta Rawan Tsunami



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

2. Rawan Bencana Gerakan Tanah

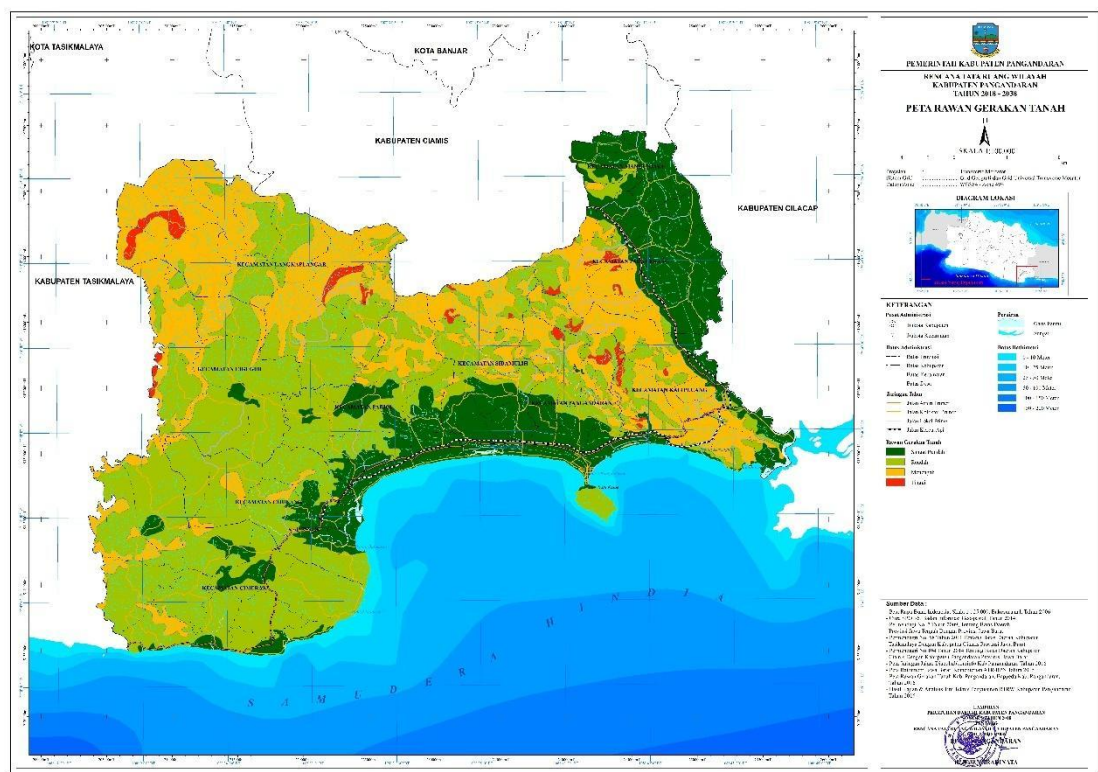
Daerah perbukitan Kabupaten Pangandaran merupakan Kawasan yang rawan bencana Gerakan tanah disebabkan kondisi tanah yang tidak stabil dan kemiringan lereng yang besar. Faktor lain penyebab rawan bencana Gerakan tanah adalah curah hujan yang tinggi dan alih fungsi lahan di daerah perbukitan. Dengan adanya kawasan-kawasan yang rawan gerakan tanah, berarti lahan permukiman harus berada pada tingkat kemiringan lereng yang rendah. Potensi gerakan tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2. 10 Luasan Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	25.774,32
2	Rendah	51.309,74
3	Menengah	34.519,48
4	Tinggi	1.721,57
Tota 1		113.325,11

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Gambar 2. 12 Peta Pergerakan Tanah



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

3. Rawan Bencana Banjir

Wilayah dataran rendah Kabupaten Pangandaran merupakan hasil proses pengendapan material laut dan sungai sehingga sesuai kodrat alam, daerah yang dekat dengan sungai merupakan daerah dataran banjir yang selalu tergenang jika debit air sungai meningkat. Dataran banjir ini adalah daerah yang cukup subur namun tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan banjir pada Tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Luasan Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Pangandaran

N o	Kerawanan Banjir	Luas (Ha)
1	Tidak Rawan Banjir	95.144,98
2	Rawan Banjir	18.180,35
Tot al		113.325,33

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Berdasarkan tabel di atas Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah 18.180,35 Ha yang berpotensi mengalami bencana banjir. Adapun wilayah yang rawan banjir tersebut meliputi sebagian kecil dari setiap kecamatan. Berikut merupakan kecamatan yang wilayahnya termasuk kedalam daerah rawan banjir yaitu Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Parigi, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Padaherang, dan Kecamatan Mangunjaya. Bencana banjir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti curah hujan yang tinggi yang menyebabkan air sungai meluap serta air laut pasang yang menyebabkan banjir rob. Meskipun dari setiap kecamatan tersebut hanya sebagian kecil daerah yang rawan banjir namun daerah rawan banjir ini hendaknya segera diminimalisir untuk mengurangi dampak yang terjadi kedepannya.

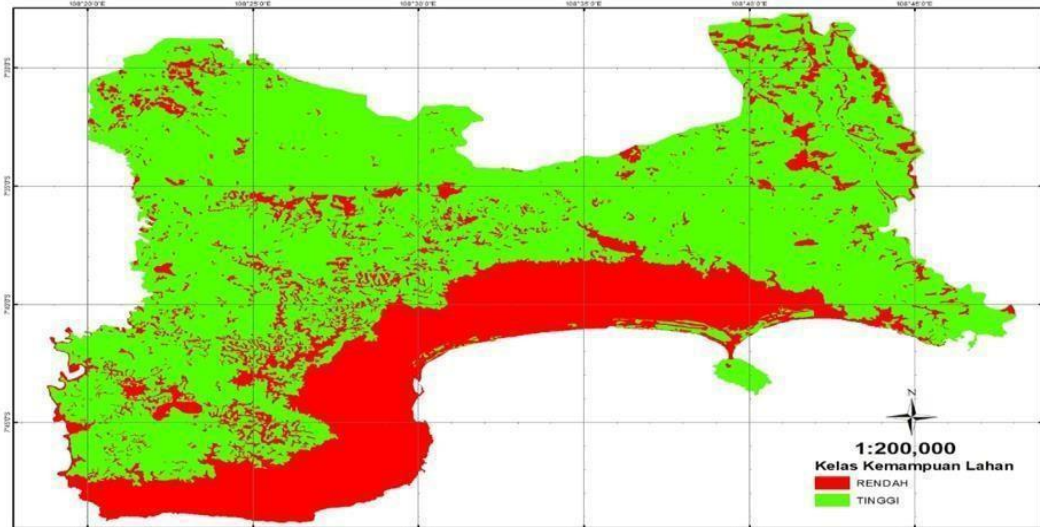
2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah dan Pola Ruang

Daya dukung Potensi Pengembangan Wilayah diperoleh dari analisis Satuan Kapasitas Lahan (SKL). Inti dari analisis SKL secara keseluruhan adalah

analisis daya tampung lahan, melihat daya dukung lahan yang cocok untuk pengembangan sebagai kawasan perkotaan/pedesaan dengan intensitas kegiatan budidaya di dalamnya, baik itu pemukiman, pertanian, perkebunan, dan budidaya lainnya.

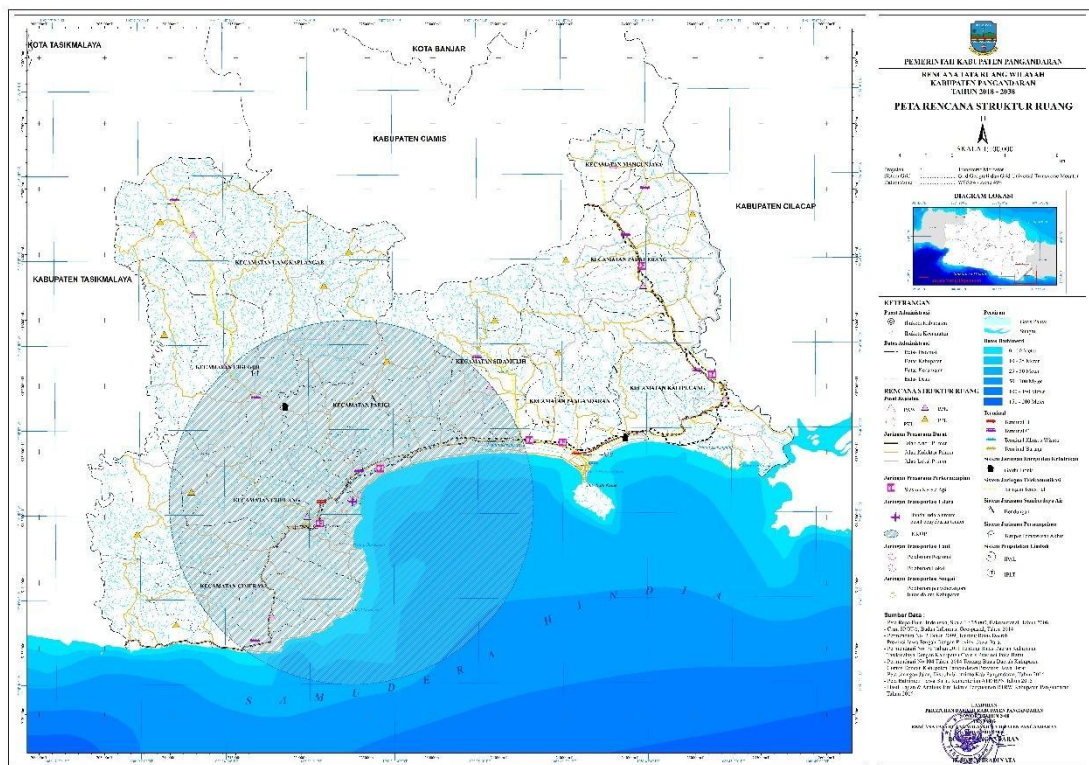
Dalam analisis SKL yang menghasilkan daya pengembangan tanah dibagi menjadi 2 kelas yaitu rendah dan tinggi. Kawasan dengan kelas daya pengembangan tinggi menjadi kawasan budidaya, sedangkan kawasan dengan kelas daya pengembangan rendah hanya dapat digunakan untuk kawasan lindung. Peta kemampuan lahan dapat dilihat pada Gambar 2. 13.

Gambar 2. 13 Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Pangandaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038

Gambar 2. 14 Peta Rencana Struktur Ruang



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038

Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran terdiri antara Rencana Kawasan Lindung dan Budidaya. Pembagian proporsi antara rencana kawasan lindung dan budidaya yaitu sebesar 22,66% untuk kawasan lindung dan 77,34% untuk kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Dalam rencana kawasan lindung terdapat daerah resapan air sebesar 3,02% dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran, wilayah sempadan pantai sebesar 0,56% dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran, wilayah sempadan sungai sebesar 3,50% dari total luas wilayah Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran, kawasan sekitar danau/situ/waduk sebesar 0,03% dari luas Kabupaten Pangandaran, Cagar Alam pananjung Pangandaran sebesar 0,40% dari total luas Kabupaten Pangandaran, Cagar Alam laut pananjung Pangandaran sebesar 0,41% dari luas Kabupaten Pangandaran, kawasan hutan pantai mangrove 0,17% dari luas Kabupaten Pangandaran, taman wisata alam Pananjung 0,03% dari luas Kabupaten Pangandaran, kawasan lindung secara geologis 13,95% dari total wilayah Kabupaten Pangandaran, dan wilayah bencana tsunami sebesar 0,59% dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran

2. Kawasan Budidaya

Pada rencana kawasan budidaya terdapat hutan produksi sebesar 7,58% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, hutan produksi terbatas sebesar 7,12% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, pertanian lahan basah sebesar 13,28% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, pertanian lahan kering sebesar 7,12% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, perkebunan sebesar 26,26% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan industri sebesar 0,50% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran, kawasan permukiman perkotaan sebesar 7,57% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran dan kawasan permukiman perdesaan sebesar 10,65% dari luas keseluruhan Kabupaten Pangandaran yang tersaji pada Tabel 2. 12.

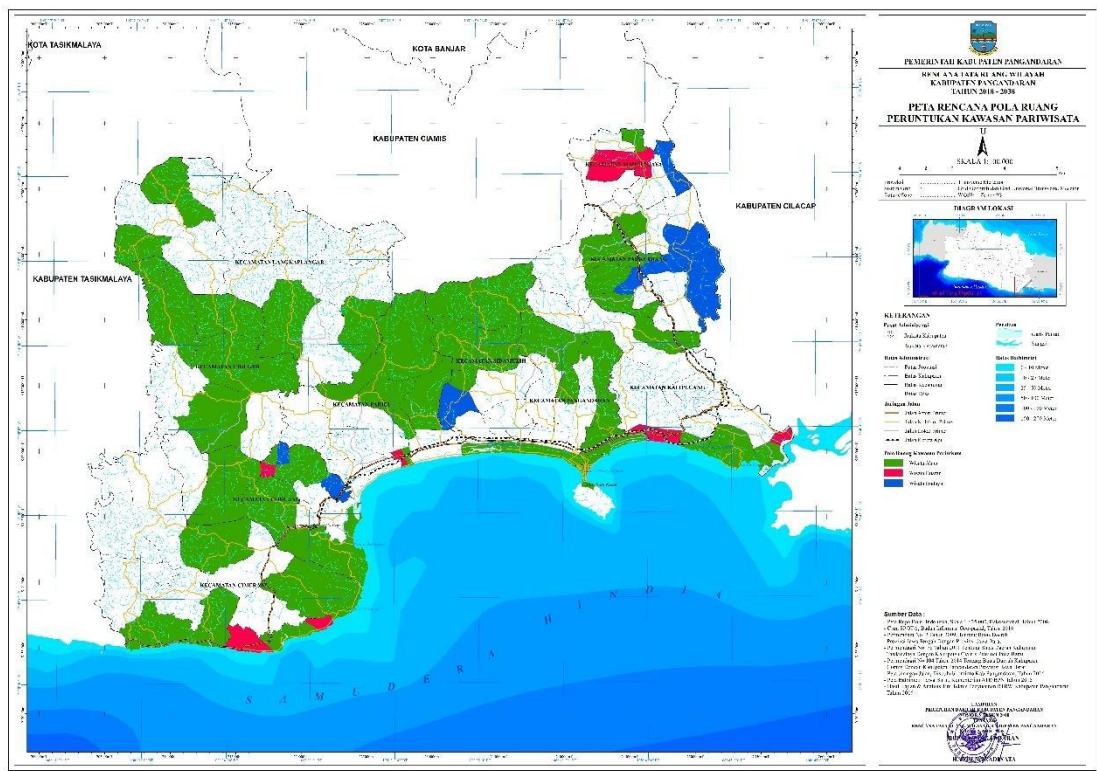
Tabel 2. 12 Rencana Pola Ruang

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
Rencana Kawasan Lindung			
1	Kawasan Resapan Air	3.441,07	3,02 %
2	Kawasan Sempadan Pantai	636,60	0,56 %
3	Kawasan Sempadan Sungai	3.990,00	3,50 %
4	Kawasan Sekitar danau/situ/embung	33,06	0,03 %
5	Cagar Alam Pananjung Pangandaran	454,62	0,40 %
6	Cagar Alam Laut Pananjung Pangandaran	470	0,41 %
7	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	188,00	0,17 %
8	Taman Wisata Alam Pananjung	34,32	0,03 %
9	Kawasan Lindung Geologi	15.882,42	13,95 %
10	Kawasan Bencana Tsunami	674,00	0,59 %
Jumlah		25.804,09	22,66 %
Rencana Kawasan Budidaya			
1	Hutan Produksi	8.626,00	7,58 %
2	Hutan Produksi Terbatas	8.102	7,12 %
3	Pertanian Lahan Basah	15.125,00	13,28 %
4	Pertanian Lahan Kering	4.997,00	7,12 %
5	Perkebunan	29.894,00	26,26 %
6	Kawasan Industri	565,08	0,50 %
7	Kawasan Permukiman Perkotaan	8.614,00	7,57 %
8	Kawasan Permukiman Perdesaan	12.125,00	10,65 %
Jumlah		88.046, 87	77,34 %

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
	Jumlah Total Kabupaten	113.850,98	100%

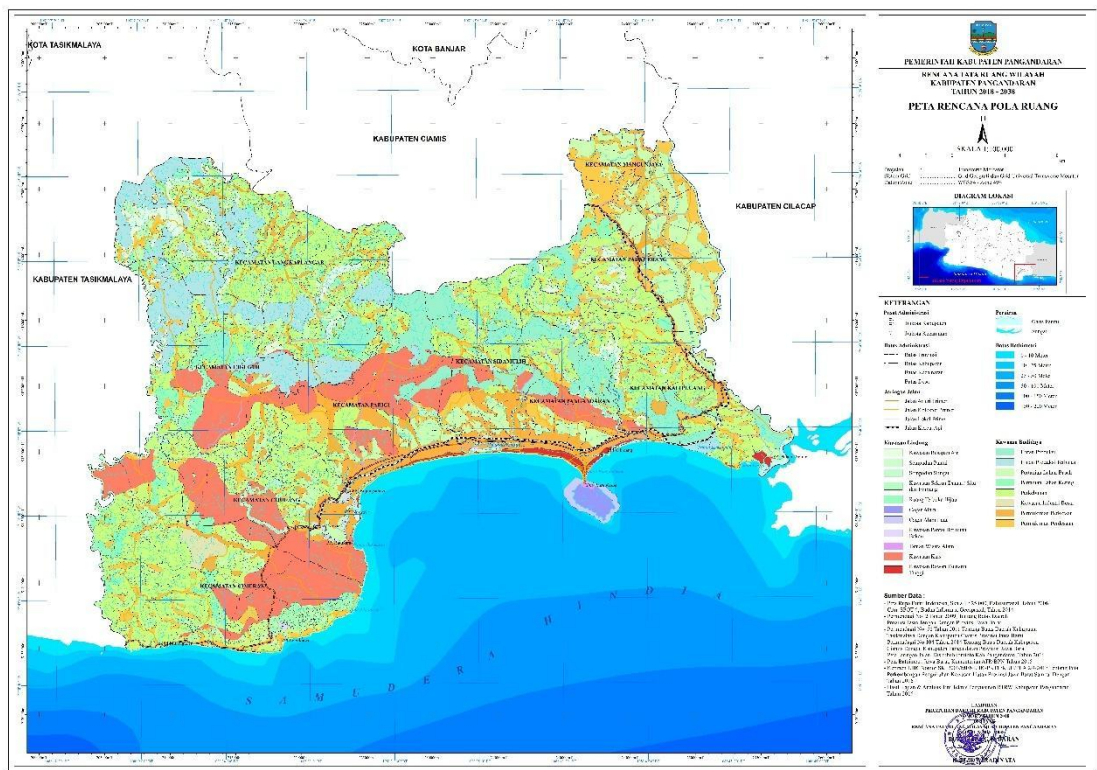
Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2038

Di bawah ini adalah peta rencana pola ruang kawasan wisata (Gambar 2.15) dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pangandaran (Gambar 2.16).
Gambar 2. 15 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038

Gambar 2. 16 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pangandaran



Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038

2.1.1.4 Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Pada bagian ini menjelaskan secara umum keadaan demografi di

Kabupaten Pangandaran. Adapun yang dibahas dalam sub bab ini adalah mengenai jumlah penduduk, kepadatan penduduk, komposisi penduduk, dan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan hingga jumlah penduduk yang bekerja.

Data disajikan dengan prinsip legal formal dan diperoleh dari instansi yang berwenang. Artinya bahwa data yang tersaji diperoleh langsung salah satunya dari aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan berdasarkan kartu identitas/KTP. Namun terkadang informasi dalam KTP tidak sesuai dengan kondisi saat ini, yang dapat diakibatkan tidak di updatenya kartu identitas/KTP oleh pemegangnya sehingga mengakibatkan perbedaan data dengan kenyataan di lapangan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 yaitu 436,494 ribu jiwa. Terdiri dari 217,904 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 218,59 ribu jiwa penduduk perempuan, sehingga angka rasio jenis kelamin di Kabupaten Pangandaran sebesar 99-100 penduduk laki-laki di setiap 100 penduduk perempuan.

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran 2025

No	Kecamatan	Penduduk (Ribu Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2021-2024	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Parigi	47.576	0,637	97,78
2	Cijulang	27.979	0,225	96,07
3	Cimerak	51.256	0,891	99,63
4	Cigugur	23.341	0,534	101,56
5	Langkaplancar	52.225	0,539	102,87
6	Mangunjaya	33.385	0,787	100,05
7	Padaherang	70.374	0,712	100,38
8	Kalipucang	39.036	0,449	99,58
9	Pangandaran	60.422	0,778	100,03
10	Sidamulih	30.888	0,771	98,53
Jumlah		436.494	0.658	99,69

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2026

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Langkaplancar memiliki rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu 102,87, sedangkan yang terendah Kecamatan Cijulang yaitu 96,07. Sebagian besar kecamatan memiliki angka rasio jenis kelamin lebih dari 100, yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi, kecuali di tiga kecamatan yakni Kecamatan Parigi, Cijulang, Cimerak, Kalipucang, dan Sidamulih. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Padaherang yang dihuni sebanyak 70.374 ribu jiwa. Sementara itu, kecamatan dengan populasi paling sedikit adalah Kecamatan Cigugur yang memiliki 23.341 ribu penduduk.

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Pada tahun 2025, persebaran penduduk Kabupaten Pangandaran bervariasi antar kecamatan, dimulai dari yang terendah 228 jiwa per kilometer persegi yaitu di Kecamatan Cigugur, dan yang memiliki kepadatan penduduk terendah kedua yaitu Kecamatan Kalipucang dengan tingkat kepadatan 285 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Mangunjaya dengan kepadatan 1.018 jiwa per kilometer persegi, dan tertinggi kedua yaitu Kecamatan Pangandaran dengan kepadatan 994 jiwa per

kilometer persegi. Berikut gambaran luas wilayah, persentase jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran tahun 2025.

Tabel 2. 14 Persentase Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km2
1	Parigi	98,04	10,90	485
2	Cijulang	88,04	6,41	318
3	Cimerak	118,35	11,74	433
4	Cigugur	102,24	5,35	228
5	Langkaplancar	177,19	11,96	295
6	Mangunjaya	32,80	7,65	1.018
7	Padaherang	118,73	16,12	593
8	Kalipucang	136,78	8,94	285
9	Pangandaran	60,77	13,84	994
10	Sidamulih	77,98	7,08	396
Jumlah		1.010,92	100,00	432

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2026

c. Komposisi Penduduk

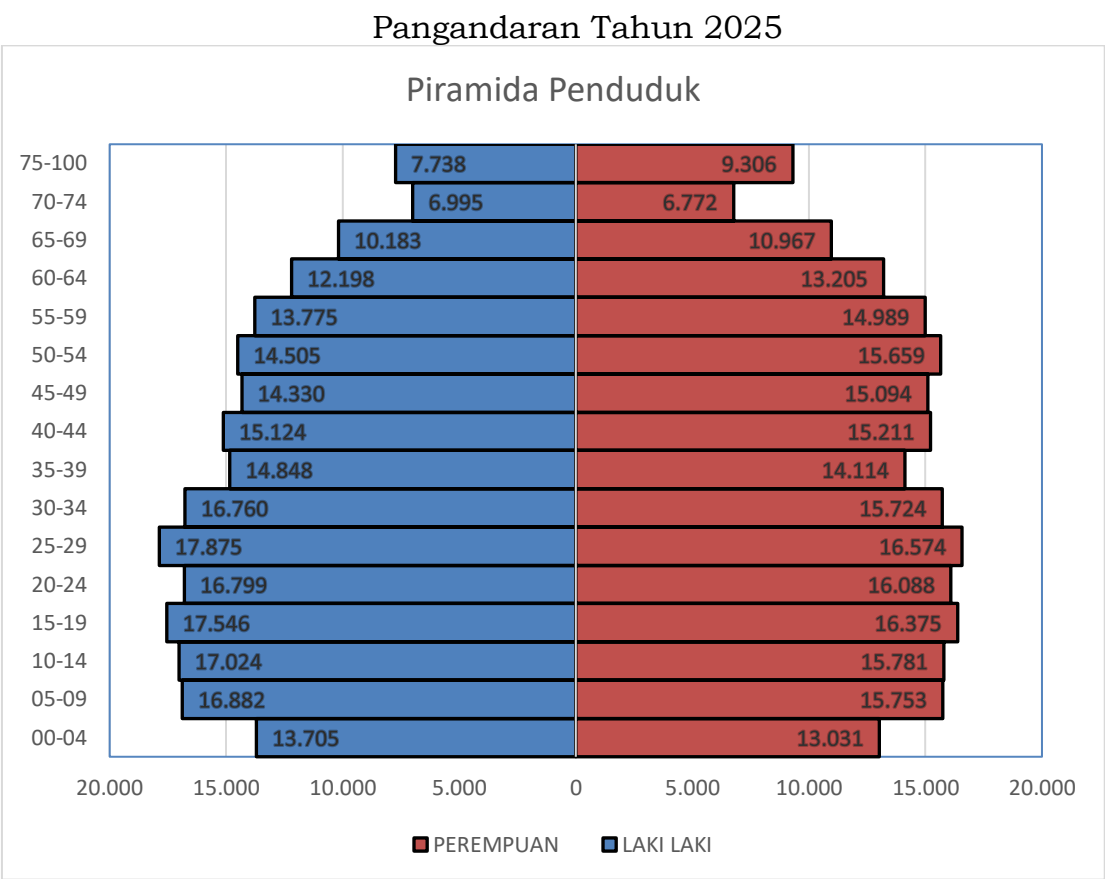
Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus subjek pelaku pembangunan yang berperan menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan daerah juga ditentukan oleh keadaan riil penduduk dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, pembangunan daerah harus menempatkan penduduk sebagai pusat dari setiap kebijakan pembangunan yang dikembangkan. Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia berkisar antara 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, komposisi ini menggambarkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yang dapat menggambarkan semakin banyak jumlah penduduk yang produktif semakin rendah angka ketergantungannya dan sebaliknya.

Tabel 2. 15 Komposisi Penduduk Kabupaten Pangandaran Menurut Kelompok Umur Tahun 2025

No	Struktur Usia	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	0-4	16.706	16.035	32.741
2	5-9	14.639	13.999	28.638
3	10-14	14.614	13.719	28.333
4	15-19	16.523	15.513	32.036
5	20-24	16.604	15.698	32.302
6	25-29	16.987	15.958	32.945
7	30-34	16.224	15.293	31.517
8	35-39	15.023	14.824	29.847
9	40-44	13.876	13.897	27.773
10	45-49	13.482	14.171	27.653
11	50-54	13.776	14.748	28.524
12	55-59	13.242	14.742	27.984
13	60-64	12.398	13.429	25.827
14	65-69	9.989	10.935	20.924
15	70-74	7.273	7.563	14.836
16	75+	6.548	8.066	14.614
Jumlah		217.904	218.590	436.494

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2026

Gambar 2. 17 Piramida Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten



Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2026

Pengaruh keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dari semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), yang berarti semakin rendah rasio beban tanggungan. Hal ini dapat membuka peluang bagi penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan kemampuannya di segala bidang. Tabel 2.16 di bawah ini menunjukkan angka beban ketergantungan penduduk.

Tabel 2. 16 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	Usia Produktif (15 – 64)	Usia Tidak Produktif		Dependency Ratio
			0 – 14	65 +	
1	Laki-laki	148.135	45.959	23.810	47,09
2	Perempuan	148.273	43.753	26.564	47,42
Jumlah		296.408	89.712	50.374	47,26

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran Dalam Angka 2026 diolah

Berdasarkan Tabel 2.16 yang menunjukkan jumlah tanggungan kurang dari 50%. Artinya kita sudah memasuki masa bonus demografi. Jika bonus demografi digunakan dengan benar, maka akan membuka *window of opportunity*. Peluang untuk mempercepat roda perekonomian lebih tinggi karena banyaknya kelompok usia produktif. Namun, jika periode bonus demografi tidak digunakan, bukan peluang yang didapat, melainkan bencana sosial. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas dapat meningkat. Bonus demografi yang terkait dengan pembangunan manusia akan berdampak besar pada kemajuan daerah. Bersama-sama, era produktif menggerakkan roda perekonomian. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya pengangguran dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya diharapkan puncak bonus demografi dan produktivitas penduduk akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Ketersediaan pekerjaan yang melimpah akan mencegah pekerja yang sangat terampil untuk mencari pekerjaan dan pindah ke kabupaten atau daerah lain. Semakin banyak sumber daya manusia yang berkualitas yang tinggal di daerah tersebut, semakin nyata keberhasilan pembangunan manusia. Karena tingkat ketergantungan yang tinggi, akan mengurangi pilihan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas hidupnya yang tentunya berdampak pada penurunan dan peningkatan angka IPM.

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah akan sangat mempengaruhi peningkatan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) karena salah satu faktor dalam IPM adalah Pendidikan, yang merupakan gabungan dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Semakin banyak orang yang bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya, maka nilai Indeks Pendidikan akan semakin tinggi. Kondisi Pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran pada tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2. 17.

Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	
		Laki Laki	Perempuan	(Orang)	%
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	66.052	60.929	126.981	28,16
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	13.604	11.476	25.080	5,56
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	73.841	85.322	159.163	35,30
4	SMP/SEDERAJAT	35.374	34.275	69.649	15,45
5	SMA/SEDERAJAT	28.881	23.452	52.333	11,61
6	DIPLOMA I/II	729	783	1.512	0,34
7	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA	1.184	1.631	2.815	0,62
8	DIPLOMA IV/STRATA I	6.111	6.520	12.631	2,80
9	STRATA-II	486	245	731	0,16
10	STRATA-III	25	10	35	0,01
JUMLAH		226.287	224.643	450.931	100,00

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran yang menyelesaikan pendidikan strata 1 sebanyak 12.631 orang, jenjang Diploma I dan II sebanyak 1.512 orang, SLTA/ sederajat sebanyak 52.333 jiwa dan SLTP/ sederajat sebanyak 69.649 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran sudah mulai meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak bersekolah/ belum sekolah yaitu sebanyak 126.981 orang, dimana 32.741 orang tidak bersekolah (0-4 tahun) dan selebihnya adalah penduduk usia sekolah hingga dewasa, namun tidak mengenyam pendidikan. Dari kinerja tersebut menghasilkan indeks pengetahuan sebesar 61,51 pada tahun 2025. Angka tersebut masih dibawah rata-rata indeks pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar 66,63, sehingga harus ada program pemerintah daerah untuk mendongkrak indeks pendidikan Kabupaten Pangandaran, khususnya dari jenjang pendidikan nonformal/ kesetaraan.

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu ditujukan untuk meningkatkan lapangan

kerja dan kesempatan berusaha agar penduduk dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk menyerap tenaga kerja tambahan yang masuk ke pasar tenaga kerja setiap tahunnya, sehingga angka pengangguran dapat ditekan dengan cara menyalurkan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan yang tersedia.

Dari sisi tenaga kerja, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) adalah hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja/pekerjaan bagi pencari kerja. Kesempatan kerja adalah kesempatan atau kondisi yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang mau dan mampu bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan berdasarkan keahlian, keterampilan dan bakat masing-masing. Dengan demikian, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan akan tenaga kerja. Sedangkan angkatan kerja (*labour force*) diartikan sebagai bagian dari penduduk yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari peluang untuk melakukan pekerjaan produktif sebagai sumber daya manusia. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat menyerap lebih banyak penduduk yang bekerja.

Tabel 2. 18 Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No	Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	(Orang)	(%)
1	Tidak/Belum Bekerja	84.073	69.955	154.028	34,16
2	Mengurus Rumah Tangga	33	97.063	97.096	21,53
3	Pelajar/Mahasiswa	12.929	9.359	22.288	4,94
4	Pensiunan	1.575	730	2.305	0,51
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.880	1.878	3.758	0,83
6	Tentara Nasional Indonesia	182	3	185	0,04
7	Kepolisian RI (Polri)	211	5	216	0,05
8	Perdagangan	1.641	1.109	2.750	0,61
9	Petani/Pekebun	39.555	21.018	60.573	13,43
10	Peternak	72	15	87	0,02
11	Nelayan/Perikanan	2.508	26	2.534	0,56
12	Industri	103	16	119	0,03
13	Konstruksi	25	3	28	0,01
14	Transportasi	142	0	142	0,03
15	Karyawan Swasta	7.260	2.591	9.851	2,18
16	Karyawan BUMN	276	51	327	0,07
17	Karyawan BUMD	56	20	76	0,02
18	Karyawan Honorer	1.299	1.461	2.760	0,61
19	Buruh Harian Lepas	15.691	1.973	17.664	3,92
20	Buruh Tani/Perkebunan	13.347	5.888	19.235	4,27
21	Buruh Nelayan/Perikanan	878	37	915	0,20
22	Buruh Peternakan	57	20	77	0,02

No	Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	(Orang)	(%)
23	Pembantu Rumah Tangga	4	353	357	0,08
24	Tukang Cukur	23	0	23	0,01
25	Tukang Listrik	23	1	24	0,01
26	Tukang Batu	132	2	134	0,03
27	Tukang Kayu	592	0	592	0,13
28	Tukang Sol Sepatu	6	1	7	0,00
29	Tukang Las/Pandai Besi	83	1	84	0,02
30	Tukang Jahit	443	300	743	0,16
31	Tukang Gigi	4	0	4	0,00
32	Penata Rias	3	39	42	0,01
33	Penata Busana	1	2	3	0,00
34	Penata Rambut	2	6	8	0,00
35	Mekanik	331	1	332	0,07
36	Seniman	62	15	77	0,02
37	Tabib	5	0	5	0,00
38	Paraji	1	45	46	0,01
39	Perancang Busana	2	0	2	0,00
40	Penterjemah	1	0	1	0,00
41	Imam Masjid	91	0	91	0,02
42	Pendeta	2	1	3	0,00
43	Pastor	0	0	0	0,00
44	Wartawan	15	0	15	0,00
45	Ustadz/Mubaligh	258	34	292	0,06
46	Juru Masak	1	5	6	0,00
47	Promotor Acara	0	0	0	0,00
48	Anggota DPR RI	0	0	0	0,00
49	Anggota DPD RI	0	0	0	0,00
50	Anggota BPK	0	0	0	0,00
51	Presiden	0	0	0	0,00
52	Wakil Presiden	0	0	0	0,00
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0,00
54	Anggota Kabinet Kementrian	0	0	0	0,00
55	Duta Besar	0	0	0	0,00
56	Gubernur	0	0	0	0,00
57	Wakil Gubernur	0	0	0	0,00
58	Bupati	1	1	2	0,00
59	Wakil Bupati	2	0	2	0,00
60	Walikota	0	0	0	0,00
61	Wakil Walikota	0	0	0	0,00
62	Anggota DPRD Provinsi	0	0	0	0,00

No	Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan	(Orang)	(%)
63	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	25	8	33	0,01
64	Dosen	31	19	50	0,01
65	Guru	562	889	1.451	0,32
66	Pilot	0	0	0	0,00
67	Pengacara	5	0	5	0,00
68	Notaris	2	3	5	0,00
69	Arsitek	3	0	3	0,00
70	Akuntan	1	0	1	0,00
71	Konsultan	9	0	9	0,00
72	Dokter	49	52	101	0,02
73	Bidan	-	262	262	0,06
74	Perawat	119	165	284	0,06
75	Apoteker	9	27	36	0,01
76	Psikiater/Psikolog	0	0	0	0,00
77	Penyiar Televisi	0	0	0	0,00
78	Penyiar Radio	1	2	3	0,00
79	Pelaut	57	0	57	0,01
80	Peneliti	4	0	4	0,00
81	Sopir	1.188	0	1.188	0,26
82	Pialang	1	3	4	0,00
83	Paranormal	1	0	1	0,00
84	Pedagang	2.989	2.473	5.462	1,21
85	Perangkat Desa	848	204	1.052	0,23
86	Kepala Desa	74	1	75	0,02
87	Biarawan/Biarawati	0	0	0	0,00
88	Wiraswasta	34.386	6.474	40.860	9,06
89	Anggota Lembaga Tinggi Lain	20	22	42	0,01
90	Artis	0	0	0	0,00
91	Atlet	0	0	0	0,00
92	Cheff	0	0	0	0,00
93	Manajer	0	0	0	0,00
94	Tenaga Tata Usaha	1	1	2	0,00
95	Operator	0	0	0	0,00
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	1	0	1	0,00
97	Teknisi	0	0	0	0,00
98	Asisten Ahli	0	0	0	0,00
99	Pekerjaan Lainnya	20	10	30	0,01

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Pangandaran, 2026

Data dimaksud merupakan gambaran jenis pekerjaan yang diajukan oleh penduduk saat pengurusan KTP dimana terdapat 99 jenis pekerjaan yang ada dalam database SIAK Terpusat, sehingga ada kemungkinan tidak

menggambarkan kondisi riil dikarenakan tidak adanya *updating* pekerjaan pada KTP yang disampaikan kepada Disdukcapil.

Berdasarkan Tabel 2. 18, dapat disampaikan bahwa masih relatif tingginya jumlah penduduk yang belum dan atau tidak bekerja mengindikasikan bahwa usia yang masih belum siap bekerja (anak-anak) dan angkatan kerja yang cukup besar kurang lebih sebesar 151.174 orang dari total penduduk Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut menggambarkan yang masuk pada usia kerja masih belum terserap secara maksimal oleh sektor- sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus difungsikan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada “*human capital*” ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Adapun data secara khusus mengenai ketenagakerjaan dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pencari kerja yang dilatih (BLK, LPK, Swasta dan Perangkat Daerah/PD lainnya)	40 Pencari Kerja
2	Jumlah data BLK, LPK Swasta dan kejuruannya	16
3	Jumlah pencari kerja yang terdaftar (laki-laki dan perempuan)	L = 874
		P = 871
4	Jumlah pencari kerja yang bersertifikat	3113 Orang
5	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (dalam negeri dan luar negeri)	DN = 1164
		LN = 299
6	Data perusahaan penempatan migran Indonesia (P2MI) dan sending and organization (SO untuk negara tujuan)	88
7	Rencana ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	0 Dokumen
8	Jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan PHK	7 Orang
9	Data perusahaan yang mulai operasi Kembali	N/A
10	Angka perselisihan hubungan industrial antar pekerja dan perusahaan	0 Kasus
11	Jumlah perselisihan industrial yang diselesaikan	2 Kasus
12	Kepesertaan sistem jaminan sosial (Ketenagakerjaan dan Kesehatan)	N/A

Sumber: Disnaker Kabupaten Pangandaran, 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa kualitas tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran cukup baik yaitu ada 271 orang pencari kerja yang bersertifikat. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja harus terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Pangandaran. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa (padat karya) dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Tabel 2. 20 Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Instansi	Pendidik	Tenaga Kependidikan	Kepsek	Jumlah
----------	----------	---------------------	--------	--------

	PNS	Non-PNS	PNS	Non-PNS		
SD Negeri	1.523	495	2	186	259	2.465
SD Swasta	0	42	0	5	4	51
SMP Negeri	619	118	6	146	37	926
SMP Swasta	1	152	0	14	18	184
Total						3.062

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan perbedaan data dimaksud, untuk kepentingan pengambilan kebijakan sektoral, maka data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data sektoral. Data di atas menunjukkan masih banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berstatus Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Terdapat beberapa aspek yang penting dan harus diperhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, antara lain aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan fokus pada seni budaya dan olahraga. Analisis aspek-aspek tersebut dilakukan terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menganalisis kinerja terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Indikator-indikator tersebut meliputi pertumbuhan PDRB, indeks gini, persentase penduduk miskin, laju inflasi, dan indeks pembangunan manusia.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1 Pertumbuhan dan Distribusi PDRB

Untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, salah satu indikator pengukurannya adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator yang mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah dinyatakan dalam satuan rupiah. Indikator pengukuran dengan PDRB dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung dalam tahun tertentu, serta digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Selanjutnya PDRB menggambarkan atas dasar arus nilai tambah barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses pertumbuhan output perkapita yang terlihat dalam jangka panjang. Konsep jangka panjang mengacu pada kesejahteraan masyarakat, yang digambarkan dalam peningkatan produksi per kapita, yang secara bersamaan menawarkan alternatif yang berbeda dalam hal konsumsi barang dan jasa dan sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat dan bersamaan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain, arah pembangunan ekonomi adalah berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik-baiknya.

Tabel 2. 21 Nilai PDRB ADHB dan ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pangandaran (miliar rupiah) Tahun 2022-2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
PDRB ADHB	13.163,70	14.256,42	15.474,58	16.758,24
PDRB ADHK	8.426,400	8.869,86	9.324,31	9.850,57

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2026

PDRB Kabupaten Pangandaran tahun 2025 atas dasar harga berlaku

sebesar 16.758,24 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2025 sebesar 9.850,57 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024, PDRB tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,283,66 miliar rupiah atau 8,3 persen. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan kenaikannya sebesar 526,26 tahun 2025 atau 5,6 persen.

Tabel 2. 22 Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025 (miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.485,23	3.631,92	3.961,05	4.519,01
B	Pertambangan dan Penggalian	75,09	77,82	80,12	82,93
C	Industri Pengolahan	663,41	710,43	752,85	780,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,70	9,97	10,16	10,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,13	2,14	2,38	2,47
F	Konstruksi	1.019,50	1.101,06	1.197,60	1.308,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.605,46	2.792,70	2.998,39	3.103,19
H	Transportasi dan Pergudangan	1.574,37	1.934,53	2.149,21	2.329,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.325,48	1.449,88	1.568,18	1.743,74
J	Informasi dan Komunikasi	249,04	261,21	277,44	282,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	267,33	276,11	289,39	295,38
L	Real Estate	395,47	412,92	433,64	465,80
M, N	Jasa Perusahaan	137,30	143,86	154,35	163,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	311,59	320,93	348,69	333,01
P	Jasa Pendidikan	793,54	848,57	948,62	1.003,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29,77	31,34	34,28	37,53
R, S, T, U	Jasa lainnya	219,30	251,03	268,21	295,32
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.163,70	14.256,42	15.474,58	16.758,24

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2026

Pada Tabel 2.22, nilai PDRB Pangandaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai 16,75 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 7,43 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 15,47 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pada beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Selama empat tahun terakhir (2021-2025), struktur perekonomian Pangandaran masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Pangandaran.

Tabel 2. 23 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025 (Persen)

Kategori	Uraian	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,48	25,48	25.60	26,97
B	Pertambangan dan Penggalian	0,57	0,55	0.52	0,49
C	Industri Pengolahan	5,04	4,98	4.87	4,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0.07	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,02	0,02	0.02	0,01
F	Konstruksi	7,74	7,72	7.74	7,81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,79	19,59	19.38	18,52
H	Transportasi dan Pergudangan	11,96	13,57	13.89	19,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,07	10,17	10,13	10,41
J	Informasi dan Komunikasi	1,89	1,83	1.79	1,69
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,03	1,94	1.87	1,76
L	<i>Real Estate</i>	3,00	2,90	2.80	2,78
M, N	Jasa Perusahaan	1,04	1,01	1.00	0,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,37	2,25	2.25	1,99
P	Jasa Pendidikan	6,03	5,95	6.13	5,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,23	0,22	0.22	0,22
R, S, T, U	Jasa lainnya	1,67	1,76	1.73	1,76
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2026

Kontribusi Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 masih berasal dari kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 26,97 persen, diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 18,52 persen. Selanjutnya, kategori Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi sebesar 13,90 persen, diikuti oleh kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,41 persen, serta kategori Konstruksi sebesar 7,81 persen. Sementara itu, kontribusi dari kategori lapangan usaha lainnya masing-masing masih di bawah 6 persen.

Selama periode 2021-2025, di antara lima kategori lapangan usaha utama tersebut, Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan kategori yang mengalami peningkatan kontribusi setiap tahunnya. Peningkatan pada kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tidak terlepas dari peran Kabupaten Pangandaran sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Pangandaran pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang tidak lagi terpengaruh oleh inflasi. Nilai PDRB Pangandaran tahun 2025 atas dasar harga konstan 2010 diproyeksikan mencapai 9,85 triliun rupiah, naik sebesar 526,26 miliar rupiah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 9,32 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025,

pertumbuhan ekonomi Pangandaran diperkirakan naik mencapai 5,64 persen, yang tetap menunjukkan tren positif.

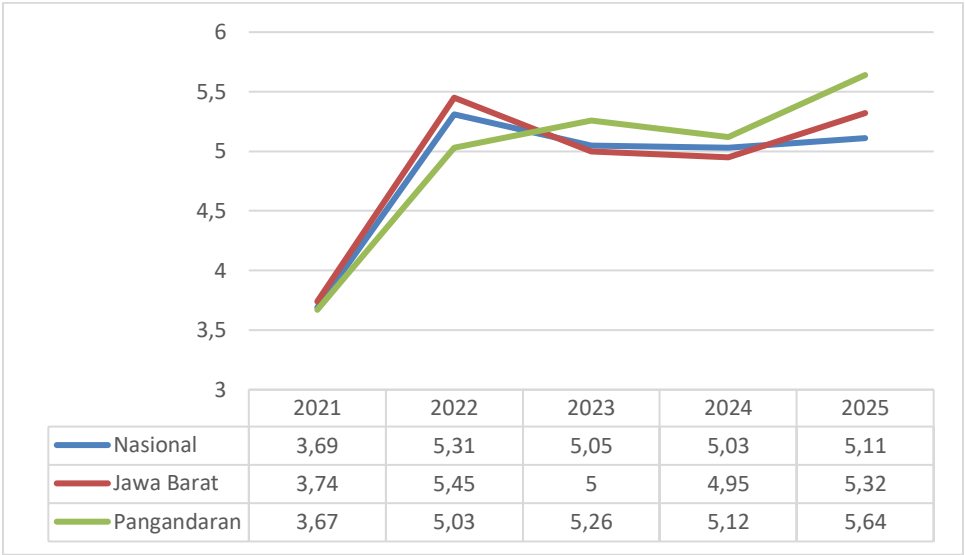
Tabel 2. 24 Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025 (miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.963,55	1.990,67	2.057,75	2.272,55
B	Pertambangan dan Penggalian	53,10	53,66	54,19	54,06
C	Industri Pengolahan	437,93	455,66	467,19	474,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,51	6,60	6,74	6,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,28	1,27	1,37	1,41
F	Konstruksi	712,27	754,86	815,36	884,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.861,28	1.944,78	2.013,47	2.029,89
H	Transportasi dan Pergudangan	938,53	1.091,57	1.203,40	1.294,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	785,69	834,47	882,28	968,33
J	Informasi dan Komunikasi	248,14	260,14	276,32	281,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	168,19	170,67	172,98	174,41
L	Real Estate	308,27	318,27	333,33	350,58
M, N	Jasa Perusahaan	85,14	86,84	89,40	90,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	224,97	229,31	244,77	230,78
P	Jasa Pendidikan	446,80	468,28	495,87	513,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,14	22,06	23,50	25,27
R, S, T, U	Jasa lainnya	163,61	180,74	186,39	198,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8.426,40	8.869,86	9.324,31	9.850,57

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2026

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai tolak ukur laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2023 dan 2024, yaitu masing-masing sebesar 5,26% dan 5,12%, capaian ini tetap mencerminkan resiliensi ekonomi daerah. Tren tersebut mengindikasikan bahwa strategi pembangunan ekonomi daerah yang diarahkan pada sektor-sektor unggulan telah memberikan dampak positif, meskipun diperlukan penguatan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2025 dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 2. 18 Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK Nasional, Jawa Barat dan Pangandaran Tahun 2021-2025 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Diolah 2026

Dalam pembangunan ekonomi, fokus tujuan utamanya adalah mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang lebih merata. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ukuran yang digunakan sebagai acuan pertama untuk menjelaskan kinerja perekonomian secara sederhana.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran terus mengalami peningkatan yang positif hingga pada tahun 2025 Triwulan mencapai 5,64. Percepatan pertumbuhan ekonomi Pangandaran disebabkan karena hampir sebagian besar kategori lapangan usaha seperti kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan; kategori lapangan usaha Konstruksi, kategori lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, kategori lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, kategori lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, kategori lapangan usaha Jasa Pendidikan, mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2.272,55 miliar rupiah. Dari ke-17 kategori lapangan usaha yang ada, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 2. 25 Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025 (Persen)

Kategori	Uraian	2022	2023	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,45	1,38	3,37	10,44
B	Pertambangan dan Penggalan	0,90	1,06	0,98	-0,24
C	Industri Pengolahan	8,54	4,05	2,53	1,59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,95	1,44	1,99	1,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,14	-0,78	7,52	2,86
F	Konstruksi	-2,32	5,98	8,02	8,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,80	4,49	3,53	0,82
H	Transportasi dan Pergudangan	7,65	16,31	10,24	7,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,47	6,21	5,73	9,75
J	Informasi dan Komunikasi	4,02	4,84	6,22	1,84

Kategori	Uraian	2022	2023	2024*	2025**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,34	1,47	1,35	0,83
L	Real Estate	7,72	3,24	4,73	5,17
M, N	Jasa Perusahaan	9,40	2,00	2,95	0,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,03	1,93	6,74	-5,72
P	Jasa Pendidikan	2,23	4,81	5,89	3,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,46	4,32	6,56	7,54
R, S, T, U	Jasa lainnya	13,50	10,47	3,13	6,37
	PERTUMBUHAN PDRB	5,03	5,26	5,12	5,64

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2026

Jika dibandingkan dengan capaian laju PDRB kabupaten/kota terdekat, Kabupaten Pangandaran mempunyai capaian yang relatif stabil dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga. Hal tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program kegiatan prioritas perangkat daerah yang diarahkan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Percepatan pertumbuhan ekonomi Pangandaran pada tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 disebabkan karena hampir sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. 26 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2022-2025

Kabupaten/ Kota	Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota			
	2022	2023	2024	2025
Pangandaran	5,03	5,26	4,97	5,64
Banjar	4,29	4,71	5,47	5,13
Ciamis	5,02	4,99	4,97	5,37
Tasikmalaya	4,70	4,69	4,64	5,31

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah, 2026

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh Kabupaten Pangandaran. Pada periode tahun 2020-2025, PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Berlaku terus meningkat, yakni mencapai 16.758,24 miliar rupiah pada tahun 2025. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk yang mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga. Peningkatan ini juga dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume konsumsi. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir.

Tabel 2. 27 Nilai PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025 (miliar rupiah)

Uraian	2022	2023	2024*	2025**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.372,14	7.990,94	8.376,00	8.709,70
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,27	113,37	125,28	130,40
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.101,47	1.123,80	1.140,62	1.233,69
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.924,11	3.124,48	3.429,79	3.702,68
Pembentukan Inventori	17,05	16,41	29,65	8,72

Uraian	2022	2023	2024*	2025**
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.648,66	1.887,41	2.373,23	2.973,02
PDRB	13.163,70	14.256,42	15.474,58	16.758,24

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2026

Selain dinilai Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Secara umum nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Pangandaran menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dengan nilai PDRB sebesar 9.850,56 miliar rupiah pada tahun 2025.

Tabel 2. 28 Nilai PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2022-2025 (miliar rupiah)

Uraian	2022	2023	2024*	2025**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.810,50	4.996,20	5.065,64	5.173,49
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	65,39	70,93	75,78	78,47
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	638,96	638,41	631,46	674,63
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.764,57	1.852,05	1.986,64	2.120,95
Pembentukan Inventori	13,69	12,78	22,22	5,76
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.133,29	1.299,49	1.542,56	1.797,23
PDRB	8.426,40	8.869,86	9.324,31	9.850,56

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2026

2.1.2.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atau yang biasa disebut dengan pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator makro untuk melihat kemakmuran suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita di suatu wilayah, maka wilayah tersebut semakin Makmur.

Tabel 2. 29 Nilai PDRB Per Kapita Tahun 2022-2024 (Ribu Rupiah)

Indikator	2022	2023	2024	2025
PDRB per Kapita ADHB	30,71	33,04	35,64	38,39
PDRB per Kapita ADHK	19,66	20,55	21,47	22,56

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2026

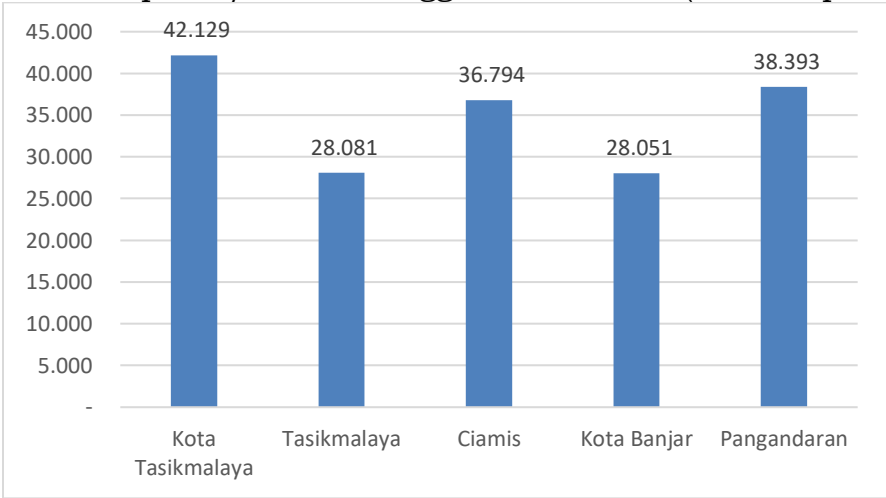
Berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita selama periode Tahun 2022–2025, perekonomian Kabupaten Pangandaran menunjukkan kinerja yang terus membaik. Hal tersebut tercermin dari nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) yang mengalami peningkatan secara konsisten, yaitu dari sebesar 30,71 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 38,39 juta rupiah pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah terus meningkat seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, nilai PDRB per kapita ADHK tercatat sebesar 19,66 juta rupiah dan meningkat menjadi 22,56 juta rupiah pada tahun 2025. Peningkatan indikator ini

menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi, tetapi juga didukung oleh peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi riil masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan memiliki fondasi yang cukup kuat dan mampu menciptakan nilai tambah secara nyata.

Kenaikan PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara agregat. Meningkatnya pendapatan per kapita mencerminkan semakin besarnya rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi di daerah. Namun demikian, peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan pemerataan hasil pembangunan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 2. 19 Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2025 (Ribu Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Diolah 2026

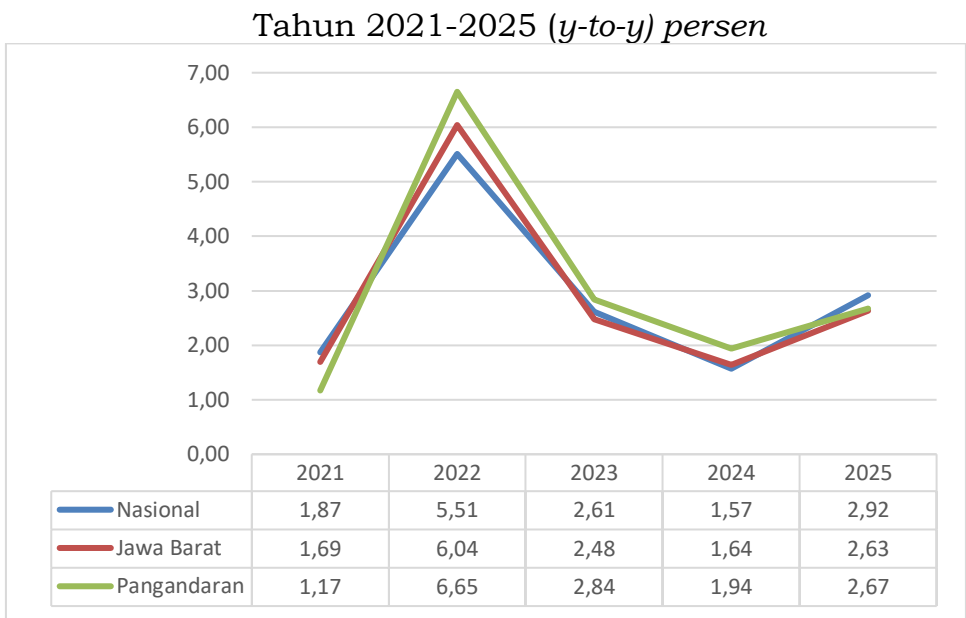
2.1.2.3 Inflasi

Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang, jasa, dan faktor produksi naik. Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali jika kenaikan itu meluas ke barang, jasa, atau faktor produksi lainnya. Inflasi mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, yang berarti terjadi guncangan atau gangguan jaminan sosial akibat ketidakmampuan masyarakat dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

Di Provinsi Jawa Barat, BPS secara rutin menghitung inflasi di 7 kota (yang biasa disebut kota Indeks Harga Konsumen). Kota-kota tersebut adalah Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya. Khusus untuk wilayah Priangan Timur (Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran), data inflasi daerah yang dihitung hanya Kota Tasikmalaya, oleh Tim TPID Bank Indonesia (BI) Cabang Tasikmalaya bersama Tim Kabupaten/Kota dan BPS.

Oleh karena di Kabupaten Pangandaran belum tersedia data inflasi tahunan karena tidak ada survei harga konsumen secara rutin, maka inflasi di Kabupaten Pangandaran dapat didekati dengan pola/data inflasi kabupaten/kota yang kondisi perekonomiannya mirip, di antaranya Kota Tasikmalaya. Walaupun pada kenyataannya pasti akan sedikit berbeda, diharapkan perbedaannya tidak terlalu signifikan.

Gambar 2. 20 Laju Inflasi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Diolah 2026

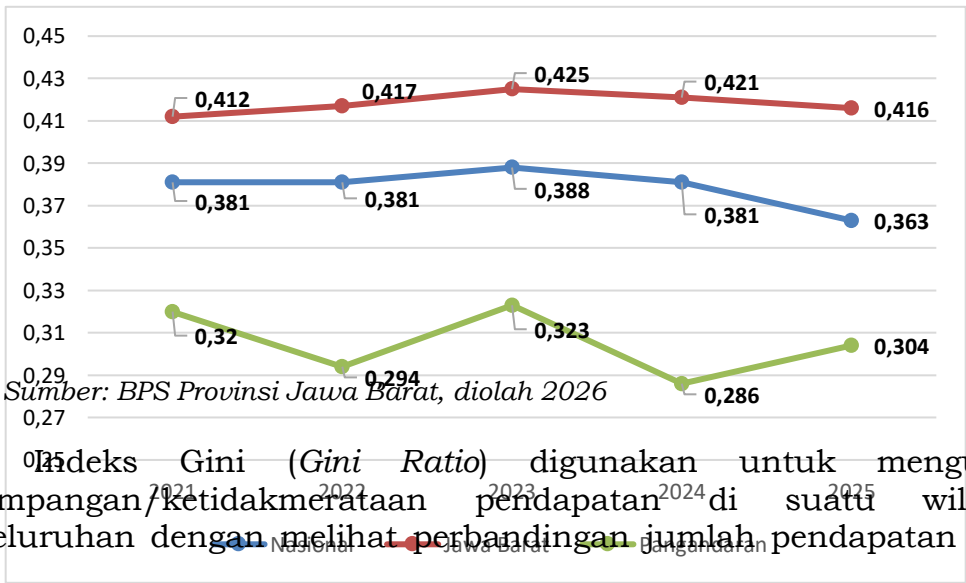
Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi tren penurunan inflasi yang cukup signifikan. Inflasi Pangandaran turun menjadi 2,84% pada 2023 dan 1,94% pada 2024. Penurunan ini menunjukkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi, stabilisasi harga pangan, serta membaiknya sistem distribusi komoditas strategis. Tahun 2024 mencerminkan kondisi harga yang relatif stabil dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional.

Memasuki tahun 2025, inflasi kembali meningkat menjadi 2,67%. Meskipun terjadi kenaikan dibanding tahun sebelumnya, tingkat inflasi tersebut masih tergolong moderat dan dalam batas terkendali. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan aktivitas ekonomi serta dinamika harga komoditas tertentu.

2.1.2.4 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diukur dengan melihat peningkatan pendapatan penduduk di suatu daerah. Peningkatan pendapatan yang terjadi harus merata dan dapat dirasakan oleh seluruh strata sosial masyarakat, artinya aspek pemerataan pendapatan menjadi penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan tolok ukur keberhasilan hasil-hasil pembangunan suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Pangandaran. Kekhawatiran akan terjadinya ketimpangan hasil pembangunan kemudian berujung pada munculnya permasalahan sosial di masyarakat.

Gambar 2. 21 Realisasi Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025 (Ribu Rupiah)



Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan/ketidakmerataan pendapatan di suatu wilayah secara keseluruhan dengan melihat perbandingan jumlah pendapatan yang diterima

oleh seluruh rumah tangga atau individu dengan total pendapatan. Indeks gini sebagai ukuran distribusi pendapatan memiliki nilai berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika koefisien gini 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan sempurna mutlak. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 maka termasuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 dan 0,5 termasuk dalam kategori ketimpangan "sedang" dan jika nilainya lebih besar dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang "tinggi".

Tabel 2. 30 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2021-2025

Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Pangandaran	0,320	0,294	0,323	0,286	0,304
Kabupaten Tasikmalaya	0,378	0,378	0,404	0,363	0,363
Kabupaten Ciamis	0,342	0,337	0,341	0,326	0,340
Kota Banjar	0,341	0,362	0,337	0,318	0,287

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 2026

Indeks Gini Kabupaten Pangandaran periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang relatif terkendali pada kisaran 0,286–0,323. Berdasarkan klasifikasi tingkat ketimpangan, capaian tersebut termasuk dalam kategori rendah hingga sedang, dengan kecenderungan fluktuatif. Secara komparatif terhadap kabupaten/kota sekitar di wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat, posisi Kabupaten Pangandaran tergolong relatif lebih baik dalam aspek pemerataan pendapatan. Dibandingkan Kabupaten Tasikmalaya yang secara konsisten mencatat nilai Indeks Gini lebih tinggi (bahkan mencapai 0,404 pada tahun 2023), Pangandaran menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah belum mengalami konsentrasi pendapatan yang tinggi pada kelompok tertentu.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Ciamis, perbedaan tingkat ketimpangan relatif tipis, namun Pangandaran cenderung berada pada posisi lebih rendah dalam sebagian besar tahun pengamatan. Kondisi ini mencerminkan distribusi aktivitas ekonomi yang relatif seimbang antar kelompok masyarakat, meskipun masih terdapat kerentanan terhadap gejolak sektor unggulan daerah.

Sementara itu, Kota Banjar menunjukkan tren penurunan ketimpangan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir hingga mencapai kategori rendah pada tahun 2025. Perkembangan tersebut menjadi referensi penting dalam memperkuat strategi pemerataan di Kabupaten Pangandaran agar tetap kompetitif dalam konteks pembangunan kawasan.

Secara regional, peningkatan ketimpangan yang terjadi pada tahun 2023 di beberapa wilayah mengindikasikan adanya tekanan ekonomi yang berdampak pada distribusi pendapatan rumah tangga. Perbaikan pada tahun 2024 mencerminkan proses pemulihan ekonomi, namun kenaikan kembali pada tahun 2025 di Pangandaran perlu dicermati sebagai sinyal perlunya penguatan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

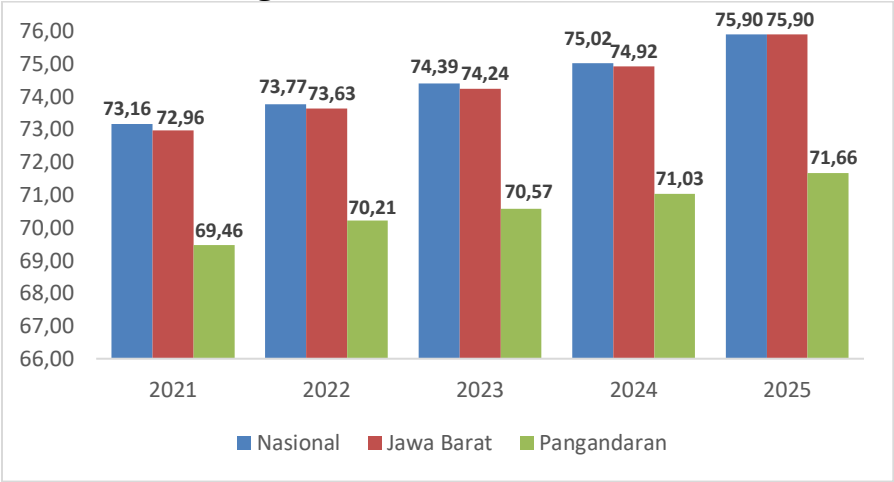
2.1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pembangunan yang berpusat pada manusia dengan mengukur perbandingan harapan hidup, pendidikan dan taraf hidup. IPM sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh

kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Saat mengukur peringkat negara, *United Nations Development Programme* (UNDP) memeringkat semua negara dalam skala dari 0 (terendah) hingga 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia di masing-masing negara tersebut.

IPM merupakan indikator agregat tunggal yang tidak dapat digunakan untuk mengukur semua dimensi pembangunan manusia, tetapi dapat digunakan untuk mengukur tiga dimensi utama pembangunan manusia dengan kemampuan dasar masyarakat. Tiga kapasitas dasar tersebut adalah umur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan, serta akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Gambar 2. 22 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Jawa Barat dan Pangandaran Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 2026

Perkembangan IPM Kabupaten Pangandaran selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 69,46 pada tahun 2021 menjadi 71,66 pada tahun 2025. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, maupun pengeluaran riil per kapita. Secara kategorisasi, IPM Kabupaten Pangandaran telah bergerak dari kategori “sedang” menuju batas bawah kategori “tinggi” (≥ 70), yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan manusia.

Secara tren, peningkatan IPM Pangandaran berlangsung stabil setiap tahun, meskipun laju peningkatannya relatif lebih lambat dibandingkan peningkatan di tingkat provinsi dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan manusia telah berjalan, namun akselerasi kebijakan masih diperlukan untuk mempercepat konvergensi terhadap capaian provinsi dan nasional.

Tabel 2. 31 Perbandingan IPM Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2025

Kabupaten/Kota	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran (Ribu Rp.)	IPM
Kabupaten Pangandaran	75,45	12,41	8,11	9.995	71,66
Kabupaten Tasikmalaya	74,37	12,92	7,98	9.258	70,76
Kabupaten Ciamis	75,69	14,31	8,23	10.406	74,33
Kota Banjar	75,35	13,29	8,84	12.222	75,54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah, 2026

Berdasarkan data tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran tercatat sebesar 71,66. Capaian ini menempatkan Pangandaran di atas Kabupaten Tasikmalaya (70,76), namun masih berada di bawah Kabupaten Ciamis (74,33) dan Kota Banjar (75,54). Secara regional di

wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat, posisi Pangandaran berada pada kelompok menengah, dengan selisih yang cukup signifikan terhadap daerah dengan capaian tertinggi.

Dari dimensi kesehatan yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH), Pangandaran mencatat angka 75,45 tahun. Capaian ini relatif kompetitif dan mendekati Kabupaten Ciamis (75,69) serta Kota Banjar (75,35), serta lebih tinggi dibanding Kabupaten Tasikmalaya (74,37). Hal ini menunjukkan bahwa aspek kesehatan bukan merupakan faktor utama penyebab kesenjangan IPM Pangandaran terhadap daerah lain.

Pada dimensi pendidikan, yang tercermin dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Pangandaran masih menghadapi tantangan. HLS Pangandaran sebesar 12,41 tahun lebih rendah dibanding Ciamis (14,31) dan Kota Banjar (13,29), meskipun sedikit lebih rendah dari Tasikmalaya (12,92). Sementara itu, RLS Pangandaran sebesar 8,11 tahun lebih tinggi dari Tasikmalaya (7,98), namun masih tertinggal dari Ciamis (8,23) dan terutama Kota Banjar (8,84). Data ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan, khususnya pada jenjang menengah dan atas, menjadi kunci percepatan IPM.

Dari dimensi standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita, Pangandaran mencatat Rp9.995 ribu per tahun. Angka ini lebih baik dibanding Tasikmalaya (Rp9.258 ribu), tetapi masih di bawah Ciamis (Rp10.406 ribu) dan secara signifikan tertinggal dari Kota Banjar (Rp12.222 ribu). Perbedaan daya beli masyarakat ini berkontribusi langsung terhadap perbedaan capaian IPM secara keseluruhan.

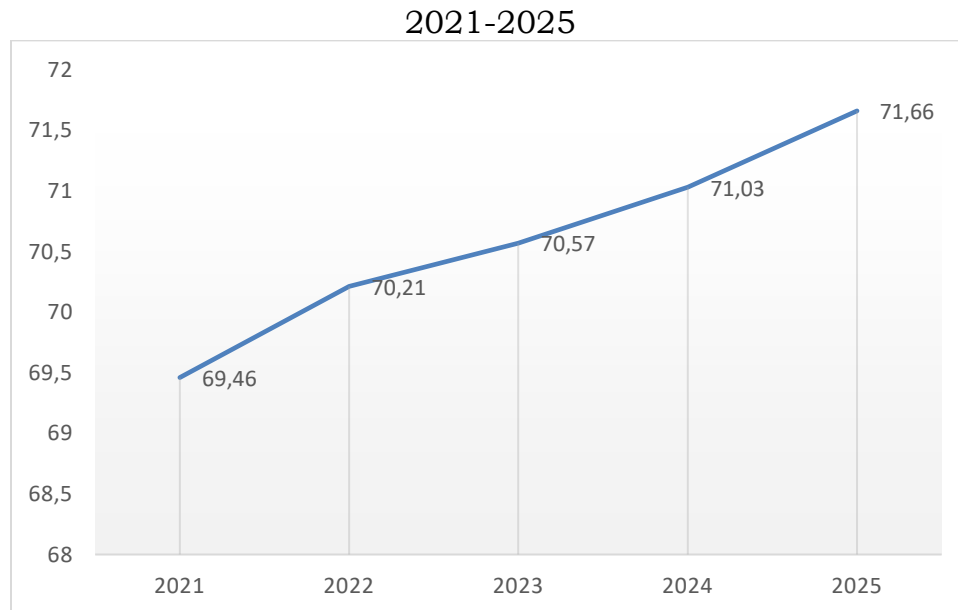
Secara keseluruhan, kesenjangan IPM Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar terutama dipengaruhi oleh dimensi pendidikan dan daya beli masyarakat, sementara dari sisi kesehatan relatif seimbang. Dengan demikian, percepatan pembangunan manusia di Pangandaran perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses pendidikan menengah dan kejuruan, serta penguatan ekonomi produktif masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 2. 32 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,46	70,21	70,57	71,03	71,66
Indeks Pendidikan	59,72	60,41	60,97	61,19	61,51
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,08	12,11	12,30	12,31	12,41
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,85	8,03	8,04	8,1	8,11
Indeks Kesehatan	83,57	84,00	84,43	84,78	85,31
Umur Harapan Hidup (tahun)	74,32	74,60	74,88	75,11	75,45
Indeks Pengeluaran	67,14	68,21	67,20	69,06	N/A
Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)	9.065	9.389	9.406	9.654	9.995

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2026

Gambar 2. 23 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran Tahun



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2026

Berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran selama periode Tahun 2021–2025, kualitas pembangunan manusia menunjukkan tren yang terus meningkat. Nilai IPM mengalami kenaikan dari 69,46 pada tahun 2021 menjadi 71,66 pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada dimensi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia tercermin dari meningkatnya Indeks Pendidikan yang naik dari 59,72 pada tahun 2021 menjadi 61,51 pada tahun 2025. Hal ini didukung oleh meningkatnya Harapan Lama Sekolah (HLS) dari 12,08 tahun menjadi 12,41 tahun, yang menunjukkan semakin besarnya peluang penduduk usia sekolah untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan dari 7,85 tahun pada tahun 2021 menjadi 8,11 tahun pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan semakin baik, meskipun masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada dimensi kesehatan, kondisi pembangunan manusia juga menunjukkan perkembangan yang positif. Indeks Kesehatan meningkat secara konsisten dari 83,57 pada tahun 2021 menjadi 85,31 pada tahun 2025, yang menggambarkan semakin baiknya kualitas kesehatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 74,32 tahun menjadi 75,45 tahun selama periode pengamatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan, kualitas lingkungan, serta kesadaran masyarakat akan perilaku hidup sehat semakin membaik sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, pada dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran per kapita juga menunjukkan perkembangan yang positif. Pengeluaran per kapita meningkat dari Rp9,07 juta pada tahun 2021 menjadi Rp9,99 juta pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Indeks Pengeluaran mengalami fluktuasi pada beberapa tahun, secara umum kondisi perekonomian

masyarakat tetap menunjukkan arah yang positif dan mampu mendukung peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sinergi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi agar peningkatan IPM dapat berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Upaya peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Pangandaran dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan derajat kesehatan, meskipun masih sulit untuk diintervensi secara optimal. Pemerintah perlu terus meningkatkan peran dalam program-program promotif dan preventif terkait perilaku hidup sehat dan bersih. Dalam bidang pendidikan, penuntasan buta huruf serta penurunan angka putus sekolah tetap menjadi prioritas, dengan melanjutkan kebijakan pendidikan gratis melalui Program Pangandaran Hebat. Selain itu, guna meningkatkan daya beli masyarakat, pengembangan skala mikro serta usaha kecil dan menengah menjadi alternatif utama dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat daya beli dan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Pangandaran.

2.1.2.6 Kemiskinan

a. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan adalah suatu proses untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Pada tingkat kesejahteraan ekonomi hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang dilihat dari tingkat konsumsi akibat peningkatan pendapatan masyarakat. Salah satu indikator terpenting keberhasilan pembangunan adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu tugas penting pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Pangandaran. Pemerintah telah mencoba untuk menerapkan beberapa jenis Kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menekan angka kemiskinan hingga ke tingkat yang serendah mungkin.

Ukuran kemiskinan didasarkan dengan membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel 2. 33 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2021-2025

Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin (Po)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pangandaran	9,65	9,32	8,98	8,75	8,03
Banjar	7,11	6,73	6,14	5,85	5,73
Ciamis	7,97	7,72	7,42	7,39	7,19
Tasikmalaya	11,15	10,73	10,28	10,23	10,15
Jawa Barat	8,40	8,06	7,62	7,46	7,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 2026

Tabel 2. 34 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pangandaran dan

Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2021-2025

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pangandaran	39,1	37,9	36,7	36,0	33,1
Banjar	13,4	12,7	11,7	11,2	11,0
Ciamis	96,6	94,0	90,8	90,8	88,7
Tasikmalaya	200,6	194,1	186,9	186,8	186,0
Jawa Barat	4.195,3	4.071,0	3.888,6	3.848,7	3.654,7

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah 2026

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu Tahun 2021–2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten, baik dari sisi persentase maupun jumlah penduduk miskin.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2021 tercatat sebesar 9,65 persen dan secara bertahap menurun menjadi 9,32 persen pada Tahun 2022, 8,98 persen pada Tahun 2023, 8,75 persen pada Tahun 2024, dan mencapai 8,03 persen pada Tahun 2025. Dengan demikian, dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan sebesar 1,62 poin persentase.

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 39,1 ribu jiwa pada Tahun 2021 menjadi 33,1 ribu jiwa pada Tahun 2025, atau berkurang sekitar 6 ribu jiwa. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar dan rata-rata Provinsi Jawa Barat, tingkat kemiskinan Kabupaten Pangandaran masih relatif lebih tinggi. Pada Tahun 2025, persentase kemiskinan Kabupaten Pangandaran (8,03 persen) berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat (7,02 persen), serta lebih tinggi dibandingkan Kota Banjar (5,73 persen) dan Kabupaten Ciamis (7,19 persen), meskipun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tasikmalaya (10,15 persen).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kinerja penurunan kemiskinan berjalan positif, Kabupaten Pangandaran masih menghadapi tantangan dalam mempercepat konvergensi terhadap rata-rata provinsi serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

b. Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan terkait angka kemiskinan, yaitu tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.35 menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan pada periode 2021 hingga 2025 mengalami penurunan menjadi 0,87 pada tahun 2025, setelah sebelumnya mencapai 1,23 pada tahun 2024. Hal ini memberikan gambaran bahwa pada periode tersebut rata-rata pengeluaran penduduk miskin

semakin dekat dengan garis kemiskinan. Hal ini tentu menjadi fokus Pemerintah Pangandaran untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan, dengan melaksanakan program prioritas perlindungan sosial bagi penduduk miskin ekstrem dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2025 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 0,13.

Tabel 2. 35 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,25	1,24	1,28	1,23	0,87
Indeks Keparahannya Kemiskinan	0,27	0,26	0,27	0,29	0,13

Sumber: Kabupaten Pangandaran Dalam Angka Tahun 2026

Data kemiskinan ekstrem diperlukan sebagai analisis penentuan kebijakan dalam penanganan kemiskinan berdasarkan kondisi terkini, data mengenai kemiskinan ekstrem memang tidak dipublish di website BPS. Data dari tahun 2021-2025, tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Pangandaran fluktuatif, pada tahun 2023 tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan menjadi 0,65%, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 1,19. Selanjutnya pada tahun 2025 ingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan kembali menjadi 0,28.

Tabel 2. 36 Tingkat Penduduk Miskin Ekstrem Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pangandaran	1,38	1,46	0,65	1,19	0.28
Tasikmalaya	1,57	0,87	1,49	1,18	1,68
Ciamis	0,45	1,47	0,11	1,17	0,41
Garut	1,15	3,10	0,36	0,88	1,26
Kota Banjar	1,10	1,32	0,04	0,95	0,33
Kota Tasikmalaya	3,99	3,49	0,96	0,71	0,46

Sumber: BPS, 2025

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang terkait dengan pengukuran ketenagakerjaan yang merangkum masyarakat yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dengan menghitung rasio angkatan kerja (semua yang bekerja) terhadap total angkatan kerja pada waktu tertentu. Angkatan kerja di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 sebanyak 274.841 orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 79,13%.

Tabel 2. 37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pangandaran

Indikator Capaian Tenaga Kerja	2022	2023	2024	2025
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	79,92	80,15	80,12	79,13
Angkatan Kerja (Orang)	260.761	274.550	272.413	274.841

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,56	1,52	1,58	1,91
Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang)	4.077	4.164	4.380	5.262

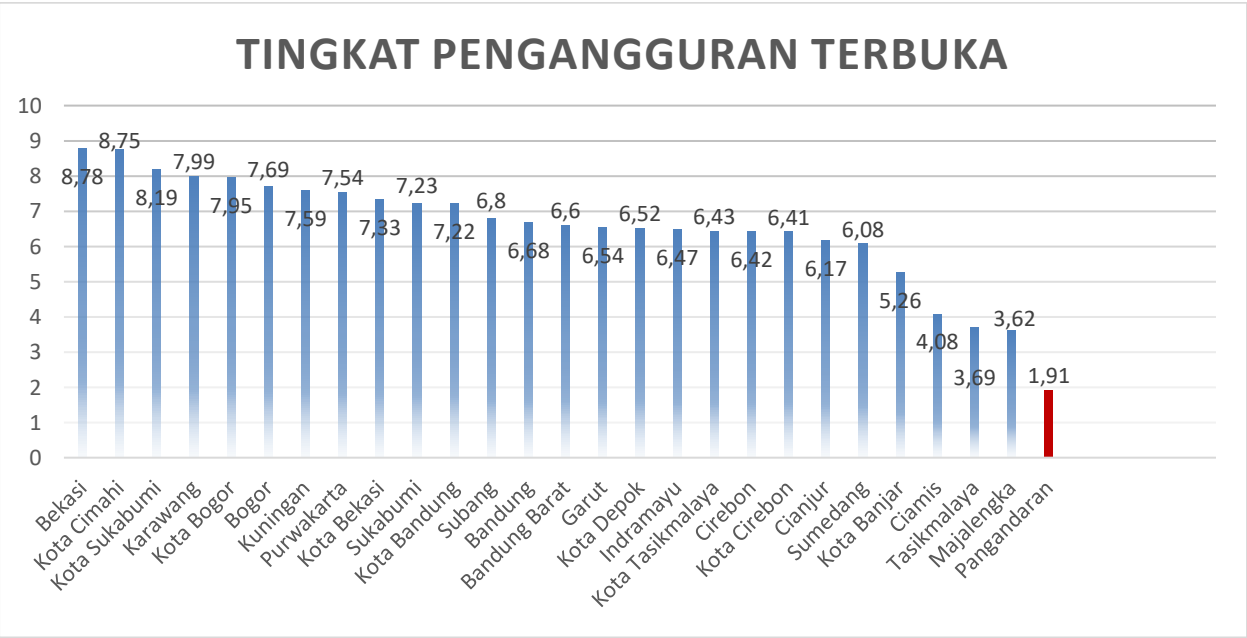
Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pangandaran dalam empat tahun terakhir (2022-2025) mengalami kenaikan, yang diikuti dengan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 1,91% pada tahun 2025. Keduanya mengalami penurunan pada tahun 2021, ketika pandemi Covid-19 menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan.

Menurunnya TPT dari 3,25% pada 2021 menjadi 1,91% pada 2025 dipengaruhi oleh peningkatan ketersediaan lapangan kerja, yang memungkinkan lebih banyak penduduk untuk bekerja. Namun, hal ini belum sepenuhnya beriringan dengan peningkatan standar hidup layak, mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Pangandaran masih cukup tinggi. Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Pangandaran tetap menempati posisi dengan TPT terendah se-Jawa Barat, menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan di wilayah ini.

Gambar 2. 24

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2025



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2026

2.1.2.8 Angka Melek Huruf

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tabel 2. 38 Angka Melek Huruf Kabupaten Pangandaran

Kelompok Umur	2024	2025
15-24	100	99,62
15-59	100	99,93
15+	99,33	99,61
60+	97,06	98,53

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2026

Tabel diatas menunjukan bahwa pada tahun 2025 angka melek huruf di Kabupaten Pangandaran mencapai 99,61 persen untuk kelompok umur 15 tahun ke atas dan 98,53 persen untuk kelompok umur 60 tahun ke atas. Pada tahun 2024, angka ini mengalami sedikit perubahan, dengan kelompok 15 tahun ke atas turun menjadi 99,33 persen dan kelompok 60 tahun ke atas menjadi 97,06 persen. Sementara itu, tingkat literasi kelompok usia produktif (15–59 tahun) mencapai 99,93 persen, tetap menunjukkan hampir seluruh penduduk usia kerja telah melek huruf. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program pendidikan dan kebijakan literasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, perhatian lebih dapat diberikan pada kelompok usia lanjut untuk memastikan literasi tetap terjaga di seluruh kelompok usia.

2.1.2.9 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk suatu kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai (menurut umur penduduk dan ketentuan usia sekolah pada jenjang tersebut) relatif terhadap jumlah penduduk kelompok yang bersangkutan. kelompok usia sekolah. APM digunakan untuk menunjukkan berapa banyak penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan berapa banyak penduduk yang bersekolah pada usia yang memenuhi ketentuan kelompok usia wajib sekolah pada jenjang pendidikan yang diikuti.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah penduduk yang masih bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk) dan jumlah penduduk yang secara bersamaan memenuhi persyaratan resmi untuk penduduk yang bersekolah. APK digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi umum penduduk pada suatu jenjang pendidikan tertentu, serta untuk menunjukkan seberapa besar kapasitas yang dapat ditawarkan oleh sistem pendidikan kepada siswa pada usia sekolah tertentu. Selain itu, APK juga merupakan indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat mencerminkan jumlah penduduk yang meningkat ke tingkat pendidikan yang belum mencukupi atau bahkan melebihi usia sekolah.

Tabel 2. 39 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pangandaran

Jenjang Pendidikan	APM			APK		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
SD/MI/Sederajat	99,49	97,57	98,71	104,08	103,6	102,40
SMP/MTs/Sederajat	87,83	85,47	83,02	97,24	96,61	92,82
SMA/SMK/MA/Sederajat	59,26	61,39	74,73	76,54	77,41	93,38

Sumber: BPS Pangandaran; Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2025 APM di Kabupaten Pangandaran untuk jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat dan SMA/SMK/MA/Sederajat mengalami penurunan, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. APK Tahun 2025 untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat dan mengalami sedikit penurunan, sedangkan untuk jenjang SD/MI/Sederajat, SMA/SMK/MA/ Sederajat mengalami kenaikan.

Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar yang naik menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Pangandaran memiliki partisipasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan fasilitas dan layanan pendidikan di Kabupaten Pangandaran cukup memadai. Selain itu, dukungan dari pihak lain juga membantu masyarakat dalam meningkatkan minat pendidikan di

Kabupaten Pangandaran.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pemerintah kabupaten melakukan berbagai upaya dan berinovasi dalam mengembangkan kawasan wisata salah satunya dengan menarik wisatawan dengan memperkenalkan budaya yang ada. Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran yang strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, untuk meningkatkan kesegaran jasmani serta mengembangkan minat dan bakat masyarakat dalam bidang keolahragaan juga dikembangkan sektor olahraga di Kabupaten Pangandaran. Berikut merupakan capaian kinerja urusan kebudayaan dan olahraga di Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 40 Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Kebudayaan			
Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persentase	0	100
Persentase Warisan Budaya Yang Dilindungi	Persentase	20,24	34,52
Pemuda dan Olahraga			
Jumlah organisasi olahraga/klub olahraga	Organisasi/ Klub	4	4
Jumlah Klub Olahraga	Klub	146	146
Jumlah Gedung Olahraga	Unit	121	121
Jumlah atlet olahraga yang mengikuti pembinaan	Orang	200	N/A

Sumber: Disparbud Kabupaten Pangandaran; Disdikpora Kabupaten Pangandaran, 2026

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mengejar ketertinggalan, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pengurangan pengangguran sehingga dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan program pembangunan. Kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh institusi.

Aspek pelayanan umum terdiri dari beberapa kategori urusan, yakni 1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 2) Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 3) Urusan pilihan, 4) Unsur pendukung pemerintahan, dan 5) Unsur penunjang pemerintah. Aspek Pelayanan Umum yang berkaitan dengan Layanan urusan pemerintah wajib meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi, tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan.

Sementara aspek pelayanan umum urusan pilihan terdiri atas kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan ketransmigrasian. Sedangkan unsur penunjang terdiri atas, perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; serta penelitian dan pengembangan. Berikut merupakan penjelasan terkait urusan-urusan terkait aspek pelayanan umum serta data terkait.

Fokus Layanan Urusan Wajib

Pemerintah daerah wajib melakukan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar seperti yang tertera didalam UU nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Berikut penjabaran masing-masing urusan.

2.1.3.1 Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembangunan di bidang pendidikan diperlukan peran serta yang aktif, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat sehingga semua program peningkatan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan bidang pendidikan. Peran pendidikan sangatlah penting sehingga pembangunan di bidang pendidikan baik secara formal ataupun nonformal harus selalu ditingkatkan. Setidaknya terdapat tiga permasalahan pendidikan. Pertama yakni terkait pemerataan, baik pemerataan kualitas, pemerataan sarana maupun pemerataan guru (rasio guru yang cukup tetapi tidak merata). Kedua yakni kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait *how to have* (bagaimana memperoleh/rekrutmen) dan *how to empower* (bagaimana memberdayakan). Ketiga yakni terkait kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum merata

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting, sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal, namun juga meliputi pendidikan nonformal. Dalam pemenuhan pelayanan di bidang pendidikan, pemerintah Kabupaten Pangandaran didukung dan dikuatkan oleh masyarakat dan swasta secara signifikan. Berikut adalah data capaian kinerja urusan pendidikan Kabupaten Pangandaran tahun 2020- 2024.

Tabel 2. 41 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Siswa yang menggunakan bahasa ibu	Persentase	N/A	N/A

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
dengan benar			
Persentase kelulusan siswa	Persentase	100	100
Rasio jumlah guru dengan jumlah siswa pada tingkat Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio	0:0	1:16,54
Nilai Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,31	12,41
Iklim Keamanan SMP	Nilai	74,90	72,21
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	N/A	46,39
Iklim Keamanan SD	Nilai	78,85	77,43
Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	61,35	61,57
Iklim Inklusivitas SD	Nilai	62,0	63,32
Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	75,65	69,03
Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	76,95	68,75

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum penyelenggaraan pendidikan menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan. Hal ini tercermin dari persentase kelulusan siswa yang mampu dipertahankan pada angka 100 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran dan evaluasi pendidikan telah berjalan dengan baik sehingga seluruh peserta didik dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan dari 12,31 tahun pada tahun 2024 menjadi 12,41 tahun pada tahun 2025, yang mengindikasikan semakin besarnya peluang masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Pada aspek ketersediaan tenaga pendidik, rasio jumlah guru terhadap jumlah siswa pada tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan menunjukkan perbaikan pada tahun 2025 dengan rasio sebesar 1:16,54. Rasio tersebut menggambarkan bahwa secara umum satu orang guru melayani sekitar 16 hingga 17 peserta didik, sehingga proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan optimal. Selain itu, peningkatan kualitas satuan pendidikan juga terlihat dari capaian proporsi jumlah satuan PAUD yang memperoleh minimal akreditasi B yang mencapai 46,39 persen pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang menjadi fondasi penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang

berkualitas.

Dari sisi lingkungan belajar, indikator iklim keamanan dan inklusivitas sekolah menunjukkan kondisi yang relatif baik meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan. Nilai Iklim Keamanan Sekolah Dasar (SD) mengalami sedikit penurunan dari 78,85 menjadi 77,43, sedangkan Iklim Keamanan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurun dari 74,90 menjadi 72,21. Namun demikian, indikator Iklim Inklusivitas menunjukkan perbaikan, baik pada jenjang SD maupun SMP. Nilai Iklim Inklusivitas SD meningkat dari 62,00 menjadi 63,32, sedangkan Iklim Inklusivitas SMP meningkat dari 61,35 menjadi 61,57. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah semakin berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang terbuka, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik.

Sementara itu, indikator iklim kebhinekaan pada jenjang SD dan SMP mengalami penurunan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai Iklim Kebhinekaan SD menurun dari 75,65 menjadi 69,03, sedangkan Iklim Kebhinekaan SMP menurun dari 76,95 menjadi 68,75. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk terus memperkuat pendidikan karakter, toleransi, serta nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sekolah.

2.1.3.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Beberapa hal dapat dilakukan untuk meningkatkan gerakan hidup sehat antara lain dengan menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai, mengimbau masyarakat untuk patuh menjalankan protokol kesehatan dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah.

Kualitas kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita, dan lain-lain. Pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan menetapkan enam pilar transformasi sistem kesehatan. Yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1. Transformasi layanan primer;
- 2. Transformasi layanan rujukan;
- 3. Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
- 4. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan;
- 5. Transformasi SDM kesehatan;
- 6. Transformasi teknologi kesehatan.

Peningkatan derajat kesehatan akan memberikan dampak positif terkait kemajuan kesehatan di Kabupaten Pangandaran. Realisasi kinerja Kabupaten Pangandaran di bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 42 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi
-----------	--------	-----------

		2024	2025
Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Persentase	N/A	N/A
Persentase Sumber Daya Manusia kesehatan yang meningkat kapasitasnya	Persentase	N/A	N/A
Persentase Izin Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang tertangani	Persentase	N/A	N/A
Persentase penerapan PHBS	Persentase	N/A	N/A
Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persentase	100	N/A
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase	93,81	N/A
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase	95,68	N/A
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	97,40	N/A
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase	100	N/A
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persentase	70,87	N/A
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	98,98	N/A
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase	96,97	N/A
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	Persentase	100	N/A
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persentase	85,95	N/A
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persentase	0,52	N/A
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase	92,19	N/A
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persentase	96,13	N/A
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persentase	100	N/A
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase	100	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari tingginya capaian berbagai indikator pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan yang sebagian besar telah mencapai angka di atas 90 persen. Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta optimalisasi program promotif dan preventif. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pada aspek pelayanan kesehatan masyarakat, sejumlah indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar telah mencapai 100 persen, demikian pula persentase warga yang berisiko terinfeksi HIV yang memperoleh pelayanan deteksi dini sesuai standar juga mencapai 100 persen. Selain itu,

persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar telah mencapai 100 persen, sedangkan persentase anak usia pendidikan dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 98,98 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan preventif dan deteksi dini terhadap berbagai penyakit, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan.

Dari sisi pelayanan kesehatan ibu dan anak, Kabupaten Pangandaran juga menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai 92,19 persen, sementara persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan mencapai 96,13 persen. Di samping itu, persentase bayi baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan bayi baru lahir tercatat sebesar 95,68 persen dan cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar mencapai 85,95 persen. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan kesehatan maternal dan neonatal terus diperkuat guna menurunkan risiko kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi masa depan.

Selain pelayanan kesehatan dasar, kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan rujukan juga menunjukkan hasil yang baik. Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi telah mencapai 100 persen, yang mengindikasikan bahwa fasilitas kesehatan rujukan telah memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan. Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa atau kelurahan yang sesuai standar juga mencapai 100 persen pada tahun 2024, sehingga dapat mendukung pemerataan akses pelayanan kesehatan hingga tingkat paling bawah. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan, memperluas cakupan pelayanan kesehatan esensial, serta memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) agar derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

2.1.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari beberapa aspek di antaranya jalan, drainase, saluran irigasi dan jumlah tempat ibadah. Indikator pada informasi penataan ruang adalah persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

Tabel 2. 43 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persentase	0	79
Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi baik	Persentase	0	0
Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase,04	0	0
Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	Persentase	45	48

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase	0	80
Persentase terbangunnya sarana persampahan	Persentase	0	0
Persentase Bangunan Gedung Sesuai Regulasi	Persentase	0	0
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persentase	60,0	65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum pembangunan infrastruktur dasar dan penataan ruang menunjukkan perkembangan yang cukup positif pada beberapa indikator strategis, meskipun masih terdapat sejumlah indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Hal ini tercermin dari meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, membaiknya kondisi infrastruktur jalan dan jaringan irigasi, serta meningkatnya tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berbagai capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, beberapa aspek seperti pengelolaan drainase, persampahan, bangunan gedung, dan pengawasan jasa konstruksi masih perlu ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan secara lebih optimal dan terpadu.

Pada aspek penyediaan air minum, capaian yang cukup signifikan terlihat pada indikator akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Jika pada tahun 2024 capaian indikator ini masih berada pada angka 0 persen, maka pada tahun 2025 meningkat menjadi 79 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya percepatan pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum yang aman dan layak. Ketersediaan akses air minum perpipaan menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat karena berhubungan langsung dengan kesehatan, sanitasi, dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, upaya perluasan jaringan perpipaan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum perlu terus dilakukan agar cakupan layanan dapat menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan.

Pada bidang infrastruktur transportasi dan sumber daya air, kondisi yang cukup baik ditunjukkan oleh meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dan membaiknya kondisi jaringan irigasi. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap meningkat dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 80 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan kemantapan jaringan jalan sebagai sarana pendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Selain itu, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik juga meningkat dari 60 persen menjadi 65 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi guna mendukung produktivitas

sektor pertanian serta menjaga ketahanan pangan daerah. Di sisi lain, persentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga mengalami peningkatan dari 45 persen menjadi 48 persen, yang mengindikasikan semakin baiknya kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum menunjukkan perkembangan yang optimal. Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi baik, persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, persentase terbangunnya sarana persampahan, serta persentase bangunan gedung yang sesuai regulasi masih tercatat sebesar 0 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan infrastruktur lingkungan dan penataan bangunan yang sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif melalui peningkatan perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

2.1.3.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011), sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat (Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011). Sedangkan, Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan, minimal bangunan dan kesehatan penghuni (Peraturan Menteri PU No.2/PRT/M/2017). Berikut merupakan capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Pangandaran:

Tabel 2. 44 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (persen)	Persentase	0	0
Persentase rumah korban bencana yang ditangani	Persentase	0	35
Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang ditangani	Persentase	0	0
Persentase Satuan	Persentase	0	0

Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum			
--	--	--	--

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum masih terdapat beberapa indikator yang belum menunjukkan capaian optimal. Hal ini terlihat dari sebagian besar indikator yang masih berada pada angka 0 persen, sehingga menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaan program dan kegiatan. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas hunian dan kawasan permukiman secara bertahap melalui berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, sektor perumahan dan kawasan permukiman diharapkan dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan mengingat perannya yang sangat penting dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Pada aspek penyediaan hunian, indikator rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan masih menunjukkan capaian sebesar 0 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengukuran atau pelaksanaan program yang mendukung pencapaian indikator ini masih perlu diperkuat, baik melalui penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, maupun pengembangan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Ketersediaan hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas hidup, kesehatan, serta produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mendorong sinergi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan berkelanjutan.

Di sisi lain, indikator persentase rumah korban bencana yang ditangani menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Pada tahun 2024 belum terdapat capaian penanganan rumah korban bencana, namun pada tahun 2025 indikator tersebut meningkat menjadi 35 persen. Capaian ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana melalui perbaikan maupun pembangunan kembali rumah yang mengalami kerusakan. Mengingat Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang memiliki potensi risiko bencana, peningkatan kapasitas penanganan rumah korban bencana menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat pascabencana.

Sementara itu, indikator persentase luasan kawasan permukiman yang ditangani serta persentase satuan perumahan yang telah dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) masih menunjukkan capaian sebesar 0 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penataan kawasan permukiman dan penyediaan infrastruktur pendukung permukiman masih perlu ditingkatkan secara lebih terencana dan terintegrasi. Penyediaan PSU yang memadai, seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka, merupakan faktor penting dalam menciptakan kawasan permukiman yang sehat dan nyaman.

2.1.3.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan, Perlindungan Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketertiban Umum

dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu hal yang wajib diutamakan guna terciptanya ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat serta menumbuhkan masyarakat yang tangguh dan tanggap dalam menghadapi bencana. Sedangkan perlindungan masyarakat yakni suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya.

Berikut adalah hasil capaian kinerja pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Pangandaran tahun 2030-2024:

Tabel 2. 45 Hasil Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,70	0,69
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persentase	0	100
Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan	Persentase	0	100
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	0	16,00
Response Time Rate	Persentase	0	64,51

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya capaian pada beberapa indikator strategis, terutama pada aspek penanganan tanggap darurat bencana dan penyelesaian pelanggaran ketertiban umum yang telah mencapai target

maksimal pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Dengan kondisi yang aman dan tertib, diharapkan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi secara lebih nyaman dan produktif.

Pada aspek ketahanan daerah, Indeks Ketahanan Daerah menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Nilai indeks pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,70 dan sedikit menurun menjadi 0,69 pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan yang tidak signifikan, capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran masih memiliki tingkat ketahanan daerah yang cukup baik dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan keamanan, ketenteraman masyarakat, maupun potensi bencana. Indeks ketahanan daerah menjadi indikator penting karena menggambarkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, serta pemulihan terhadap berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas wilayah.

Pada bidang penanggulangan bencana, capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Persentase penanganan tanggap darurat bencana meningkat secara signifikan dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 100 persen pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kejadian bencana yang terjadi telah mendapatkan penanganan secara cepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana juga mulai menunjukkan perkembangan dengan capaian sebesar 16 persen pada tahun 2025. Meskipun masih relatif rendah, capaian tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana melalui penyebaran informasi, sosialisasi, dan edukasi kebencanaan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada aspek penegakan ketertiban umum, tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman, dan keindahan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 100 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran yang teridentifikasi telah dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, indikator *Response Time Rate* juga mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 64,51 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menggambarkan kemampuan pemerintah daerah, khususnya perangkat yang menangani ketenteraman dan perlindungan masyarakat, dalam merespons berbagai kejadian secara cepat dan tepat.

2.1.3.6 Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang disabilitas, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Untuk mengurangi angka penyandang disabilitas, maka diperlukan kerja sama dari pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan sosial Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 46 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	Persentase	15	15
Persentase meningkatnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase	100	90
Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	Persentase	100	100
Persentase Taman Makam Makam Pahlawan yang dikelola	Persentase	100	100
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase	100	90

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini tercermin dari tingginya capaian pada beberapa indikator utama, terutama yang berkaitan dengan penanganan korban bencana, pengelolaan Taman Makam Pahlawan, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berbagai capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial di tengah berbagai tantangan pembangunan. Melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat yang rentan dapat memperoleh perlindungan dan kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat miskin, persentase keluarga miskin yang meningkat kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik tercatat sebesar 15 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan telah mampu mendorong sebagian keluarga miskin untuk meningkatkan kondisi sosial ekonominya, meskipun persentasenya masih perlu terus ditingkatkan. Berbagai program seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta pendampingan keluarga miskin menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk keluar dari kondisi kerentanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dari sisi penguatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), capaian indikator menunjukkan kondisi yang masih sangat baik meskipun mengalami sedikit penurunan. Persentase meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencapai 100 persen pada tahun 2024

dan menurun menjadi 90 persen pada tahun 2025. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap menunjukkan bahwa peran berbagai unsur masyarakat, seperti relawan sosial, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi sosial, dan komunitas masyarakat masih sangat besar dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pangandaran. Di sisi lain, persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial juga mengalami penurunan dari 100 persen menjadi 90 persen. Kondisi ini menjadi perhatian penting agar pemerintah daerah terus meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sosial sehingga seluruh kelompok rentan dapat memperoleh layanan yang optimal.

Sementara itu, pada aspek perlindungan sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai perjuangan bangsa, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase penanganan korban bencana yang kebutuhan dasarnya terpenuhi sehingga mampu bertahan hidup mencapai 100 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu memberikan respons yang cepat dan tepat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, seperti pangan, sandang, tempat tinggal sementara, dan pelayanan sosial lainnya. Selain itu, persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola juga mencapai 100 persen pada kedua tahun tersebut, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan situs penghormatan kepada para pahlawan.

Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

Fokus layanan urusan wajib nondasar mencakup: usaha kecil mikro dan menengah, tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; pemberdayaan masyarakat dan desa; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi dan UMKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan, yang disajikan sebagai berikut.

2.1.3.7 Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai, atau sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Lalu yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan agar menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk dapat menjalankan urusan pemerintah daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan serapan dan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.

Berkaitan dengan tenaga kerja dapat disajikan data hasil kinerja bidang urusan tenaga kerja pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 47 Hasil Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi
-----------	--------	-----------

		2024	2025
Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	276,503	274.481
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	80,12	79,13
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,58	1,91
Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	Persentase	90	90
Persentase peserta pelatihan yang kompeten	Persentase	70	40
Persentase Tenaga Kerja yang diserap	Persentase	70	75

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, kondisi ketenagakerjaan secara umum masih menunjukkan performa yang cukup baik meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja yang berada di atas 79 persen pada kedua tahun tersebut. Tingginya partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja memiliki keterlibatan aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Kondisi ini menjadi modal penting bagi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas.

Pada tahun 2024 jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 276.503 orang, kemudian sedikit menurun menjadi 274.481 orang pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan tipis dari 80,12 persen menjadi 79,13 persen. Meskipun mengalami penurunan, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia kerja di Kabupaten Pangandaran tetap aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan dari 1,58 persen pada tahun 2024 menjadi 1,91 persen pada tahun 2025. Meskipun angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional, peningkatan TPT perlu menjadi perhatian agar tidak berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk yang belum memperoleh pekerjaan.

Pada aspek hubungan industrial, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini tercermin dari persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani yang tetap berada pada angka 90 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku sehingga mampu menjaga iklim hubungan industrial yang kondusif. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus dilakukan melalui berbagai program pelatihan kerja. Akan tetapi, persentase peserta pelatihan yang dinyatakan kompeten mengalami penurunan dari 70 persen pada tahun 2024 menjadi 40 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap kualitas pelatihan, kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, serta peningkatan efektivitas metode pelatihan agar hasil yang dicapai lebih optimal.

Di sisi lain, indikator penyerapan tenaga kerja menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase tenaga kerja yang berhasil diserap meningkat dari 70 persen pada tahun 2024 menjadi 75 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Pangandaran masih memiliki

kemampuan yang cukup baik dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Capaian tersebut juga mengindikasikan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi dan peluang usaha yang mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus memperkuat program pelatihan berbasis kebutuhan industri, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat dan mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis.

2.1.3.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan usaha dalam mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Kedudukan perempuan akan membaik jika ketika perempuan dapat mandiri serta mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Dalam penyelenggaraan perlindungan anak berbagai pihak seperti negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab didalamnya”.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mengupayakan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Berikut adalah hasil capaian kinerja urusan pemberdayaan dan perlindungan anak Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2025.

Tabel 2. 48 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Capaian	
		2024	2025
Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	Persentase	0	100
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase	100	100
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100
Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	696,71	695,95
Nilai Penghargaan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	0	N/A

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum penyelenggaraan urusan ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama dalam aspek perlindungan perempuan dan anak serta penguatan sistem data gender dan anak. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai

bentuk kekerasan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dengan menempatkan perempuan dan anak sebagai subjek utama pembangunan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas jangkauan program kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pada aspek pengelolaan data gender dan anak, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Persentase sistem data gender dan anak yang terkelola dan valid meningkat dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 100 persen pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil membangun dan mengelola sistem data yang lebih baik sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang responsif gender dan berpihak pada kepentingan anak. Ketersediaan data yang akurat dan valid menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Pada aspek perlindungan perempuan dan anak, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif mencapai 100 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Demikian pula, persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang memperoleh layanan komprehensif juga tetap berada pada angka 100 persen pada kedua tahun tersebut. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu memberikan layanan perlindungan secara optimal, mulai dari pengaduan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi sosial bagi korban. Keberhasilan tersebut menjadi indikator penting bahwa sistem perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan baik dan memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok yang rentan.

Sementara itu, nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) menunjukkan kondisi yang relatif stabil meskipun mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 696,71 pada tahun 2024 menjadi 695,95 pada tahun 2025. Penurunan yang relatif kecil tersebut menunjukkan bahwa secara umum komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak masih terjaga dengan baik, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan. Di sisi lain, nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah belum tersedia pada tahun 2025 setelah pada tahun 2024 tercatat sebesar 0. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperluas partisipasi masyarakat agar kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pangandaran dapat semakin meningkat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

2.1.3.9 Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pangan Pasal 1 menjelaskan definisi ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ketahanan pangan sendiri adalah kondisi tersedianya pangan oleh negara untuk rakyatnya, tersedianya pangan yang cukup baik disertai dengan jumlah maupun mutunya, keamanan, keanekaragaman, gizi yang cukup, pemerataan, dan harga yang terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Manusia membutuhkan energi untuk hidup dan melakukan aktivitas

sehari-hari. Asupan energi harus mengandung karbohidrat, lemak dan protein untuk digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Energi yang diserap dari asupan makanan harus sesuai dengan porsi yang dibutuhkan untuk asupan energi penuh. Pada urusan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman bergam, bergizi dan imbang namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut merupakan hasil kinerja bidang urusan pangan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2020-2024

Tabel 2. 49 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Capaian	
		2025	2025
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	94,93	95,40
Jumlah Desa Yang Memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Desa	Desa	0	0
Persentase desa rentan rawan pangan	Persentase	0	0
Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase	89,60	85

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum kondisi ketahanan pangan daerah menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi yang menggambarkan semakin beragam, bergizi, seimbang, dan aman pola konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, tidak terdapat desa yang tergolong rentan rawan pangan selama periode pengamatan, yang menunjukkan bahwa ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan relatif terjaga. Berbagai capaian tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, diversifikasi konsumsi pangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pada aspek kualitas konsumsi pangan masyarakat, skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi mengalami peningkatan dari 94,93 pada tahun 2024 menjadi 95,40 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Pangandaran semakin mendekati pola konsumsi ideal yang ditandai dengan keseimbangan asupan berbagai kelompok pangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat tidak hanya mengandalkan satu jenis pangan pokok, tetapi mulai mengonsumsi pangan yang lebih beragam dan bernilai gizi tinggi. Capaian ini juga mencerminkan keberhasilan berbagai program edukasi dan sosialisasi mengenai konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dari sisi kerawanan pangan, Kabupaten Pangandaran menunjukkan kondisi yang cukup baik. Persentase desa rentan rawan pangan tercatat sebesar 0 persen pada tahun 2024 maupun tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa

tidak terdapat desa yang masuk kategori rentan rawan pangan, sehingga secara umum akses masyarakat terhadap pangan berada dalam kondisi yang relatif aman dan terkendali. Namun demikian, indikator jumlah desa yang memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Desa juga masih tercatat sebesar 0 desa pada kedua tahun tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem cadangan pangan di tingkat desa masih perlu diperkuat sebagai salah satu instrumen penting untuk mengantisipasi potensi gangguan ketersediaan pangan akibat bencana, perubahan iklim, maupun gejolak ekonomi yang dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pangan.

Sementara itu, pada aspek keamanan pangan, persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 89,60 persen pada tahun 2024 menjadi 85 persen pada tahun 2025. Meskipun demikian, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian besar produk pangan segar asal tumbuhan yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan pengawasan, pembinaan kepada pelaku usaha pangan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan.

2.1.3.10 Pertanahan

Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang kepada pemiliknya dalam menggunakan maupun memanfaatkan tanah yang dimilikinya. Kewenangan dalam hak atas tanah dijelaskan menurut regulasi UU Pokok Agraria Pasal 4 ayat 2 yaitu menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan langsung dengan tanah itu dalam batas-batas menurut UU ini dan regulasi yang berlaku.

Menurut pasal 33 (1) UUD 1945 dikatakan bahwa, “Bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara”. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat berhak menguasai kekayaan alam tersebut sebagaimana tercantum dalam UUPA Pasal 1 ayat (2) yang memberi wewenang kepada negara untuk: mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penataan wilayah dan ruang melalui pembuatan peraturan tentang tata ruang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk. Konflik-konflik yang sering muncul pada urusan pertanahan di Kabupaten Pangandaran adalah berupa konflik perbatasan antar kecamatan, desa maupun antar penduduk, serta dengan *stakeholders* lain seperti pengusaha pertambangan dan perkebunan. Berikut merupakan tabel hasil capaian kinerja urusan pertanahan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 2. 50 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah	Persentase	100	0
Persentase sengketa tanah yang terselesaikan	Persentase	100	10
Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100	8,33

Sumber: BPN Kabupaten Pangandaran, 2024

Pada aspek redistribusi tanah, capaian pelaksanaan pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan persentase mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh target redistribusi tanah yang direncanakan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pada tahun 2025 capaian indikator ini tercatat sebesar 0 persen. Dikarenakan program tersebut belum dilaksanakan.

Pada indikator penyelesaian sengketa tanah, persentase sengketa tanah yang berhasil diselesaikan mengalami penurunan dari 100 persen pada tahun 2024 menjadi 10 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan aspek administratif, hukum, maupun kompleksitas permasalahan yang terjadi di lapangan. Sengketa pertanahan merupakan isu yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui koordinasi antara pemerintah daerah, instansi pertanahan, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Oleh karena itu, penguatan mekanisme mediasi, peningkatan kualitas data pertanahan, dan percepatan penyelesaian kasus menjadi langkah penting yang perlu terus dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga stabilitas sosial di masyarakat.

Sementara itu, indikator cakupan penggunaan tanah dalam satu daerah kabupaten/kota juga mengalami penurunan dari 100 persen pada tahun 2024 menjadi 8,33 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengendalian penggunaan tanah masih memerlukan perhatian yang lebih serius agar pemanfaatan lahan dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan yang berlaku. Penggunaan tanah yang tertata dengan baik akan memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang, mencegah terjadinya konflik pemanfaatan lahan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.3.11 Lingkungan Hidup

Sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintahan. Pengelolaan sumber daya alam memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya sumber daya alam yang dapat diperbarui, menghemat, dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui serta mencari substitusi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berikut ini dapat disajikan realisasi dari kinerja di Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan mutu lingkungan hidup:

Tabel 2. 51 Hasil Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	58,99	77,7
Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikelola	Persentase	0	0
Persentase Jumlah kegiatan dan/atau usaha dilakukan pengawasan yang memiliki izin lingkungan Perlindungan dan	Persentase	72,0	20

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundangundangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah			
Persentase kasus lingkungan hidup yang ditangani oleh pemda	Persentase	100	100
Persentase Program Penghargaan yang diikuti	Persentase	0	0
Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Persentase	30,10	53,33
Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	Persentase	0,80	2,87

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terutama pada aspek kualitas lingkungan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, capaian mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 58,99 pada tahun 2024 menjadi 77,7 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Pangandaran semakin membaik, baik dari aspek kualitas air, kualitas udara, maupun tutupan lahan dan pengelolaan lingkungan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu juga meningkat dari 30,10 persen pada tahun 2024 menjadi 53,33 persen pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan pemerintah daerah mulai memberikan hasil yang positif. Kondisi lingkungan yang semakin baik diharapkan dapat mendukung kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian sumber daya alam, serta meningkatkan daya tarik daerah sebagai kawasan wisata dan investasi.

Pada aspek penanganan dan pengawasan lingkungan hidup, pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan. Hal ini tercermin dari persentase kasus lingkungan hidup yang ditangani oleh pemerintah daerah yang tetap mencapai 100 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Namun demikian, persentase jumlah kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan pengawasan dan memiliki izin lingkungan mengalami penurunan dari 72 persen pada tahun 2024 menjadi 20 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut perlu menjadi perhatian karena pengawasan terhadap kegiatan usaha merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, serta optimalisasi sistem perizinan lingkungan perlu terus dilakukan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, pada aspek pengelolaan sumber daya lingkungan, persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola mengalami peningkatan dari 0,80 persen pada tahun 2024 menjadi 2,87 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas dan mengelola taman maupun hutan kota sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Di sisi lain, persentase limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dikelola serta persentase program penghargaan lingkungan yang diikuti masih tercatat sebesar 0 persen pada kedua tahun tersebut. Kondisi

ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih intensif dalam pengelolaan limbah B3 serta peningkatan partisipasi dalam berbagai program penghargaan lingkungan sebagai bentuk penguatan tata kelola lingkungan hidup.

2.1.3.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaturan serta pengelolaan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan suatu hal penting dalam kehidupan masyarakat sebagai data pendukung dalam penentuan prioritas sasaran program pembangunan di Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pangandaran tahun 202-2024:

Tabel 2. 52 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase	100	100
Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	Persentase	100	100
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	Persentase	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum penyelenggaraan administrasi kependudukan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya seluruh indikator utama pada angka 100 persen selama dua tahun berturut-turut. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah diakses, berkualitas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa sistem administrasi kependudukan di Kabupaten Pangandaran telah berjalan secara efektif dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang lebih baik.

Pada aspek pencatatan sipil, persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil mencapai 100 persen pada tahun 2024 maupun tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil, seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, maupun dokumen pencatatan sipil lainnya, telah memperoleh layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingginya tingkat kepemilikan dokumen pencatatan sipil memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas status peristiwa penting yang dialaminya serta menjadi dasar dalam memperoleh berbagai layanan publik. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan sebagai bagian dari hak dasar warga negara.

Selain itu, pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah juga telah berjalan dengan sangat baik. Persentase jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama mencapai 100 persen pada tahun 2024 maupun 2025.

Capaian ini menunjukkan bahwa data kependudukan telah menjadi basis utama dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta penyelenggaraan berbagai layanan publik di Kabupaten Pangandaran. Pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi tidak hanya meningkatkan akurasi sasaran program pemerintah, tetapi juga mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sementara itu, pada aspek identitas kependudukan, persentase kepemilikan identitas kependudukan juga mencapai 100 persen pada kedua tahun pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh penduduk yang wajib memiliki identitas kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) maupun Kartu Identitas Anak (KIA), telah memperoleh dokumen identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut merupakan indikator penting dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta menjamin akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan layanan pemerintahan lainnya.

2.1.3.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah kabupaten dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Upaya pemberdayaan masyarakat adalah salah satu indikator dalam menentukan kemandirian sumber daya manusia (SDM) di suatu daerah. Pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan upaya membendung arus urbanisasi ke kota, karena suatu daerah mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, maka suatu daerah berhasil dalam melakukan proses pembangunan. Berikut merupakan hasil kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 53 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase penataan desa	Persentase	0	0
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Persentase	100	100
Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase	0	0
Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	Persentase	65	65

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan

capaian yang beragam pada masing-masing indikator. Beberapa indikator telah menunjukkan hasil yang sangat baik, terutama yang berkaitan dengan keaktifan lembaga kemasyarakatan desa, sedangkan indikator lainnya masih memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut. Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan strategis yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan penguatan kelembagaan masyarakat menjadi aspek yang perlu terus dioptimalkan untuk mendukung pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Pada indikator penataan desa dan indikator peningkatan kerja sama desa masih menunjukkan capaian sebesar 0 persen pada tahun 2024 maupun tahun 2025. Dikarenakan program tersebut tidak dianggarkan pada tahun 2025.

Di sisi lain, indikator persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu sebesar 100 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh lembaga kemasyarakatan desa, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan lembaga lainnya, telah menjalankan fungsi dan perannya secara aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Keberadaan lembaga kemasyarakatan yang aktif menjadi modal sosial yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat gotong royong, serta mendorong keberhasilan berbagai program pembangunan di tingkat desa.

Sementara itu, pada aspek tata kelola pemerintahan desa, persentase administrasi desa yang baik dan tertib tercatat sebesar 65 persen pada tahun 2024 dan tetap berada pada angka yang sama pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar desa telah mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan secara tertib, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi di sejumlah desa lainnya. Administrasi desa yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.3.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk berfokus kepada edukasi masyarakat terkait jumlah anggota keluarga yang akan ditanggung di masa depan. Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat ditekan. Selain itu Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing.

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diamanahkan berdasarkan regulasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Berikut merupakan data hasil kinerja bidang urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada 5 tahun terakhir yaitu mulai tahun 2021 hingga tahun 2025 yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 54 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga BerencanaKabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025			
Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase	N/A	5,10
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun	Poin	N/A	20,00
Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	N/A	40,37

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2026

Pada indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,10 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian pasangan usia subur yang memiliki kebutuhan untuk menggunakan alat atau metode kontrasepsi, namun belum mendapatkan akses atau belum memanfaatkan layanan keluarga berencana yang tersedia. Nilai *unmet need* yang relatif rendah mencerminkan bahwa pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Pangandaran telah menjangkau sebagian besar masyarakat, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan aksesibilitas, edukasi, dan kualitas layanan agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Adapun data tahun 2024 untuk indikator ini belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan analisis tren secara komprehensif.

Pada indikator Angka Kelahiran Remaja umur 15–19 tahun, pada tahun 2025 tercatat sebesar 20,00 poin. Indikator ini menggambarkan tingkat kelahiran pada kelompok usia remaja yang menjadi salah satu perhatian penting dalam pembangunan kependudukan karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kualitas pendidikan, serta kesejahteraan keluarga di masa depan. Angka kelahiran remaja yang masih terjadi menunjukkan perlunya penguatan edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan pemahaman mengenai perencanaan kehidupan berkeluarga, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan pendampingan kepada remaja. Sementara itu, data capaian tahun 2024 belum tersedia sehingga evaluasi perkembangan indikator ini masih memerlukan data pendukung pada periode berikutnya.

Selanjutnya, pada indikator persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga, pada tahun 2025 tercatat sebesar 40,37 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari jumlah keluarga di Kabupaten Pangandaran telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, seperti pembinaan keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia, maupun kegiatan pemberdayaan keluarga lainnya. Partisipasi keluarga dalam kelompok kegiatan ketahanan keluarga merupakan modal penting dalam membangun keluarga yang tangguh, harmonis, dan adaptif terhadap berbagai tantangan sosial maupun ekonomi.

2.1.3.15 Perhubungan

Perhubungan merupakan hal yang penting dalam hal yang berkaitan tentang arus mobilisasi antar satu ke lainnya. Peran perhubungan sendiri tidak jauh dari hal distribusi barang maupun jasa pada kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut dapat mendorong, maupun menunjang pada segala aspek kehidupan bermasyarakat dengan suatu tujuan seperti halnya pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Adapun data hasil kinerja bidang

urusan perhubungan pemerintah Kabupaten Pangandaran pada 5 tahun terakhir ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 55 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Fasilitas Pelayaran Angkutan Sungai, Danau, dan Pelabuhan yang Layak Fungsi	Persentase	0	0
Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	39,00	33,68

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, penyelenggaraan sektor perhubungan masih memerlukan perhatian dan penguatan pada beberapa aspek pelayanan infrastruktur transportasi. Urusan perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peningkatan konektivitas antarwilayah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai serta memenuhi standar keselamatan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi. Capaian indikator pada periode ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas transportasi di Kabupaten Pangandaran.

Pada aspek transportasi sungai, danau, serta pelabuhan, persentase fasilitas pelayaran angkutan sungai, danau, dan pelabuhan yang layak fungsi masih tercatat sebesar 0 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Dikarenakan program baru yang masih belum teranggarkan di tahun tersebut.

Sementara itu, pada aspek keselamatan dan kelengkapan jalan, persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota mengalami penurunan dari 39,00 persen pada tahun 2024 menjadi 33,68 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan perlengkapan jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, pagar pengaman, dan fasilitas keselamatan lainnya, masih belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Keberadaan perlengkapan jalan yang memadai memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi risiko kecelakaan, serta menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, peningkatan investasi dan pengalokasian anggaran untuk penyediaan perlengkapan jalan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan sektor perhubungan di masa mendatang.

2.1.3.16 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informasi menjadi suatu hal yang sangat penting saat ini. Oleh karena itu urusan komunikasi dan informasi merupakan urusan yang sangat penting dalam proses kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran. Berikut adalah capaian urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Pangandaran tahun 2020-2025.

Tabel 2. 56 Hasil Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase tata kelola layanan informasi publik	Persentase	60	93,88

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2026

Pada tahun 2024, persentase tata kelola layanan informasi publik tercatat sebesar 60 persen, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 93,88 persen pada tahun 2025. Peningkatan sebesar 33,88 poin persentase tersebut menunjukkan adanya perbaikan yang cukup besar dalam aspek pengelolaan informasi publik, baik dari sisi kelembagaan, ketersediaan informasi, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Capaian ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, peningkatan tersebut juga mencerminkan semakin baiknya implementasi prinsip keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peningkatan tata kelola layanan informasi publik tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah, seperti penguatan kapasitas aparatur pengelola informasi, pengembangan sistem informasi berbasis elektronik, serta peningkatan kualitas pelayanan melalui media digital. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai informasi mengenai kebijakan, program, maupun pelayanan pemerintah daerah.

2.1.3.17 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Usaha kecil dan menengah akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi. Untuk menguatkan perekonomian daerah, maka perlu dilakukan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penguatan UMKM merupakan salah satu faktor penggerak pembangunan ekonomi daerah agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Berikut adalah capaian urusan koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2025.

Tabel 2. 57 Hasil Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Sumber Daya Manusia pengelola koperasi yang bersertifikat	Persentase	2,94	5
Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	Persentase	14,56	5,78
Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Persentase	0,10	0,1
Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah	Persentase	50,60	69,23
Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Persentase	24	45,07

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum terdapat perkembangan yang positif dalam upaya penguatan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro. Hal ini tercermin dari meningkatnya beberapa indikator yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pengawasan koperasi, serta pertumbuhan wirausaha baru. Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menciptakan ekosistem usaha yang kondusif melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan tata kelola koperasi, dan pengembangan kewirausahaan masyarakat. Dengan demikian, sektor koperasi dan usaha mikro diharapkan mampu menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada aspek penguatan kelembagaan koperasi, kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Persentase sumber daya manusia pengelola koperasi yang memiliki sertifikat meningkat dari 2,94 persen pada tahun 2024 menjadi 5 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola koperasi melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Selain itu, persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah juga meningkat dari 50,60 persen menjadi 69,23 persen, yang mengindikasikan semakin kuatnya fungsi pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan koperasi yang sehat, akuntabel, dan berdaya saing.

Di sisi lain, indikator pertumbuhan volume usaha koperasi menunjukkan adanya perlambatan. Persentase pertumbuhan volume usaha yang pada tahun 2024 mencapai 14,56 persen, menurun menjadi 5,78 persen pada tahun 2025. Sementara itu, persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan omzet relatif stagnan pada angka 0,10 persen pada kedua tahun pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aspek kelembagaan dan tata kelola mengalami perbaikan, masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan pasar, persaingan usaha, serta dinamika perekonomian yang terus berkembang.

Meskipun demikian, perkembangan kewirausahaan masyarakat menunjukkan tren yang sangat positif. Persentase pertumbuhan wirausaha baru meningkat secara signifikan dari 24 persen pada tahun 2024 menjadi 45,07 persen pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan semakin tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan usaha baru serta meningkatnya efektivitas program pemerintah dalam mendorong lahirnya pelaku usaha yang mandiri dan inovatif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat dukungan terhadap koperasi dan usaha mikro melalui peningkatan akses pembiayaan, pengembangan kapasitas usaha, digitalisasi, serta perluasan akses pasar agar sektor koperasi dan UMKM mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

2.1.3.18 Penanaman Modal

Di era globalisasi seperti saat ini, persaingan dunia usaha semakin ketat. Agar dapat bertahan maka setiap daerah mulai berlomba-lomba untuk mengembangkan wilayahnya. Pengembangan yang diupayakan dimaksudkan untuk menarik investor agar masuk ke daerahnya, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Berbagai upaya dilakukan seperti memanfaatkan kekayaan alam, menaikkan retribusi daerah dan ada juga yang memudahkan perizinan bagi investor untuk menanamkan modal di daerah tersebut. Realisasi

kinerja Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangandaran tersajikan dalam data sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Capaian	
		2024	2025
Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Persentase	1	N/A
Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase	0	N/A
Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase	2	N/A
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase	100	N/A
Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	1,53	N/A

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada 2024, jumlah realisasi investasi (PMA dan PMDN) mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, nilai investasi masih berada dalam kisaran tinggi, menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran tetap menjadi daerah yang menarik bagi investor. Penurunan ini terjadi seiring dengan berkurangnya jumlah investor PMDN dibandingkan 2023, meskipun nilai investasi yang masuk masih cukup signifikan. Keberlanjutan investasi ini mencerminkan bahwa Pangandaran tetap memiliki daya tarik sebagai lokasi usaha, terutama di sektor pariwisata yang terus berkembang dan menarik minat baik dari investor dalam negeri maupun asing.

2.1.3.19 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran yang strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Dalam berbagai aspek pembangunan, pemuda memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional maupun lokal. Peranan pemuda sebagai aset untuk percepatan pembangunan, sangat tergantung pada kualitas sumber daya pemuda.

Pengoptimalan peran pemuda di Kabupaten Pangandaran memiliki peran penting dalam pembangunan daerah baik dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan, keamanan maupun sosial budaya. Pemberdayaan pemuda dapat dilakukan melalui organisasi sosial kepemudaan seperti karang taruna maupun Non-Government Organization (NGO) pemuda yang bergerak di berbagai bidang. Selain itu, untuk meningkatkan kesegaran jasmani serta mengembangkan minat dan bakat masyarakat dalam bidang keolahragaan juga dikembangkan sektor olahraga di Kabupaten Pangandaran.

Selain itu, permasalahan pembangunan pada generasi muda saat ini adalah memiliki tubuh yang sehat, kuat dan berdaya saing. Oleh karena itu, jika pemuda tersebut memiliki hati jiwa dan raga yang sehat, maka dapat mengerahkan daya tahan tubuh yang kuat pula untuk mengatisipasi berbagai penyakit. Berikut merupakan capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 59 Hasil Capaian Kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran

Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi	Angka	22.409	N/A
Jumlah atlet olahraga yang mengikuti pembinaan	Orang	200	N/A
Jumlah pemuda yang aktif dalam kepramukaan	Angka	44.792	N/A
Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Persentase	N/A	4,9
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Persentase	N/A	30,2
Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persentase	N/A	22,56

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Olahraga Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum pembangunan kepemudaan dan olahraga menunjukkan capaian yang cukup baik, khususnya dalam mendorong partisipasi pemuda pada berbagai kegiatan organisasi, kepramukaan, dan sosial kemasyarakatan. Urusan olahraga tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi atlet, tetapi juga diarahkan untuk membentuk generasi muda yang sehat, produktif, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda dalam berbagai aktivitas positif menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di daerah. Berbagai capaian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan.

Pada tahun 2024, jumlah pemuda yang aktif berorganisasi tercatat sebanyak 22.409 orang. Capaian tersebut menunjukkan bahwa cukup banyak pemuda di Kabupaten Pangandaran yang terlibat dalam berbagai organisasi, baik organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, maupun organisasi berbasis pendidikan dan keagamaan. Selain itu, jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan kepramukaan mencapai 44.792 orang, yang mengindikasikan bahwa gerakan pramuka masih menjadi salah satu wadah pembinaan karakter dan kepemimpinan yang diminati oleh generasi muda. Sementara itu, jumlah atlet olahraga yang mengikuti pembinaan tercatat sebanyak 200 orang pada tahun 2024. Pembinaan atlet tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan prestasi olahraga sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing pada berbagai ajang olahraga di tingkat regional maupun nasional.

Pada tahun 2025, indikator pembangunan kepemudaan lebih difokuskan pada pengukuran tingkat partisipasi dan kondisi sosial ekonomi pemuda. Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan tercatat sebesar 4,9 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda di Kabupaten Pangandaran telah terlibat dalam kegiatan pendidikan, pekerjaan, maupun pelatihan yang produktif, sehingga kondisi ini menjadi modal yang baik dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir mencapai 30,2 persen. Capaian ini

menunjukkan bahwa pemuda memiliki kepedulian dan partisipasi yang cukup baik dalam berbagai kegiatan sosial yang berlangsung di lingkungan masyarakat.

Di sisi lain, persentase pemuda usia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir tercatat sebesar 22,56 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seperempat dari jumlah pemuda di Kabupaten Pangandaran aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi sebagai sarana pengembangan kapasitas, kepemimpinan, serta jejaring sosial. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus memperluas ruang partisipasi pemuda melalui penguatan organisasi kepemudaan, peningkatan pembinaan olahraga prestasi, serta penyediaan berbagai program pengembangan keterampilan dan kewirausahaan.

2.1.3.20 Statistik

Statistik merupakan upaya pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan penyajian data yang sering digunakan untuk masalah ilmiah, industri maupun sosial. Tahap pengolahan data sangat menentukan Tingkat keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Dengan adanya lembaga statistik diharapkan mampu menyebarluaskan produk yang berkualitas terkait hasil pembangunan di berbagai sendi kehidupan, baik lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintahan. Statistik digunakan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam memahami kondisi daerahnya dan mempermudah dalam proses pengambilan keputusan.

Statistik pada pemerintahan dibantu dalam mendeskripsikan maupun mengimplementasikan data tentang data kepegawaian dan variabel yang akan diteliti. Oleh sebab itu, perbaikan maupun penyempurnaan terus dilakukan untuk mendukung perubahan atau penambahan nilai guna meningkatkan penilaian dan sebagai sumber informasi bagi Kabupaten Pangandaran. Adapun indikator capaian statistik Kabupaten Pangandaran sebagai berikut.

Tabel 2. 60 Hasil Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase publikasi data statistik sektoral	Persentase	65	74,62

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, penyelenggaraan statistik sektoral menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya persentase publikasi data statistik sektoral dari 65 persen pada tahun 2024 menjadi 74,62 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola data dan informasi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Ketersediaan data statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence based policy*).

Pada tahun 2024, persentase publikasi data statistik sektoral mencapai 65 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar data statistik yang dihasilkan oleh perangkat daerah telah berhasil dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan cakupan publikasi data agar seluruh informasi sektoral dapat tersedia secara lebih lengkap dan terintegrasi. Ketersediaan data yang memadai tidak hanya mendukung proses pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi

sumber informasi yang penting bagi masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pada tahun 2025, persentase publikasi data statistik sektoral meningkat menjadi 74,62 persen atau mengalami kenaikan sebesar 9,62 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan koordinasi antarperangkat daerah dalam pengelolaan data serta semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya statistik sektoral sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik juga turut mendorong percepatan pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan data statistik secara lebih efektif dan efisien.

2.1.3.21 Persandian

Semakin berkembangnya E-Government memunculkan banyak inovasi baru yang semakin memberikan kemudahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan komunikasi publik. Persandian dan keamanan informasi adalah sebagai entitas pengaman data dan informasi. Namun demikian, hal tersebut memunculkan permasalahan yaitu ancaman keamanan data maupun transaksi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan mereka. Peran persandian dan keamanan informasi berada yaitu sebagai entitas pengaman data dan informasi sangat berperan aktif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Bidang tersebut merupakan pengamanan data dan informasi yang dilakukan analisis guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

Tabel 2. 61 Hasil Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	Persentase	30	54

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, penyelenggaraan keamanan informasi dan perlindungan data elektronik menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman dari 30 persen pada tahun 2024 menjadi 54 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem keamanan informasi di tengah semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan data, keberlangsungan layanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan digital.

Pada tahun 2024, persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman tercatat sebesar 30 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian sistem informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah telah memenuhi aspek keamanan informasi, namun masih terdapat sejumlah sistem yang memerlukan peningkatan perlindungan dan penguatan pengelolaan keamanan siber. Berbagai ancaman keamanan informasi, seperti kebocoran data, serangan siber, maupun penyalahgunaan akses sistem, menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola keamanan informasi, penerapan standar keamanan, serta peningkatan kesadaran aparatur mengenai pentingnya keamanan data menjadi langkah yang sangat diperlukan.

Pada tahun 2025, persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman meningkat menjadi 54 persen atau mengalami kenaikan sebesar 24 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam penerapan sistem keamanan informasi, baik melalui peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan kebijakan keamanan informasi, maupun penerapan berbagai mekanisme pengamanan data elektronik. Selain itu, peningkatan ini juga mencerminkan semakin besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan data dan keamanan sistem informasi sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 46 persen sistem informasi yang perlu ditingkatkan tingkat keamanannya agar seluruh layanan digital pemerintah dapat berjalan secara aman dan andal.

2.1.3.22 Kebudayaan

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu kabupaten termuda yang ada di provinsi Jawa Barat, selain memiliki banyak wisata alam, kabupaten ini juga terkenal dengan wisata budaya dan wisata buatan yang memiliki keunikan dan beragam. Pemerintah kabupaten melakukan berbagai upaya dan berinovasi dalam mengembangkan kawasan wisata salah satunya dengan menarik wisatawan dengan memperkenalkan budaya yang ada. Perbatasan wilayah Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Cilacap menyebabkan Kabupaten Pangandaran kental akan kultur Sunda dan kultur Jawa. Berkembangnya era globalisasi cukup berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya. Berikut merupakan hasil capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 62 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persentase	0	100
Persentase Warisan Budaya Yang Dilindungi	Persentase	20.24	34.52

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan berbagai aset budaya yang dimiliki daerah. Kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai warisan yang harus dijaga keberadaannya, tetapi juga sebagai identitas daerah yang memiliki nilai historis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai upaya pelestarian budaya terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan komunitas budaya.

Pada aspek pelestarian cagar budaya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola meningkat dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 100 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan komitmen dan perhatian pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi, perlindungan, pengelolaan, serta pemanfaatan cagar budaya secara optimal. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan nilai-nilai sejarah dan budaya daerah sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat serta mendukung pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya.

Selain itu, perlindungan terhadap warisan budaya juga menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase warisan budaya yang dilindungi

meningkat dari 20,24 persen pada tahun 2024 menjadi 34,52 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak unsur budaya, baik yang bersifat benda maupun tak benda, yang telah mendapatkan perlindungan dan pengakuan secara resmi. Upaya ini menjadi penting mengingat warisan budaya merupakan aset daerah yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat identitas masyarakat serta menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal di tengah perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, capaian indikator urusan kebudayaan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah berupaya memperkuat pelestarian dan perlindungan kebudayaan sebagai bagian dari pembangunan daerah. Meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan cakupan perlindungan warisan budaya, berbagai capaian yang telah diraih menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan kebudayaan pada masa yang akan datang.

2.1.3.23 Perpustakaan

Perkembangan literasi masyarakat Indonesia salah satunya bergantung pada kegemaran membaca yang tergambar dalam Indeks Literasi Masyarakat (IPLM). Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, berkarakter, mandiri dan berdaya saing yang pada akhirnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan merupakan pusat kegiatan belajar, membaca dan mencari informasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Capaian kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Pangandaran disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 63 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	0	8,64
Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Persentase	0	10

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, penyelenggaraan layanan perpustakaan dan pengembangan budaya literasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari mulai meningkatnya capaian pada indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat serta upaya pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno pada tahun 2025. Perpustakaan memiliki peran strategis sebagai pusat informasi, pembelajaran, dan pengembangan pengetahuan yang dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penguatan budaya literasi dan pelestarian warisan intelektual menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pada aspek pembangunan literasi masyarakat, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, indikator ini masih tercatat sebesar 0 poin, kemudian meningkat menjadi 8,64 poin pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek yang mendukung pengembangan literasi masyarakat, seperti peningkatan akses terhadap bahan bacaan, pemanfaatan layanan perpustakaan, serta pelaksanaan berbagai

program literasi yang melibatkan masyarakat secara luas. Capaian ini juga mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya budaya membaca dan belajar sepanjang hayat mulai mengalami peningkatan seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah.

Selain pembangunan literasi, upaya pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno juga mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase peningkatan bahan pustaka dan naskah kuno yang dilestarikan meningkat dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 10 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap upaya menjaga dan melestarikan berbagai koleksi pustaka serta naskah kuno yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno tidak hanya bertujuan untuk menjaga warisan intelektual daerah, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi mendatang agar tetap mengenal dan menghargai identitas budaya serta sejarah daerahnya.

2.1.3.24 Kearsipan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Era digitalisasi saat ini menuntut upaya strategis yang dilakukan lembaga kearsipan dan lembaga pengelola kearsipan lainnya, untuk memastikan bahwa arsip baik yang bersifat statis maupun dinamis menjadi Informasi yang terkandung di dalamnya merupakan informasi yang nyata dan tidak dapat dibantah. Melalui arsip, generasi saat ini dapat mengetahui apa saja yang pernah terjadi sebelumnya dan generasi yang akan datang dapat mengetahui apa saja yang terjadi saat ini sehingga kita dapat mengetahui apa yang terjadi dari waktu ke waktu untuk dipelajari. Berikut merupakan capaian hasil kinerja urusan kearsipan Kabupaten Pangandaran tahun 2020- 2025.

Tabel 2. 64 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Persentase	0	36,67
Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Poin	3.353,00	3080 C (Kurang)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, penyelenggaraan kearsipan daerah menunjukkan adanya upaya peningkatan tata kelola arsip meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Kearsipan merupakan salah satu fungsi pendukung pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menjamin tersedianya informasi yang autentik, utuh, dan terpercaya sebagai bahan akuntabilitas serta memori kolektif daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan arsip menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Capaian kinerja pada urusan ini menggambarkan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip yang dilakukan oleh

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Pada indikator Persentase Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE), capaian menunjukkan peningkatan dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 36,67 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan audit kearsipan eksternal mulai berjalan dan semakin banyak aspek pengelolaan arsip yang telah dievaluasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Audit kearsipan eksternal merupakan instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam penyelenggaraan kearsipan, mulai dari penciptaan arsip, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Dengan adanya audit tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan maupun potensi perbaikan sehingga kualitas tata kelola arsip dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Sementara itu, berdasarkan indikator Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE), pada tahun 2024 Kabupaten Pangandaran memperoleh nilai sebesar 3.353,00 poin. Adapun pada tahun 2025 nilai yang diperoleh tercatat sebesar 3.080 dengan predikat C atau kategori "Kurang". Predikat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah masih memerlukan berbagai perbaikan, baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung kearsipan. Penurunan nilai dan predikat yang masih berada pada kategori kurang menjadi perhatian penting agar pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan kearsipan dan menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri atas: kelautan dan perikanan pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Berikut adalah penjelasan serta data terkait urusan pemerintah pilihan.

2.1.3.25 Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan di Kabupaten Pangandaran meliputi sumber daya perikanan tangkap dan budi daya dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di masa depan, namun masih belum secara optimal tergali dan dimanfaatkan. Sedangkan untuk kelompok usaha didominasi oleh kelompok nelayan. Produksi ikan sendiri mencakup semua hasil penangkapan/budi daya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya produksi yang dijual saja tetapi termasuk produksi yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olah raga atau rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budi daya. Berikut merupakan hasil capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 65 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Penanganan Laporan Tindak Pelanggaran di Sektor Perikanan	Persentase	0	0

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.403	1.035,5
Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100	100
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	900	639,42
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	312	382,77

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, sektor kelautan dan perikanan masih menjadi salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pangandaran yang memiliki wilayah pesisir dan sumber daya perikanan yang cukup besar memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan, baik pada subsektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pengolahan hasil perikanan. Namun demikian, capaian kinerja pada beberapa indikator menunjukkan adanya dinamika yang memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Berbagai upaya peningkatan produktivitas, pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, serta peningkatan nilai tambah produk perikanan perlu terus dilakukan untuk mendukung daya saing sektor ini. Pada aspek pengawasan dan tata kelola sektor perikanan, persentase penanganan laporan tindak pelanggaran di sektor perikanan masih tercatat sebesar 0 persen pada tahun 2024 maupun 2025.

Pada aspek produksi, produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dari 2.403 ton pada tahun 2024 menjadi 1.035,5 ton pada tahun 2025. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi cuaca dan iklim, perubahan musim penangkapan ikan, keterbatasan armada, maupun fluktuasi sumber daya ikan di perairan. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah produksi olahan hasil perikanan yang menurun dari 900 ton pada tahun 2024 menjadi 639,42 ton pada tahun 2025. Penurunan produksi olahan perlu menjadi perhatian karena subsektor pengolahan memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan akses pasar, serta pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan perlu terus didorong agar daya saing produk perikanan daerah semakin meningkat.

Di sisi lain, subsektor perikanan budidaya menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Produksi perikanan budidaya meningkat dari 312 ton pada tahun 2024 menjadi 382,77 ton pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan budidaya ikan memiliki prospek yang baik sebagai alternatif untuk menjaga keberlanjutan produksi perikanan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan perikanan budidaya juga memiliki keunggulan karena relatif lebih terkendali dari sisi produksi dan dapat dikembangkan melalui berbagai inovasi teknologi. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus memperkuat pembinaan kepada pembudidaya, meningkatkan akses terhadap sarana produksi dan permodalan, serta

mendorong diversifikasi usaha perikanan agar sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Pangandaran dapat tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

2.1.3.26 Pariwisata

Bidang pariwisata akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks dalam menunjang peningkatan ekonomi. Manajemen pengelolaan pariwisata akan mempengaruhi tingkat pengelolaan potensi wisata yang dimiliki daerah tersebut terhadap daya tarik masyarakat untuk berwisata di daerah tersebut. Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah yang berpotensi sebagai kawasan wisata andalan. Kunjungan wisata selalu naik di setiap tahun. Perkembangan dalam sektor wisata Kabupaten Pangandaran lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 66 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	3.297.362	5.192.687
Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	68,91	68,49
Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	11,83	12,71
Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase	0	1,29
Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian	Persentase	100	100
Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,84	1,54

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan tetap menjadi salah satu sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang cukup signifikan, yaitu dari 3.297.362 orang pada tahun 2024 menjadi 5.192.687 orang pada tahun 2025. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut menunjukkan bahwa daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Pangandaran semakin kuat dan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa berbagai upaya promosi, pengembangan destinasi, serta penyelenggaraan kegiatan pariwisata telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan aktivitas wisata di daerah.

Selain peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pemerintah daerah juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya persentase sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan peningkatan kapasitas, dari 11,83 persen pada tahun 2024 menjadi 12,71 persen pada tahun 2025. Peningkatan kapasitas tersebut

diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan daya saing pelaku usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif dalam menghadapi perkembangan industri yang semakin dinamis. Di sisi lain, persentase produk ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga mengalami peningkatan dari tidak terdapat produk yang terdaftar pada tahun 2024 menjadi 1,29 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran pelaku ekonomi kreatif terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya dan inovasi yang dihasilkan.

Pada aspek tata kelola dan dukungan penyelenggaraan urusan pariwisata, capaian layanan kepegawaian menunjukkan hasil yang sangat baik dengan persentase pelayanan mencapai 100 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan administrasi dan pengelolaan sumber daya aparatur di bidang pariwisata telah berjalan secara optimal sehingga mampu menunjang pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif. Sementara itu, persentase sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi relatif stabil, yaitu sebesar 68,91 persen pada tahun 2024 dan 68,49 persen pada tahun 2025. Meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan urusan pariwisata secara lebih baik.

Di sisi lain, rata-rata lama kunjungan wisatawan mengalami penurunan dari 1,84 hari pada tahun 2024 menjadi 1,54 hari pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah wisatawan yang datang meningkat secara signifikan, durasi tinggal wisatawan masih perlu ditingkatkan agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengembangkan destinasi wisata yang lebih beragam, meningkatkan kualitas amenities dan atraksi wisata, serta memperkuat keterkaitan antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.1.3.27 Pertanian

Sektor pertanian dalam pengembangannya sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang saat ini sedang berkembang selain itu juga menjadi potensi dan peluang pasar yang cukup baik, diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, tomat, cabe merah, cabe rawit, manggis, durian, dan pisang. Berikut adalah capaian urusan pertanian Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 67 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase	80	98
Jumlah Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Ha	486	266
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	8.766,04	16.908,90
Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	Persentase	9,94	9,73
Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	215.564,17	233.951,11

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Persentase	51.708,39	52.126,70
Jumlah Produksi Telur	Ton	3.503,00	3.006,85
Jumlah Produksi Daging	Ton	4.596	6.448,61

Sumber:
Dinas

Pertanian Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor unggulan yang memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari berbagai indikator yang menunjukkan perkembangan positif, terutama pada peningkatan penyediaan prasarana pertanian dan kenaikan produksi komoditas utama. Pemerintah daerah terus berupaya memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kapasitas petani, serta penerapan teknologi pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan. Dengan dukungan sumber daya alam yang memadai, sektor pertanian di Kabupaten Pangandaran diharapkan mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Pada aspek penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, capaian kinerja menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian meningkat dari 80 persen pada tahun 2024 menjadi 98 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sarana dan prasarana pendukung pertanian, seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian, serta infrastruktur pendukung lainnya. Sementara itu, luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian mengalami penurunan dari 486 hektare pada tahun 2024 menjadi 266 hektare pada tahun 2025. Penurunan luas area yang memerlukan penanganan dapat mengindikasikan berkurangnya dampak bencana pertanian atau meningkatnya efektivitas langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para petani.

Dari sisi produksi tanaman, kinerja sektor pertanian menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Produksi tanaman hortikultura meningkat secara signifikan dari 8.766,04 ton pada tahun 2024 menjadi 16.908,90 ton pada tahun 2025 atau hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, produksi tanaman pangan juga mengalami peningkatan dari 215.564,17 ton menjadi 233.951,11 ton. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian Kabupaten Pangandaran masih memiliki produktivitas yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mendukung perekonomian daerah. Produksi tanaman perkebunan juga mengalami kenaikan meskipun relatif terbatas, yaitu dari 51.708,39 ton pada tahun 2024 menjadi 52.126,70 ton pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya stabilitas produksi pada subsektor perkebunan.

Pada subsektor peternakan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang beragam. Produksi telur mengalami penurunan dari 3.503,00 ton pada tahun 2024 menjadi 3.006,85 ton pada tahun 2025. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fluktuasi harga pakan, kondisi kesehatan ternak, maupun perubahan skala usaha peternakan. Sebaliknya, produksi daging menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 4.596 ton pada tahun 2024 menjadi 6.448,61 ton pada tahun 2025. Selain itu, persentase kenaikan skor kelas kelompok tani relatif stabil, meskipun sedikit menurun dari 9,94 persen menjadi 9,73 persen. Secara keseluruhan, capaian

Urusan Pertanian Kabupaten Pangandaran menunjukkan arah perkembangan yang positif. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus memperkuat dukungan terhadap petani dan peternak melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta pengembangan inovasi dan teknologi pertanian agar sektor pertanian dapat tumbuh secara berkelanjutan

2.1.3.28 Perdagangan

Perdagangan merupakan unsur dalam pelaksanaan dalam mendukung urusan pemerintah untuk peningkatan ekonomi di sektor perdagangan. Bidang perdagangan akan selalu menghadapi tantangan peningkatan dalam mendorong peningkatan ekonomi dengan melihat potensi daerah Kabupaten Pangandaran. Capaian kinerja urusan perdagangan dalam waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 68 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persentase	19,23	19,23
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persentase	0	100
Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	23,39	43.1
Persentase penggunaan produk lokal oleh pemerintah daerah	Persentase	77,00	91,96
Persentase penggunaan produk lokal oleh pemerintah daerah	Persentase	100	100
Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	70	10
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase	76,19	85,7
Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100	100

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, sektor perdagangan menunjukkan perkembangan yang cukup positif pada berbagai indikator utama, terutama dalam aspek perizinan usaha, penggunaan produk lokal, serta stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Perdagangan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen serta menciptakan berbagai peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perdagangan, peningkatan daya saing pelaku usaha, serta pengembangan sarana distribusi menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan. Capaian kinerja yang diperoleh

menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat ekosistem perdagangan di Kabupaten Pangandaran.

Pada aspek pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, persentase capaian pada tahun 2024 dan 2025 tercatat relatif stabil, yaitu sebesar 19,23 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan sarana distribusi perdagangan masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung kelancaran arus barang dan jasa secara lebih optimal. Di sisi lain, indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 100 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut mencerminkan semakin baiknya pelayanan perizinan dan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang bertanda tera sah juga meningkat dari 23,39 persen menjadi 43,10 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan pengawasan dan jaminan kepastian dalam transaksi perdagangan sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Pada aspek penggunaan produk lokal, capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Persentase penggunaan produk lokal oleh pemerintah daerah meningkat dari 77,00 persen pada tahun 2024 menjadi 91,96 persen pada tahun 2025. Bahkan pada indikator penggunaan produk lokal lainnya, capaian telah mencapai 100 persen pada kedua tahun pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung produk dalam negeri dan memberdayakan pelaku usaha lokal melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa. Penggunaan produk lokal secara konsisten tidak hanya memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha daerah, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri kecil dan menengah serta memperkuat struktur perekonomian lokal yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Sementara itu, indikator persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok mengalami peningkatan dari 76,19 persen pada tahun 2024 menjadi 85,70 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok sehingga dapat mengurangi risiko gejolak harga yang berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu, persentase laporan keuangan dengan kualitas yang baik tetap terjaga pada angka 100 persen pada kedua tahun, yang mencerminkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Namun demikian, persentase sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi mengalami penurunan dari 70 persen pada tahun 2024 menjadi 10 persen pada tahun 2025 sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan. Secara keseluruhan, capaian Urusan Perdagangan Kabupaten Pangandaran menunjukkan arah perkembangan yang positif

2.1.3.29 Perindustrian

Perindustrian merupakan unsur dalam pelaksanaan urusan pemerintah untuk peningkatan ekonomi. Urusan perindustrian selalu mengalami tantangan yang kompleks dalam upaya peningkatan ekonomi. Capaian kinerja urusan perindustrian dalam waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 69 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri di dalam sentra	Persentase	0	5
Persentase industri kecil dan menengah yang berizin	Persentase	100	100
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase	0	0

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pangandaran, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, pembangunan sektor industri menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama dalam upaya meningkatkan jumlah pelaku industri dan kepatuhan perizinan bagi industri kecil dan menengah (IKM). Sektor perindustrian memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, penguatan sektor industri perlu terus dilakukan melalui pengembangan sentra industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan informasi industri yang memadai. Capaian indikator pada periode ini menunjukkan bahwa beberapa aspek telah mengalami kemajuan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Pada indikator persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri di dalam sentra, capaian mengalami peningkatan dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 5 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah pelaku usaha yang bergabung dan beraktivitas di kawasan sentra industri yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Keberadaan sentra industri memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, memperluas akses pasar, serta mendorong kolaborasi antar pelaku usaha. Selain itu, pertumbuhan jumlah pelaku industri di dalam sentra juga menjadi indikator meningkatnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha di sektor industri yang memiliki potensi ekonomi dan nilai tambah yang tinggi.

Sementara itu, indikator persentase industri kecil dan menengah yang berizin menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten. Pada tahun 2024 maupun 2025, persentase industri kecil dan menengah yang telah memiliki izin mencapai 100 persen. Capaian tersebut mencerminkan tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku serta menunjukkan bahwa pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. Kepemilikan izin usaha menjadi faktor penting karena dapat meningkatkan legalitas usaha, memperluas akses terhadap pembiayaan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Di sisi lain, indikator tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini masih menunjukkan capaian sebesar 0 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem penyediaan dan pengelolaan data serta informasi industri masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sektor industri di daerah. Ketersediaan informasi yang lengkap dan mutakhir sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, serta perencanaan pengembangan industri yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem informasi industri,

meningkatkan kualitas pendataan, serta mengintegrasikan data industri secara lebih baik

2.1.3.30 Transmigrasi

Pelaksanaan sektor transmigrasi melibatkan adanya kerja sama antar pemerintah daerah baik itu melibatkan daerah pengirim maupun daerah yang menerima dengan pemerintah pusat yang menjadi fasilitator. Berikut merupakan hasil capaian kinerja urusan transmigrasi Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 70 Hasil Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Laju Kemandirian Transmigran	Persentase	0	0
Persentase Masyarakat yang Memahami Program Transmigrasi	Persentase	0	0

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, pelaksanaan program transmigrasi masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian dua indikator utama, yaitu Persentase Laju Kemandirian Transmigran dan Persentase Masyarakat yang Memahami Program Transmigrasi yang masing-masing masih berada pada angka 0 persen pada tahun 2024 maupun 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Pangandaran belum menjadi prioritas utama atau belum terdapat kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi pada periode tersebut. Meskipun demikian, urusan transmigrasi tetap memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kawasan permukiman baru yang produktif.

Fokus Layanan Pendukung Urusan Pemerintah Daerah

2.1.3.31 Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretariat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Tabel 2. 71 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Tingkat Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah	Persentase	100	100
Persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan pembangunan Daerah	Persentase	90	96,3
Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	84,83	85,54
Cakupan pelayanan kesejahteraan rakyat	Persentase	80	88,73
Persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan perekonomian Daerah	Persentase	80	81,46
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	3,45	0

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum penyelenggaraan fungsi

koordinasi, fasilitasi, serta pelayanan administrasi pemerintahan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah melalui koordinasi kebijakan, pengendalian pelaksanaan pembangunan, pelayanan kesejahteraan rakyat, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, capaian berbagai indikator pada urusan ini menjadi gambaran penting mengenai kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Hasil yang dicapai pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya peningkatan pada sejumlah indikator utama yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pada aspek pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dengan persentase sebesar 100 persen pada tahun 2024 maupun tahun 2025. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa seluruh pelayanan keprotokolan, fasilitasi kegiatan pimpinan daerah, serta penyampaian komunikasi dan informasi strategis telah dilaksanakan secara optimal. Selain itu, persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan pembangunan daerah juga mengalami peningkatan dari 90 persen pada tahun 2024 menjadi 96,3 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan sehingga berbagai program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan perekonomian daerah juga meningkat dari 80 persen menjadi 81,46 persen, yang menunjukkan adanya penguatan koordinasi dalam pengelolaan kebijakan ekonomi daerah.

Pada aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Indeks Tata Kelola Pengadaan mengalami peningkatan dari 84,83 poin pada tahun 2024 menjadi 85,54 poin pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah semakin baik, baik dari sisi transparansi, akuntabilitas, maupun efisiensi pelaksanaannya. Selain itu, cakupan pelayanan kesejahteraan rakyat juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 80 persen pada tahun 2024 menjadi 88,73 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya jangkauan pelayanan dan fasilitasi pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan dasar lainnya.

Sementara itu, pada indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), capaian menunjukkan nilai sebesar 3,45 poin pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebesar 0. Kondisi tersebut perlu dicermati lebih lanjut karena dapat disebabkan oleh belum tersedianya hasil penilaian, proses evaluasi yang masih berlangsung, atau adanya perubahan mekanisme pelaporan dan penilaian LPPD. Secara keseluruhan, capaian Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran menunjukkan arah perkembangan yang positif dengan peningkatan pada berbagai indikator strategis.

Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.1.3.32 Perencanaan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara

dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan diperlukan untuk menentukan target keberhasilan, sehingga dari perencanaan terdapat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Berikut ini adalah hasil kinerja perencanaan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023.

Tabel 2. 72 Hasil Capaian Kinerja Urusan Perencanaan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Capaian	
		2024	2025
Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100	100
Capaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	0	80
Persentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	Persentase	100	100
Persentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD	Persentase	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, 2024

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan daerah menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini tercermin dari terjaganya kualitas proses perencanaan, evaluasi kinerja, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta keselarasan program pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Urusan perencanaan memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan secara terarah, efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kualitas perencanaan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Pada indikator persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas, capaian pada tahun 2024 maupun 2025 mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kinerja telah dilakukan secara optimal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Selain itu, persentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi antara perencanaan dan penganggaran juga mencapai 100 persen pada kedua tahun tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa seluruh perangkat daerah telah mampu menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran merupakan aspek penting untuk menjamin efisiensi penggunaan sumber daya dan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, persentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program antara RPJMD dan RKPD juga menunjukkan capaian yang sangat baik, yaitu sebesar 100 persen pada tahun 2024 dan 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah telah menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah maupun tahunan daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan tersebut

menjadi penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta memastikan bahwa pelaksanaan program di setiap perangkat daerah tetap berada dalam koridor visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Pangandaran. Sementara itu, pada indikator Capaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, terjadi peningkatan dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 80 persen pada tahun 2025. Peningkatan yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas proses perencanaan, baik dari aspek substansi, sinkronisasi program, maupun kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa tata kelola perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik dan semakin berkualitas. Pemerintah daerah perlu terus mempertahankan capaian yang telah diraih melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana, penguatan sistem informasi perencanaan, serta peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dalam proses penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan. Selain itu, pemanfaatan data dan informasi yang akurat serta penerapan pendekatan perencanaan berbasis kinerja perlu terus diperkuat agar kebijakan pembangunan yang dihasilkan semakin tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.3.33 Keuangan

Bidang urusan keuangan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan pemerintah untuk mendukung perencanaan, pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah di bidang keuangan. Berikut ini adalah Realisasi kinerja Bidang Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2. 73 Hasil Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Capaian	
		2024	2025
Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase	0	100
Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	Persentase	76	111,5
Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	Persentase	87	66,54
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,94	N/A
Cakupan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai SAP	Persentase	90	N/A
Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	Persentase	83	96,21
Capaian kualitas pengelolaan kas daerah	Persentase	0	25

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum pengelolaan keuangan daerah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada aspek pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui sektor perpajakan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Capaian indikator pada periode ini menunjukkan adanya kemajuan pada beberapa aspek penting, meskipun masih terdapat sejumlah indikator yang perlu terus ditingkatkan.

Pada aspek pengelolaan aset daerah, persentase pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan akuntabel mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 100 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan tata kelola aset daerah, baik dalam proses pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, maupun pelaporan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek penerimaan pajak daerah, realisasi pajak sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Persentase realisasi pajak daerah sektor PBB dan BPHTB meningkat dari 76 persen pada tahun 2024 menjadi 111,5 persen pada tahun 2025, yang berarti capaian penerimaan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan potensi pajak daerah serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di sisi lain, realisasi pajak daerah dari sektor pajak daerah lainnya mengalami penurunan dari 87 persen pada tahun 2024 menjadi 66,54 persen pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam optimalisasi penerimaan pada beberapa jenis pajak daerah di luar sektor PBB dan BPHTB. Namun demikian, secara keseluruhan persentase realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah mengalami peningkatan, yaitu dari 83 persen pada tahun 2024 menjadi 96,21 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak serta memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,94 poin, yang menggambarkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan berdasarkan kapasitas pendapatan yang dimiliki, sedangkan data tahun 2025 masih belum tersedia.

Sementara itu, indikator cakupan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tahun 2024 mencapai 90 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun pada tahun 2025, data capaian indikator tersebut masih belum tersedia. Pada indikator capaian kualitas pengelolaan kas daerah, terjadi peningkatan dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 25 persen pada tahun 2025. Meskipun masih perlu ditingkatkan, capaian ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan arus kas daerah agar lebih efektif dan efisien. Secara keseluruhan, Urusan Keuangan Kabupaten Pangandaran menunjukkan arah perkembangan yang positif, terutama dalam penguatan tata kelola aset dan peningkatan pendapatan daerah.

2.1.3.34 Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan

Sumber daya aparatur dalam suatu pemerintahan harus selalu ditingkatkan pengembangan kapasitasnya agar dapat beradaptasi secara cepat dengan perubahan lingkungan di instansi. Kepegawaian, pendidikan serta pelatihan merupakan penunjang urusan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam memberikan pelayanan publik ke depan, sumber daya aparatur akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks dalam mendukung kinerja pemerintah Kabupaten Pangandaran. Peningkatan kemampuan melalui kependidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian untuk meningkatkan kualitas

dari ASN. Berikut ini adalah realisasi kinerja kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Kabupaten Pangandaran:

Tabel 2. 74 Hasil Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2021	2022
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	Persentase	0	2,15
Persentase layanan pengembangan karir ASN	Persentase	0	100
Persentase formasi sesuai dengan perencanaan kebutuhan ASN	Persentase	0	100
Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)	Skor	79,65	80,53
Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Sertifikat dalam pengembangan kompetensi	Persentase	0	37

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pangandaran, pengelolaan sumber daya aparatur menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya dalam aspek pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan aparatur, serta peningkatan profesionalitas ASN. Penguatan kapasitas dan kualitas aparatur sipil negara merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, berbagai upaya peningkatan kompetensi, pendidikan lanjutan, serta pengelolaan manajemen ASN terus dilakukan untuk mewujudkan aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Capaian indikator pada periode pengukuran menunjukkan bahwa sebagian besar aspek telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pada indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan, capaian mengalami peningkatan dari 0 persen menjadi 2,15 persen. Meskipun persentasenya masih relatif kecil, kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesempatan bagi aparatur untuk menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan karier. Pendidikan lanjutan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan ASN juga diharapkan dapat mendorong terciptanya inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada aspek pengembangan karier dan perencanaan kebutuhan aparatur, capaian menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase layanan pengembangan karier ASN mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh aparatur telah memperoleh akses terhadap layanan pengembangan karier sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan indikator persentase formasi yang sesuai dengan perencanaan kebutuhan ASN yang juga mencapai 100 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mampu menyusun kebutuhan aparatur secara lebih tepat dan terencana sehingga dapat mendukung efektivitas organisasi perangkat daerah. Sementara itu, Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan dari 79,65 pada tahun sebelumnya menjadi 80,53, yang menunjukkan adanya peningkatan

kualitas aparatur dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Selain itu, indikator persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan sertifikat dalam pengembangan kompetensi menunjukkan capaian sebesar 37 persen. Capaian ini menggambarkan bahwa lebih dari sepertiga ASN telah memperoleh pengakuan kompetensi melalui sertifikasi yang relevan dengan bidang tugasnya. Sertifikasi kompetensi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa aparatur memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar jabatan dan tuntutan pekerjaan. Secara keseluruhan, capaian Urusan Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pangandaran menunjukkan arah perkembangan yang positif dalam membangun aparatur yang profesional dan berkualitas.

2.1.3.35 Penelitian dan Pengembangan

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. Sedangkan pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dan pengembangan merupakan bentuk garda daerah untuk membuat pemerintahan terus maju dan mampu menciptakan inovasi baru. Berikut adalah capaian urusan penelitian dan pengembangan Kabupaten Pangandaran tahun 2019-2023:

Tabel 2. 75 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Capaian	
		2024	2025
Persentase Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase	50	0

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase implementasi Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik hingga tahun 2025 masih belum berjalan dengan baik. Untuk memaksimalkan capaian tersebut perlu peningkatan dan dukungan berbagai pihak dalam pengumpulan data informasi yang dibutuhkan.

2.1.3.36 Pengawasan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan diperlukan agar tidak terdapat pelanggaran disiplin dan penyelewengan kekuasaan. Pengawasan merupakan penunjang urusan dalam pelaksanaan pemerintahan dalam mendukung Sumber Daya Manusia, Pembangunan dan Pelayanan. Pengawasan menjadi salah satu sektor yang penting dan harus dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas mengawasi yaitu Inspektorat. Realisasi hasil kinerja di bidang pengawasan Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 76 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Capaian	
		2024	2025
Tingkat Maturitas SPIP (RPJMD)	Level	3,00	N/A
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Poin	2,78	N/A
Nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Poin	3,09	N/A
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Persentase	84,94	N/A
Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	Persentase	3,85	N/A
Persentase Hasil Pengawasan	Persentase	0	N/A

Sumber: Inspektorat Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini tercermin dari tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta efektivitas pengendalian korupsi yang telah mencapai level dan nilai yang cukup memadai. Pengawasan internal memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

2.1.3.37 Pemerintahan Umum

Wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah. Bakesbangpol memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. Berikut ini akan disajikan data realisasi kinerja untuk Unsur Pemerintahan Umum dari Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 77 Hasil Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	Persentase	73,00	94,95
Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase	60,00	90,33
Persentase masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	Persentase	75,00	102,11
Persentase Masyarakat yang Memahami tentang Ketahanan	Persentase	81,00	84

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Ekonomi, Sosial, dan Budaya			
Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah	Persentase	80	97,05

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum penyelenggaraan pemerintahan umum menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, organisasi kemasyarakatan, politik dalam negeri, serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Pemerintahan umum memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan urusan ini. Capaian berbagai indikator menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan berwawasan kebangsaan.

Pada indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan, capaian mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 73,00 persen pada tahun 2024 menjadi 94,95 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan telah berjalan secara efektif. Selain itu, persentase masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan juga meningkat dari 60,00 persen menjadi 90,33 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat.

Pada aspek pendidikan politik dan ketahanan masyarakat, persentase masyarakat yang memahami politik dalam negeri mengalami peningkatan dari 75,00 persen pada tahun 2024 menjadi 102,11 persen pada tahun 2025. Capaian yang melebihi target tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan pendidikan politik dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Sementara itu, persentase masyarakat yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya juga mengalami peningkatan dari 81,00 persen menjadi 84 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya menjaga ketahanan sosial dan budaya serta memperkuat kemampuan ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan dinamika sosial yang berkembang.

Selain peningkatan pemahaman masyarakat, pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah juga menunjukkan capaian yang sangat baik. Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah meningkat dari 80 persen pada tahun 2024 menjadi 97,05 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut mencerminkan semakin optimalnya koordinasi antarinstitusi dan pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat mempengaruhi kondisi daerah. Secara keseluruhan, Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pangandaran menunjukkan kinerja yang semakin baik dan memberikan

kontribusi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, demokratis, serta memiliki kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan.

2.1.3.38 Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Urusan Sekretariat DPRD merupakan hal yang penting dalam menunjang segala bentuk aktivitas anggota legislatif dalam menjaring aspirasi masyarakat di daerah. Sekretariat DPRD merupakan urusan yang berkaitan dengan hal-hal penunjang anggota legislatif dalam menjalankan seluruh aktivitas kinerjanya. Untuk menunjang pembangunan Daerah supaya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat maka legislatif melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Setiap tahunnya sekretaris dewan mampu untuk menerbitkan rencana tahunan tersebut dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Realisasi kinerja yang berkaitan dengan Sekretariat DPRD di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 78 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase pencapaian Program Legislasi Daerah yang terfasilitas	Persentase	100	89,83
Persentase DPRD pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan	Persentase	60	69,80
Cakupan Pelayanan Fasilitasi	%	N/A	67,42
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	%	N/A	84,36

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum pelaksanaan fungsi fasilitasi dan pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan oleh DPRD melalui penyediaan pelayanan administratif, fasilitasi kegiatan, serta dukungan teknis lainnya. Kualitas pelayanan Sekretariat DPRD menjadi salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD terus menjadi perhatian dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Pada indikator Persentase Pencapaian Program Legislasi Daerah yang Terfasilitasi, capaian mengalami sedikit penurunan dari 100 persen pada tahun 2024 menjadi 89,83 persen pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian besar agenda legislasi daerah telah memperoleh dukungan dan fasilitasi yang memadai dari Sekretariat DPRD. Fasilitasi program legislasi daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi dan dukungan teknis

dalam proses penyusunan peraturan daerah perlu terus dilakukan agar seluruh program legislasi dapat terealisasi secara optimal.

Sementara itu, pada indikator Persentase DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan, capaian menunjukkan peningkatan dari 60 persen pada tahun 2024 menjadi 69,80 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya dukungan yang diberikan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan yang menjadi kewenangan DPRD. Selain itu, pada tahun 2025 juga mulai dilakukan pengukuran terhadap indikator Cakupan Pelayanan Fasilitasi yang mencapai 67,42 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan fasilitasi yang diberikan kepada DPRD telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar pelayanan dapat menjangkau seluruh kebutuhan dewan secara lebih optimal dan tepat waktu.

Pada aspek kualitas pelayanan, Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2025 mencapai 84,36 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum anggota DPRD merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, baik dari sisi administrasi, fasilitasi kegiatan, maupun dukungan teknis lainnya. Tingkat kepuasan yang tinggi ini menjadi indikator bahwa kualitas pelayanan Sekretariat DPRD telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pelaksanaan tugas DPRD secara efektif.

2.1.3.39 Penanggulangan Bencana

Bencana tsunami dan gempa bumi merupakan dua bencana yang cukup sering terjadi dan berdampak kepada minat wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Berikut merupakan realisasi kinerja urusan penanggulangan bencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2023.

Tabel 2. 79 Hasil Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2025

Indikator	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persentase	0	100
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	0	16

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum terdapat peningkatan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya pada aspek penanganan tanggap darurat. Kabupaten Pangandaran sebagai daerah yang memiliki potensi risiko bencana alam, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi, memerlukan sistem penanggulangan bencana yang responsif, terkoordinasi, dan didukung oleh kesiapsiagaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penyebaran informasi kebencanaan, serta penguatan sistem tanggap darurat menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan urusan ini. Capaian indikator pada tahun 2025 menunjukkan adanya kemajuan yang cukup baik, meskipun masih terdapat aspek yang perlu terus diperkuat.

Pada indikator Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana, capaian mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 100 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2025 telah mendapatkan penanganan tanggap darurat sesuai dengan standar dan

prosedur yang berlaku. Keberhasilan ini mencerminkan semakin baiknya kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan respons cepat terhadap kejadian bencana, baik melalui penyediaan personel, sarana dan prasarana, maupun koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Selain itu, capaian tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mengelola situasi darurat sehingga dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalkan.

Sementara itu, pada indikator Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, capaian meningkat dari 0 persen pada tahun 2024 menjadi 16 persen pada tahun 2025. Meskipun masih relatif rendah, peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mulai memperluas kegiatan penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi ancaman bencana, langkah-langkah mitigasi, serta tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi keadaan darurat. Penyebaran informasi dan edukasi kebencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengurangi risiko korban jiwa, serta memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas relawan kebencanaan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah akan menjelaskan tentang kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim investasi, sumber daya manusia, dan daya saing pariwisata.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Pengeluaran per kapita dapat diartikan sebagai perbandingan total biaya yang telah dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga dalam kurun waktu satu bulan yang dibagi dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan kemampuan daya beli (BPS, 2020). Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat dihitung dari angka konsumsi rumah tangga per kapita, dengan kata lain yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran ini dibagi berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran, karena semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Oleh karena itu, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 2. 80 Hasil Capaian Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2024–2025

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi per Kapita	Rp	648.636,00	689.789,00	720.756,00	N/A	N/A
Persentase Konsumsi	%	54,98	57,62	N/A	N/A	N/A
Pengeluaran Non makanan	Rp	531.095,00	507.252,00	572.884,00	N/A	N/A

Indikator	Satuan	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
per Kapita						
APBD	Rp	1.473.090.741.881	1.282.067.392.061,00	983.514.549.013,00	1.971.668.227.721,74	N/A
SiLPA	Rp	20.000.000.000	21.000.000.000,00	26.775.224.160,00	-11.753.337.174,26	N/A

Sumber: Diolah Penyusun, 2025

Terlihat pada tabel di atas, capaian fokus kemampuan ekonomi daerah untuk keuangan suatu daerah diperlihatkan dari jumlah APBD suatu daerah, apabila semakin tinggi jumlah APBD maka akan semakin tinggi pula kemampuan keuangan suatu daerah tersebut. Pada tabel di atas terlihat bahwa APBD Kabupaten Pangandaran mengalami angka yang fluktuatif, dimana terjadi penurunan pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena jumlah peningkatan pendapatan di suatu daerah maka akan diiringi dengan peningkatan pembiayaan, karena beban belanja suatu daerah tersebut juga ikut bertambah.

SiLPA mempunyai kepanjangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Dalam perumusan APBD yang ideal, angka SiLPA yang muncul seharusnya sama dengan nol, yang berarti bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang ada. Angka SiLPA di Kabupaten Pangandaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 26.775.224.160,00 dan pada tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp -11.753.337.174,26.

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas di suatu wilayah atau infrastruktur yang dapat menunjang daya saing daerah dan keterkaitan dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor antara lain dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah orang yang dapat diangkut oleh angkutan umum dan jumlah orang melalui terminal, penataan wilayah, fasilitas bank dan nonbank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik dan telepon, restoran/rumah makan, dan ketersediaan penginapan.

Peran fasilitas di suatu wilayah atau infrastruktur yang dapat menunjang daya saing daerah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 81 Hasil Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
		2024	2025
Panjang Jalan	Km	627,70	632,54
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Jumlah	45.906	43,761
Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah	9	10
Rasio izin trayek	Jumlah	0,0042	0,0044
Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	48	49
Jumlah Angkutan Darat	Jumlah	2.753	2,830
Jumlah penumpang angkutan darat	Jumlah	442.361	372,557

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
		2024	2025
Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Jumlah	157	159
Jumlah angkutan umum	Jumlah	127	118
Jumlah pemasangan rambu-rambu	Jumlah	1.168	1.168
Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Jumlah	1.380	1.380
Tabel Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Jumlah	447.130	377.948
Jumlah orang/barang melalui dermaga	Jumlah	27.593	28.310
Jumlah orang/barang melalui terminal	Jumlah	421.798	381.766
Jumlah orang/barang melalui bandara	Jumlah	2.943	3.556

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan hasil capaian kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas penduduk dan barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas jalan, sarana transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya terus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Capaian pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan pada sejumlah indikator penting yang mendukung penguatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

Pada aspek infrastruktur jalan, panjang jalan di Kabupaten Pangandaran meningkat dari 627,70 km pada tahun 2024 menjadi 632,54 km pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan jalan sebagai sarana utama mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Sementara itu, pada sektor transportasi darat, jumlah angkutan darat mengalami peningkatan dari 2.753 unit menjadi 2.830 unit, serta jumlah uji KIR angkutan umum meningkat dari 48 kali menjadi 49 kali. Di sisi lain, jumlah izin trayek yang dikeluarkan juga meningkat dari 9 izin pada tahun 2024 menjadi 10 izin pada tahun 2025, sehingga rasio izin trayek mengalami kenaikan dari 0,0042 menjadi 0,0044. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya penguatan tata kelola transportasi dan legalitas operasional angkutan umum di Kabupaten Pangandaran.

Namun demikian, beberapa indikator menunjukkan kecenderungan penurunan. Jumlah arus penumpang angkutan umum menurun dari 45.906 orang pada tahun 2024 menjadi 43.761 orang pada tahun 2025. Penurunan juga terjadi pada jumlah penumpang angkutan darat yang berkurang dari 442.361 orang menjadi 372.557 orang, serta jumlah orang dan barang yang terangkut melalui angkutan umum yang turun dari 447.130 menjadi 377.948. Selain itu, jumlah orang dan barang yang melalui terminal juga mengalami penurunan dari 421.798 menjadi 381.766. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan pola mobilitas masyarakat, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, maupun perkembangan moda transportasi alternatif yang tersedia di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, beberapa indikator lainnya menunjukkan kondisi yang

relatif stabil dan positif. Jumlah pemasangan rambu-rambu tetap sebanyak 1.168 unit pada tahun 2024 dan 2025, sedangkan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia juga tetap sebesar 1.380 unit. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan penambahan rambu-rambu untuk mencapai kondisi ideal dalam mendukung keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Pada moda transportasi laut dan udara, jumlah orang dan barang yang melalui dermaga meningkat dari 27.593 menjadi 28.310, sedangkan jumlah orang dan barang yang melalui bandara meningkat dari 2.943 menjadi 3.556.

C. Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal untuk jangka panjang. Penanaman modal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu investasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan di suatu daerah. Iklim investasi yang baik juga dapat berpengaruh terhadap daya saing suatu daerah, semakin baik iklim investasi maka akan membuat daya saing daerah juga meningkat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat investasi di suatu daerah antara lain adalah angka kriminalitas, jumlah aksi demo yang terjadi, waktu yang dibutuhkan untuk proses perijinan, jumlah dan jenis pajak retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa yang berstatus swasembada terhadap total desa. Beberapa peran iklim investasi terhadap daya saing daerah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 82 Hasil Capaian Kinerja Urusan Iklim Investasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
		2024	2025
Jumlah Investor PMDN	Jumlah	31.100	11.695
PMA	Rp	50.580.000.000	N/A
PMDN	Rp	1.485.964.762.333	N/A
Jumlah investasi (PMA/PMDN)	Rp	1.536,36 M	1.048,15 M

Sumber: LKPJ Kabupaten Pangandaran, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Iklim Investasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, secara umum perkembangan investasi daerah masih menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kondisi ekonomi nasional, daya tarik investasi daerah, maupun perubahan strategi investasi para pelaku usaha. Investasi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan promosi potensi daerah kepada calon investor. Capaian indikator pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya tantangan sekaligus peluang yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing investasi Kabupaten Pangandaran.

Pada indikator jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 31.100 investor pada tahun 2024 menjadi 11.695 investor pada tahun 2025. Penurunan tersebut dapat

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi, penyesuaian kebijakan investasi, maupun adanya konsolidasi usaha yang dilakukan oleh pelaku investasi. Meskipun demikian, keberadaan investor PMDN tetap memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah karena investasi domestik umumnya lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang berbasis potensi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat strategi peningkatan investasi melalui pemberian kemudahan berusaha, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, serta pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi.

Sementara itu, nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp50,58 miliar, sedangkan nilai investasi PMDN mencapai Rp1,49 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa investasi di Kabupaten Pangandaran masih didominasi oleh investasi domestik yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan modal dan aktivitas ekonomi daerah. Adapun data nilai investasi PMA dan PMDN pada tahun 2025 belum tersedia atau masih dalam proses verifikasi dan pelaporan. Meskipun demikian, indikator jumlah investasi secara keseluruhan yang merupakan gabungan PMA dan PMDN menunjukkan nilai sebesar Rp1,536 triliun pada tahun 2024 dan menurun menjadi Rp1,048 triliun pada tahun 2025. Penurunan nilai investasi ini perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha di daerah.

D. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah daerah, karena sumber daya manusia yang baik dapat memberikan sumbangan pikiran dan upaya untuk mencapai tujuan di suatu daerah. Fokus sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari rasio ketergantungan yang terdapat pada tabel 2.82 berikut ini:

Tabel 2. 83 Rasio Kelulusan S1/S2/S3 Tahun 2021–2025

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
Lulusan S1	Jumlah	10.136	10.838	11.517	12.046	12.631
Lulusan S2	Jumlah	631	666	697	719	731
Lulusan S3	Jumlah	30	31	38	35	35

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, 2026

Berdasarkan perkembangan indikator pendidikan tinggi selama periode Tahun 2021–2025, kualitas sumber daya manusia di daerah menunjukkan tren yang semakin baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah lulusan pada seluruh jenjang pendidikan tinggi, baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3). Jumlah lulusan S1 meningkat secara konsisten dari 10.136 orang pada tahun 2021 menjadi 12.631 orang pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi sekaligus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sebagai modal utama dalam meningkatkan kualitas hidup dan daya saing.

Pada jenjang pendidikan pascasarjana, jumlah lulusan S2 juga menunjukkan perkembangan yang positif. Selama periode pengamatan, jumlah lulusan S2 meningkat dari 631 orang pada tahun 2021 menjadi 731 orang pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta meningkatnya kebutuhan terhadap tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keahlian yang lebih spesifik. Keberadaan lulusan pascasarjana diharapkan

dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun penguatan sektor-sektor strategis di daerah.

Sementara itu, jumlah lulusan S3 meskipun relatif lebih sedikit dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, tetap menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Jumlah lulusan doktor meningkat dari 30 orang pada tahun 2021 menjadi 35 orang pada tahun 2025, dengan capaian tertinggi sebanyak 38 orang pada tahun 2023. Hal tersebut mencerminkan semakin berkembangnya kapasitas akademik masyarakat serta meningkatnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan penelitian, inovasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan lulusan S3 diharapkan mampu menjadi penggerak dalam menciptakan berbagai inovasi dan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi pada seluruh jenjang menunjukkan bahwa pembangunan bidang pendidikan telah memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan dan persaingan global yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi melalui berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

E. Fokus Daya Saing Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan dalam pengembangan perekonomian di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam pengembangan pariwisata, dilihat dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pada pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, kelestarian, dan berkelanjutan. Berdasarkan manfaat-manfaat tersebut maka pengembangan pariwisata yang baik di Kabupaten Pangandaran turut serta dalam meningkatkan daya saing daerah juga. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, seperti yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 84 Hasil Capaian Kinerja Urusan Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
		2024	2025
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	3.297.362	N/A
PAD sektor pariwisata	Jumlah	27.973.717.000	N/A
Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,84	1,54
Persentase Warisan Budaya Yang Dilindungi	%	20,24	34,52
Tingkat Hunian Akomodasi	%	10,61	N/A

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, 2025

Berdasarkan hasil capaian kinerja Urusan Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran Tahun 2024–2025, sektor pariwisata masih menjadi salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai daerah tujuan wisata unggulan di Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran memiliki beragam potensi wisata alam, budaya, dan ekonomi kreatif yang mampu menarik kunjungan wisatawan dari berbagai daerah. Pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas destinasi, penguatan promosi wisata, serta pelestarian budaya terus menjadi prioritas dalam pembangunan sektor pariwisata.

Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Pangandaran tercatat mencapai 3.297.362 orang. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya daya tarik Kabupaten Pangandaran sebagai destinasi wisata, terutama dengan keberadaan objek wisata pantai, kawasan konservasi, wisata alam, serta berbagai atraksi budaya yang menjadi ciri khas daerah. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata yang pada tahun 2024 mencapai Rp27,97 miliar. Namun demikian, data jumlah kunjungan wisatawan dan PAD sektor pariwisata untuk tahun 2025 belum tersedia atau masih dalam proses pengumpulan dan verifikasi sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan secara menyeluruh antara kedua tahun tersebut.

Sementara itu, rata-rata lama kunjungan wisatawan mengalami penurunan dari 1,84 hari pada tahun 2024 menjadi 1,54 hari pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun Pangandaran tetap menjadi tujuan wisata yang diminati, terdapat kecenderungan wisatawan untuk melakukan kunjungan dengan durasi yang lebih singkat. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan pola perjalanan wisata, preferensi wisatawan, maupun persaingan dengan destinasi wisata lainnya. Di sisi lain, upaya pelestarian budaya menunjukkan perkembangan yang positif, tercermin dari meningkatnya persentase warisan budaya yang dilindungi dari 20,24 persen pada tahun 2024 menjadi 34,52 persen pada tahun 2025.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Capaian Kinerja Makro, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2025 dilakukan terhadap capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin dan Rasio Gini. Kinerja pembangunan makro Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif meskipun belum seluruh target indikator dapat tercapai secara optimal. Secara umum, capaian indikator makro dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah, efektivitas program pembangunan, serta faktor eksternal seperti dinamika ekonomi nasional dan regional.

Capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran tahun 2025 sebesar 5,64 persen, sedikit diatas target sebesar 5,2 persen. Faktor pendukung pertumbuhannya antara lain peningkatan aktivitas sektor pariwisata, perbaikan infrastruktur konektivitas wilayah, serta pertumbuhan UMKM. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan promosi investasi turut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Namun demikian, perlambatan realisasi investasi swasta dan keterbatasan diversifikasi ekonomi menjadi faktor penghambat optimalisasi pertumbuhan.

Capaian TPT Kabupaten Pangandaran tahun 2025 sebesar 1,91 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan target sebesar 1,43 persen. Peningkatan lapangan kerja informal dan musiman berperan dalam menekan angka pengangguran. Selain itu, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi oleh pemerintah daerah turut memperkuat kualitas tenaga kerja lokal.

IPM Kabupaten Pangandaran tahun 2025 tercatat sebesar 71,66 poin, sedikit di atas target sebesar 71,53 poin. Hal ini menunjukkan tren peningkatan kualitas manusia, didorong oleh meningkatnya akses pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, dan perbaikan standar hidup masyarakat. Program

beasiswa pendidikan, penurunan stunting, serta peningkatan cakupan layanan kesehatan menjadi faktor penting pendukung peningkatan IPM.

Capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Pangandaran tahun 2025 sebesar 8,03 persen, sedikit lebih rendah dari target sebesar 8,20 persen. Untuk dapat menekan angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya dengan melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Capaian Rasio Gini Kabupaten Pangandaran tahun 2025 sebesar 0,304 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi dan belum sesuai dengan target sebesar 0,286. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Faktor penyebabnya antara lain ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, keterbatasan peluang kerja formal, dan perbedaan produktivitas antarwilayah. Meski demikian, peningkatan peran UMKM dan kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal menjadi langkah penting untuk menekan ketimpangan di masa mendatang.

Secara umum, capaian indikator makro Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 menunjukkan arah pembangunan yang positif dengan peningkatan pada sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, diperlukan langkah lebih intensif untuk menekan ketimpangan dan kemiskinan, serta memperkuat diversifikasi ekonomi agar pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Pangandaran dibandingkan dengan target Nasional dan Provinsi yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 85 Target dan Capaian Indikator Makro Nasional, Provinsi dan Pangandaran Tahun 2025

No	Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Target Pangandaran	Capaian Pangandaran
		2025	2025	2025	2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	4,96 – 5,37	5,2	5,64
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 - 5,00	6,42 – 6,99	1,43	1,91
3.	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	0,56	0,55	71,53	71,66
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	7 - 8	5,85 – 6,46	8,20	8,03
5.	Rasio Gini (Poin)	0,379 - 0,382	0,383 – 0,390	0,286	0,304

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Pangandaran Triwulan IV Tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, RKP Tahun 2024

Tabel 2. 86 Capaian Indikator Makro Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2	5,64
2	PDRB Per Kapita (Rp. Juta)	Rp	40	38,39
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,43	1,91
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,53	71,66

No	Indikator	Satuan	Target	Capaian
5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,2	8,03
6	Rasio Gini	Poin	0,286	0,304
7	Penurunan Intesitas Emisi GRK (Ton) Co2Eq/Milyar)	Ton CO2 eq/Miliar	10	N/A

Sumber: BPS, Target berdasarkan RPJMD Kab. 2025-2029

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 87 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	2025		
			Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	Indeks Kesehatan	84,78	85,14	85,31	100,20%
2	Usia Harapan Hidup	75,11	75,34	75,45	100,15%
3	Indeks Pendidikan	61,19	61,62	61,45	99,72%
4	Capaian SPM pendidikan	80	82	73,25	89,33%
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	87,7	85,88	85,71	99,80%
6	persentase cakupan layanan infrastruktur	NA	38,1	0	0,00%
7	Indeks Konektivitas Wilayah	1,73	1,75	1,73	98,86%
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,99	66,26	77,7	117,27%
9	Indeks risiko bencana	133,13	133	118,18	88,86%
10	Indeks Daya Saing Pariwisata	0,2	0,5	0	0,00%
11	Indeks Kepuasan Wisatawan	NA	70	74,93	107,04%
12	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto	10,13	10,36	10,3	99,42%
13	Indeks Pembangunan Kebudayaan	NA	52	0	0,00%
14	Indeks Kesalehan Sosial	NA	82,14	0	0,00%
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	NA	73,09	0	0,00%
16	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	NA	63,7	96,07	150,82%
17	Indeks Ketahanan Pangan	83,96	83,96	78,58	93,59%
18	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	5,22	4,11	4,51	109,73%
19	Indeks Reformasi Birokrasi	74,46	76,5	81,43	106,44%
20	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	67,98	69,99	68,43	97,77%
21	Indeks Integritas Nasional	65,66	71,85	0	0,00%
22	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	58,8	53,6418	91,23%
23	indeks daya saing daerah	3,65	3,87	3,72	96,12%

Visi, Misi Tujuan, Sasaran		Indikator	Satuan	2025			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tujuan 3.1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	85,88	85,71	99,80%	
Sasaran 3.1.1	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Persentase cakupan layanan infrastruktur	Poin	38,10			
Sasaran 3.1.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	1,75			
Sasaran 3.1.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66,26	77,7	117%	
Sasaran 3.1.4	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks risiko bencana	Poin	133	118,18	89%	
Misi 4: Mewujudkan Penataan Pariwisata Yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan							
Tujuan 4.1	Mewujudkan daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	0,2	0	0%	
Sasaran 4.1.1	Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata melalui Tata Kelola yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Wisatawan	Poin	70	74,93	107%	
Sasaran 4.1.2	Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persen	10,36	10,30	99%	
Sasaran 4.1.3	Meningkatnya penguatan identitas budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	52	0	0%	

Visi, Misi Tujuan, Sasaran		Indikator	Satuan	2025			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
	dan warisan daerah	an					
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, Dan Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Agama Dan Wawasan Kebangsaan							
Tujuan 5.1	Mewujudkan ketertiban dan ketentraman sosial dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama serta kehidupan berkebangsaan yang partisipatif	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	82,14			
Sasaran 5.1.1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan kebangsaan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	73,09			
Sasaran 5.1.2	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Poin	63,7	96,07	151%	
Misi 6: Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan							
Tujuan 6.1	Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara merata serta berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	83,96	78,58	94%	
Sasaran 6.1.1	Meningkatnya tingkat Ketahanan Pangan Daerah	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	4,11	4,51	110%	
Misi 7: Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani							
Tujuan 7.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	76,50	81,43	106%	

Visi, Misi Tujuan, Sasaran		Indikator	Satuan	2025			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
	yang baik, responsif, bersih dan inovatif						
Sasaran 7.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Poin	69,99	68,43	98%	
Sasaran 7.1.2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas	Indeks Integritas Nasional	Poin	71,85			
Sasaran 7.1.3	Meningkatnya Kinerja tata kelola keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	58,8	53,64	91%	
Sasaran 7.1.4	Meningkatnya sistem inovasi daerah dan kolaborasi lintas sektor	Indeks daya saing daerah	Poin	3,87	3,72	96%	
Misi 8: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa							
Tujuan 8.1	Meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian desa	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2	5,07	98%	
Sasaran 8.1.1	Meningkatnya perekonomian wilayah	Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persen	35,51			
Sasaran 8.1.2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,2	8,03	98%	
Sasaran 8.1.3	Masyarakat Desa yang berdaya saing	Indeks Desa Membangun	Poin	0,8613	0,8399	98%	

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Triwulan IV, Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencakup seluruh

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugasnya dengan melihat pencapaian keberhasilan melalui indikator – indikator yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perangkat Daerah terkait. Untuk melihat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah sesuai dengan aspek pembangunan maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 89 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Ketahanan Pangan (RPJMD)	Poin	76,39	77,39	78,58
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	58,99	66,01	77,7
3	Indeks Risiko Bencana (RPJMD)	Poin	133,13	133,00	118,18
4	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persentase	5,22	4,11	4,51
5	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persentase	27,47	31,10	
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persentase	100,00	100,00	
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,61	0,60	0,63
8	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (persen)	Persentase	-	6,54	
9	Indeks Kapasitas Daerah (RPJMD)	Poin	0,70	0,71	0,69
10	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	-	10,00	188,3
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (persen)	Persentase	26,00	27,62	39,11
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (RPJMD)	Persentase	5,12	5,20	5,64
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,11	75,34	75,45
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	-	73,09	
4	Tingkat Kemiskinan	Persentase	8,75	8,20	8,03
5	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	8,24		
6	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,79	2,92	
7	Indeks Numerasi	Poin	-	49,00	
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,40	0,39	0,337
9	Indeks Pembangunan Manusia (RPJMD)	Poin	71,03	71,53	
10	Rasio Gini	Poin	0,28	0,28	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,36	12,43	
12	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	17,20	15,50	
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,58	1,41	1,91
14	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	35,65	40,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	98,46	98,54	
16	Indeks Literasi	Poin	-	62,00	
17	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,24	0,27	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	85,70	85,88	85,71
2	Indeks Desa Membangun (RPJMD)	Poin	0,84	0,86	8.399
3	Laju Inflasi	(%)	6,15	5,95	2,67
4	Persentase Desa Mandiri	%	-	46,24	100
5	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	-	5,13	4,66
6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,70	0,74	
7	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	10,36	10,43	10,30
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	25,00	26,00	
9	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	-	15,21	
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	-	22,09	
11	Ekspor barang dan jasa (persentase Produk Domestik Regional Bruto)	Persentase	15,34	16,54	0,4
12	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persentase	58,09	60,19	
13	Indeks Inovasi Daerah	Poin	48,03	48,00	45,19
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Integritas Nasional	Poin	65,66	71,85	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,65	3,87	3,72
3	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Poin	0,28	0,30	0,3548
4	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Poin	-	63,70	96,07
5	Persentase Penegakan Perda	Persentase	-	100,00	
6	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,44	4,50	4,57
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,52	3,53	3,55
8	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,34	70,00	98,24
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	
2	Persentase Siswa yang menggunakan bahasa ibu dengan benar	%	-	88,00	
3	Persentase kelulusan siswa	%	100,00	100,00	100
4	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	
5	Rasio jumlah guru dengan jumlah siswa pada tingkat Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio	0:0	01:12	1 : 16,54
6	Nilai Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,31	12,31	12,41

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
7	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	52,00	52,00	
8	Iklim Keamanan SMP	Nilai	74,90	80,28	72,21,
9	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	-	124,00	46,39
10	Iklim Keamanan SD	Nilai	78,85	83,31	77,43
11	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	61,35	68,94	61,57
12	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	62,03	67,62	63,32
13	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	75,65	81,71	69,03
14	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	76,95	68,94	68,75
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	-	63,00	
2	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	-	100,00	
3	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	-	100,00	
4	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	-	100,00	
5	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Persentase	-	85,00	
6	Persentase Sumber Daya Manusia kesehatan yang meningkat kapasitasnya	Persentase	-	100,00	
7	Persentase Izin Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang tertangani	Persentase	-	100,00	
8	Persentase penerapan PHBS	Persentase	-	85	
9	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persentase	100,00	100,00	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	93,81	100,00	
11	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	95,68	100,00	
12	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,40	100,00	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	
14	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	70,87	100,00	
15	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	98,98	100,00	
16	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,97	100,00	
17	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	
18	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	85,95	100,00	
19	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,52	0,52	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
20	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	92,19	100,00	
21	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	96,13	100,00	
22	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100,00	100,00	
23	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (persen)	Persentase	0,00	27,47	79
2	Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi baik	Persentase	0,00	10,00	0
3	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	0,00	0,00	0
4	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	Persentase	45,04	47,54	48
5	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase	0,00	81,44	80
6	Persentase terbangunnya sarana persampahan	Persentase	0,00	0,00	0
7	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Regulasi	Persentase	0,00	50,00	0
8	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persentase	60,00	60,00	65
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (persen)	Persentase	0,00	0,00	0
2	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	Persentase	0,00	100,00	35
3	Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang ditangani	%	0,00	0,00	
4	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Persentase	0,00	50,00	0
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,70	0,68	0,69
2	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	0,00	80,00	100
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan	Persentase	0,00	100,00	100
4	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	0,00	16,00	16,00
5	Response Time Rate	Persentase	0,00	100,00	64,51
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
2	Persentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	Persentase	15,00	15,00	15
3	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	100
4	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	100
5	Persentase meningkatnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase	100,00	90,00	90
6	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	84,00	84,00	84
7	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	Persentase	100,00	100,00	100
8	Persentase Taman Makam Makam Pahlawan yang diKelola	Persentase	100,00	100,00	100
9	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase	100,00	90,00	90
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
1	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	%	90,00	100,00	90
2	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	85,00	100,00	80
3	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	85,00	100,00	90
4	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	75,00	100,00	90
5	Persentase peserta pelatihan yang kompeten	%	70,00	100,00	40
6	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Diselesaikan	Persentase	80,00	100,00	90
7	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	75,00	100,00	80
8	Persentase Tenaga Kerja yang diserap	Persentase	70,00	50,00	75
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	Persentase	0,00	100,00	100
2	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	100
3	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100,00	100,00	100
4	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	0,00	52,00	52
5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00	100
6	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
7	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	100
8	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	696,71	710,00	659,95
9	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	0,00	0,00	
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Angka	94,93	95,00	95,40
2	Jumlah Desa Yang Memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Desa	Desa	0,00	2,00	0
3	Persentase desa rentan rawan pangan	Persentase	0,00	10,00	0
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	89,60	89,65	85
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
1	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah	Persentase	100,00	100,00	0
2	Persentase sengketa tanah yang terselesaikan	Persentase	100,00	10,00	10
3	Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	100,00	100,00	8,33
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	58,99	66,01	77,7
2	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikelola	Persentase	0,00	5,00	0
3	Persentase Jumlah kegiatan dan/atau usaha dilakukan pengawasan yang memiliki izin lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundangundangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persentase	72,00	80,00	20
4	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditangani oleh pemda	%	100,00	100,00	100
5	Persentase Program Penghargaan yang diikuti	%	0,00	0,00	0
6	Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Persentase	30,10	30,50	53,33
7	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	%	0,80	2,87	2,87
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase	100,00	100,00	100
2	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	100
3	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	100,00	100,00	100
4	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	Persentase	100,00	100,00	100
5	Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
6	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	100,00	100,00	100
7	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	100
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Persentase penataan desa	Persentase	0,00	0,00	0
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Persentase	100,00	100,00	100
3	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase	0,00	0,00	0
4	Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	Persentase	65,00	65,00	65
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	0,00	9,47	5,10
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun	Poin	0,00		20,00
3	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase		35,00	40,37
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
1	Persentase Fasilitas Pelayaran Angkutan Sungai, Danau, dan Pelabuhan yang Layak Fungsi	%	0,00	0,00	0,00
2	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	39,00	39,00	33,68
3	Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00	100,00	100
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Persentase tata kelola layanan informasi publik	Persentase	60,00	60,00	93,88
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
1	Persentase Sumber Daya Manusia pengelola koperasi yang bersertifikat	Persentase	2,94	0,00	5
2	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	Persentase	14,56	14,56	5,78
3	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Persentase	0,10	0,10	0,1
4	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah	Persentase	50,60	51,00	69,23
5	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Persentase	24,00	0,00	45,07
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
1	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Persentase	1,00	0,00	
2	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase	0,00	0,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
3	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase	2,00	2,00	
4	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	
5	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase	100,00	100,00	
6	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	20,00	20,00	
7	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	
8	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	1,53	0,72	
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi	Angka	22.409,00	22.409,00	
2	Jumlah atlet olahraga yang mengikuti pembinaan	Orang	200,00	200,00	
3	Jumlah pemuda yang aktif dalam kepramukaan	Angka	44.792,00	44.792,00	
4	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Persentase	-	5,00	4,9
5	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Persentase	-	30,00	30,2
6	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persentase	-	22,00	22,56
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
1	Persentase publikasi data statistik sektoral	Persentase	65,00	40,00	74,62
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
1	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	Persentase	30,00	35,00	54
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
1	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persentase	0,00	100,00	100
2	Persentase Warisan Budaya Yang Dilindungi	Persentase	20,24%	25,00%	34,52%
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
1	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	100
2	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	100
3	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	100
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	0,00	19,95	8,64
5	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Persentase	0,00	10,00	10,00
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
1	Persentase Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Persentase	0,00	89,29	36,67
2	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Poin	3.353,00	3.732,00	3080 C (Kurang)
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Persentase Penanganan Laporan Tindak Pelanggaran di Sektor Perikanan	Persentase	0,00	0,00	0,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
2	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.403,00	1.900,00	1.035,50
3	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	100,00
4	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	900,00	920,00	639,42
5	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	312	320	382,77
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	3297362	4200000	5192687
2	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	68,91	69,91	68,49
3	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	11,83	12,87	12,71
4	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase	0,00	1,29	1,29
5	Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	100
6	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,84	1,85	1,54
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
1	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	100
2	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase	80,00	81,00	98
3	Jumlah Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Ha	486,00	400,00	266
4	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	8.766,04	8.897,53	16.908,90
5	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	Persentase	9,94	10,00	9,73
6	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	100
7	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	215.564,17	218.797,63	223.951,11
8	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	20,00	20,00	20
9	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	100
10	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	51.708,39	52.225,47	52.126,70
11	Jumlah Produksi Telur	Ton	3.503,00	1.196,00	3.006,85
12	Jumlah Produksi Daging	Ton	4.596,00	5.286,00	6.448,61
BB	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persentase	19,23	19,23	19,23
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persentase	0,00	0,00	100
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	23,39	35,00	43,1
4	Persentase penggunaan produk lokal oleh pemerintah daerah	Persentase	77,00	78,00	91,96
5	Persentase penggunaan produk lokal oleh pemerintah daerah	Persentase	100,00	100,00	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
6	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	70,00	70,00	70
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase	76,19	80,95	85,7
8	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	100
BC	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
1	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri di dalam sentra	Persentase	0,00	5,00	5
2	Persentase industri kecil dan menengah yang berizin	Persentase	100,00	100,00	100
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase	0,00	0,00	0
BD	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
1	Persentase Laju Kemandirian Transmigran	Persentase	0,00	0,00	0
2	Persentase Masyarakat yang Memahami Program Transmigrasi	%	0,00	0,00	0
BE	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				
1	Tingkat Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah	Persentase	100,00	100,00	100
2	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	100
3	Persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan pembangunan Daerah	Persentase	90,00	90,00	96,3
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	84,83	84,85	85,54
5	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	100
6	Nilai LHE AKIP Sekretariat Daerah	Poin	70,75	70,75	71,45
7	Cakupan pelayanan kesejahteraan rakyat	%	80,00	85,00	88,73
8	Persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan perekonomian Daerah	Persentase	80,00	85,00	81,46
9	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Poin	3,45	3,50	0
10	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	100
11	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	70,00	70,00	70
BF	4.02 - SEKRETARIAT DPRD				
1	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	72,32	72,32	98,50
2	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	105,88
3	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	100
4	Persentase pencapaian Program Legislasi Daerah yang terfasilitas	Persentase	100,00	100,00	89,83
5	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	54,01
6	Persentase pelayanan keuangan dan administrasi DPRD	Persentase	0	80,00	76,60

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
7	Persentase DPRD pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan	Persentase	60,00	70,00	69,80
BG	5.01 - PERENCANAAN				
1	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	100
2	Capaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase	0,00	80,00	80
3	Persentase perangkat daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	Persentase	100,00	100,00	100
4	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	100
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki keselarasan program RPJMD dan RKPD	Persentase	100,00	100,00	100
6	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	100
7	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	61,00	62,00	98,26
BH	5.02 - KEUANGAN				
1	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	0,00	100,00	94
2	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	0,00	52,00	96
3	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase		100,00	100
4	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor PBB BPHTB	Persentase	76,00	100,00	111,5
5	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	97,00	100,00	100
6	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	97,00
7	Persentase Realiasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainnya	Persentase	87,00	100,00	66,54
8	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	0,00	100,00	97
9	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,94	1,00	NA
10	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	79,00	100,00	80
11	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	63,00	91,00	75
12	Cakupan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai SAP	%	90,00	90,00	NA
13	Persentase realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	Persentase	83,00	100,00	96,21
14	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	90,00	100,00	97
15	Capaian kualitas pengelolaan kas daerah	Persentase		25,00	25
BI	5.03 - KEPEGAWAIAN				
1	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	97,14	91,00	100
2	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	100,00	91,00	100
3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	Persentase	0,00	0,81	2,15

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
4	Nilai LHE AKIP Unsur Pengukuran Kinerja	Poin	19,81	20,39	19,91
5	Persentase layanan pengembangan karir ASN	Persentase	0,00	75,00	100
6	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	90,70	91,00	100
7	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	87,44	91,00	100
8	Persentase formasi sesuai dengan perencanaan kebutuhan ASN	Persentase	0,00	40,00	100
BJ	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
1	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Sertifikat dalam pengembangan kompetensi	Persentase	1,00	1,00	37
BK	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	Persentase Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase	50,00	100,00	0
BL	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				
1	Tingkat Maturitas SPIP (RPJMD)	Level	3,00	3,00	
2	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	93,00	93,00	
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Poin	2,78	2,83	
4	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	93,00	93,00	
5	Nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Poin	3,09	3,19	
6	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Persentase	84,94	85,04	
7	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	Persentase	3,85	4,85	
8	Persentase Hasil Pengawasan	Persentase		100,00	
9	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	93,00	93,00	
BM	7.01 - KECAMATAN				
1	Indeks Integritas Nasional	Persentase	0,00	100,00	
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100,00	100,00	
3	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100,00	100,00	
4	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100,00	100,00	
5	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	
6	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase	100,00	100,00	
7	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	
8	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	
9	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
10	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	
11	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	
12	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	
13	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100,00	100,00	
14	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100,00	100,00	
15	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100,00	100,00	
16	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase	100,00	100,00	
17	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	
18	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	100,00	100,00	
19	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	100,00	100,00	
20	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	100,00	100,00	
21	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	100,00	100,00	
22	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	100,00	100,00	
23	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	0,00	0,00	
24	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	0,00	0,00	
25	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	100,00	100,00	
26	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	0,00	0,00	
27	Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	
28	Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	
29	Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	
30	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	
31	Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	
32	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	
33	Presentase Cakupan Layanan Kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	
34	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	
35	Cakupan layanan kepegawaian	Persentase	100,00	100,00	
36	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase	100,00	100,00	
37	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100,00	100,00	
38	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100,00	100,00	
39	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100,00	100,00	
40	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	Persentase	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
41	Persentase koordinasi ketentraman dan keteriban umum	Persentase	100,00	100,00	
42	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100,00	100,00	
43	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100,00	100,00	
44	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100,00	100,00	
45	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100,00	100,00	
46	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase	100,00	100,00	
47	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase	100,00	100,00	
48	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase	100,00	100,00	
49	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase	100,00	100,00	
50	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase	100,00	100,00	
51	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase	100,00	100,00	
52	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase	0,00	0,00	
53	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase	0,00	0,00	
54	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	100,00	100,00	
55	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	100,00	100,00	
56	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	100,00	100,00	
57	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	100,00	100,00	
58	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	100,00	100,00	
59	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	100,00	100,00	
60	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	100,00	100,00	
61	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persentase	100,00	100,00	
62	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	
63	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	
64	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	
65	Persentase Laporan Keuangan dengan Kualitas yang Baik	Persentase	100,00	100,00	
66	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	
67	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	
68	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persentase	100,00	100,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET	CAPAIAN
				2025	2025
69	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase	100,00	100,00	
70	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase	100,00	100,00	
71	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase	100,00	100,00	
72	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase	100,00	100,00	
73	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase	100,00	100,00	
74	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase	100,00	100,00	
75	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase	100,00	100,00	
BN	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Persentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan	%	73,00	75,00	94,95
2	Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	%	60,00	61,00	90,33
3	Persentase masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	Persentase	75,00	76,00	102,11
4	Persentase Masyarakat yang Memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%	81,00	82,00	84
5	Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah	Persentase	80,00	81,00	97,05

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Triwulan IV, Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2025

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 serta realisasi RPJMD. Keseluruhan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, menunjukkan gambaran sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029. Realisasi anggaran RPJMD Kabupaten Pangandaran s/d Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 90 Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 Sampai Triwulan IV Tahun 2025

No.	Nama Urusan	Target RPJMD pada Tahun 2025	Realisasi RPJMD	Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		316.052.335.399	98,07	309.965.288.101
1	PENDIDIKAN	89.301.677.280	184,27	164.551.997.390
2	KESEHATAN	147.800.902.017	67,39	99.602.318.488

No.	Nama Urusan	Target RPJMD pada Tahun 2025	Realisasi RPJMD	Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	66.864.683.650	59,05	39.483.818.834
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.677.125.778	24,33	408.006.990
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6.597.629.294	8,07	532.717.919
6	SOSIAL	3.810.317.380	141,36	5.386.428.480
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		35.848.583.065	44,76	16.044.269.553
1	TENAGA KERJA	686.635.190	100,16	687.731.450
2	TRANSMIGRASI	0	0,00	0
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	442.532.413	165,41	732.004.534
3	PANGAN	258.503.988	91,21	235.787.100
4	PERTANAHAN	38.950.000	23,59	9.190.000
5	LINGKUNGAN HIDUP	4.267.843.697	106,87	4.560.837.159
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	238.746.500	72,30	172.625.000
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	937.617.286	51,99	487.467.730
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.341.353.568	9,43	503.950.510
9	PERHUBUNGAN	19.978.529.250	22,45	4.484.852.391
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	580.215.938	61,50	356.860.863
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	124.638.400	54,67	68.138.400
12	PENANAMAN MODAL	119.540.600	121,46	145.190.300
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.463.000.000	187,86	2.748.442.354
14	STATISTIK	16.634.000	102,24	17.006.000
15	PERSANDIAN	24.300.000	66,36	16.126.612
16	KEBUDAYAAN	839.315.500	43,65	366.360.000
17	PERPUSTAKAAN	403.347.619	85,78	345.990.306
18	KEARSIPAN	86.879.116	121,67	105.708.844
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		66.405.317.405	63,21	41.978.104.737
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	30.257.881.908	25,33	7.663.481.365
2	PARIWISATA	26.227.427.104	94,50	24.784.408.053
3	PERTANIAN	6.807.990.955	95,24	6.484.103.119
4	PERDAGANGAN	110.756.038	61,52	68.138.400
5	PERINDUSTRIAN	3.001.261.400	99,22	2.977.973.800
4. PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		25.678.352.491	26,33	6.762.379.955
1	SEKRETARIAT DAERAH	18.989.846.591	4,34	823.931.561
2	SEKRETARIAT DPRD	6.688.505.900	88,79	5.938.448.394

No.	Nama Urusan	Target RPJMD pada Tahun 2025	Realisasi RPJMD	Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2025
5. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		240.379.223.570	53,0618	127.549.658.845
1	PERENCANAAN	2.746.452.812	64,13	1.761.412.735
2	KEUANGAN	235.728.977.133	52,05	122.687.291.487
3	KEPEGAWAIAN	1.315.507.750	185,68	2.442.646.403
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	336.760.500	141,32	475.908.345
5	PENELITAN DAN PENGEMBANGAN	251.525.375	72,52	182.399.875
6. PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		9.761.609.800	21,73	2.121.543.000
1	INSPEKTORAT DAERAH	9.761.609.800	21,73	2.121.543.000
7. KEWILAYAHAN		495.364.287	66,32	328.520.037
1	KECAMATAN	495.364.287	66,32	328.520.037
8. PEMERINTAHAN UMUM		3.435.246.985	92,83	3.188.979.199
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.435.246.985	92,83	3.188.979.199
Total		698.056.033.002	72,76	507.938.743.427

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Triwulan IV

Realisasi anggaran RPJMD tahun 2025 mencapai 72,76% dibandingkan dengan pagu indikatif program RPJMD. Hal ini sangat dipengaruhi oleh validnya pagu indikatif program yang dimuat dalam RKPD. Realisasi juga dipengaruhi oleh konsistennya kegiatan dalam RKPD dianggarkan dalam APBD.

Tabel 2. 91 Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Sampai Triwulan IV Tahun 2025

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD S/D Tahun 2025	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		63,36	72,86
1	PENDIDIKAN	33,57	93,99
2	KESEHATAN	100,00	81,73
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	13,26	58,67
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	15,95
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	138,33	72,63
6	SOSIAL	95,00	114,21
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		51,03	56,51
1	TENAGA KERJA	93,75	79,32
2	TRANSMIGRASI	0,00	0,00
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	87,50	66,77
3	PANGAN	N/A	36,55
4	PERTANAHAN	54,17	40,48
5	LINGKUNGAN HIDUP	69,86	41,04
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100,00	92,52

No.	Nama Urusan	Rata-rata Tingkat Capaian RPJMD S/D Tahun 2025	
		Kinerja (%)	Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	84,62	85,10
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	N/A	9,54
9	PERHUBUNGAN	N/A	17,48
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	N/A	80,50
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	18,78	69,20
12	PENANAMAN MODAL	75,72	10,68
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25,00	106,40
14	STATISTIK	14,67	103,80
15	PERSANDIAN	28,57	83,56
16	KEBUDAYAAN	50,00	68,90
17	PERPUSTAKAAN	62,36	80,84
18	KEARSIPAN	0,53	1,05
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		180,43	91,25
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	N/A	78,06
2	PARIWISATA	305,73	91,19
3	PERTANIAN	308,41	93,80
4	PERDAGANGAN	66,13	93,97
5	PERINDUSTRIAN	41,45	99,22
4. PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		91,05	40,09
1	SEKRETARIAT DAERAH	80,60	55,73
2	SEKRETARIAT DPRD	101,50	24,45
5. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		96,14	120,90
1	PERENCANAAN	95,00	80,40
2	KEUANGAN	80,00	50,65
3	KEPEGAWAIAN	176,63	172,18
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	35,00	217,31
5	PENELITAN DAN PENGEMBANGAN	94,07	83,94
6. PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		87,00	52,22
1	INSPEKTORAT DAERAH	87,00	52,22
7. KEWILAYAHAN		66,65	89,30
1	KECAMATAN	66,65	89,30
8. PEMERINTAHAN UMUM		107,71	79,63
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	107,71	79,63
Total		92,92	75,34

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Triwulan IV

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, terdapat

beberapa kendala utama yang menjadi faktor penyebab rendahnya capaian kinerja fisik dan keuangan, yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran
 - a. Banyak program dan kegiatan tidak dapat diakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) akibat keterbatasan anggaran daerah.
 - b. Sebagian besar anggaran terserap untuk membayar utang tahun 2024, sehingga mengurangi ruang fiskal untuk program baru.
2. Realokasi dan Efisiensi Anggaran
 - a. Anggaran mengalami pergeseran untuk mendukung prioritas capaian visi dan misi dalam RPJMD 2025-2029.
 - b. Efisiensi anggaran menyebabkan sebagian besar program RKPD tidak dapat direalisasikan dalam APBD.
3. Keterlambatan Pelaksanaan dan Pelaporan
 - a. Beberapa urusan baru akan mencatat capaian fisiknya pada triwulan empat, sehingga realisasi triwulan tiga terlihat sangat rendah.
 - b. Keterlambatan penyampaian laporan capaian kinerja dari SKPD ke Bappeda memperlambat proses pelaporan kepada pemerintah provinsi.

Sejumlah faktor yang menghambat pencapaian kinerja dalam RKPD Tahun 2025 antara lain:

1. Ketidakseimbangan antara Perencanaan dan Pendanaan
 - a. Banyak program RKPD yang tidak terakomodir dalam APBD karena keterbatasan anggaran.
 - b. Perencanaan anggaran dan target kinerja dalam RKPD belum sepenuhnya dapat didanai secara optimal.
2. Kendala Teknis dalam Implementasi Program dan Kegiatan
 - a. Program dalam beberapa urusan memiliki capaian fisik sangat rendah atau bahkan nol persen, seperti Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (0%) dan Transmigrasi (0%).
 - b. Mayoritas program dalam urusan tersebut tidak masuk dalam DPA akibat keterbatasan anggaran.
3. Penyerapan Anggaran yang Tidak Optimal
 - a. Rata-rata realisasi keuangan hanya 75,34%, jauh lebih rendah dibandingkan realisasi fisik yang mencapai 92,92%.
 - b. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa program telah berjalan, pencairan anggarannya belum optimal.
4. Keterlambatan Perhitungan dan Evaluasi Capaian Kinerja
 - a. Masih terdapat capaian kinerja yang belum terhitung dan ada juga yang capaiannya masih rendah.

Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan RKPD Tahun Berikutnya

Dari evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025, diperlukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD pada tahun berikutnya, yaitu:

1. Penyesuaian Perencanaan dan Anggaran
 - a. Melakukan reviu terhadap RKPD dan Renja Perangkat Daerah agar lebih realistis sesuai dengan kondisi fiskal dan kapasitas APBD.
 - b. Menyusun prioritas belanja yang lebih efisien agar program strategis dapat tetap berjalan.
2. Penguatan Pengendalian dan Evaluasi Berkala
 - a. Memastikan adanya pengendalian dan evaluasi capaian program/kegiatan secara berjenjang agar kendala dapat diidentifikasi lebih awal.
 - b. Mempercepat mekanisme pencatatan dan pelaporan kinerja dari

- SKPD untuk menghindari keterlambatan pelaporan ke provinsi.
- 3. Verifikasi Keselarasan Dokumen Perencanaan
 - a. Memastikan keselarasan antara RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja Perangkat Daerah agar program/kegiatan dalam APBD benar-benar mendukung target pembangunan daerah.
 - b. Menyusun sistem pemantauan yang lebih ketat untuk mencegah adanya program yang tidak terakomodir dalam DPA.
 - 4. Percepatan Implementasi Program dan Pencairan Anggaran
 - a. Mengoptimalkan proses pencairan anggaran agar program yang telah berjalan tidak terhambat oleh masalah administratif.
 - b. Mendorong SKPD untuk segera melaksanakan program sejak awal tahun agar tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun yang berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan.

Penjelasan secara lengkap mengenai matriks akan disampaikan lebih rinci pada *Lampiran I*.

2.2.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

A. Capaian Realisasi SPM

Penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten.

Tabel 2. 92 Pencapaian Indikator SPM Tahun 2023-2025

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pendidikan							
Pendidikan Dasar Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi	100%	100%	100%	100%	100%	98,14%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	dalam pendidikan kesetaraan						
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kesehatan							
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	89,27%	100%	95,54%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	89,23%	100%	87,93%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	90,60%	100%	88,39%
Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	79,89%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	92,87%	100%	99,87%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	73,43%	100%	99,42%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	90,86%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan	100%	100%	100%	93,16%	100%	98,63%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	pelayanan Kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	90,93%	100%	99,74%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	93,31%	100%	94,79%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	92,98%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	91,83%	100%	100%
Pekerjaan Umum							
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok pokok air minum sehari – hari	100%	90,54%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah warga kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air	100%	100%	100%	100%	100%	90%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	limbah domestik						
Perumahan Rakyat							
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase warga kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase warga kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Trantibumlinmas							
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota	Persentase warga kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	99,72%	100%	96,83%	100%	91%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	95%	100%	98%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	90,98%	100%	88,33%
Pelayanan Penyelamatan dan	Persentase warga negara yang	100%	99,96%	100%	95,84%	100%	98,75%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Evakuasi Korban Bencana	memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana						
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Persentase warga kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	94,35	100%	44,72%	100%	26,59%
Sosial							
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	98,46%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	98,33%
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	96,92%
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	97,36%
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap	100%	100%	100%	100%	100%	96%

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Korban Bencana Kabupaten/ Kota	darurat dan paska						

Sumber: Laporan SPM Kabupaten Pangandaran Tahun 2023, 2024, 2025.

Berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pangandaran Tahun 2023–2025, secara umum penyelenggaraan pelayanan dasar telah menunjukkan kinerja yang baik dengan sebagian besar indikator mampu mencapai target yang telah ditetapkan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Oleh karena itu, pencapaian indikator SPM menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Hasil capaian selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan akses layanan bagi seluruh masyarakat.

Pada bidang pendidikan, capaian SPM menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase warga negara usia 7–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) secara konsisten mencapai 100 persen pada periode 2023 hingga 2025. Demikian pula dengan persentase warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD yang berhasil mempertahankan capaian sebesar 100 persen selama tiga tahun berturut-turut. Sementara itu, persentase warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun 2025 mencapai 98,14 persen, sedikit menurun dibandingkan capaian 100 persen pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal.

Pada bidang kesehatan, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan mendekati target 100 persen. Pelayanan kesehatan balita serta pelayanan kesehatan pada usia lanjut pada tahun 2025 telah mencapai target 100 persen. Selain itu, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar mencapai 99,87 persen, pelayanan kesehatan usia produktif mencapai 99,42 persen, pelayanan kesehatan penderita hipertensi mencapai 98,63 persen, serta pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus mencapai 99,74 persen. Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2024, masing-masing mencapai 95,54 persen, 87,93 persen, dan 88,39 persen pada tahun 2025. Di samping itu, pelayanan kesehatan bagi orang terduga tuberkulosis dan orang dengan risiko terinfeksi HIV berhasil mencapai target 100 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin baiknya cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Pada bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, capaian SPM juga menunjukkan hasil yang relatif baik. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2025 telah mencapai target 100 persen setelah pada tahun 2023 masih berada pada angka 90,54 persen. Sementara itu, pelayanan pengolahan air limbah domestik mencapai 90 persen pada tahun 2025, sedikit menurun dibandingkan capaian 100 persen pada tahun sebelumnya. Untuk bidang perumahan rakyat, seluruh indikator seperti penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah berhasil mencapai target 100 persen selama periode 2023–2025. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap hunian yang layak dan aman.

Pada bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), capaian indikator menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 mencapai 91 persen, sedangkan pelayanan informasi rawan bencana mencapai 98 persen. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga menunjukkan capaian yang tinggi yaitu sebesar 98,75 persen. Namun demikian, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mengalami penurunan menjadi 88,33 persen, dan pelayanan pemadaman, penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran mengalami penurunan cukup signifikan dari 94,35 persen pada tahun 2023 menjadi 26,59 persen pada tahun 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan layanan kebencanaan dan kebakaran.

Sementara itu, pada bidang sosial, hampir seluruh indikator mampu mempertahankan capaian yang sangat baik. Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti pada tahun 2025 masing-masing mencapai 98,46 persen, 98,33 persen, 96,92 persen, dan 97,36 persen. Selain itu, perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat tanggap darurat dan pascabencana juga mencapai 96 persen. Meskipun terdapat sedikit penurunan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 100 persen, secara umum pelayanan sosial di Kabupaten Pangandaran masih menunjukkan kinerja yang sangat baik. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus memperkuat kualitas dan jangkauan pelayanan dasar agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak-haknya secara merata sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang sudah direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah biasanya muncul dari keunggulan yang belum dipergunakan secara optimal dan

kekurangan yang tidak di atasi untuk mencapai peluang yang muncul dan meminimalisasi hambatan yang terjadi. Pengoptimalan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, akan membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang keunggulan, kekurangan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan yang diampu. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang agar didapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dapat dipecahkan. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan menjadi pemicu permasalahan pembangunan daerah. Selain itu kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat juga dapat berpengaruh pada munculnya pembangunan daerah. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang sudah direncanakan diantaranya:

1. Capaian IPM Kabupaten Pangandaran masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional
2. Masih rendahnya pertumbuhan PDRB
3. Belum optimalnya Pariwisata Kabupaten Pangandaran yang memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat
4. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah
5. Masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Pangandaran
6. Belum optimalnya aksesibilitas wilayah
7. Tingkat pengangguran yang belum signifikan menurun
8. Menurunnya realisasi investasi daerah
9. Kondisi fiskal daerah yang tidak sehat
10. Belum optimalnya lingkungan hidup yang berkelanjutan
11. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

Kemudian, permasalahan tersebut dapat dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Seperti pada tabel

berikut ini:

Tabel 2. 93 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Capaian IPM Kabupaten Pangandaran masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional	1. Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pangandaran masih pada lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) khususnya masih di kelas 8	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan 2. Tingginya angka kemiskinan 3. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan 4. Belum optimalnya pendidikan kesetaraan
		2. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	1. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Kesehatan 2. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Kendaraan Operasional 3. Belum optimalnya pelayanan secara preventif dan promotive kepada masyarakat 4. Kurangnya tenaga dokter untuk mengakomodasi, dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk
		3. Rendahnya daya beli masyarakat	1. Masih tingginya angka kemiskinan 2. Masih adanya balita yang bergizi buruk 3. Pendapatan masyarakat yang tidak meningkat cukup baik
2.	Masih rendahnya pertumbuhan PDRB	Sepanjang tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Pangandaran diperkirakan mencapai 5,07 persen, yang tetap menunjukkan tren positif meskipun sedikit melambat	1. Masih rendahnya produktivitas pendapatan masyarakat 2. Rendahnya Pendapatan masyarakat, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga keinginan untuk melakukan konsumsi menurun

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5,14 persen.	3. Rendahnya permintaan barang dan jasa dari kabupaten Pangandaran 4. UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan dan pemasaran 5. Kabupaten pangandaran belum memiliki rumah kemas (sentra UMKM) 6. Penurunan produksi ikan tangkap disebabkan oleh terjadinya abrasi pantai
		Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor yang menyumbang kontribusi tertinggi terhadap PDRB trend pertumbuhannya cenderung menurun yakni sebesar 26,73 pada tahun 2021 menjadi sebesar 25,60 pada tahun 2024	1. Belum optimalnya PDRB pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Belum optimalnya subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,13 persen pada tahun 2024, menurun 0,04 persen. 3. Sulitnya sektor pertanian akses kredit ke perbankan, juga akses ke pasar, dan beberapa masalah internal di sektor pertanian itu sendiri seperti rendahnya kualitas SDM dan teknologi 4. Kurangnya minat pemuda untuk menjadi petani sebagai profesi dan mata pencaharian sehari-hari 5. Berkurangnya lahan persawahan yang diakibatkan adanya pembangunan infrastruktur dan permukiman yang tidak terkendali
		Komposisi PDRB untuk sektor penyedia akomodasi dan makan minum belum menyumbang kontribusi tinggi padahal sektor ini yang di dalamnya ada kegiatan pariwisata merupakan sektor unggulan Kabupaten Pangandaran	1. Belum optimalnya promosi sektor pendukung pariwisata 2. Belum optimalnya pengembangan potensi wisata 3. Belum optimalnya infrastruktur pendukung perekonomian seperti jalan usaha tani, dan infrastruktur menuju destinasi wisata

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			4. Belum optimalnya aksesibilitas menuju Pangandaran
3.	Belum optimalnya Pariwisata Kabupaten Pangandaran yang memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat	1. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata dan produk pariwisata	1. Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata belum optimal 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata 3. Kurangnya keterampilan dan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata 4. Belum terpenuhinya indikator standar pengembangan pariwisata yang berkelanjutan 5. Perubahan motivasi wisatawan terhadap pariwisata massal menjadi pariwisata Minat khusus (segmentasi destinasi wisata, desa wisata) 6. Kemudahan akses menuju wisata yang belum terintegrasi
		2. Belum optimalnya promosi pariwisata	1. Belum masifnya promosi pariwisata melalui media di level nasional dan internasional 2. Belum optimalnya kerjasama promosi pariwisata
		3. Belum optimalnya daya tarik wisata	1. Belum diterapkannya kebudayaan lokal sebagai identitas daerah untuk pemanfaatan pada sector Pariwisata 2. Belum adanya Atraksi/event wisata yang menjadi ciri khas 3. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, desa, dan kelompok penggerak pariwisata dalam membangun daya tarik wisata

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
4.	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	1. Terjadinya fluktuasi harga pangan utama pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,93%, lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2023 yang mencapai 1,81%.	1. Stabilisasi dan Keterjangkauan Harga Pangan, sebagian komoditas sering mengalami fluktuasi harga 2. Masih Kurangnya Ketersediaan Pasokan Beras, sebagian kecil gabah masih dipasok dari luar Pangandaran 3. Kurang optimalnya pengelolaan Pasar Rakyat oleh Pemda dikarenakan belum tercukupinya kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai
		2. Belum tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang baik	1. Masih rendahnya kualitas hasil pangan daerah 2. Belum optimalnya diversifikasi olahan pangan local 3. Masih rendahnya wawasan pelaku usaha pangan dalam menghasilkan produk B2SA
5.	Masih tingginya angka kemiskinan Kabupaten Pangandaran	1. Belum optimalnya infrastruktur pelayanan dasar	1. Terbatasnya pelayanan air baku Masyarakat 2. Masih rendahnya akses air minum Perpipaan (2023: Akses Air minum layak 86,47%; Akses Air minum perpipaan 13%; Akses Air minum aman 0%) 3. Belum meratanya pelayanan sanitasi (2023: Akses Sanitasi Layak 70.82%; Akses Sanitasi aman 0%; Belum memiliki IPAL) 4. Masih adanya rumah tidak layak huni 5. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh
		2. Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	1. Cakupan dan Kualitas Layanan Pendidikan masih rendah 2. Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas 3. Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan masih rendah (Rumah sakit hanya tersedia 1;

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			Rasio puskesmas persatuan penduduk 1 : 29.480, Ideal 1 : 16.000; Rasio dokter 19:100.000, ideal 96:100.000) 4. Masih adanya kasus stunting
		3. Belum optimalnya aktivitas perekonomian masyarakat	1. Belum optimalnya sub sektor unggulan masuarakat pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan 2. Belum optimalnya subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,13 persen pada tahun 2024, menurun 0,04 persen 3. Belum optimalnya daya saing produk, kelembagaan, dan pemberdayaan UMKM 4. Rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan 5. Belum optimalnya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan implementasi TKDN dalam pembangunan daerah
		4. Belum optimalnya perlindungan sosial, akurasi bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.	1. Data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang ada di luar panti belum terdata secara maksimal, sehingga penentuan target capaian kurang akurat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi dan penanggulangan Bencana
6.	Belum optimalnya aksesibilitas wilayah	Masih kurangnya konektivitas transportasi dan logistik	1. Belum adanya integrasi antar moda (Terminal, Bandara, Pelabuhan, Kereta Api) 2. Kinerja system logistic masih belum optimal 3. Terdapat pusat kegiatan yang belum terhubung dengan pusat kegiatan lainnya 4. Belum optimalnya sarana prasarana transportasi 5. Jalur alternatif dari dan menuju Pangandaran belum memadai

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			6. Terbatasnya jaringan infrastruktur jalan menghambat akses menuju kawasan perkantoran dan menurunkan efisiensi pelayanan pemerintahan
7.	Tingkat pengangguran yang belum signifikan menurun	Masih minimnya produktivitas, kualitas dan penyerapan angkatan kerja	1. Masih minimnya ketersediaan lapangan kerja 2. Rendahnya kompetensi tenaga kerja 3. Belum tersedianya data ketenagakerjaan yang valid
8.	Menurunnya realisasi investasi daerah	Menurunnya jumlah investor	1. Tidak adanya regulasi Pemberian Fasilitas / Insentif yang dapat memberikan kemudahan dan menarik para investor untuk berinvestasi di daerah 2. Belum adanya peta potensi yang dapat membantu investor untuk menentukan lokasi dan sektor usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka 3. Kurangnya partisipasi promosi di berbagai event daerah maupun nasional 4. Keterbatasan SDM yang memadai 5. Kurangnya sosialisasi dalam berbagai platform digital
9.	Kondisi fiskal daerah yang tidak sehat	1. Terdapat hutang daerah	1. Lemahnya sistem pengendalian intern 2. Terdapat kegiatan yang bersumber dari APBD belum dibayarkan sehingga menimbulkan hutang
		2. Pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal	1. Lemahnya sistem pengendalian intern 2. Kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		3. Belum optimalnya pengelolaan potensi PAD	1. Belum optimalnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah 2. Beberapa jenis retribusi belum terbentuk perdanya, 3. Belum adanya pelayanan pajak dan retribusi berbasis elektronik 4. Belum optimalnya kemampuan aparatur pelayanan pajak dan retribusi daerah 5. Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah
10.	Belum optimalnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Capaian Indeks Kualitas air, udara, dan tutupan lahan yang belum baik	1. Masih adanya kerusakan kawasan lindung 2. Belum optimalnya pengawasan dan penegakkan hukum lingkungan terhadap kegiatan/usaha 3. Belum optimalnya pengelolaan sampah 4. Masih terjadinya pencemaran air
11.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Masih rendahnya capaian pada komponen pengukuran dan pelaporan kinerja 2. Penggunaan ukuran kinerja/indikator kinerja belum sepenuhnya mencerminkan tujuan yang hendak dicapai
		2. Masih kurangnya pemahaman terkait reformasi birokrasi	1. Kurangnya sosialisasi penerapan reformasi birokrasi 2. Kurangnya komitmen seluruh perangkat daerah
		2. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital (SPBE dan SDI) belum optimal	1. Sarana dan prasarana SPBE belum memadai 2. Belum menjadi skala prioritas utama pemerintah daerah 3. Kualitas dan Kuantitas SDM masih kurang 4. Koordinasi dan kerjasama antar instansi yang masih lemah dalam penerapan SPBE

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			5. Kebijakan Standar aplikasi tidak seragam
		3. Belum terwujudnya ASN berbasis sistem merit	1. Belum optimalnya integrasi data kepegawaian dalam mendukung sistem merit 2. Belum optimalnya pemetaan kompetensi sebagai dasar talentpool 3. Sistem informasi pendukung sistem merit belum optimal 4. Belum optimalnya penggajian, pemberian penghargaan dan disiplin (reward & punishment) 5. Masih rendahnya pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring
		4. Belum terintegrasinya sinergitas dan konsistensi perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pengendalian dan evaluasi	1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antar pusat dan daerah 2. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan 3. Masih sering terjadi ego sektoral dalam proses perencanaan

Sumber: Olahan Penulis, 2025

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Berikut ini adalah hasil identifikasi terhadap berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Pangandaran:

Tabel 2. 94 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
A. Pendidikan				

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Masih rendahnya indeks pendidikan	1. Belum optimalnya pendidikan kesetaraan 2. Angka Harapan lama Sekolah masih rendah 3. Angka Rata-rata lama Sekolah masih rendah	1. Kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan belum maksimal 2. Minat masyarakat untuk belajar belum maksimal	1. Peningkatan cakupan dan kualitas pendidikan 2. Peningkatan serta pemerataan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan 3. Pemberian beasiswa bagi pelajar 4. Bantuan Operasional bagi sekolah non formal 5. Sosialisasi dan edukasi melalui Posyandu, PKK, dan RT/RW terkait pentingnya sekolah PAUD
2	Masih rendahnya angka harapan sekolah	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan 2. Tingginya angka kemiskinan 3. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan	1. Banyaknya pelajar yang memilih bekerja dari pada bersekolah 2. Pendapatan masyarakat belum tinggi 3. Ketersediaan sarana pendidikan belum maksimal 4. Jarak sekolah ada yang relatif masih jauh 5. Minat masyarakat untuk belajar belum tinggi 6. Minimnya pendidikan non formal yang bermutu 7. Minimnya informasi tentang beasiswa dimasyarakat	
3	Masih rendahnya angka rata- rata lama sekolah	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan 2. Tingginya angka kemiskinan 3. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan	1. Banyaknya pelajar yang memilih bekerja dari pada bersekolah 2. Pendapatan masyarakat belum tinggi 3. Ketersediaan sarana pendidikan belum maksimal 4. Jarak sekolah ada yang	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		4. belum optimalnya pendidikan kesetaraan	relatif masih jauh 5. Minat masyarakat untuk belajar belum tinggi 6. Minimnya pendidikan non formal yang bermutu 7. Minimnya informasi tentang beasiswa dimasyarakat	
4	Masih rendahnya pesentase jumlah siswa PAUD	1. Minimnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak ke PAUD 2. Kualitas dan Kuantitas layanan PAUD belum optimal	1. Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang penting menyekolahkan ke PAUD 2. Minimnya pendidikan PAUD yang bermutu 3. Masih sedikitnya jumlah PAUD yang ada 4. Jarak antar PAUD relatif jauh 5. Masih banyaknya tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan belum S1/D4	
5	Masih rendahnya angka partisipasi kasar SD	1. Akses ke sekolah masih ada sebagian anak yang cukup kesulitan 2. Pelayanan pendidikan sekolah dasar belum optimal	1. Ada sekolah yang memiliki jarak relatif jauh antara sekolah dan pemukiman 2. Kemampuan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya belum optimal	
7	Masih rendahnya angka partisipasi Murni SD	1. Akses ke sekolah masih ada sebagian anak yang	1. Ada sekolah yang memiliki jarak relatif jauh antara	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		cukup kesulitan 2. Pelayanan pendidikan sekolah dasar belum optimal	sekolah dan pemukiman 2. Pemetaan dan Pendistribusian tenaga pendidik yang belum merata 3. Kemampuan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya belum optimal	
8	Rasio sebaran sekolah belum optimal	Sebaran bangunan sekolah tidak merata	Sebaran bangunan sekolah tidak merata	
9	Rasio Perbandingan Jumlah Guru dan Jumlah Murid SD/MI, SMP/MTs belum optimal	1. Penyebaran guru tidak merata 2. Kualifikasi guru belum sesuai	1. Kebijakan penempatan dan redistribusi guru belum efektif 2. Kesempatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru masih terbatas	
10	Kekurangan Ketersediaan APE	Minimnya sarana prasarana Alat PERaga Edukatif (APE)	Ketersediaan alat pendukung kegiatan pembelajaran merupakan salah satu aspek kualitas yang dipantau dalam akreditasi	
11	Pelayanan Pendidikan PAUD belum maksimal	kekurangan Tenaga Pendidik dengan kualifikasi S1/D4	Belum maksimalnya kebijakan dari pemerintah daerah berupa regulasi yang diperlukan untuk memitigasi berbagai faktor penyebab rendahnya kepemilikan kualifikasi pada pendidik PAUD, serta minimnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			program studi guru PAUD di Kab. Pangandaran	
12	kemampuan literasi SD dan SMP masih rendah	Tenaga pendidik di satuan pendidikan belum terpenuhi sesuai kebutuhan yang diharuskan	belum terpenuhinya kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	
13	Kemampuan Numerasi SD dan SMP masih rendah	Tenaga pendidik di satuan pendidikan belum terpenuhi sesuai kebutuhan yang diharuskan	belum terpenuhinya kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	
14	APS (5-6) masih belum optimal	Pendataan anak usia 5 - 6 tahun dan jumlah satuan pendidikan PAUD menjadi syarat untuk tercapainya APS yang meningkat	1. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun belum tercapai 2. Masih ada satuan pendidikan yang belum berizin operasional	
15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan masih rendah	Daftar anak usia 7-18 tahun yang tidak	1. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		berpartisipasi di satuan SD/SMP	layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun belum tercapai 2. Masih ada satuan pendidikan yang belum berizin operasional	
B. Kesehatan				
1	Masih adanya balita yang bergizi buruk	1. Kurangnya tenaga dokter untuk mengakomodasi, dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 penduduk 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat 3. Tingginya angka kemiskinan	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat 3. Masih kurangnya program-program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat 4. Pendapatan masyarakat relatif rendah 5. Kurangnya SDM kesehatan 6. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 7. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 8. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit	1. Perbaikan layanan kesehatan 2. Peningkatan edukasi kesehatan melalui Posyandu, PKK, dan sekolah 3. Akses sanitasi dan air minum aman(PHBS)
2	Belum optimalnya penanganan diare	Masih terjadi kasus diare	1. Belum optimalnya sosialisasi terkait menjaga kebersihan dan	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			memilah makan sehat 2. Masyarakat masih menganggap diare sebagai penyakit yang biasa terjadi sehingga penanganannya tidak optimal	
3		Masih kurangnya pelaksanaan surveilans migrasi	1. Belum optimal sosialisasi terkait dengan pekerja dari luar daerah endemis untuk melakukan screening malaria	
4	Masih rendahnya Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	Rumah sakit hanya terdapat di pusat kegiatan saja dan rasio pelayanan minimal belum terpenuhi	1. Ketersediaan sarana prasarana kesehatan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat belum optimal 2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran	
5	Masih minimnya kuantitas tenaga kesehatan (Dokter)	Kurangnya dokter untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dimana rasio dokter Kab. Pangandaran 19 per 100.000 penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 per 100.000 penduduk dan 96 dokter	1. Kurangnya SDM kesehatan 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan di Kabupaten Pangandaran sedikit	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		umum per 100.000 penduduk		
6	Terjadi peningkatan kasus DBD dari tahun ke tahun	Terjadi peningkatan kasus DBD dari tahun ke tahun	1. Belum optimalnya penanganan sumber perkebangbiakan nyamuk penyebab DBD 2. belum optimalnya upaya sosialisasi mengenai penanganan DBD	
C. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang				
1	belum optimalnya Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	1. Penambahan ruas Jalan Baru Kabupaten (SK Jalan Baru) 2. Masih terdapat jalan dalam kondisi rusak/belum dibangun	1. Terdapat perubahan SK jalan sehingga menambah panjang jalan kabupaten 2. Belum adanya peraturan terkait penyelenggaraan jalan 3. Belum seluruhnya Jalan Kabupaten dilengkapi dengan Bangunan Pelengkap Jalan 4. Pemeliharaan Jalan Belum seluruhnya tertangani	1. Pemerataan akses jalan dalam kondisi baik 2. Peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik 3. Jaringan irigasi yang baik 4. Pembangunan sarana prasarana perkantoran pusat pemerintahan yang baik
2	Jalan kabupaten belum memiliki trotoar dan drainase	1. Belum optimalnya sinergitas berbagai pihak 2. Balum adanya data terkait ini	1. Mayoritas jalan kabupaten kekurangan ruang milik jalan (ketersediaan lahan) 2. Ketidaktersediaan data terkait trotoar dan drainase 3. Pembangunan drainase dan trotoar belum menjadi prioritas sedangkan hal tersebut	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			merupakan kebutuhan dasar infrastruktur	
3	Belum adanya data sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	1. Kurangnya komitmen pimpinan OPD tentang sempadan	1. Alokasi anggaran tentang pendataan tidak ada 2. Dokumen perencanaan sektoral belum ada	
4	Masih terdapat sempadan sungai yang digunakan untuk bangunan permanen	Masih terdapat sempadan sungai yang digunakan untuk bangunan permanen	1. Pengendalian dan penegakan hukum pemanfaatan sempadan sungai yang belum optimal 2. Ketidaktersediaan data terkait trotoar dan drainase	
5	Tidak adanya data ideal panjang irigasi	Tidak adanya data ideal panjang irigasi	1. Tidak adanya data ideal panjang irigasi yang dibutuhkan untuk mengairi luasan daerah pertanian 2. Koordinasi antar pemangku kewenangan sarana irigasi yang ditangani kurang baik	
6	Penurunan proporsi jalan dalam kondisi baik	1. Masih terdapat jalan dalam kondisi rusak/belum dibangun 2. Terdapat jalan dengan kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan	1. Terdapat perubahan SK jalan sehingga menambah panjang jalan kabupaten 2. Belum adanya peraturan terkait penyelenggaraan jalan	
D. Perumahan Rakyat dan Permukiman				

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Penanganan kumuh yang belum optimal	Kesiapan readiness criteria yang belum tersedia	1. Terdapat update SK kumuh pada tahun 2021 sehingga mempengaruhi perhitungan 2. Penanganan kawasan kumuh belum menjadi prioritas pembangunan pada bidang perumahan dan permukiman	1. Penanganan kawasan kumuh 2. Pembangunan IPAL 3. Pembentukan UPTD yang mengurus tentang sanitasi 4. Peningkatan sarana prasarana pendukung (Armada, SDM dll)
2	Belum optimalnya penduduk berakses air minum	1. Akses air minum perpipaan belum merata keseluruh wilayah	Belum optimalnya penduduk berakses air minum	
E. Keamanan dan Ketertiban Umum				
1	Masih adanya kejadian kebakaran yang ditangani lebih dari 15 Menit	1. Belum tersedianya UPTD DAMKAR yang memadai (1 UPTD membawahi 2 Kecamatan) 2. Jangkauan terlalu jauh	1. Kurangnya Armada DAMKAR 2. Rendahnya Biaya Operasional	1. Pemenuhan armada DAMKAR 2. Kolaborasi dengan Karang Taruna atau relawan masyarakat 3. Optimalisasi kelembagaan terkait penanggulangan bencana
2	Masih rendahnya cakupan petugas Linmas	Kurangnya SDM Petugas Linmas	1. Alokasi anggaran terbatas 2. Belum meratanya anggota linmas 3. Kurangnya insentif bagi petugas linmas baik dalam bentuk finansial maupun finansial 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran linmas dalam menjaga kemandirian dan ketertiban	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
3	Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran	1. Belum tersedianya UPTD DAMKAR yang memadai (1 UPTD membawahi 2 Kecamatan) 2. Jangkauan terlalu jauh	1. Kurangnya Armada DAMKAR 2. Rendahnya Biaya Operasional	
F. Sosial				
1	Masih terdapat data tidak valid untuk Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Masih terdapat data tidak valid	belum maksimalnya sinergitas berbagai pihak baik pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan	1. Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi 2. Akurasi data kemiskinan sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran (sinkronisasi data antar stakeholder pengampu
2	Belum optimalnya Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	1. Masih terdapat data tidak valid 2. terdapat penerima yang sudah meninggal dunia, pindah domisili datanya tidak terupdate	belum maksimalnya sinergitas berbagai pihak baik pemerintah daerah, desa dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan	
II. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
A. Tenaga Kerja				
1	Masih rendahnya rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2023 sebesar 73,38	masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Pangandaran	1. calon tenaga kerja kurang terampil 2. Pengembangan Wirausaha belum optimal 3. belum optimalnya link and	1. Peningkatan kualitas pendidikan 2. Workshop/Pelatihan sebelum menjadi pencari kerja

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			match antara dunia pelatihan dengan dunia industri	3. Link and Match yang sesuai antara Dunia pelatihan dan Perindustrian 4. Optimalisasi pengadministrasian tenaga kerja 5. Pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja).
2	Masih rendahnya persentase pencari kerja yang ditempatkan	masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Pangandaran	1. calon tenaga kerja kurang terampil 2. belum optimalnya link and match antara dunia pelatihan dengan dunia industri	
B. Pemberdayaan Perempuan				
1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan masih rendah	1. Masih belum optimalnya kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki 2. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal 3. Belum optimalnya peningkatan kompetensi kerja perempuan	Terbatasnya akses pelatihan kerja	Pelibatan dan pemberdayaan perempuan pada sektor-sektor perekonomian
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR belum tercapai	1. masih rendahnya partisipasi calon legislatif wanita 2. pemilih cenderung memilih calon legislatif dengan gender laki-laki		
C. Pangan				

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	kurangnya pengetahuan masyarakat akan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Masih tingginya konsumsi karbohidrat yang bersumber dari beras dan tepung terigu, sementara konsumsi karbohidrat dari bahan pangan lainnya seperti jagung, dan kelompok umbi-umbian meliputi singkong, ubi jalar, kentang, dan ubi lainnya masih rendah	masih minimnya sosialisasi dan promosi menu makan B2SA	1. Pemenuhan ketersediaan dan cadangan pangan 2. Peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi 3. Optimalisasi peran masyarakat dalam ketahanan pangan 4. Penjagaan stabilitas harga pangan
2	Belum terpenuhinya kebutuhan cadangan pangan kabupaten pangandaran	Pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah belum menjadi prioritas daerah	Terjadinya perubahan harga yang fluktuatif setiap tahunnya yang ke ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah	
3	Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan	Masih terdapat daerah yang masuk kategori rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan	ketersediaan, akses pangan, pemanfaatan pangan yang belum memenuhi kebutuhan	
4	Ketersedian pangan utama (food availability)	kabupaten pangandaran dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih perlu mendatangkan komoditas pangan dari daerah luar	Data ekspor-impor kabupaten pangandaran belum tersedia	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		agar ketersediaan pangan tercukupi		
5	Angka ketersediaan Protein belum tercapai	Kabupaten Pangandaran dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih perlu mendatangkan komoditas pangan dari daerah luar agar ketersediaan pangan tercukupi	Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih perlu mendatangkan komoditas pangan dari Daerah luar agar ketersediaan pangan tercukupi	
D. Pertanahan				
1	Masih rendahnya Persentase luas lahan bersertifikat	1. Tingkat sosialisasi yang rendah/tidak maksimal mengenai pertanahan 2. Masyarakat masih belum Memiliki kelengkapan administrasi pertanahan	1. Masih rendahnya sosialisasi mengenai pertanahan dari pemerintah	1. Peningkatan penanganan kasus sengketa batas wilayah 2. Pembuatan peta batas wilayah
2	Proses administrasi untuk penyelesaian sengketa tanah sering kali panjang dan rumit, melibatkan berbagai instansi pemerintah.	1. kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu 2. ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah; 3. meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah;	Tumpang tindih kepentingan	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
E. Lingkungan Hidup				
1	Masih rendahnya penanganan sampah	Masih rendahnya cakupan area penanganan sampah	1. Sedikitnya armada pengangkutan sampah 2. Belum terdapatnya TPST 3. Daya tampung TPA belum bisa melayani seluruh area 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat	1. Perbaiki ekosistem dan lingkungan hidup 2. Penegakan hukum lingkungan 3. Peningkatan pengelolaan limbah 4. Pembangunan dan Optimalisasi TPS3R; 5. Pengoptimalan pengelolaan sampah guna untuk meningkatkan pengolahan sampah pada setiap TPS3R yang dibantu dengan pembentukan serta optimalisasi Bank Sampah pada setiap Desa
2	Masih rendahnya kualitas air	belum tersedianya sarana prasarana pengelolaan limbah secara terpadu	1. Belum adanya regulasi terkait RPAM 2. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah disungai 3. Sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi belum optimal	6. Memfasilitasi dan mendukung Bank Sampah untuk bekerjasama dengan BRIN serta akademisi guna mengolah sampah organik 7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung 8. Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir
	1. Peningkatan Jumlah sumber pencemar bergerak (Kendaraan) pada waktu-waktu tertentu 2. Pengendalian sumber pencemar tidak bergerak di industri yang minim perawatan dan pengawasan internal	Fluktuasi mutu udara ambien di masa tertentu menghasilkan nilai indeks yang berbeda2 tiap waktu	1. Industri terkait yang menghasilkan output buangan emisi kurang memperhatikan perawatan sarana pengendalian udara dan monitoring Baku mutu Emisi yang dihasilkan 2. Pemilik kendaraan pribadi kurang memperhatikan perawatan mesin sehingga mengurangi efisiensi pembakaran mesin yang mengakibatkan penambahan	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
			jumlah emisi 3. Belum dilakukanya wajib uji emisi kendaraan untuk pengendalian emisi di Kabupaten	
	Masih terdapat lahan kritis	Rehabilitasi dan penghijauan kembali pada lahan kritis belum optimal	Terdapat perubahan fungsi lahan akibat pertambahan penduduk, dan peningkatan industri serta pertambangan	
	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten belum optimal	Banyak pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki kelengkapan perizinan dan melaporkan laporan semesteran operasional kegiatan	Kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	
	masih rendahnya penghargaan di bidang lingkungan hidup yang didapat	1. Masih rendahnya jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat 2. Rendahnya Rasio RTH 3. Pengembangan dan perizinan tidak memperhatikan RTH yang 30% 4. Perlu peningkatan pada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan	1. Minimnya sosialisasi ramah lingkungan pada masyarakat 2. Penegakan kebijakan terkait lingkungan belum optimal 3. Kurangnya SDM	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		sebagai upaya peningkatan KLH di pemdes 5. Masih rendahnya pendataan untuk penetapan hutan kota pada tiap kecamatan dan penetapan taman		
		6. Masih rendahnya pendataan program kampung iklim		
	Masih rendahnya penanganan sampah	1. Masih rendahnya cakupan area penanganan sampah	1. Sedikitnya armada pengangkutan sampah 2. Belum terdapatnya TPST 3. Daya tampung TPA belum bisa melayani seluruh area 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat	
	masih rendahnya timbulan sampah yang ditangani	Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan timbulan sampah serta terbatasnya SDM	1. masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R 2. belum tersedianya TPA/TPST 3. sarana prasarana pengelolaan dan pengolahan sampah masih terbatas 4. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara mandiri	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
	Masih rendahnya penanganan sampah	1. Masih rendahnya cakupan area penanganan sampah	1. Sedikitnya armada pengangkutan sampah 2. Belum terdapatnya TPST 3. Daya tampung TPA belum bisa melayani seluruh area 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat	
F. Kependudukan				
	penerbitan KTP elektronik belum optimal	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi Database 2. Terbatasnya SDM 3. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas	1. Pemenuhan sarana dan prasarana administrasi pencatatan sipil 2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan 3. Pemanfaatan Data dan Sitem Informasi yang terintegrasi
	penerbitan Kartu Keluarga belum optimal	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi Database 2. Terbatasnya SDM 3. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
	masih rendahnya penerbitan Kartu Identitas Ana	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi Database 2. Terbatasnya SDM 3. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya KIA 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas	
	masih rendahnya kepemilikan kutipan akta kelahiran	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi Database 2. Terbatasnya SDM 3. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akte kelahiran. 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas	
	masih rendahnya cakupan kepemilikan akta perkawinan	1. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi masih perlu ditingkatkan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akte perkawinan 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas	
G. Pemberdayaan Masyarakat Desa				
	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif masih sedikit	Kemampuan SDM Pengurus Bumdes kurang memahami manajemen		Sosialisasi dan pelatihan manajemen Bumdes

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		pengelolaan bumdes sehingga banyak bumdes yang tidak aktif		
I. Perhubungan				
	Kurangnya alokasi anggaran pemeliharaan Sarana Prasarana (PJU)	Belum menjadi Prioritas Daerah	1. Biaya pemeliharaan tidak sebanding dengan jumlah sarana prasarana perhubungan khususnya PJU di Kab Pangandaran 2. Kurangnya SDM 3. Sarana pendukung penunjang pemeliharaan kurang memadai	1. Pemenuhan sarana dan prasarana pelengkap jalan 2. Peningkatan sarana prasarana transportasi 3. Pembiayaan alternatif seperti KPBU untuk pengelolaan
	Masih rendahnya persentase Kecamatan yang terlayani angkutan umum	1. Kurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum 2. tidak seimbangnya rasio antara biaya operasional dan pendapatan	1. Keterbatasan Jangkauan Layanan. 2. frekuensi dan konsistensi layanan angkutan umum sangat rendah 3. Ketidakseimbangan antara permintaan angkutan umum dengan operasional angkutan umum	
	Ketidakcukupan fasilitas angkutan umum	Keterbatasan akses transportasi dan kualitas layanan angkutan umum yang belum optimal	Kurangnya permintaan angkutan umum di wilayah tertentu (biaya operasional kendaraan tidak sebanding dengan jumlah penumpang)	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
	Masih rendahnya jumlah uji KIR angkutan umum	Kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan berlalu lintas	1. Kurangnya informasi tentang pentingnya uji kir kepada pengemudi atau pemilik kendaraan. 2. Kondisi teknis kendaraan yang tidak terjaga dengan baik 3. Kurangnya kesadaran masyarakat	
	Kurangnya permintaan penumpang dan beralih ke kendaraan pribadi karena kenyamanan yang belum optimal	Fasilitas Kurang memadai. Ketersediaan dan frekuensi layanan masih rendah. Kenyamanan belum memadai. Lebih menggunakan kendaraan pribadi	Kenyamanan belum optimal	
	Permintaan izin trayek yang masih minim	Kurangnya permintaan izin trayek dikarenakan persaingan usaha dan menurunnya penumpang	Kurangnya permintaan penumpang	
	Infrastruktur terminal belum memadai	Permasalahan yang ditemukan yaitu jumlah penumpang dan barang yang menurun dikarenakan kondisi ekonomi yang menurunnya orang orang bepergian. Tersedianya banyak alternatif kendaraan diantaranya	Kurangnya fasilitas terminal seperti speaker audio, kursi tunggu penumpang	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		menggunakan sepeda motor. Fasilitas dan infrastruktur terminal yang belum memadai juga jadi permasalahan yang timbul.		
J. Komunikasi dan Informasi				
	Belum semua aplikasi e-government terintegrasi	Aplikasi di masing-masing OPD belum seragam sehingga belum sama dalam standar teknis aplikasi	1. Sarana dan prasarana SPBE belum memadai 2. Belum menjadi skala prioritas utama pemerintah daerah 3. Kualitas dan Kuantitas SDM masih kurang 4. Koordinasi dan kerjasama antar instansi yang masih lemah dalam penerapan SPBE 5. Kebijakan Standar aplikasi tidak seragam	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik atau SPBE 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang SPBE
	SPBE belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan	Domain Tata Kelola dan Manajemen belum berjalan optimal	1. Sarana dan prasarana SPBE belum memadai 2. Belum menjadi skala prioritas utama pemerintah daerah	
			3. Kualitas dan Kuantitas SDM masih kurang 4. Koordinasi dan kerjasama antar instansi yang masih lemah dalam penerapan SPBE	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
	Masih sedikitnya jumlah KIM	1. Masih banyak Desa yang belum membentuk KIM 2. pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan belum berjalan secara optima 3. Rendahnya partisipasi masyarakat 4. Keterbatasan SDM, Infrastruktur dan alokasi anggaran untuk mendukung pengembangan KIM	Masyarakat belum mengerti manfaat dan kegunaan KIM - Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung seperti pusat informasi dan internet di tingkat kecamatan - belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai KIM	
	Masih rendahnya cakupan KIM	1. Masih banyak Desa yang belum membentuk KIM 2. pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan belum berjalan secara optima 3. Rendahnya partisipasi masyarakat 4. Keterbatasan SDM, Infrastruktur dan alokasi anggaran untuk mendukung pengembangan KIM	Masyarakat belum mengerti manfaat dan kegunaan KIM - Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung seperti pusat informasi dan internet di tingkat kecamatan - belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai KIM	
K. Statistik				
	Kompetensi SDM Produsen Data yang terbatas	Produsen Data (Perangkat Daerah) belum melakukan	Sumber daya dan infrastruktur belum memadai	1. Sistem data dan statistik yang terintegrasi

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		publikasi data secara lengkap dan berkala		
L. Persandian				
	Masih rendahnya sistem informasi yang menerapkan keamanan sistem informasi	1. Belum menjadi prioritas pembangunan terkait keamanan data	1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan infrastruktur 3. kesadaran akan keamanan data 4. Regulasi dan kebijakan yang mendukung penggunaan sandi	Peningkatan pengelolaan bidang pesandian
	Belum diterapkannya sandi dalam komunikasi perangkat daerah	1. Belum menjadi prioritas pembangunan terkait keamanan data	1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan infrastruktur 3. kesadaran akan keamanan data 4. Regulasi dan kebijakan yang mendukung penggunaan sandi	
M. Koperasi dan UMKM				
	1. Kurangnya kesadaran dan partisipasi anggota 2. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas 3. Kurangnya inovasi dan adaptasi	1. Koperasi tidak melaksanakan RAT 2. Masih rendahnya kaderisasi generasi muda sebagai pengurus koperasi 3. Masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil	1. Kesadaran anggota 2. Kaderisasi koperasi 3. Kurangnya SDM profesional	1. Peningkatan kapasitas UMKM melalui penerapan teknologi, inkubasi usaha, akses pembiayaan, dan kemitraan usaha 2. Peningkatan nilai tambah, dan ekspor produk UMKM 3. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual
	1. database 2. akses informasi	belum update database pelaku usaha yang terbaru		

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
	update aturan baru yang mewajibkan koperasi mempunyai modal minimal 500jt	KSP diusahakan untuk tidak ada	1. Kesadaran anggota 2. Kaderisasi koperasi 3. Kurangnya SDM profesional	
	database Jumlah Usaha Mikro dan akses informasi	1. Potensi usaha mikro dan kecil sebagai muatan lokal belum terpetakan 2. Minimnya usaha mikro dan kecil yang memiliki hak izin dan edar 3. Terhambatnya promosi produk usaha mikro & kecil 4. Belum ada formulasi untuk menghitung jumlah peningkatan presentasi kewirausahaan mikro dibagi jumlah penduduk 5. Belum tersedianya display/ruang promosi untuk ajang promosi usaha mikro dan kecil bagi wisatawan 6. Masih rendahnya pemberdayaan SDM usaha mikro dan kecil		
	Rendahnya kualitas dan kapabilitas SDM wirausaha muda	1. Modal yang terbatas 2. Masih rendahnya		

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		kualitas dan kapabilitas SDM wirausaha muda		
N. Penanaman Modal				
	Realisasi investasi daerah menurun	Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1. Tidak adanya regulasi Pemberian Fasilitas / Insentif yang dapat memberikan kemudahan dan menarik para investor untuk berinvestasi di daerah 2. Belum adanya peta potensi yang dapat membantu investor untuk menentukan lokasi dan sektor usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka 3. Kurangnya partisipasi promosi di berbagai event daerah maupun nasional 4. Keterbatasan SDM yang memadai 5. Kurangnya sosialisasi dalam berbagai platform digital	1. Regulasi investasi yang mengatur mengenai izin perusahaan 2. Penegakan regulasi izin usaha 3. Keterlibatan masyarakat dalam UMKM dan ekonomi kreatif 4. Strategi promosi investasi
O. Kepemudaan Dan Olahraga				
		3 Induk Organisasi, 146 Klub olahraga (Belum banyaknya cabang olahraga yang bisa mendapatkan		1. Ketersediaan fasilitas untuk mengembangkan minat bakat pemuda dan olahraga 2. Peningkatan kapasitas SDM

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
		penghargaan/prestasi, karena belum ditunjang oleh besaran anggaran, sarpras dan fasilitas lainnya yang representatif)		
		fungsi GOR yang bisa dipakai oleh banyak cabang olahraga, sehingga lebih cepat rusak sementara dalam pemeliharaannya memerlukan biaya cukup besar	Jumlah GOR yang masih kurang merata	
	Data organisasi yang tercatat belum sesuai dengan ada yang di lapangan	Dengan banyaknya organisasi menjadi banyak pula organisasi yang membutuhkan anggaran operasional		
III. URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	Kondisi fiskal tidak sehat	1. terdapat hutang daerah 2. Pengelolaan keuangan daerah belum optimal	1. kelemahan sistem pengendalian intern 2. kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan 3. terdapat kegiatan yang bersumber dari APBD belum dibayarkan sehingga menimbulkan hutang	1. Tercapainya kemandirian fiskal 2. Optimalisasi sumber-sumber PAD 3. Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
	Belum optimalnya sinergitas SKPD dalam pembangunan dan implementasi perencanaan pembangunan	1. belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antar pusat dan daerah 2. masih kurangnya komitmen dan konsistensi intansi pelaksana atas perencanaan pembangunan	1. adanya konflik kepentingan dan keterbatasan waktu perencanaan di daerah 2. penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara berkesinambungan	

Sumber: Olahan Penulis, 2025

2.4 Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokokpokok pikiran DPRD tersebut, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Saran dan pendapat yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk perencanaan pembangunan tahun 2027 yang telah dimasukkan kedalam *e-planning* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Saran dan masukan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disinergikan dalam rancangan program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 95 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD

NO	PRIORITAS DAERAH	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	PD1. Akselerasi perekonomian daerah berbasis pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan lokal	Pengembangan Pariwisata
2	PD2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pendidikan, kesehatan, PU-PR, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial	Pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD
		Rehabilitasi Ruang Kelas
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SPAM
3	PD3. Peningkatan daya saing SDM untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi unggulan	Peningkatan Kapasitas BumDes
		Pengadaan Bibit Ternak
		Pengadaan Alat Mesin Pertanian
4	PD4. Penguatan infrastruktur konektivitas dan layanan publik pendukung pariwisata dan produktivitas wilayah	Pembangunan Jalan
		Peningkatan Jalan Lingkungan
		Pembangunan Jembatan Gantung
		Peningkatan Jalan Usaha Tani
		Penerangan Jalan Umum
5	PD5. Penguatan reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi untuk mendukung penyehatan fiskal daerah	

NO	PRIORITAS DAERAH	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
6	PD6. Pembangunan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang berkarakter, inklusif dan berwawasan kebangsaan	
7	PD7. Penguatan lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan bencana di kawasan wisata dan permukiman	

Sumber: Diolah Penyusun, 2026

2.5 Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kabupaten Pangandaran sebagai daerah yang terus berkembang memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya menumbuhkan budaya inovasi pada seluruh perangkat daerah. Inovasi tidak hanya dimaknai sebagai penciptaan sesuatu yang baru, tetapi juga sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap proses, metode, maupun layanan yang telah ada agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui inovasi, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Pangandaran juga merupakan bentuk implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan keberlanjutan. Berbagai inovasi yang dikembangkan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, inovasi tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi menjadi budaya kerja yang terus berkembang dan berkelanjutan.

Melalui penyusunan dokumen inovasi daerah ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai berbagai upaya inovatif yang telah dan sedang dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran. Selain sebagai sarana dokumentasi dan evaluasi, dokumen ini juga diharapkan menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan inovasi yang lebih baik di masa mendatang, sehingga Kabupaten Pangandaran dapat terus mewujudkan pemerintahan yang maju, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Inovasi daerah tidak hanya menjadi sarana untuk menghasilkan perubahan yang bersifat administratif, tetapi juga menjadi strategi dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran

diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendorong sesuai dengan Visi Kabupaten Pangandaran, Pembangunan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia dengan Menitikberatkan pada Pendidikan Agama dan Karakter.

Tabel 2. 96 Inovasi Daerah Kabupaten Pangandaran

NO	JUDUL INOVASI	TAHUN AWAL PELAKSANAAN	DETAIL INOVASI
1.	Pangandaran Melesat: Gerakan Pembangunan Manusia dan Budaya Sosial Masyarakat Pangandaran	2025	Pangandaran Melesat merupakan program unggulan Kabupaten Pangandaran yang berfokus pada pembangunan manusia melalui penguatan pendidikan karakter, pelayanan kesehatan masyarakat, serta pembiasaan budaya hidup bersih dan sehat. Program ini dirancang untuk mendukung terwujudnya daerah wisata yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Program ini lahir dari kebutuhan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat sebagai fondasi pembangunan daerah wisata. Keberhasilan daerah wisata tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan destinasi, tetapi juga oleh karakter masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta budaya hidup sehat dan peduli lingkungan

Sumber: Diolah Penyusun, 2026

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi perekonomian serta arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran Tahun 2027 yang disusun dengan mengacu pada target pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029. Di dalamnya termasuk kerangka keuangan daerah yang menjelaskan arah kebijakan keuangan daerah, meliputi sumber dan target pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah, serta pembiayaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027. Uraian tersebut memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kerangka ekonomi daerah dan perencanaan keuangan daerah menjadi dasar dalam penetapan arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam pengalokasian sumber daya keuangan daerah

secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2027 yaitu “Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata”. Melalui kerangka ini, pembangunan ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor unggulan daerah, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing daerah.

Implementasi kerangka tersebut dilakukan melalui pendekatan *money-follow program*, yaitu penganggaran yang difokuskan pada program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dengan tetap menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur, efektif, dan berkelanjutan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan merupakan kerangka kerja yang disusun sebagai upaya untuk menjawab permasalahan pembangunan serta memberikan fokus terhadap penanganan isu-isu strategis daerah secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan misi pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja ekonomi daerah Tahun 2025, perkembangan perekonomian pada Tahun 2026, serta target pembangunan yang akan dicapai pada Tahun 2027 sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029. Selain itu, kebijakan ini juga memperhatikan dinamika dan prospek perekonomian global, nasional, dan Provinsi Jawa Barat yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran Tahun 2027 difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah, khususnya sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Arah kebijakan ini merupakan operasionalisasi tahunan dari sasaran RPJMD yang disesuaikan dengan tema pembangunan tahun 2027. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan secara terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, serta ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

3.1.1 Kondisi dan Prospek Ekonomi Global

Perekonomian global pada Tahun 2026 dan 2027 diperkirakan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersumber dari dinamika geopolitik, fragmentasi geoekonomi, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter negara maju. Ketegangan geopolitik yang terjadi di beberapa kawasan, termasuk konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah, berpotensi mempengaruhi stabilitas harga energi, rantai pasok global, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan dunia. Selain itu, meningkatnya rivalitas ekonomi dan teknologi antara negara-negara besar turut mendorong terjadinya realokasi investasi

dan pergeseran pola perdagangan global.

Berdasarkan proyeksi lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank, pertumbuhan ekonomi global dalam jangka menengah diperkirakan berada pada level yang moderat. Pengetatan kebijakan moneter yang masih berlangsung di beberapa negara maju sebagai respons terhadap pengendalian inflasi menyebabkan kondisi likuiditas global menjadi lebih ketat, sehingga berdampak pada aliran modal ke negara berkembang. Tingkat suku bunga global yang relatif tinggi serta penguatan mata uang dolar Amerika Serikat berpotensi meningkatkan tekanan terhadap stabilitas sektor keuangan di negara berkembang, termasuk melalui risiko capital *outflow* dan meningkatnya biaya pembiayaan pembangunan.

Di sisi lain, tren disinflasi global mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan menurunnya harga energi dan normalisasi rantai pasok. Kebijakan moneter yang secara bertahap menjadi lebih akomodatif di beberapa negara maju diperkirakan akan memberikan ruang bagi pemulihan aktivitas ekonomi global. Transformasi ekonomi berbasis digital, transisi energi menuju ekonomi hijau, serta penguatan industri berbasis teknologi tinggi menjadi sumber pertumbuhan baru yang akan membentuk struktur perekonomian global ke depan.

Kawasan Asia diproyeksikan tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia, didukung oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi, serta integrasi ekonomi kawasan melalui berbagai kerja sama regional seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Negara-negara berkembang dengan struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan berbasis industri manufaktur serta jasa modern diperkirakan akan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Perkembangan jaringan produksi global dan rantai nilai global (*Global Value Chain*) juga mendorong terjadinya relokasi industri ke negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif dari sisi demografi, stabilitas ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur. Hal ini menjadi peluang bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan daya saing investasi dan memperluas basis industri pengolahan yang berorientasi ekspor dengan tetap menerapkan pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tetap stabil pada kisaran 3 persen dalam jangka menengah, meskipun masih dibayangi oleh berbagai risiko ketidakpastian. Oleh karena itu, penguatan kerja sama multilateral, reformasi struktural, peningkatan produktivitas, serta akselerasi transformasi ekonomi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi global.

Perkembangan ekonomi global tersebut juga menunjukkan peningkatan mobilitas wisatawan internasional seiring dengan pemulihan sektor pariwisata dunia, perubahan preferensi wisata berbasis pengalaman (*experience-based tourism*), serta meningkatnya tren pariwisata berkelanjutan. Kondisi ini menjadi peluang bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata seperti Kabupaten Pangandaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pengembangan ekonomi kreatif, serta penguatan keterkaitan sektor pariwisata dengan sektor unggulan lainnya.

3.1.2 Kondisi dan Prospek Ekonomi Nasional

Perekonomian nasional pada Tahun 2026–2027 diperkirakan tetap menghadapi tantangan yang bersumber dari dinamika global, khususnya ketidakpastian pasar keuangan internasional, fluktuasi harga komoditas, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Ketegangan geopolitik di beberapa kawasan berpotensi mempengaruhi stabilitas harga energi dan pangan, yang pada akhirnya berdampak terhadap inflasi, nilai tukar, serta daya beli masyarakat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengendalian inflasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendorong peningkatan investasi dan konsumsi domestik sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi.

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang menuju Visi Indonesia Emas 2045, transformasi ekonomi menjadi agenda utama yang diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan daya saing industri, serta pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Tantangan yang masih dihadapi antara lain produktivitas tenaga kerja yang belum optimal, kapasitas riset dan inovasi yang masih terbatas, struktur industri yang belum sepenuhnya kuat, serta kontribusi sektor pertanian yang masih didominasi oleh kegiatan dengan nilai tambah rendah. Selain itu, optimalisasi potensi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi kelautan masih memerlukan penguatan dari sisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan investasi.

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional terus didorong melalui peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, serta penguatan rantai pasok. Di sisi lain, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Transisi menuju ekonomi hijau dilakukan melalui pengembangan energi baru terbarukan, efisiensi energi, serta penguatan ekonomi sirkular. Sementara itu, pengembangan ekonomi biru menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru melalui optimalisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada periode 2030–2040 menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang harus didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas nasional, baik transportasi, logistik, maupun infrastruktur digital, juga menjadi faktor penting dalam mendorong integrasi ekonomi antarwilayah, menurunkan biaya distribusi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, penguatan kapasitas keuangan daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar arah pembangunan nasional dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah.

Secara umum, prospek perekonomian nasional dalam jangka menengah diperkirakan tetap tumbuh stabil, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat, peningkatan investasi, hilirisasi industri,

transformasi digital, serta pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi. Kondisi ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan sektor pariwisata nasional sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi juga memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian melalui pengembangan destinasi, peningkatan kualitas amenities dan aksesibilitas, serta integrasi dengan ekonomi kreatif dan UMKM.

3.1.3 Kondisi dan Prospek Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Perekonomian Provinsi Jawa Barat pada periode 2026–2027 diperkirakan tetap tumbuh dengan didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, serta pariwisata. Namun demikian, pengembangan potensi ekonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum meratanya konektivitas wilayah, keterbatasan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi, serta belum optimalnya penguatan rantai nilai komoditas unggulan daerah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya aksesibilitas destinasi wisata, efisiensi distribusi barang dan jasa, serta daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama perekonomian daerah masih memerlukan penguatan dari sisi kapasitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, serta perluasan pasar. Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengembangan produk unggulan daerah menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, pengendalian inflasi daerah, peningkatan ekspor nonmigas, serta perlindungan konsumen menjadi faktor yang perlu terus diperkuat dalam menjaga stabilitas ekonomi Jawa Barat.

Dari sisi kewilayahan, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, menurunkan biaya logistik, serta mempercepat pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Hal ini sejalan dengan upaya pengembangan wilayah selatan Jawa Barat sebagai kawasan strategis yang didorong melalui peningkatan aksesibilitas, penguatan sektor pariwisata, perikanan, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, Provinsi Jawa Barat memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) dan ekonomi biru (*blue economy*). Pemanfaatan energi baru terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam, pengelolaan persampahan berbasis ekonomi sirkular, serta pengembangan produk ramah lingkungan menjadi bagian dari transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan berketahanan iklim. Di sisi lain, penguatan sektor pariwisata dilakukan melalui peningkatan kualitas destinasi, pengembangan amenities dan aksesibilitas, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata guna menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi perdesaan juga menjadi fokus dalam memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Barat melalui diversifikasi usaha, pengolahan hasil pertanian, serta peningkatan infrastruktur

dasar seperti jalan, listrik, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Secara keseluruhan, prospek perekonomian Jawa Barat ke depan diarahkan pada penguatan daya saing daerah melalui transformasi ekonomi, peningkatan nilai tambah sektor unggulan, pengembangan pariwisata yang terintegrasi, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Arah kebijakan tersebut menjadi acuan bagi kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

3.1.4 Kondisi dan Prospek Ekonomi Pangandaran

Kabupaten Pangandaran dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi dalam mendorong kinerja perekonomian daerah hingga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika dan ketidakpastian global maupun domestik pada tahun 2027.

Pada sektor pertanian, pengembangan komoditas dinilai masih belum optimal meskipun didukung oleh ketersediaan lahan yang luas dan perkembangan teknologi pertanian. Terdapat berbagai faktor penghambat dalam pengembangan sektor pertanian, diantaranya keterbatasan akses terhadap insentif pemerintah, teknologi tepat guna, sistem pemasaran yang efisien, serta kualitas sumber daya petani yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan agribisnis turut mempengaruhi percepatan pertumbuhan sektor ini.

Sektor perikanan juga masih menghadapi berbagai kendala, baik pada perikanan tangkap maupun budi daya. Kegiatan usaha perikanan yang masih didominasi oleh nelayan tradisional dengan keterbatasan modal dan teknologi menyebabkan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan belum optimal. Produksi perikanan yang tercatat belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil, terbatasnya fasilitas pengolahan hasil perikanan, serta dampak pencemaran laut dan perubahan iklim turut mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

Pada sektor pariwisata, Kabupaten Pangandaran masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, diversifikasi atraksi wisata, promosi destinasi, dan pengelolaan lingkungan, serta tingginya ketergantungan kunjungan wisata pada musim tertentu. Pengembangan pariwisata juga perlu memperhatikan kerentanan bencana dan daya dukung lingkungan sehingga tercipta pariwisata Kabupaten Pangandaran yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dari sisi ketenagakerjaan, peningkatan jumlah angkatan kerja belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi menyebabkan tingkat pengangguran relatif tinggi dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah masih menjadi kendala dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya biaya logistik, kurang efisiennya distribusi barang dan jasa,

terhambatnya investasi, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar. Dampak belum optimalnya aksesibilitas wilayah juga berpengaruh pada pengembangan sektor pariwisata. Kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, fluktuasi PDRB, belum optimalnya pendapatan daerah, serta melemahnya daya beli masyarakat juga menjadi tantangan dalam pencapaian target pembangunan.

Di sisi lain, Kabupaten Pangandaran memiliki prospek ekonomi yang cukup besar melalui penerapan teknologi pertanian modern, serta penguatan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan, berpotensi meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Pada sektor perikanan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan budidaya, penguatan kelembagaan kelompok nelayan, penyediaan akses permodalan dan teknologi, pembangunan fasilitas pengolahan hasil perikanan, diversifikasi produk, serta pengembangan pasar ekspor akan meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor perikanan secara berkelanjutan.

Sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas pariwisata dilihat dari komponen pariwisata 5A yakni *Attraction* (atraksi), *Accessibility* (aksesibilitas), *Amenities* (amenitas), *Ancillary Services* (layanan pendukung), serta *Activities* (aktivitas). Kelima komponen tersebut menjadi unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya penguatan promosi berbasis digital, pengelolaan destinasi secara profesional, pelestarian cagar budaya, serta peningkatan kesadaran wisatawan terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Pangandaran.

Penguatan koperasi dan UMKM melalui pelatihan kewirausahaan, perluasan akses permodalan, serta digitalisasi usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip ekonomi berkelanjutan juga dapat memperkuat struktur ekonomi daerah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan industri, pengembangan kawasan ekonomi kreatif, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah diharapkan mampu membuka peluang kerja yang lebih luas, meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, serta memperkuat daya saing daerah.

Dengan dukungan regulasi yang kondusif serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, potensi ekonomi Kabupaten Pangandaran dapat dioptimalkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3. 1 Target dan Capaian Indikator Makro daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023-2027

No	Indikator	Capaian			Target	
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,26	5,12	5,64	5,62	5,65
2.	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	32,62	35,65	38,39	41,75	43,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,52	1,58	1,91	1,47	1,39
4.	Indeks	70,57	71,03	71,66	71,77	72,53

No	Indikator	Capaian			Target	
		2023	2024	2025	2026	2027
	Pembangunan Manusia (Poin)					
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,98	8,75	8,03	7,78	6,98
6.	Rasio Gini (Poin)	0,323	0,286	0,304	0,285	0,284
7.	Penurunan Intesitas Emisi GRK (Ton Co ₂ Eq/Milyar)	N/A	N/A	N/A	10,17	11,37

Sumber: BPS, Target berdasarkan RPJMD Kab. 2025-2029

Data capaian indikator makro daerah hingga tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan indikator ekonomi makro daerah, kinerja perekonomian Kabupaten Pangandaran dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif positif. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,26 persen, kemudian sedikit melambat menjadi 5,12 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 5,64 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi daerah yang didorong oleh meningkatnya aktivitas sektor unggulan daerah dan pemulihan ekonomi masyarakat. Dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,62 persen pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 5,65 persen pada tahun 2027.

PDRB per kapita juga mengalami peningkatan dari Rp32,62 juta pada tahun 2023 menjadi Rp35,65 juta pada tahun 2024 dan meningkat kembali menjadi Rp38,39 juta pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat serta peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029, PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp41,75 juta pada tahun 2026 dan meningkat menjadi Rp43,50 juta pada tahun 2027.

Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 sebesar 1,52 persen, meningkat menjadi 1,58 persen pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 1,91 persen pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan penyerapan tenaga kerja masih perlu menjadi perhatian, terutama dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan UMKM, serta pengembangan sektor-sektor yang bersifat padat karya agar target Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,47 persen pada tahun 2026 dan 1,39 persen pada tahun 2027 dapat tercapai.

Indeks Pembangunan Manusia terus menunjukkan peningkatan dari 70,57 pada tahun 2023 menjadi 71,03 pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 71,66 pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029, IPM ditargetkan meningkat menjadi 71,77 pada tahun 2026 dan mencapai 72,53 pada tahun 2027.

Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 8,98 persen pada tahun 2023 menjadi 8,75 persen pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 8,03 persen pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meskipun upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus diperkuat melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses layanan dasar, serta pengembangan sektor unggulan daerah. Dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029, tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 7,78 persen pada tahun 2026 dan 6,98 persen pada tahun 2027.

Rasio gini pada tahun 2023 sebesar 0,323 menurun menjadi 0,286 pada tahun 2024, namun kembali meningkat menjadi 0,304 pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan masyarakat masih perlu diperkuat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029, rasio gini ditargetkan menurun menjadi 0,285 pada tahun 2026 dan 0,284 pada tahun 2027.

Selain itu, indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca mulai ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029 sebesar 10,17 ton CO₂e per miliar rupiah PDRB pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 11,37 pada tahun 2027 sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam ketersediaan data realisasi pada tahun-tahun sebelumnya sehingga penguatan sistem data dan pelaporan lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan.

Kondisi tahun berjalan juga menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Pangandaran masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta konstruksi. Kabupaten Pangandaran juga belum menjadi wilayah penghitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik sehingga angka inflasi masih mengacu pada Kota Tasikmalaya sebagai kota terdekat dalam satu regional. Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pengendalian inflasi melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah, stabilisasi pasokan dan distribusi pangan, serta penguatan sistem informasi harga.

Di sisi lain, realisasi investasi daerah masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, penguatan kebijakan peningkatan kemudahan berusaha, promosi investasi daerah, pengembangan infrastruktur pendukung, serta penguatan daya saing daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Upaya penurunan pengangguran dan kemiskinan juga terus dilakukan melalui pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, penguatan sektor pariwisata dan UMKM, serta program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Dengan melihat kondisi capaian kinerja hingga tahun 2025 dan target RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029, diperlukan penguatan pada sektor-sektor penggerak ekonomi, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pembangunan berkelanjutan agar

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran pada tahun 2027 dapat lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan. Berikut perkiraan atau target indikator makro Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Pangandaran Tahun 2027:

Tabel 3. 2 Target Indikator Makro
NasionalProvinsi Jawa Barat dan Pangandaran Tahun 2027

N o	Indikator Makro	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,3-7,5	5,8-6,5	5,65
2	Laju Inflasi (%)		1,5-3,5	0,40
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-6,5	3,00-3,90	6,98
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30-4,87	5,90-6,00	1,39
5	Rasio Gini (Poin)	0,375-0,378	0,419-0,422	0,284
6	IMM/IPM (Poin)	0,58	0,660-0,670	72,53
7	Persentase Intensitas Emisi GRK (ton CO ₂ eq/Miliar)	39,57	12,46	11,37
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	76,84	64,56	66,51
9	Prevalensi Stunting (%)		13,65	12,79

Sumber: RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, RPJMD Kabupaten Pangandaran 2025-2029

3.1.5 Kondisi dan Prospek Komponen PDRB

Pembangunan ekonomi daerah merupakan sebuah proses di mana pemerintah daerah bersama dengan masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang tersedia serta menjalin kemitraan dengan sektor swasta guna menciptakan peluang kerja baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Arah pembangunan ekonomi daerah mengacu pada pelaksanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan daerah serta berlandaskan visi dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pangandaran disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global, nasional, dan provinsi, serta menyesuaikan dengan kondisi ekonomi di wilayah tersebut.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran selama periode 2019-2024 menunjukkan adanya tren pemulihan yang cukup signifikan pasca-pandemi, meskipun masih terdapat tantangan struktural yang perlu diatasi, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Untuk itu, kebijakan ekonomi daerah ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan semata, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan, serta berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Memasuki Tahun 2026, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih strategis dan integratif, yang mencakup diversifikasi basis ekonomi lokal, penguatan daya saing sektor-sektor unggulan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital

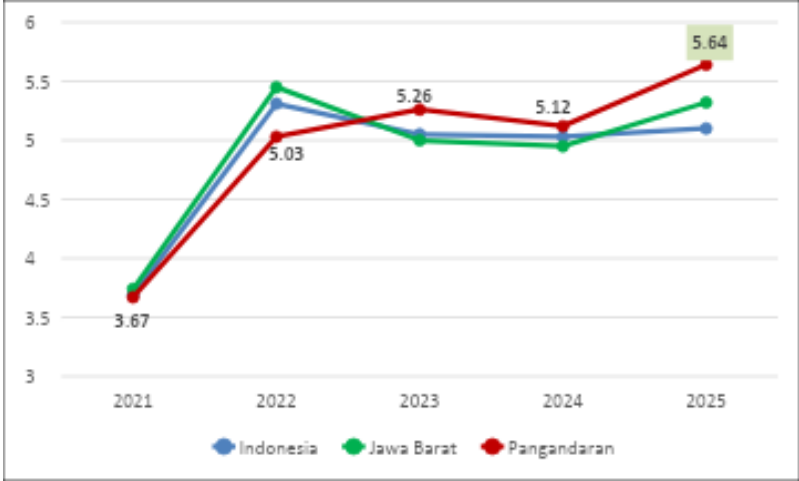
dalam pengembangan ekonomi lokal juga menjadi fokus, khususnya dalam mendukung transformasi digital UMKM, penguatan sistem informasi pasar, dan peningkatan efisiensi rantai pasok daerah.

Strategi untuk penguatan ekosistem investasi difokuskan pada sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu langkah utama dalam memperkuat investasi adalah penyederhanaan proses perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), yang memudahkan pelaku usaha dalam mengurus legalitas bisnis mereka. Hal inipun termasuk dalam kemudahan berusaha, selain kemudahan berusaha, pemberdayaan UMKM juga dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi dan penyebarluasan akses pemasaran.

Dengan mempertimbangkan kondisi aktual dan proyeksi ekonomi ke depan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Di samping itu, respons kebijakan terhadap isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, serta fluktuasi harga komoditas utama, perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang serta memperkuat fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Pangandaran pada tahun 2024 tercatat mengalami perlambatan dibandingkan capaian tahun sebelumnya, sedangkan data capaian tahun 2025 masih dalam proses rilis oleh BPS, sehingga analisis kinerja menggunakan data tahun terakhir yang tersedia. Penurunan laju pertumbuhan ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap aktivitas ekonomi daerah, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal maupun internal, seperti penyesuaian fiskal, fluktuasi harga komoditas, dinamika pasar tenaga kerja, maupun dampak lanjutan dari kondisi ekonomi global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran 2020-2024 dapat dilihat dalam Grafik berikut:

Gambar 3. 1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat dan Pangandaran Tahun 2021-2025 (%)

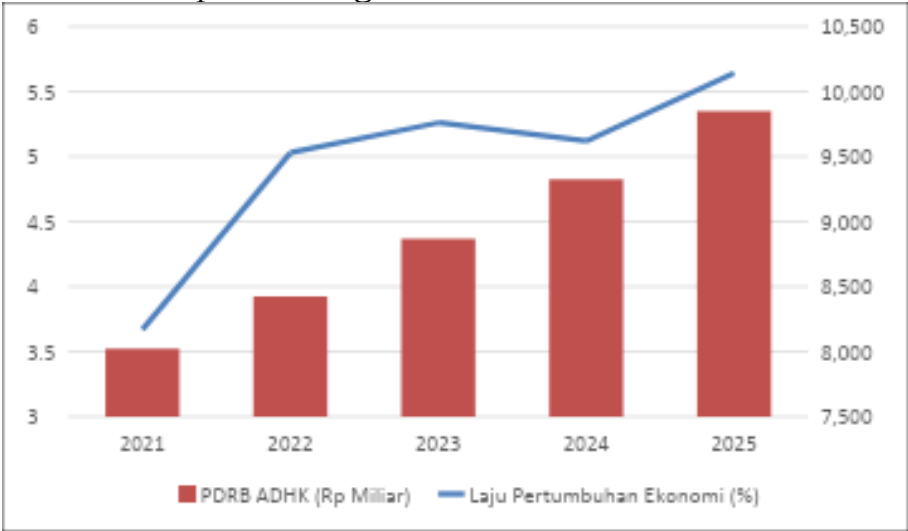


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, Diolah

Berdasarkan grafik di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran pada periode 2021–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,67 persen pada tahun 2021 menjadi 5,64 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,10 persen dan Provinsi Jawa Barat sebesar 5,32 persen, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah terus menguat didukung oleh sektor-sektor unggulan daerah.

Sejalan dengan itu, PDRB Kabupaten Pangandaran juga terus meningkat setiap tahunnya yang mencerminkan adanya ekspansi dan penguatan struktur perekonomian daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Kabupaten Pangandaran semakin membaik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan pemulihan sektor-sektor produktif daerah.

Gambar 3. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026, Diolah

A. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Kontribusi berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi yang tercipta dari nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor mencerminkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap kapasitas produksi di masing-masing sektor usaha.

Tabel 3. 3 PDRB ADHB Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.241,83	3.485,23	3.631,92	3.961,05	4.519,01
B	Pertambangan dan Penggalian	72,32	75,09	77,82	80,12	82,93
C	Industri Pengolahan	592,38	663,41	710,43	752,85	780,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,03	9,70	9,97	10,16	10,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan	2,07	2,13	2,14	2,38	2,45

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
	Daur Ulang					
F	Konstruksi	1.023,09	1.019,50	1.101,06	1.197,60	1.308,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.368,36	2.605,46	2.792,70	2.998,39	3.103,19
H	Transportasi dan Pergudangan	1.403,19	1.574,37	1.934,53	2.149,21	2.329,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.162,85	1.325,48	1.449,88	1.568,18	1.743,74
J	Informasi dan Komunikasi	242,55	249,04	261,21	277,44	282,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	237,91	267,33	276,11	289,39	295,38
L	Real Estate	361,77	395,47	412,92	433,64	465,80
M,N	Jasa Perusahaan	122,79	137,30	143,86	154,35	163,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	312,33	311,59	320,93	348,69	333,01
P	Jasa Pendidikan	767,95	793,54	848,57	948,62	1.003,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27,49	29,77	31,34	34,28	37,53
R,S,T,U	Jasa lainnya	181,78	219,30	251,03	268,21	295,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		12.129,69	13.163,70	14.256,42	15.474,58	16.758,24

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran, 2026

Tabel 3. 4 PDRB ADHK Lapangan Usaha Kabupaten Pangandaran
Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.898,15	1.963,55	1.990,67	2.057,75	2.272,55
B	Pertambangan dan Penggalian	52,63	53,10	53,66	54,19	54,06
C	Industri Pengolahan	403,46	437,93	455,66	467,19	474,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,09	6,51	6,60	6,74	6,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,24	1,28	1,27	1,37	1,41
F	Konstruksi	729,18	712,27	754,86	815,36	884,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.759,30	1.861,28	1.944,78	2.013,47	2.029,89
H	Transportasi dan Pergudangan	871,80	938,53	1.091,57	1.203,40	1.294,40

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	711,21	785,69	834,47	882,28	968,33
J	Informasi dan Komunikasi	238,55	248,14	260,14	276,32	281,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	161,19	168,19	170,67	172,98	174,41
L	Real Estate	286,18	308,27	318,27	333,33	350,58
M,N	Jasa Perusahaan	77,82	85,14	86,84	89,40	90,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	224,90	224,97	229,31	244,77	230,77
P	Jasa Pendidikan	437,07	446,80	468,28	495,87	513,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,86	21,14	22,06	23,50	25,27
R,S,T,U	Jasa lainnya	144,15	163,61	180,74	186,39	198,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8.022,78	8.426,40	8.869,86	9.324,31	9.850,57

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2025, perekonomian daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan relatif stabil. Nilai PDRB ADHB meningkat dari Rp12.129,69 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp16.758,24 miliar pada tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut, PDRB ADHK juga meningkat dari Rp8.022,78 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp9.850,57 miliar pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi daerah baik secara nominal maupun riil.

Struktur perekonomian Kabupaten Pangandaran masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; serta konstruksi. Beberapa sektor jasa dan pariwisata juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah pasca pandemi. Peningkatan nilai PDRB tersebut mencerminkan semakin membaiknya ketahanan ekonomi daerah serta meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran.

Tabel 3. 5 Perkembangan PDRB Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,67	5,03	5,26	5,12	5,64
PDRB ADHB (miliar Rp.)	12.129,79	13.163,70	14.256,42	15.474,58	16.758,24
PDRB ADHK (miliar Rp.)	8.022,780	8.426,400	8.869,86	9.324,31	9.850,57
PDRB per Kapita ADHB (juta Rp.)	28,366	30,444	32,616	35,647	38,39

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB per Kapita ADHK (juta Rp.)	18,761	19,488	20,293	21,479	22,57

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pada periode 2021–2025, perekonomian Kabupaten Pangandaran menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan relatif stabil. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, PDRB per kapita Kabupaten Pangandaran terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp28,366 juta pada tahun 2021 menjadi Rp38,39 juta pada tahun 2025, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan meningkat dari Rp18,761 juta menjadi Rp22,57 juta. Kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan rata-rata pendapatan masyarakat dan membaiknya kinerja perekonomian daerah secara berkelanjutan.

B. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Jenis Pengeluaran

Analisis PDRB berdasarkan pengeluaran tahun 2025 mencerminkan struktur dan dinamika perekonomian Kabupaten Pangandaran dari sisi penggunaan barang dan jasa akhir. Kajian ini menggambarkan peran konsumsi rumah tangga, pemerintah, investasi, serta perdagangan antarwilayah dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah. Pengguna utama barang dan jasa akhir dalam perekonomian meliputi rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT), pemerintah, serta sektor usaha yang secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pangandaran.

Tabel 3. 6 Perbandingan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2024

Uraian	PDRB ADHB (Miliar)	Distribusi Persentase PDRB ADHB (%)	PDRB ADHK (Miliar)	Distribusi Persentase PDRB ADHK (%)	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.709,70	51,97	5.273,49	52,52	2,14
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	130,40	0,78	78,48	0,80	3,56
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.233,69	7,36	674,63	6,85	6,84
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.702,69	22,09	2.120,95	21,53	6,76
Pembentukan Inventori	8,73	0,05	5,77	0,06	N/A
Net Ekspor Barang dan Jasa	2.973,03	17,74	1.797,24	18,25	N/A

Uraian	PDRB ADHB (Miliar)	Distribusi Persentase PDRB ADHB (%)	PDRB ADHK (Miliar)	Distribusi Persentase PDRB ADHK (%)	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%)
PDRB	16.758,24	100,00	9.850,57	100,00	5,64

Sumber: BPS, Kabupaten Pangandaran dalam Angka, 2025

Berdasarkan komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 51,97 persen terhadap PDRB ADHB dan 52,52 persen terhadap PDRB ADHK. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto memberikan kontribusi sebesar 22,09 persen terhadap PDRB ADHB dengan laju pertumbuhan sebesar 6,76 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas investasi dan pembangunan di daerah.

Di sisi lain, net ekspor barang dan jasa juga memberikan kontribusi cukup besar yaitu sebesar 17,74 persen terhadap PDRB ADHB dan 18,25 persen terhadap PDRB ADHK. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 6,84 persen yang menunjukkan adanya peningkatan peran belanja pemerintah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangandaran tahun 2025 sebesar 5,64 persen mencerminkan kondisi perekonomian daerah yang terus tumbuh dan relatif stabil.

3.1.6 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

A. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional difokuskan pada transformasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta pengembangan ekosistem ekonomi sirkular.

Pengembangan ekonomi syariah diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi syariah global melalui penguatan industri halal, keuangan syariah, dan pemberdayaan usaha berbasis syariah. Sementara itu, pengembangan ekonomi digital difokuskan pada peningkatan daya saing digital, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta percepatan transformasi digital pada sektor pemerintahan dan perekonomian.

Kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru diarahkan pada pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, penguatan ketahanan iklim, serta pengembangan potensi kelautan dan perikanan. Selain itu, pengembangan ekonomi sirkular dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya, pengurangan limbah, dan penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) pada berbagai sektor pembangunan.

Dalam mendukung transformasi ekonomi tersebut, pemerintah juga mendorong penguatan inovasi pelayanan publik, transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, serta penguatan stabilitas

politik, hukum, keamanan, dan hak asasi manusia guna menciptakan iklim pembangunan yang kondusif dan berkelanjutan.

Implementasi arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional tersebut diukur melalui berbagai indikator strategis, antara lain pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing digital, pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru, penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan inovasi dan tata kelola pemerintahan.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan produktivitas daerah, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta perluasan kesempatan kerja. Adapun arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat meliputi:

- 1) Penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pangan melalui penyediaan benih unggul, penguatan infrastruktur pertanian, pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas unggulan;
- 2) Pengembangan potensi ekonomi lokal dan peningkatan investasi daerah, khususnya pada wilayah afirmasi Jawa Barat bagian selatan, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 3) Penguatan tata kelola perdagangan, perlindungan konsumen, serta dukungan terhadap produk unggulan daerah guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah;
- 4) Penataan dan pengembangan sektor pariwisata secara kolaboratif dan berkelanjutan melalui penguatan daya tarik wisata alam, budaya, dan wisata perkotaan;
- 5) Penguatan koperasi dan UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, digitalisasi usaha, penguatan kewirausahaan, hilirisasi produk unggulan daerah, serta pengembangan inkubator bisnis;
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja melalui upskilling, reskilling, pelatihan kerja, serta penguatan keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri;
- 7) Pengembangan riset dan inovasi daerah guna mendukung percepatan pertumbuhan dunia usaha dan industri yang berdaya saing;
- 8) Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui deregulasi perizinan, penguatan kemitraan usaha, serta pengembangan sektor ekonomi produktif, hijau, dan berkelanjutan;
- 9) Penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengembangan energi baru terbarukan; dan
- 10) Penataan kelembagaan ekonomi daerah, termasuk penguatan koperasi dan restrukturisasi BUMD guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pangandaran

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran

Tahun 2025–2029 serta dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Barat, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran Tahun 2027 diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan, dan kelautan melalui peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perikanan, dan kelautan berbasis kawasan, komoditas unggulan, dan korporasi;
- 2) Pengembangan ekonomi kreatif melalui perluasan fasilitas inkubasi usaha, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan daya saing produk ekonomi kreatif;
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya potensial daerah pada berbagai sektor pembangunan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing;
- 4) Pengawasan percepatan realisasi proyek strategis daerah yang telah memiliki perizinan guna mendukung peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi daerah; dan
- 5) Transformasi ekonomi daerah melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan nilai tambah produk, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2027 juga diselaraskan dengan tema RKPD Tahun 2027 yaitu “Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata”, yang diarahkan melalui:

- 1) Peningkatan pengelolaan destinasi wisata;
- 2) Peningkatan promosi digital dan penguatan branding pariwisata melalui event dan kolaborasi dengan berbagai platform;
- 3) Pengembangan ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata;
- 4) Peningkatan investasi daerah melalui promosi dan kemudahan prosedur investasi; dan
- 5) Penguatan sektor unggulan daerah serta peningkatan nilai tambah produk lokal.

Kebijakan ekonomi ke depan perlu menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimana peningkatan output ekonomi harus diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan ketimpangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pangandaran tidak hanya difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif, merata, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3. 3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Pangandaran Tahun 2027



Sumber: Diolah Penyusun, 2026

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama satu tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, kebijakan ini menjadi acuan dalam menentukan langkah strategis pemerintah daerah. Optimalisasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah bergantung pada kecukupan sumber penerimaan yang diberikan kepada daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan keuangan Kabupaten Pangandaran tahun 2027 disusun sejalan dengan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah sebagai faktor krusial dalam pelaksanaan pembangunan. Kinerja keuangan daerah tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, di antaranya: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; serta (4) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diukur dalam bentuk uang, termasuk aset yang menjadi milik daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari sistem keuangan negara dan menjadi elemen utama dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 membawa perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam aspek desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, serta meningkatkan kemandirian fiskal. Agar pendanaan pemerintahan berjalan efisien dan efektif serta menghindari ketimpangan alokasi anggaran, maka sistem pengelolaan keuangan daerah diatur dengan jelas dalam regulasi yang berlaku.

Kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu: alokasi, untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan optimalisasi mekanisme pasar; distribusi, guna memastikan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah; serta stabilisasi, sebagai alat untuk meredam dampak guncangan ekonomi, khususnya dari faktor eksternal, agar tidak terlalu memengaruhi perekonomian domestik dan kesejahteraan masyarakat miskin maupun rentan.

Strategi kebijakan fiskal diterapkan melalui dua pendekatan utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang berfokus pada transformasi ekonomi dan sosial melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, ekonomi hijau, peningkatan nilai tambah, penguatan inklusivitas, serta penyederhanaan regulasi. Sementara itu, strategi jangka pendek diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat konvergensi pembangunan antarwilayah. Implementasi strategi ini dilakukan melalui optimalisasi kapasitas fiskal dengan kebijakan transfer ke daerah secara asimetris, peningkatan PAD (*collecting more*), inovasi pembiayaan (*innovative financing*), serta perbaikan kualitas belanja daerah (*spending better*), baik dari segi efektivitas maupun efisiensi, guna memperkuat investasi dan meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.

Kondisi keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal yang diperoleh. Keterbatasan sumber pendapatan daerah menjadikan pengelolaan aset secara profesional sebagai faktor potensial dalam mendukung penerimaan daerah. Selain pendanaan yang bersumber dari APBD, terdapat berbagai alternatif sumber pembiayaan lain yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, seperti pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP), kontribusi swadaya masyarakat, serta peran dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah, dan Kerangka Pendanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berperan lebih aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek keuangan daerah. Oleh karena itu, kemandirian keuangan daerah menjadi faktor krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Daerah dengan kapasitas fiskal yang baik akan memiliki kemampuan lebih besar dalam merancang dan melaksanakan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik serta menjamin keberlanjutan

pembangunan. Kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat diukur melalui tingkat pendapatan daerah yang diperoleh.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencakup tiga aspek utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta sumber pendapatan sah lainnya. Belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sementara itu, pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kondisi keuangan Kabupaten Pangandaran menunjukkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja, defisit yang terjadi disebabkan oleh pelaksanaan belanja yang tetap berjalan meskipun target pendapatan mengalami koreksi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi target RPJMD serta janji politik yang telah ditetapkan. Dampak dari defisit ini bersifat ganda, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, defisit mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Namun, di sisi lain, beban utang daerah semakin tinggi, risiko krisis keuangan meningkat, dan ketergantungan terhadap pendanaan eksternal semakin besar.

Untuk mengatasi defisit yang terjadi, pemerintah daerah menerapkan beberapa strategi utama, antara lain melalui pinjaman daerah yang dilakukan secara terstruktur guna membiayai proyek prioritas tanpa menambah beban fiskal secara signifikan. Efisiensi anggaran juga dilakukan dengan membandingkan penganggaran terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) guna memastikan alokasi yang lebih efektif. Selain itu, pemerintah daerah juga mengupayakan pendanaan inovatif dengan mengeksplorasi sumber-sumber alternatif seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta diiringi dengan penyusunan regulasi guna mengurangi ketergantungan pada utang belanja dan memastikan keberlanjutan fiskal daerah. Dengan strategi-strategi ini, diharapkan kondisi keuangan daerah dapat dikelola secara lebih efektif, sehingga dampak negatif dari defisit dapat diminimalkan dan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2.1.1 Kondisi Fiskal Kabupaten Pangandaran

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih menghadapi tantangan yang cukup dinamis, ditandai dengan keterbatasan ruang fiskal daerah dalam mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya kapasitas pendapatan daerah dibandingkan dengan kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat, khususnya untuk pemenuhan belanja wajib, pelayanan dasar, dan prioritas pembangunan daerah.

Tantangan fiskal daerah yang dihadapi antara lain meliputi:

- 1) Keterbatasan kapasitas fiskal daerah akibat peningkatan kebutuhan belanja yang belum sepenuhnya diimbangi oleh

- pertumbuhan pendapatan daerah;
- 2) Tingginya tekanan belanja daerah, terutama untuk pemenuhan belanja pegawai, pelayanan publik, serta pembiayaan program prioritas daerah;
 - 3) Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ruang fiskal daerah untuk mendukung pembangunan masih terbatas.

Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan berbagai langkah strategis, antara lain:

- 1) Melaksanakan efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah secara lebih efektif dan tepat sasaran;
- 2) Menyusun roadmap penyehatan fiskal daerah sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah jangka menengah;
- 3) Meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
- 4) Memprioritaskan alokasi anggaran pada program prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, menjaga stabilitas fiskal, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah secara lebih optimal.

3.2.1.2 Strategi Penyehatan Fiskal Kabupaten Pangandaran

Dalam rangka menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menerapkan beberapa strategi penyehatan fiskal daerah yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal, mengendalikan belanja daerah, serta menjaga keberlanjutan pembangunan.

Strategi penyehatan fiskal daerah meliputi:

- 1) Efisiensi dan Rasionalisasi Belanja Daerah
Dilaksanakan melalui pengendalian dan penajaman prioritas belanja daerah agar lebih fokus pada pelayanan dasar, program prioritas pembangunan, dan kewajiban daerah. Efisiensi dilakukan terhadap belanja yang kurang produktif, antara lain perjalanan dinas, belanja barang dan jasa, honorarium, kegiatan bimbingan teknis, serta belanja modal yang belum mendesak.
- 2) Penjadwalan Ulang Pembayaran Kewajiban Daerah
Dilakukan melalui penjadwalan ulang pembayaran utang daerah kepada pihak ketiga maupun lembaga perbankan, termasuk restrukturisasi pinjaman daerah guna mengurangi tekanan fiskal dan menjaga kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban secara bertahap.
- 3) Optimalisasi Pendapatan Daerah
Dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam optimalisasi dukungan pendanaan daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga menerapkan pengendalian belanja pegawai melalui kebijakan pengadaan ASN yang lebih selektif guna menjaga proporsi belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penajaman prioritas program dan

kegiatan juga dilakukan agar alokasi anggaran lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Kebijakan penyehatan fiskal tersebut diarahkan untuk meningkatkan ruang fiskal daerah sehingga alokasi anggaran pembangunan Tahun 2027 dapat lebih difokuskan pada program prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan pendapatan Kabupaten Pangandaran guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sementara kontribusi PAD menunjukkan tren meningkat meskipun masih perlu terus dioptimalkan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1.291.641.675.418,99 atau menurun dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.433.017.885.265,47. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan transfer, khususnya transfer antar daerah yang pada Tahun 2024 memperoleh dukungan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Pada Tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.147.946.613.140,74. Penurunan proyeksi tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan transfer pemerintah pusat, belum dialokasikannya Bantuan Keuangan Provinsi, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya pada Tahun 2027, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp1.475.675.925.028,00 seiring dengan peningkatan target PAD dan proyeksi meningkatnya pendapatan transfer.

Dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah, arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan, perluasan basis pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, pemanfaatan dana umat, dan produk ekonomi syariah. Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mengoptimalkan pendapatan transfer dan sumber pendapatan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3. 7 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2024-2028

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	240.125.736.186,47	294.884.638.626,99	324.123.208.924,00	342.749.362.761,00	461.255.933.000,00
4.1.1	Pajak Daerah	83.495.705.322,00	107.329.104.785,00	134.411.838.292,00	131.049.683.411,00	138.974.541.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	34.721.606.693,00	175.002.422.629,00	185.964.020.632,00	203.599.679.350,00	198.543.387.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	525.178.733,00	551.716.296,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	888.665.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	121.383.245.438,47	12.001.394.916,99	2.747.350.000,00	7.100.000.000,00	122.849.340.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	983.208.106.906,00	996.722.363.747,00	823.823.404.216,74	1.132.926.562.267,00	1.095.808.842.328,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	922.264.407.000,00	923.553.385.679,00	782.064.026.449,74	901.630.951.125,00	944.459.384.713,00
4.2.2	Transfer antar – daerah	234.642.261.776,00	73.168.978.068,00	41.759.377.767,00	231.295.611.142,00	151.349.457.615,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	34.673.045,00	0	0	0
4.3.1	Hibah	0	0	0	0	0
4.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	34.673.045,00	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	1.433.017.885.265,47	1.291.641.675.418,99	1.147.946.613.140,74	1.475.675.925.028,00	1.557.064.775.328,00

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, 2026

³⁾ Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (audited BPK)

⁴⁾ Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (non-audited BPK)

⁵⁾ APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026

⁶⁾ Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2027

⁷⁾ RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah, kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi berbagai sumber penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan sistem administrasi pendapatan, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah dalam pengelolaan pendapatan dan memperluas ruang fiskal daerah.

Kebijakan pendapatan daerah juga diarahkan pada penguatan digitalisasi layanan perpajakan dan retribusi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, pendapatan transfer tetap dioptimalkan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka optimalisasi Dana Transfer ke Daerah serta sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan arah kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah melalui optimalisasi peran perangkat daerah pengelola pendapatan;
- 2) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis potensi riil daerah;
- 3) Penyempurnaan regulasi dan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan efektivitas penerimaan daerah;
- 4) Penguatan digitalisasi layanan pendapatan daerah melalui pengembangan sistem pembayaran daring, perluasan kanal pembayaran, dan integrasi sistem informasi pendapatan daerah;
- 5) Peningkatan sinergi lintas sektor dan penguatan pengawasan pendapatan daerah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mencegah kebocoran penerimaan daerah;
- 6) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola pendapatan melalui penguatan kapasitas, integritas, dan pemanfaatan teknologi informasi;
- 7) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan penguatan peran BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
- 8) Eksplorasi sumber-sumber PAD baru yang potensial sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan daerah dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), arah kebijakan yang ditempuh meliputi:

- 1) Penguatan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan unit Samsat dalam pengembangan layanan perpajakan kendaraan bermotor;
- 2) Peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat melalui berbagai media dan pendekatan kewilayahan;
- 3) Dukungan terhadap pemutakhiran data kendaraan bermotor melalui kegiatan pendataan dan koordinasi lintas instansi; dan
- 4) Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan

pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan komponen utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Struktur belanja daerah Kabupaten Pangandaran terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pada Tahun 2025 realisasi belanja daerah mencapai Rp1.389.673.573.881,00 dan masih didominasi oleh belanja operasi, khususnya belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, belanja modal mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebagai dampak penyesuaian kapasitas fiskal daerah dan kebijakan efisiensi belanja.

Pada Tahun 2026 belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp1.187.310.661.786,43 atau menurun dibandingkan Tahun 2025 sejalan dengan kebijakan penyehatan fiskal daerah, penyesuaian kemampuan pendapatan daerah, serta pemenuhan kewajiban pembayaran utang daerah. Selanjutnya pada Tahun 2027 belanja daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp1.464.475.925.028,00 yang mencerminkan mulai membaiknya kapasitas fiskal daerah dan meningkatnya alokasi belanja pembangunan, terutama belanja modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah kebijakan belanja daerah difokuskan pada peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, penajaman prioritas program dan kegiatan, serta penguatan belanja yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kebijakan belanja daerah diarahkan pada penguatan belanja berbasis kinerja, pengendalian belanja operasi secara lebih proporsional, peningkatan kualitas belanja modal, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi sistem pengelolaan keuangan.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah dan menjaga stabilitas fiskal, pemerintah daerah juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar arah belanja daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Pangandaran. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2028

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA					
2.1	Belanja Operasi	994.530.727.427,00	1.008.015.134.872,00	859.471.539.255,76	1.140.573.536.928,00	1.136.983.435.779,00
2.1.1	Belanja Pegawai	491.964.608.785,00	526.388.537.041,00	481.875.377.478,09	565.290.473.651,87	598.585.682.000,00
2.1.2	Belanja barang dan jasa	443.165.843.753,00	448.096.079.507,00	353.287.504.977,67	549.449.256.476,13	494.377.952.779,00
2.1.3	Belanja bunga	12.681.597.221,00	12.388.472.221,00	11.375.000.000,00	8.417.500.000,00	21.113.345.000,00
2.1.4	Belanja subsidi	0	0	0	1.000.000.000,00	0
2.1.5	Belanja Hibah	43.449.125.668,00	16.863.046.103,00	11.576.656.800,00	15.943.306.800,00	20.790.012.000,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	3.269.552.000,00	4.279.000.000,00	1.357.000.000,00	473.000.000,00	2.116.444.000,00
2.2	Belanja Modal	304.982.767.222,00	191.662.187.197,00	80.664.825.707,00	64.766.922.770,00	246.380.483.549,00
2.2.1	Belanja Tanah	0	986.850.000,00	0	0,00	997837000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	108.827.498.051,00	88.050.721.060,00	23.563.643.326,00	13.690.137.316,00	151.383.761.000,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	92.813.878.413,00	83.304.805.255,00	12.423.530.500,00	50.720.003.254,00	49.143.281.033,00
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jembatan	101.020.283.051,00	16.584.204.854,00	41.495.919.681,00	5.000.000,00	39.246.187.516,00
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	2.286.727.707,00	155.047.000,00	181.732.200,00	351.782.200,00	176.542.000,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	34.380.000,00	2.580.559.028,00	3.000.000.000,00	0,00	5.432.875.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	4.334.157.345,00	4.619.298.743,00	72.468.050.020,69	53.781.724.692,00	11.265.976.000,00
2.4	Belanja transfer	174.981.811.102,00	185.376.953.069,00	174.706.246.802,98	205.353.740.638,00	85.916.185.000,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.729.021.396,00	16.916.876.057,00	28.887.712.802,98	29.233.894.270,00	14.026.766.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	169.252.789.706,00	168.460.077.012,00	145.818.534.000,00	176.119.846.368,00	71.889.419.000,00
	Total Belanja	1.478.829.463.096,00	1.389.673.573.881,00	1.187.310.661.786,43	1.464.475.925.028,00	1.480.546.080.328,00

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, 2026

³⁾ Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (audited BPK)

⁴⁾ Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (non-audited BPK)

⁵⁾ APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026

⁶⁾ Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2027

⁷⁾ RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

Sebagian besar belanja daerah Kabupaten Pangandaran masih dialokasikan pada belanja operasi, terutama belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial. Oleh karena itu, ke depan proporsi belanja pembangunan, khususnya belanja modal, perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029 serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* sesuai kemampuan fiskal daerah.

Secara umum, arah kebijakan belanja daerah meliputi:

- 1) Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 2) Peningkatan proporsi belanja publik yang mendukung pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- 3) Pengutamaan belanja untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, program unggulan kepala daerah, target RPJMD, serta prioritas nasional dan provinsi;
- 4) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial;
- 5) Penguatan integrasi belanja daerah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan pengurangan ketimpangan wilayah;
- 6) Pemenuhan mandatory spending, termasuk alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah serta fungsi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah;
- 7) Peningkatan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik untuk mendukung konektivitas wilayah, pelayanan dasar, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 8) Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui penguatan penganggaran berbasis kinerja, pengawasan internal, dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah;
- 9) Optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan aset daerah guna mendukung pelayanan publik dan peningkatan nilai ekonomi daerah;
- 10) Penguatan peran belanja daerah dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, penggunaan produk dalam negeri, dan penguatan ekonomi lokal;
- 11) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi, penguatan kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- 12) Pengalokasian hibah dan bantuan keuangan secara selektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Selain itu, penguatan pengawasan dan pengembangan sistem

pengelolaan keuangan daerah berbasis digital terus dilakukan guna meningkatkan transparansi, meminimalkan potensi penyimpangan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan akuntabel. Pemerintah daerah juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar kebijakan belanja daerah selaras dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan daerah.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan seluruh transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran dalam satu tahun anggaran. Struktur pembiayaan daerah Kabupaten Pangandaran terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada Tahun 2025 realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp181.931.242.640,21 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp68.600.000.000,00 yang digunakan terutama untuk pembayaran cicilan pokok utang daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2026 penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp70.564.048.645,69 yang seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp31.200.000.000,00 untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Selanjutnya pada Tahun 2027 penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp31.200.000.000,00 sehingga pembiayaan netto diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp11.200.000.000,00. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan daerah diarahkan secara lebih hati-hati dan selektif guna menjaga stabilitas fiskal daerah serta mendukung upaya penyehatan fiskal Kabupaten Pangandaran.

Arah kebijakan pembiayaan daerah difokuskan pada pengelolaan pembiayaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah serta kemampuan pembayaran kembali kewajiban daerah. Secara umum arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi:

- 1) Pengendalian pembiayaan daerah secara selektif dan terukur sesuai kebutuhan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan untuk mendukung kesinambungan pendanaan pembangunan daerah;
- 3) Pengendalian dan penataan kewajiban utang daerah melalui pembayaran cicilan pokok utang secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah;
- 4) Penguatan manajemen kas daerah dan perencanaan pembiayaan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi risiko defisit anggaran;
- 5) Pengendalian penerimaan pinjaman daerah dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali serta dampaknya terhadap ruang fiskal daerah;

- 6) Peningkatan efektivitas pengelolaan pembiayaan daerah melalui penguatan sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan daerah;
- 7) Penguatan sinkronisasi kebijakan pembiayaan daerah dengan kebijakan fiskal nasional dan provinsi guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah; dan
- 8) Penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan yang berkelanjutan.

Melalui kebijakan pembiayaan daerah tersebut diharapkan stabilitas fiskal Kabupaten Pangandaran dapat terus terjaga, kewajiban daerah dapat dipenuhi secara bertahap, serta kapasitas fiskal daerah semakin kuat dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tabel 3. 9 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024-2028

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026	Proyeksi Tahun 2027	Proyeksi Tahun 2028
1	2	3	4	5	6	7
	PEMBIAYAAN					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	219.242.820.470,74	6.931.242.640,21	70.564.048.645,69	20.000.000.000,00	0
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000,00	140.000.000.000,00	0	0	0
6.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0	35.000.000.000,00	0	0	0
6.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	37.500.000.000,00	0	0	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	219.242.820.470,74	181.931.242.640,21	70.564.048.645,69	20.000.000.000,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	
6.2.2	Penyertaan modal daerah	0	0	0	0	
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	150.000.000.000,00	33.600.000.000,00	31.200.000.000,00	31.200.000.000,00	76.518.695.000,00
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	0	0	
6.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	16.500.000.000,00	35.000.000.000,00	0	0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	166.500.000.000,00	68.600.000.000,00	31.200.000.000,00	31.200.000.000,00	76.518.695.000,00
	Pembiayaan Netto	52.742.820.470,74	113.331.242.640,21	39.364.048.645,69	-11.200.000.000,00	-76.518.695.000,00

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, 2026

³⁾ Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (audited BPK)

⁴⁾ Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (non-audited BPK)

⁵⁾ APBD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026

⁶⁾ Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2027

⁷⁾ RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan daerah serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mengoptimalkan berbagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali dan mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, selain mengandalkan APBD Kabupaten, pembangunan daerah juga didukung melalui berbagai sumber pembiayaan lain, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi Jawa Barat, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah yang digunakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah melalui mekanisme transfer ke daerah. Dukungan APBN bagi Kabupaten Pangandaran terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, serta bentuk pendanaan lainnya sesuai kebijakan pemerintah pusat. Alokasi APBN diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi transfer APBN untuk Kabupaten Pangandaran masih menjadi salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Namun demikian, adanya dinamika kebijakan fiskal nasional dan penyesuaian prioritas pembangunan menyebabkan besaran alokasi transfer mengalami fluktuasi pada masing-masing jenis pendanaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat sinkronisasi program pembangunan daerah dengan prioritas nasional agar dukungan pendanaan APBN dapat lebih optimal.

Tabel 3. 10
Alokasi dan Proyeksi APBN untuk Kabupaten Pangandaran
Tahun 2024-2027

NO	Jenis APBN	Realisasi		Proyeksi	
		2024	2025	2026	2027
Dana Transfer					
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	71.433.031.000	66.892.914.000	22.707.541.450	19.987.662.000
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	536.179.445.752	563.750.746.025	512.463.318.000	503.015.581.000
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.756.443.000	32.506.746.568	0	168.519.090.125
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	146.789.452.595	163.350.468.134	162.310.223.000	116.077.937.000
5	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0	0
6	Hibah ke Daerah	0	0	0	0
7	Insentif Fiskal	0	0	0	0

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, 2026

3.3.2 APBD Provinsi Jawa Barat

Selain APBN, pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran juga didukung melalui bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBD Provinsi. Bantuan keuangan tersebut diberikan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas daerah, mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah, serta memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Pada Tahun 2026 belum terdapat alokasi bantuan keuangan provinsi karena proses pengalokasian masih menyesuaikan kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Besaran bantuan keuangan tersebut bersifat indikatif dan sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal provinsi, hasil verifikasi usulan daerah, serta sinkronisasi program prioritas antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus memperkuat koordinasi dan penyelarasan program pembangunan guna meningkatkan peluang dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3. 11
Alokasi APBD Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Pangandaran
Tahun 2024-2027

NO	Jenis APBD Provinsi	Realisasi		Proyeksi	
		2024	2025	2026	2027
1	Bankeu Provinsi	181.986.267.305	73.168.978.068	0	176.119.846.368

Sumber: BKAD Kabupaten Pangandaran, 2026

3.3.3 Alternatif Pembiayaan Lainnya

1. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk dukungan dunia usaha terhadap pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mendorong peningkatan sinergi dengan sektor swasta agar program CSR dapat mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama pada bidang sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Optimalisasi program CSR juga diarahkan melalui penyelarasan program perusahaan dengan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran.

2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha dengan prinsip pembagian risiko yang proporsional. Skema KPBU diarahkan untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik tanpa memberikan tekanan yang besar terhadap kemampuan fiskal daerah. Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mendorong pengembangan skema KPBU, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis seperti penyediaan air minum, penerangan jalan umum, dan infrastruktur pelayanan publik lainnya.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan

yang dapat dimanfaatkan secara selektif dan terukur untuk mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas fiskal daerah. Pemanfaatan pinjaman daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kapasitas pembayaran kembali, serta kesinambungan fiskal jangka menengah dan panjang. Kebijakan pinjaman daerah diarahkan secara hati-hati dan lebih difokuskan untuk mendukung pembangunan yang produktif dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta peningkatan pelayanan publik.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2027 merupakan bagian integral dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 serta penjabaran tahunan dari arah kebijakan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat. Penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, proyeksi kondisi makro daerah, isu strategis pembangunan, serta kebutuhan riil masyarakat.

Tahun 2027 menjadi momentum penting dalam memperkuat fondasi transformasi ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sisi lain, tantangan pembangunan masih dihadapkan pada perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran, pemerataan infrastruktur wilayah, serta penguatan ketahanan lingkungan dan kebencanaan, khususnya sebagai daerah pesisir.

Oleh karena itu, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 dirumuskan secara terukur, realistis, dan selaras dengan kapasitas fiskal daerah, dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil (result oriented). Rumusan ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan, sehingga tercipta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, berikut disampaikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2027.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk memberikan arah yang jelas dan tepat untuk pembangunan wilayah, tujuan dan sasaran pembangunan harus dirumuskan. Selain itu, perlu untuk memberikan informasi yang akurat tentang ketercapaian kinerja pembangunan, yang tentunya didukung dengan indikator dari tujuan dan sasaran tersebut. Selanjutnya, melalui perumusan tujuan dan sasaran tersebut, akan membantu dalam menentukan apakah visi dan misi yang telah dibentuk telah tercapai atau tidak.

Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Telaah terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan bagian penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 guna memastikan terwujudnya sinergi, konsistensi, dan harmonisasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Arah pembangunan nasional Tahun 2027 mengacu pada tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode berjalan, dengan penekanan pada transformasi ekonomi, penguatan sumber daya manusia, pembangunan rendah karbon, serta reformasi birokrasi dan tata kelola

pemerintahan.

Secara umum, tujuan pembangunan nasional diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur melalui percepatan transformasi struktural ekonomi, peningkatan daya saing SDM, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta penguatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sasaran pembangunan nasional tersebut diukur melalui indikator-indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rasio gini, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan dari visi diatas, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif;
4. Memantapkan supermasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tatakelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah

- sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Visi Presiden untuk periode 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini memiliki makna bahwa pembangunan membutuhkan kerja sama dari seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan semangat yang sama, berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, untuk menjadikan Indonesia setara dengan negara maju pada tahun 2045. Visi ini akan tercapai melalui Delapan Misi Presiden yang diuraikan dalam Delapan Asta Cita.

Asta Cita tersebut mencakup 17 program prioritas Presiden yang meliputi rencana pembangunan di berbagai sektor, serta langkah-langkah yang dikenal sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Semua upaya ini dirancang untuk mengatasi permasalahan dan tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur, dengan tujuan menciptakan struktur yang kuat untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Gambar 4. 1 Visi dan Misi 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029

Program Prioritas berfokus pada pembangunan jangka panjang yang mencakup berbagai sektor penting, seperti ketahanan pangan, sistem pemerintahan yang lebih baik, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Program ini bertujuan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi kemajuan bangsa dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Sementara itu, Program Hasil Terbaik Cepat mengedepankan langkah-langkah yang lebih konkret dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam waktu yang relatif cepat. Dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kebijakan langsung, seperti pemberian makanan sehat bagi anak-anak, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan infrastruktur di tingkat desa, program ini diharapkan mampu memberikan dampak

positif yang nyata dan cepat terasa. Berikut ini program prioritas dan program hasil terbaik cepat:

Gambar 4. 2 Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Nasional 2025-2029

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Sumber: RPJMN 2025-2029

4.1.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, yaitu “JABAR ISTIMEWA, Lembur diurus, Kota ditata”. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk pencapaian misi pembangunan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

MISI 1

Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul

Tujuan 1

Terwujudnya sumber daya manusia yang cageur bageur, bener, pinter, dan singer, dengan sasaran:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Terbentuknya individu bertaqwa, beretika, dan berbudaya;
3. Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
4. Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan;
5. Terbentuknya individu kreatif dan cekatan.

MISI 2

Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif

Tujuan 2

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi berbasis sumber daya lokal dan teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan yang berdaya saing;
2. Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas;
3. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk swasembada pangan serta kesejahteraan petani/nelayan;
4. Meningkatnya nilai investasi, penciptaan lapangan kerja, serta aktivitas usaha ekonomi kerakyatan dan tenaga kerja kompeten;
5. Terkendalinya stabilitas ekonomi makro; dan
6. Meningkatnya produktivitas sektor pariwisata dan ekonomikreatif yang berdaya saing.

MISI 3

Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan pedesaan, serta miskin dan kaya

Tujuan 3

Terwujudnya pemerataan pembangunan kewilayahan, sosial, dan ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya layanan infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan sekitar kawasan konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan; dan
2. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.

MISI 4

Mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance

Tujuan 4.1

Terwujudnya masyarakat mandiri dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya penerapan iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan;
2. Meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Tujuan 4.2

Terwujudnya birokrasi yang gesit dan berorientasi pelayanan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2027

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan

antara misi dengan program pembangunan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Visi pembangunan daerah harus mampu mengatasi isu-isu strategis dan tantangan pembangunan di wilayah tersebut, serta dapat diselesaikan dalam periode waktu menengah. Visi pembangunan daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih saat pemilihan kepala daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil pembangunan dari RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029. Visi ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi berbagai masalah strategis di Kabupaten Pangandaran serta perkembangan pembangunan di beberapa tahun terakhir. Akibatnya, untuk mendukung kemajuan Kabupaten Pangandaran, beberapa masalah strategis harus dipertimbangkan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran, kebijakan strategis harus dibuat untuk mendukung masalah strategis tersebut. Adapun visi Kabupaten Pangandaran adalah:

Gambar 4. 3 Visi Kabupaten Pangandaran 2025-2029



Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2025-2029

Diharapkan melalui visi pembangunan Kabupaten Pangandaran selama lima tahun ke depan, semua pihak berwenang di Kabupaten Pangandaran dapat bekerja sama untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan misi pembangunan untuk mencapai visi. Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029, rumusan misi dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam proses pembangunan. Perlu diingat bahwa misi berfungsi sebagai pedoman (*guidence*) untuk: (i) mendorong fokus untuk pencapaian tujuan; (ii) memberikan dasar untuk pengalokasian sumber daya; (iii) menetapkan kerangka tanggung jawab organisasi; dan (iv) berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan tujuan organisasi.

Rumusan misi juga dapat berfungsi sebagai alat promosi, yaitu dapat menarik perhatian *stakeholder* (pemerintah, donasi, masyarakat, dll.) dan memberikan inspirasi kepada pihak terkait. Misi Kabupaten Pangandaran 2025–2029 disusun untuk memperjelas langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi periode 2025–2029. Misi pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 4 Misi Kabupaten Pangandaran 2025-2029



Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2025-2029

Berikut ini penjelasan misi-misi Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029:

1. Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Pangandaran mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas. Hal ini mencakup pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih baik, peningkatan tenaga kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan

Fokus misi ini adalah memperbaiki dan memperkuat sistem pendidikan di Pangandaran. Ini bisa meliputi peningkatan kualitas pengajaran, peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan bagi tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, tujuannya adalah menghasilkan generasi yang cerdas dan siap bersaing.

3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan

Misi ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat Pangandaran, seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, infrastruktur yang dibangun harus ramah lingkungan dan berkelanjutan agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

4. Mewujudkan Penataan Pariwisata yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan

Sebagai daerah yang dikenal dengan potensi wisata alamnya, Pangandaran berkomitmen untuk mengelola sektor pariwisata dengan cara yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan tempat wisata yang ramah lingkungan, pengaturan keamanan bagi wisatawan, serta menciptakan pengalaman wisata yang tidak merusak lingkungan namun tetap memberi keuntungan ekonomi.

5. Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, dan Nasionalisme melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan

Misi ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di kalangan masyarakat Pangandaran. Hal ini

dilakukan melalui penguatan pendidikan agama, kegiatan keagamaan, serta pemahaman tentang pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme. Diharapkan, masyarakat dapat hidup harmonis dengan saling menghargai dan menjaga persatuan.

6. Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan

Dalam misi ini, Kabupaten Pangandaran berupaya untuk mencapai kemandirian dalam bidang pangan dengan memaksimalkan potensi pertanian dan perikanan lokal. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, tetapi mampu memenuhi kebutuhan pangan dari hasil produksi sendiri dengan kualitas yang baik dan berkelanjutan.

7. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani

Misi ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Kabupaten Pangandaran agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas birokrasi, pelayanan publik akan lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

8. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa

Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Pangandaran. Ini mencakup pemberdayaan desa-desa melalui program-program yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan, akses ke pembiayaan, dan pengembangan produk unggulan daerah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

A. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, pencapaian kinerja pada misi 1 diuraikan melalui tujuan dan sasaran. Untuk itu, tujuan pada misi 1, yakni Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata. Dengan demikian, sasaran dalam rangka mendukung tujuan di misi 1 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Gambar 4. 5 Cascading Misi 1



Sumber: RPJMD Kabupaten Pangadaran 2025-2029

B. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, pencapaian kinerja pada misi 2 diuraikan melalui tujuan dan sasaran. Untuk itu, tujuan pada misi 2, yakni Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan. Dengan demikian, sasaran dalam rangka mendukung tujuan di misi 2 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah.

Gambar 4. 6 Cascading Misi 2



Sumber: RPJMD Kabupaten Pangadarann2025-2029

C. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, pencapaian kinerja pada misi 3 diuraikan melalui tujuan dan sasaran. Untuk itu, tujuan pada misi 3, yakni Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, sasaran dalam rangka mendukung tujuan di misi 3 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur;
2. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan
4. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana.

Gambar 4. 7 Cascading Misi 3



Sumber: RPJMD Kabupaten Pangadaran 2025-2029

D. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, pencapaian kinerja pada misi 4 diuraikan melalui tujuan dan sasaran. Untuk itu, tujuan pada misi 4, yakni Terwujudnya daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, sasaran dalam rangka mendukung tujuan di misi 4 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata melalui Tata Kelola yang Berkelanjutan;
2. Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah; dan
3. Meningkatnya penguatan identitas budaya dan warisan daerah.

Gambar 4. 8 Cascading Misi 4



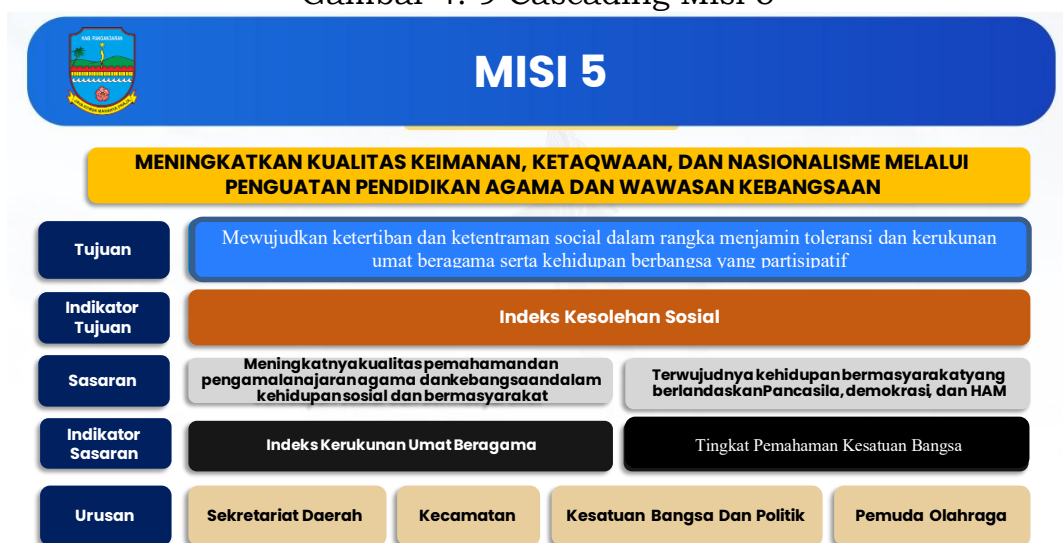
Sumber: RPJMD Kabupaten Pangadaran 2025-2029

E. Tujuan dan Sasaran Misi 5

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, pencapaian kinerja pada misi 5 diuraikan melalui tujuan dan sasaran. Untuk itu, tujuan pada misi 5, yakni Terwujudnya ketertiban dan ketentraman sosial dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama serta kehidupan berkebangsaan yang partisipatif. Dengan demikian, sasaran dalam rangka mendukung tujuan di misi 5 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan kebangsaan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat; dan
2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Gambar 4. 9 Cascading Misi 5



Sumber: RPJMD Kabupaten Pangadaran 2025-2029

F. Tujuan dan Sasaran Misi 6

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, pencapaian kinerja pada misi 6 diuraikan melalui tujuan dan sasaran. Untuk itu, tujuan pada misi 6, yakni Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara merata serta berkelanjutan. Dengan demikian, sasaran dalam rangka mendukung tujuan di misi 6 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tingkat Ketahanan Pangan Daerah.

Gambar 4. 10 Cascading Misi 6



G. Tujuan dan Sasaran Misi 7

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, pencapaian kinerja pada misi 7 diuraikan melalui tujuan dan sasaran. Untuk itu, tujuan pada misi 7, yakni Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bersih dan inovatif. Dengan demikian, sasaran dalam rangka mendukung tujuan di misi 7 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
- 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegrasi;
- 3. Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah; dan
- 4. Meningkatnya sistem inovasi daerah dan kolaborasi lintas sektor.

Gambar 4. 11 Cascading Misi 7



H. Tujuan dan Sasaran Misi 8

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, pencapaian kinerja pada misi 8 diuraikan melalui tujuan dan sasaran. Untuk itu, tujuan pada misi 8, yakni Meningkatnya perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian desa. Dengan demikian, sasaran dalam rangka mendukung tujuan di misi 8 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya perekonomian wilayah;
- 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
- 3. Masyarakat Desa yang berdaya saing.

Gambar 4. 12 Cascading Misi 8



Sumber: RPJMD Kabupaten Pangadaran 2025-2029

Tabel 4. 1 *Cascading* Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2027 dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
							2025	2026	2027	
PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN WISATA PANGANDARAN MENDUNIA DENGAN MENITIKBERATKAN PADA PENDIDIKAN AGAMA DAN KARAKTER	MEMPERMUDAH AKSES DAN MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Indeks Kesehatan			Angka	85,14	85,49	85,85	86,55
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,34	75,57	75,80	76,26
	MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT SEJAHTERA DENGAN PENGUATAN PARIWISATA	Mewujudkan SDM Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan			Angka	61,62	62,06	62,50	63,39
				Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Capaian SPM Pendidikan	Nilai	82	84	86	90
	MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			Angka	85,88	85,96	86,04	86,20
				Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Persentase cakupan layanan infrastruktur	Persen	38,1	40,47	42,80	49,98
				Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Indeks Konektifitas Wilayah	Angka	1,75	1,77	1,79	1,83
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66,26	66,26	66,51	67,02
				Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	133	131,35	129,7	126,40

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
							2025	2026	2027	
	MEWUJUDKAN PENATAAN PARIWISATA YANG AMAN, NYAMAN, DAN BERKESINAMBUNGAN	Mewujudkan daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Pariwisata			Angka	0,5	0,5	0,8	1,2
				Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata melalui Tata Kelola yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Wisatawan (IKW)	Angka	70	72	74	80
				Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	10,36	10,43	10,69	11,40
				Meningkatnya penguatan identitas budaya dan warisan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	52	53	55	59
	MENINGKATKAN KUALITAS KEIMANAN, KETAQWAAN, DAN NASIONALISME MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Mewujudkan ketertiban dan ketentraman sosial dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama serta kehidupan berkebangsaan yang partisipatif	Indeks Kesalehan Sosial			Angka	82,14	82,34	82,54	82,94
				Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan kebangsaan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	73,09	73,78	74,47	75,85
				Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Angka	63,7	67,7	71,7	79,7

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
							2025	2026	2027	
				berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM						
	MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KETAHANAN PANGAN	Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara merata serta berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)			Angka	83,96	84,06	84,16	84,36
				Meningkatnya tingkat Ketahanan Pangan Daerah	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan		4,11	3,96	3,78	3,34
	MENINGKATKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bersih dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi			Angka	76,5	76,80	77,00	79,00
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	LHE AKIP Pemda	Poin	69,99	72,79	75,20	80,01
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas	Indeks Integritas Nasional	Angka	71,85	72,37	72,90	73,94
				Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	58,8	59,69	60,51	62,16

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
							2025	2026	2027	
				Meningkatnya sistem inovasi daerah dan kolaborasi lintas sektor	Indeks Daya saing daerah	Angka	3,87	3,90	3,93	3,98
	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEREKONOMIAN, SERTA PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN DESA	Meningkatnya perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian desa	Laju Pertumbuhan Ekonomi			Persen	5,2	5,62	5,65	6,03
				Meningkatnya perekonomian wilayah	Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap PDRB	Persen	35,51	35,55	35,65	35,88
				Meningkatnya kesejahetraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,2	7,78	6,98	4,99
				Masyarakat Desa yang berdaya saing	Indeks Desa Membangun / Indeks Desa	Angka	0,8613	0,8713	0,8813	0,9013

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran 2025-2029

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Pangandaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2027 harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027.

4.2.1 Isu Strategis

Isu strategis merujuk pada keadaan atau aspek yang perlu diberikan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang penting bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa depan. Penyusunan isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Tujuannya adalah agar pengenalan isu-isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap prioritas pembangunan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan etika birokrasi.

Isu strategis dapat mencakup kondisi yang saat ini belum menjadi permasalahan, tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di masa mendatang. Manajemen isu-isu strategis yang efektif dapat menjadi langkah penting dalam merealisasikan pembangunan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2027.

Isu Strategis Nasional

Indonesia telah mengalami kemajuan dari fase pembangunan sebelumnya. Namun, di masa mendatang Indonesia akan menghadapi perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat. Begitu banyak perubahan yang terjadi, membuat langkah menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045 menjadi lebih sulit. Hal ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, tata kelola, kekuasaan hukum, stabilitas, pertahanan, diplomasi, ketahanan sosial budaya, ekologi, kewilayahan, infrastruktur, dan pengelolaan pembangunan. Beberapa isu dan tantangan dalam proses pembangunan di masa mendatang.

- a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.
- b. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN).
- c. Kuantitas dan Kualitas SDM peneliti belum memadai,
- d. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.
- g. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.
- h. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal.
- i. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.
- j. Pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
- k. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.
- l. Perkembangan teknologi digital, infrastruktur, dan literasi digital masih

- terbatas.
- m. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas.
 - n. Tantangan yang masih harus dihadapi antara lain adalah rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi.
 - o. kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
 - p. Kualitas pendidikan yang masih rendah.
 - q. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial ketenaga kerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
 - r. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah.
 - s. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.
 - t. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih belum sepenuhnya efektif.
 - u. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.
 - v. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik.
 - w. Belum meratanya kualitas pelayanan publik.
 - x. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar.

Permasalahan dan tantangan di atas dirumuskan isu strategis Nasional sebagai berikut:

1. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
2. Kemandirian Bangsa melalui Swasembada pangan, air, dan energi.
3. Pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat daya saing SDM.
5. Hlirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA
6. Membangun dari desa.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan tata kelola.
8. Kehidupan yang harmonis dengan alam, lingkungan, budaya.

Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2027 merupakan penajaman dari isu strategis daerah yang harus diselesaikan selama periode RPJMD Tahun 2025-2029, dengan berdasar pada permasalahan pembangunan daerah dari capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2027 meliputi:

- 1.** Daya Saing Sumber Daya Manusia Berkarakter Pancawaluya, didukung dengan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang Merata. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter pancawaluya menjadi modal utama transformasi pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi peluang dan dinamika global. Karakter pancawaluya menunjukkan Sumber Daya Manusia yang memiliki sikap cageur (sehat), bageur (berkarakter), bener (benar), pinter (pintar), dan singer (kreatif).

Kualitas sumber daya manusia berkarakter pancawaluya menentukan keberhasilan pembangunan karena pengaruhnya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan, kualitas tata kelola

pemerintahan dan pelayanan publik, serta ketahanan sosial.

Dinamika pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan proporsi usia produktif yang besar menjadi tantangan utama Provinsi Jawa Barat dengan meningkatnya tekanan terhadap layanan dasar. Di sisi lain, struktur usia produktif yang dominan menciptakan peluang besar untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi apabila disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks Modal Manusia (IMM) yang mengukur seberapa besar kontribusi Jawa Barat terhadap Indonesia dalam memobilisasi modal manusia, potensi ekonomi, dan profesionalisme warganya. Target IMM Jawa Barat tahun 2027 sebesar 0,57 harus dicapai melalui upaya akselerasi peningkatan kapasitas produktif penduduk pada aspek kesehatan, pendidikan, dan ketahanan hidup sebagai fondasi daya saing sumber daya manusia jangka panjang.

Karakter manusia yang cagur (sehat) diukur melalui capaian angka Usia Harapan Hidup Jawa Barat sebesar 75,53 tahun meningkat 0,37 tahun dari tahun 2024 sebesar 75,16 tahun. Selain itu, manusia yang cagur diukur melalui capaian prevalensi stunting pada balita menurun signifikan dari 21,7 persen menjadi 15,90 persen pada tahun 2024. Permasalahan utama kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat pada aspek kesehatan diantaranya adalah belum optimalnya upaya peningkatan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, serta belum optimalnya penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat.

Karakter manusia bageur (baik) diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dimana manusia Jawa Barat mengutamakan toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar umat beragama yang rukun dan harmonis ditunjukkan dengan capaian IKUB sebesar 79,43 poin meningkat 2,96 poin dari tahun sebelumnya.

Manusia yang bener menjadi ciri manusia Jawa Barat yang menjunjung tinggi hukum dan norma yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat, dan Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Manusia yang pinter ditunjukkan dengan kualitas pendidikan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2025 yaitu 9,46 tahun dengan target pada tahun 2027 sebesar 9,61, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2025 yaitu 13,02 tahun dengan target tahun 2027 sebesar 13,03 tahun. Permasalahan utama pendidikan ditandai dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.

Manusia Jawa Barat yang singer ditunjukkan dengan upaya pembangunan pemuda serta peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak yang ditunjukkan dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah kasus sebanyak 2.602 kasus kekerasan pada tahun 2024. Meskipun menurun dari tahun 2023, Jawa Barat menjadi provinsi dengan laporan tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024.

2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, melalui Penciptaan Lapangan Kerja, Pengembangan Usaha, dan Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, ketimpangan antar wilayah, keterbatasan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menurunnya kapasitas fiskal daerah.

Perekonomian Jawa Barat tumbuh mencapai 5,90 persen pada tahun 2025 dan melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi belum sepenuhnya inklusif. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi, yaitu 6,78 persen pada tahun 2025. Pada tahun 2027, penanganan kemiskinan difokuskan di wilayah perdesaan dan kawasan pesisir yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan modal usaha, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Rasio gini Jawa Barat sebesar 0,397 poin pada tahun 2025 menggambarkan bahwa ketimpangan antar wilayah juga menjadi tantangan inklusivitas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, salah satunya ditunjukkan oleh kesenjangan spasial yang masih signifikan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu upaya prioritas untuk menurunkan disparitas ekonomi antar wilayah.

Tingkat pengangguran terbuka masih menjadi permasalahan utama Jawa Barat, yaitu sebesar 6,66 persen pada tahun 2025, yang didorong oleh besarnya angkatan kerja yang tidak sebanding dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, rendahnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri, serta rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan. Untuk itu, penciptaan lapangan kerja menjadi kebutuhan mendesak dan didorong sebagai fokus pembangunan pada tahun 2027 seiring dengan upaya peningkatan pertumbuhan pada sektor perindustrian dan perdagangan, sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan ketahanan pangan daerah.

Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada industri pengolahan konvensional menjadikan pertumbuhan rentan terhadap dinamika eksternal. Rasio PDRB Industri Pengolahan Jawa Barat sebesar 40,41 poin pada tahun 2025 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 41,39 poin. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengantisipasi dampak dari dinamika eksternal seperti halnya perang terhadap perekonomian, dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal terutama di wilayah perdesaan dan pesisir dengan mengarahkan pengembangan usaha pada penguatan daya saing UMKM yang berkontribusi sekitar 57 persen terhadap PDRB Jawa Barat. Salah satu upaya adalah mendorong tumbuhnya klaster usaha berbasis sumber daya alam lokal yang berkelanjutan di sektor pertanian, serta sektor kelautan, perikanan dan pengelolaan ekosistem pesisir melalui penerapan blue economy. Pemberdayaan ekonomi perdesaan yang dapat menyentuh kantong-kantong kemiskinan di wilayah perdesaan dan pesisir menjadi salah satu upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Barat.

Tantangan lainnya yang dihadapi Jawa Barat adalah melemahnya kapasitas fiskal daerah yang menjadi prasyarat pendanaan pembangunan untuk dapat berkelanjutan. Rasio kapasitas fiskal Jawa Barat menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,142

poin menjadi 1,444 poin pada tahun 2025. Selain dengan mendorong pendapatan dari pajak dan pemanfaatan aset daerah, kesenjangan fiskal yang masih lebar antara kabupaten/kota diatasi melalui perluasan basis pendapatan asli daerah dari sektor-sektor pertumbuhan baru.

Provinsi Jawa Barat berkomitmen dalam melaksanakan transformasi ekonomi melalui pendekatan green economy dan blue economy. Indeks Ekonomi Hijau Jawa Barat (green economy) baru mencapai 61,3 poin pada tahun 2025, sedangkan Indeks Ekonomi Biru Jawa Barat (blue economy) baru mencapai 48,19 poin. Potensi penerapan green economy terus ditingkatkan dengan mendorong transisi energi terbarukan, industri hijau, ekonomi sirkular, dan agribisnis berkelanjutan. Demikian halnya dengan potensi blue economy Provinsi Jawa Barat dioptimalkan melalui pengembangan budidaya perikanan tangkap, pengelolaan kawasan konservasi mangrove, dan ekowisata bahari dengan memberdayakan masyarakat pesisir.

Transformasi ekonomi diharapkan dapat mengubah tantangan dan membuka peluang, tidak hanya untuk membangun perekonomian yang inklusif bagi masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga untuk menjawab tuntutan pembangunan yang rendah emisi, pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

3. Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas, serta Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan rasio gini tertinggi di atas rata-rata nasional dengan ketimpangan antara daerah perkotaan dan perdesaan yang cukup tinggi. Tantangan mendasar yang dihadapi Provinsi Jawa Barat adalah pemerataan wilayah dan penyediaan infrastruktur dasar berkualitas yang menjadi akar masalah utama dari kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antar wilayah.

Kondisi infrastruktur dasar di Jawa Barat ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Infrastruktur sebesar 63,58 persen pada tahun 2025. Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur terus didorong terutama di wilayah timur dan selatan Jawa Barat yang memiliki tingkat kemiskinan dengan keterbatasan akses infrastruktur dasar, seperti halnya air bersih dan sanitasi, jalan mantap dan konektivitas, listrik dan telekomunikasi, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga terus melakukan peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan yang baru mencapai 58,63 persen pada tahun 2025, untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh terutama di perkotaan.

Pemerataan pembangunan wilayah terus dilanjutkan melalui peningkatan konektivitas antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat, serta perkotaan dan perdesaan, untuk mendukung tumbuhnya perekonomian dan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Salah satu prioritas kebijakan pembangunan adalah mempercepat peningkatan Indeks Desa yang baru mencapai 77,46 poin pada tahun 2025 melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi perdesaan.

Salah satu implikasi dari pembangunan wilayah adalah peningkatan tekanan terhadap kondisi lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebesar 71,03 poin menunjukkan bahwa pembangunan dengan tetap mempertahankan daya dukung dan daya

tampung lingkungan masih menjadi tantangan besar untuk Jawa Barat. Alih fungsi lahan yang masif, deforestasi, dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang telah memperluas lahan kritis, menurunkan kualitas air dan udara, serta meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor yang intensitasnya semakin meningkat akibat perubahan iklim.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan melalui pengendalian alih fungsi lahan, rehabilitasi lahan kritis dan ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran industri melalui penegakan hukum, serta pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan sanitasi dan pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terintegrasi.

Upaya antisipasi dampak perubahan iklim yang telah dilakukan oleh Jawa Barat ditunjukkan oleh penurunan emisi gas rumah kaca Jawa Barat mencapai 7,99 persen pada tahun 2025 dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 6,61 persen. Upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, baik peningkatan risiko bencana hidrometeorologi dan kerugian ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terdampak perubahan iklim, dilakukan melalui pendekatan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim serta peningkatan pengurangan risiko bencana dan penguatan kapasitas penanggulangan bencana. Pendekatan ini dilaksanakan sejalan dengan transformasi ekonomi Jawa Barat melalui kerangka green economy dan blue economy, sehingga pemerataan pembangunan tidak hanya mengurangi kesenjangan, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.

4. Tata Kelola Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, serta Integrasi Data dan Sinergitas Pembangunan

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A- pada tahun 2025. Budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mengoptimalkan sistem tata kelola pemerintahan yang terpadu, adaptif, responsif, dan akuntabel.

Meskipun capaian sudah tinggi, permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta integrasi data dan sinergitas pembangunan. Selain itu perlu juga didukung dengan daya saing daerah dan partisipasi masyarakat melalui indeks demokrasi provinsi.

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 adalah:

**“PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS PEREKONOMIAN BERBASIS
PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA
PEMBANGUNAN”**

Tema tersebut memiliki makna bahwa pengembangan produktivitas dilaksanakan melalui produksi pangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta industri yang didukung oleh sumber daya manusia dan tata kelola pembangunan yang berkualitas. Tata kelola pembangunan yang produktif dan efektif akan meningkatkan daya saing tenaga kerja, mendorong iklim investasi, dan pertumbuhan sektor produktif yang akan mempercepat penciptaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja secara inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

Isu Strategis Kabupaten Pangandaran

Tahun 2027 merupakan periode penting bagi Kabupaten Pangandaran dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah menuju tercapainya visi pembangunan jangka menengah daerah. Meskipun sektor pariwisata terus menunjukkan potensi sebagai penggerak utama ekonomi daerah, berbagai tantangan pembangunan masih perlu mendapat perhatian serius dan penanganan yang terintegrasi.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Pangandaran meliputi:

1. Kesehatan Fiskal

Isu strategis kesehatan fiskal di Kabupaten Pangandaran mencakup beberapa tantangan utama yang perlu diperbaiki agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu masalah yang dihadapi adalah pengelolaan anggaran dan utang daerah yang belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan sesuai dengan kebijakan fiskal nasional agar terjamin kestabilan keuangan daerah dan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi isu strategis yang perlu ditangani dengan serius. Optimalisasi sumber-sumber PAD, seperti pajak daerah dan retribusi, harus dilakukan agar pendapatan daerah semakin meningkat. Selain itu, intensifikasi dan eksternalisasi pajak daerah perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal Kabupaten Pangandaran. Hal ini akan memberikan fleksibilitas lebih dalam merencanakan dan membiayai program-program pembangunan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Terakhir, pemanfaatan alternatif pembiayaan pembangunan daerah selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga perlu diperhatikan. Salah satu solusi adalah dengan memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur dasar yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus dimaksimalkan dalam mendukung pembangunan daerah, serta pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membantu pendanaan proyek-proyek sosial dan pembangunan. Dengan memperhatikan berbagai alternatif pembiayaan ini, Kabupaten Pangandaran dapat memperkuat sektor keuangannya untuk mencapai pembangunan yang lebih optimal.

2. SDM Berdaya Saing

Kabupaten Pangandaran perlu memperhatikan minimal dua hal tersebut untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing dalam jangka panjang yang berfokus pada peningkatan layanan

pendidikan dan pemerataan akses terhadap pendidikan baik formal maupun nonformal. Dipandang dari sisi kesehatan, perlu adanya perbaikan akses dan mutu layanan pendidikan serta peningkatan kesadaran masyarakat atas pelaksanaan program kesehatan promotif dan preventif serta peningkatan akses mutu layanan kesehatan. Perbaikan pada dua sisi tersebut pada akhirnya akan memberikan impact dalam hal penurunan kemiskinan.

3. Pariwisata inklusif dan impresif

Sektor pariwisata dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan akan terjadi terhadap sektor ekonomi terkait. Potensi pariwisata di Kabupaten Pangandaran di dominasi oleh pariwisata laut yang perlu dioptimalkan Kembali dari segi sarana prasarana maupun promosi. Potensi tersebut juga dapat dimaksimalkan dalam proses pemberian daya dukung lingkungan untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Optimalisasi potensi desa dapat menjadi strategi yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, membangun keberlanjutan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa seringkali memiliki potensi pertanian yang besar. Melalui 45 pelatihan, teknologi pertanian modern, dan pemasaran yang efektif, dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu petani meningkatkan pendapatan. Mendorong diversifikasi ekonomi di desa dengan mendukung berbagai sektor ekonomi seperti pariwisata, kerajinan lokal, dan sektor jasa. Ini dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pendapatan tambahan.

4. Penyediaan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, efisien dan merata dapat mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih maju bahkan menjadi salah satu cara dalam pengurangan kemiskinan dan penunjang keberhasilan perekonomian di Kab. Pangandaran. Berhasilnya pembangunan infrastruktur akan berkaitan dengan konektivitas wilayah yang semakin merata sehingga akan memperbesar biaya produksi dan menghilangkan daya saing atas harga yang ditawarkan. Kemudahan infrastruktur dan konektivitas akan mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat.

5. Pertanian, Kelautan, dan Sumber Daya Lokal sebagai Kekuatan Perekonomian

Pertumbuhan investasi jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas. Isu strategis dalam bidang pertanian, kelautan, dan sumber daya lokal di Kabupaten Pangandaran sangat penting untuk memperkuat perekonomian daerah. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya produktivitas ekonomi pada sektor perairan atau ekonomi biru. Untuk mengatasi hal ini, pengembangan sektor perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan perlu dilakukan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya laut sebagai daya tarik wisata ramah lingkungan juga harus didorong untuk mendukung ekonomi biru, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengembangan penelitian, inovasi, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sektor ini menjadi kunci untuk mendorong sektor perikanan dan kelautan lebih maju.

Selain itu, kesejahteraan petani dan nelayan di Kabupaten Pangandaran juga masih rendah, dengan Indeks Kesejahteraan Petani dan Nelayan (NTP) yang perlu ditingkatkan. Untuk itu, penting untuk

mengembangkan korporasi petani dan nelayan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan komunitas, yang dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan melalui pendekatan korporasi diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, yang memprioritaskan kesejahteraan komunitas pesisir dan pelaku ekonomi berbasis kelautan.

Masalah lainnya adalah belum optimalnya daya saing produk, kelembagaan, dan pemberdayaan UMKM di sektor pertanian dan kelautan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas UMKM melalui penerapan teknologi, inkubasi usaha, akses pembiayaan, dan kemitraan usaha harus menjadi prioritas. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengoptimalkan penggunaan produk lokal dalam kegiatan pembangunan daerah, serta mendukung penggunaan barang dan jasa dalam negeri. Dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan peningkatan distribusi yang lebih efisien, sektor pertanian dan kelautan di Pangandaran dapat berkembang dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mendukung daya saing produk lokal.

6. Kesejahteraan Sosial

Isu strategis kesejahteraan sosial di Kabupaten Pangandaran mencakup berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu masalah utama adalah tingginya angka kemiskinan yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 8,89 persen. Untuk mengurangi kemiskinan, pengentasan melalui perlindungan sosial yang adaptif dan terintegrasi sangat penting. Selain itu, akurasi data mengenai kemiskinan perlu ditingkatkan untuk memastikan bantuan sosial dan program pemberdayaan dapat tepat sasaran. Upaya ini juga mencakup penguatan pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa keluar dari kemiskinan dan lebih mandiri secara ekonomi, khususnya melalui pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Selain masalah kemiskinan, perlindungan sosial yang belum optimal juga menjadi isu strategis lainnya. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, serta jaminan sosial agar lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di kelompok rentan. Pemberdayaan masyarakat juga harus ditujukan pada sektor-sektor yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi penting untuk memastikan pekerja, terutama perempuan dan kelompok rentan, memperoleh perlindungan yang memadai. Ini akan mendukung terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat.

Tantangan lain yang perlu diatasi adalah rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Meskipun banyak perempuan yang memiliki potensi besar, mereka sering kali terbatas dalam hal kesempatan kerja dan akses terhadap sektor-sektor perekonomian. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan melibatkan mereka dalam sektor ekonomi yang lebih luas. Selain itu, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya juga menjadi perhatian utama. Inklusi sosial yang lebih baik serta pengembangan ekonomi berbasis perawatan atau "care economy" yang berfokus pada kelompok rentan dapat membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi mereka. Semua langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pangandaran secara menyeluruh.

7. Tata Kelola Pemerintah yang baik

Dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam teknologi, Kab. Pangandaran masih mengalami beberapa kendala dalam konektivitas jaringan telekomunikasi yang belum optimal, infrastruktur penunjang pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang belum memadai, infrastruktur penunjang pengelolaan statistik sektoral belum optimal serta integrasi sistem informasi belum terlaksana secara menyeluruh.

8. Aksesibilitas Wilayah

Isu strategis aksesibilitas wilayah di Kabupaten Pangandaran menunjukkan tantangan utama dalam pengembangan konektivitas antar pusat kegiatan dan sarana transportasi yang belum optimal. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya pusat kegiatan yang belum terhubung dengan pusat kegiatan lainnya, yang dapat menghambat mobilitas penduduk dan distribusi ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembangunan serta peningkatan akses antar pusat kegiatan, diikuti dengan perbaikan pola pengaturan tata guna lahan yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas yang lebih efisien dan terorganisir antara berbagai wilayah dalam Kabupaten Pangandaran.

Selain itu, belum optimalnya sarana dan prasarana transportasi juga menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Infrastruktur transportasi yang kurang memadai dapat menghambat kelancaran aktivitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana transportasi, seperti jalan dan terminal, perlu dilakukan, serta penyusunan kebijakan transportasi yang lebih terarah. Pengembangan alternatif seperti Kereta Api Panas (KPBU) juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan pengelolaan sarana transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pembiayaan untuk pembangunan prasarana transportasi menjadi kunci dalam mewujudkan aksesibilitas wilayah yang lebih baik.

Terakhir, masalah rendahnya cakupan layanan transportasi publik di Pangandaran harus segera diatasi. Salah satu solusinya adalah dengan membangun terminal feeder yang dapat mendukung penghubung antar transportasi umum, serta mendorong penggunaan angkutan umum melalui pemberlakuan subsidi bagi penggunaanya. Di samping itu, pengembangan jalur alternatif, seperti jalur lintas tengah Jawa Barat dan jalan lingkar tengah Pangandaran, juga diperlukan untuk meningkatkan akses ke dan dari Pangandaran. Integrasi antar moda transportasi, seperti terminal, bandara, pelabuhan, dan kereta api, harus diperhatikan untuk menciptakan sistem transportasi yang saling mendukung dan memudahkan mobilitas masyarakat. Semua langkah ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah Kabupaten Pangandaran dan mempercepat pembangunan daerah secara keseluruhan.

9. Ketahanan Pangan Daerah

Kemandirian pangan di Kabupaten Pangandaran masih menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2021 menunjukkan poin yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 130,8 dan tahun 2019 mengalami penurunan poin percepatan sebesar 5,4 poin karena percepatannya hanya 2,2 poin. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan dalam ketersediaan jenis pangan minyak dan lemak, buah biji berminyak dan paling berpengaruh pada penurunan ketersediaan jenis pangan kacang-kacangan.

10. Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Letak Geografis Kabupaten Pangandaran berada pada daerah pesisir laut yang sangat rawan dalam bencana banjir. Lingkungan hidup menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kehidupan bermasyarakat. Berbagai permasalahan yang dialami Kab. Pangandaran dalam penataan Lingkungan Hidup adalah adanya kerusakan. Kerusakan tersebut terjadi baik dari air, udara maupun tutupan lahan yang belum tertata dengan baik. Permasalahan lain berangkat dari persampahan di Kab. Pangandaran yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Masih adanya sistem TPA yang masih terbuka (open dumping) akan menyebabkan pencemaran, kerusakan air tanah dan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kab. Pangandaran belum mencapai 30% dari luas wilayah administrasi sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2007.

Tabel 4. 2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Permasalahan Pembangunan Daerah

Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan Daerah
1. Kesehatan Fiskal	1. Masih rendahnya produktivitas pendapatan masyarakat
	2. Daya beli masyarakat berkurang
	3. Daya konsumsi masyarakat menurun
	4. Rendahnya permintaan barang dan jasa dari kabupaten Pangandaran
	5. UMKM masih memiliki permasalahan pada permodalan dan pemasaran
2. Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan
	2. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan
	3. Belum optimalnya pendidikan kesetaraan
	4. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Kesehatan
	5. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Kendaraan Operasional
	6. Belum optimalnya pelayanan secara preventif dan promotive kepada masyarakat
	7. Kurangnya tenaga dokter
3. Pariwisata Inklusif dan Impresif	1. Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata belum optimal
	2. Kurangnya keterampilan dan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata
	3. Belum terpenuhinya indikator standar pengembangan pariwisata yang berkelanjutan
4. Penyediaan Infrastruktur Dasar	1. Belum adanya integrasi antar moda (Terminal, Bandara, Pelabuhan, Kereta Api)
	2. Kinerja system logistik masih belum optimal
	3. Terdapat pusat kegiatan yang belum terhubung dengan pusat kegiatan lainnya
	4. Belum optimalnya sarana prasarana transportasi
	1. Belum optimalnya PDRB pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan

Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan Daerah
5. Pertanian, Kelautan, dan Sumber Daya Lokal sebagai Kekuatan Perekonomian	2. Belum optimalnya subsektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	3. Kurangnya minat pemuda untuk menjadi petani sebagai profesi dan mata pencaharian sehari-hari
	4. Berkurangnya lahan persawahan yang diakibatkan adanya pembangunan infrastruktur dan permukiman yang tidak terkendali
	5. Belum optimalnya sub sektor unggulan masuarakat pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
	6. Belum diterapkannya kebudayaan lokal sebagai identitas daerah untuk pemnfaatan pada sektor Pariwisata
	7. Belum adanya Atraksi/event wisata yang menjadi ciri khas
6. Kesejahteraan Sosial	1. Masih tingginya angka kemiskinan
	2. Masih adanya balita yang bergizi buruk
	3. Pendapatan masyarakat yang tidak meningkat cukup baik
	4. Data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang ada di luar panti belum terdata secara maksimal, sehingga penentuan target capaian kurang akurat
7. Tata Kelola Pemerintah yang baik	1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah
	2. Masih kurangnya pemahaman terkait reformasi birokrasi
	3. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital (SPBE dan SDI) belum optimal
	4. Belum terwujudnya ASN berbasis sistem merit
	5. Belum terintegrasinya sinergitas dan konsistensi perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pengendalian dan evaluasi
8. Aksesibilitas Wilayah	1. Belum optimalnya aksesibilitas menuju Pangandaran
	2. Jalur alternatif dari dan menuju Pangandaran belum memadai
	3. Terbatasnya jaringan infrastruktur jalan menghambat akses menuju kawasan perkantoran dan menurunkan efisiensi pelayanan pemerintahan

Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan Daerah
9. Ketahanan Pangan Daerah	1. Stabilisasi dan Keterjangkauan Harga Pangan, sebagian komoditas sering mengalami fluktuasi harga
	2. Masih Kurangnya Ketersediaan Pasokan Beras, sebagian kecil gabah masih dipasok dari luar Pangandaran
	3. Masih rendahnya kualitas hasil pangan daerah
	4. Belum optimalnya diversifikasi olahan pangan lokal
10. Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1. Masih adanya perusakan kawasan lindung
	2. Belum optimalnya pengawasan dan penegakkan hukum lingkungan terhadap kegiatan/usaha
	3. Belum optimalnya pengelolaan sampah
	4. Masih terjadinya pencemaran air

Sumber: Olahan Penyusun, 2026

4.2.2 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 mengusung tema pembangunan “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN Tahun 2025- 2029, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dipertahankan pada RKP Tahun 2027 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2027 meliputi:

1. Prioritas Nasional/PN 1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan Sasaran PN 1 yaitu Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Prioritas Nasional/PN 2, yaitu, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan Sasaran PN 2 yaitu mendorong: (a) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan; (b) Terbangunnya Eco-region Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal; (c) Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih; (d) Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi; (e) Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB; (f) Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; dan (g) Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru.
3. Prioritas Nasional/PN 3, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan Sasaran PN 3 yaitu mendorong: (a) Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan; (b) Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB; (c) Meningkatnya nilai tambah pariwisata; (d) Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas; dan (e) Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.
4. Prioritas Nasional/PN 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan Sasaran PN 4, yaitu mendorong: (a) Pendidikan Berkualitas yang Merata; (b) Kesehatan untuk Semua; (c) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif; (d) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; dan (e) Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga.

5. Prioritas Nasional/PN 5 yaitu, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan Sasaran PN 5, yaitu mendorong: (a) Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan; (b) Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; dan (c) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.
6. Prioritas Nasional/PN 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan Sasaran PN 6, yaitu mendorong: (a) Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan; (b) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; (c) Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; dan (d) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
7. Prioritas Nasional/PN 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan Sasaran PN 7 yaitu mendorong: (a) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi; (b) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani; (c) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba; (d) Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan; (e) Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan; (g) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi; dan (h) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
8. Prioritas Nasional/PN 8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan Sasaran PN 8, yaitu mendorong: (a) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; dan (b) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.

4.2.3 Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 4 (empat) prioritas pembangunan daerah yang disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) Tematik (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) Holistik (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) Spasial (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan pada tahun 2027 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang

pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk tahun 2027.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2027 meliputi:

1. Prioritas 1, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. Prioritas 2, yaitu Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif;
3. Prioritas 3, yaitu Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;
4. Prioritas 4, yaitu Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance.

4.2.4 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2027

Tema pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2027 adalah:

“Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata”

Selanjutnya tema pembangunan di atas akan diterjemahkan melalui beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran di tahun 2027.

Arah kebijakan daerah pada dasarnya berisikan sasaran, fokus, dan kebijakan pembangunan yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan masing-masing prioritas pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar perencanaan untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan Kabupaten Pangandaran Tahap I yaitu Tahun 2025-2029 dalam RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan pelayanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial
2. Penyiapan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar dan pengembangan destinasi sarana dan prasarana pariwisata
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang berdaya saing dan inovatif
4. Peningkatan keamanan daerah yang bersih dari konflik sosial, politik, dan agama
5. Pelestarian budaya dan tradisi serta peningkatan kepedulian terhadap lingkungan
6. Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur serta pengembangan transportasi massal
7. Penyediaan sarana dan pelayanan dasar yang merata
8. Peningkatan pembangunan berkelanjutan pada pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan

Berikut ini prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2027 meliputi:

1. Akselerasi perekonomian daerah berbasis pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan lokal;
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pendidikan, kesehatan, PU-PR, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial;
3. Peningkatan daya saing SDM untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi unggulan;
4. Penguatan infrastruktur konektivitas dan layanan publik pendukung pariwisata dan produktivitas wilayah;
5. Penguatan reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi untuk mendukung penyehatan fiskal daerah;
6. Pembangunan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang berkarakter, inklusif dan berwawasan kebangsaan;
7. Penguatan lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan bencana di kawasan wisata dan permukiman.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang optimal, maka dibutuhkan upaya telaah terhadap tema pembangunan nasional Tahun 2027 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2027 dan tema pembangunan provinsi yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keterkaitan dan keselarasan dalam pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Pangandaran, sehingga terjadi pembangunan daerah yang sinergi dan optimal. Berikut ini adalah keselarasan tema RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 dan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2027.

Tabel 4. 3 Keselarasan Tema RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, dan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2027

Tema RKP 2027	Tema RKPD Provinsi Jawa Barat 2027	Tema RKPD Kabupaten Pangandaran 2027
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	Pengembangan Produktivitas Perekonomian Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia Dan Tata Kelola Pembangunan	Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata

Sumber: Olahan Penulis, 2026

4.2.5 Keselarasan Prioritas RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, dan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2027

Keselarasan prioritas pembangunan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2027, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2027 merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Berikut ini pula keselarasan prioritas pembangunan RKP tahun 2027, RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2027, dan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2027:

Tabel 4. 4 Keselarasan Prioritas RKP Tahun 2027, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, dan RKPD Kabupaten Pangandaran tahun 2027

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Pangandaran
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Provinsi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Prioritas Daerah 6: Pembangunan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang berkarakter, inklusif dan berwawasan kebangsaan
	Prioritas Provinsi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas Provinsi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Prioritas Daerah 1: Akselerasi perekonomian daerah berbasis pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan lokal
	Prioritas Provinsi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	
	Prioritas Provinsi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan,	Prioritas Provinsi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Prioritas Daerah 4: Penguatan infrastruktur konektivitas dan layanan publik pendukung pariwisata dan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Pangandaran
mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Prioritas Provinsi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	produktivitas wilayah
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas Provinsi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Prioritas Daerah 3: Peningkatan daya saing SDM untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi unggulan
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas Provinsi 2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Prioritas Daerah 1: Akselerasi perekonomian daerah berbasis pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan lokal
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Provinsi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Prioritas Daerah 2: Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pendidikan, kesehatan, PU-PR, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Prioritas Provinsi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Prioritas Daerah 5: Penguatan reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Kabupaten Pangandaran
pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas Provinsi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi untuk mendukung penyehatan fiskal daerah
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas Provinsi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Prioritas Daerah 7: Penguatan lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan bencana di kawasan wisata dan permukiman
	Prioritas Provinsi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	

Sumber: Olahan Penyusun, 2026

Adapun program prioritas/kamus usulan aspirasi Pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Kamus Usulan Kegiatan/Program Prioritas Tahun 2027

Prioritas Daerah	Kamus Usulan	Detail Kamus Usulan	Perangkat Daerah Pelaksana
1. Akselerasi perekonomian daerah berbasis pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan lokal	1. Pemasaran Pariwisata Terintegrasi Berbasis Digital	Penguatan Promosi Melalui Even Pariwisata, Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	DISPARBUD
	2. Pengembangan Industri Kreatif & Ekonomi Digital	Pengembangan usaha kreatif dan ekonomi digital melalui inovasi produk kreatif, inkubasi bisnis, digitalisasi usaha, pemasaran digital dan penguatan industri berbasis teknologi	DISPARBUD
	3. Pengembangan Produk Lokal dan Potensi Unggulan Daerah	Penguatan kualitas, kapasitas produksi, nilai tambah dan daya saing melalui pendampingan teknis, penguatan kelembagaan, promosi dan inovasi produk	DISKOPDAGIN
	4. Peningkatan Produksi Pertanian	Pengadaan atau pengembangan sarana pertanian dan peternakan untuk meningkatkan produksi pertanian seperti pengadaan benih dan bibit	DISTAN
	5. Peningkatan Produksi Perikanan	Peningkatan kapasitas pengelolaan perikanan budidaya melalui pembinaan dan peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan	DKPKP

2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pendidikan, kesehatan, PU-PR, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial	6. Penguatan PAUD, Pendidikan Informal dan Kesetaraan	Pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas PAUD serta peningkatan cakupan layanan melalui pengembangan sarana prasarana pendidikan informal dan kesetaraan	DISDIKPORA
	7. Dana Bantuan Pendidikan	Beasiswa Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan yang dikelola swasta atau diluar kewenangan Pemda.	DISDIKPORA
	8. Dana Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kepemudaan	Bantuan operasional kegiatan untuk organisasi/lembaga kemasyarakatan Bidang Kepemudaan	DISDIKPORA
	9. Dana Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Olahraga	Bantuan operasional kegiatan untuk organisasi/lembaga kemasyarakatan Bidang Olahraga	DISDIKPORA
	10. Peningkatan Layanan Kesehatan	Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Sarana Prasarana Kesehatan	DINKES
	11. Dana Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesehatan	Bantuan operasional kegiatan untuk organisasi/lembaga kemasyarakatan Bidang Kesehatan	DINKES
	12. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh kewenangan Kabupaten	DPUTRPRKP
	13. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diluar kawasan kumuh	DPUTRPRKP
	14. Pengembangan Air Minum	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DPUTRPRKP
	15. Pengembangan Sanitasi	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (toilet dan tangki septik)	DPUTRPRKP
	16. Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Peningkatan kapasitas SATLINMAS	SATPOL PP
	17. Pelayanan Sosial dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINSOS PMD
	18. Dana Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Bantuan operasional kegiatan untuk organisasi/lembaga kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Masyarakat	DINSOS PMD

3. Peningkatan daya saing SDM untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi unggulan	19. Penguatan SDM Pariwisata, Ekonomi Kreatif & Desa Wisata	Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata, Pelaku Ekonomi Kreatif & Pengelola Desa Wisata melalui Pelatihan, pendampingan, sertifikasi dan pemberdayaan komunitas	DISPARBUD
4. Penguatan infrastruktur konektivitas dan layanan publik pendukung pariwisata dan produktivitas wilayah	20. Pengembangan Destinasi Pariwisata Inklusif dan Berkelanjutan	Pengembangan Destinasi Wisata melalui Pengembangan Sarana Prasarana	DISPARBUD
	21. Jalan Pendukung Kawasan Wisata	Peningkatan Jalan Akses Destinasi Wisata	DPUTRPRKP
	22. Penerangan Jalan Kawasan Wisata	Peningkatan Jaringan Listrik Akses Destinasi Wisata	DISHUD
5. Penguatan reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi untuk mendukung penyehatan fiskal daerah	23. Inovasi Pengembangan Pariwisata	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	BAPPEDA
	24. Optimalisasi PAD & Modernisasi Pemungutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak & Retribusi Daerah	BAPENDA
6. Pembangunan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang berkarakter, inklusif dan berwawasan kebangsaan	25. Penguatan BUMDes & Kewirausahaan Desa	Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas BUMDes & Kewirausahaan Desa	DINSOS PMD
	26. Sarana dan Prasarana Keagamaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	SETDA
	27. Dana Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	Bantuan operasional kegiatan untuk organisasi/lembaga kemasyarakatan Bidang Keagamaan	SETDA
7. Penguatan lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan bencana di kawasan wisata dan permukiman	28. Pengelolaan Persampahan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPS	DLHK
	29. Penguatan Masyarakat Tangguh Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD

Sumber: Olahan Penyusun, 2026

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2027 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2027. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Proses penyusunan program prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bawah-atas (*bottom up*), atas-bawa (*top-down*), dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2027 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional tahun 2027. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, pinjaman daerah, serta sumber pendanaan lainnya. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian pembangunan tahun sebelumnya maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kabupaten Pangandaran tahun 2027 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya mewujudkan tema yaitu “*Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata*”, dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 yaitu:

1. PD1, Akselerasi perekonomian daerah berbasis pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan lokal;
2. PD2, Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pendidikan, kesehatan, PU-PR, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial;
3. PD3, Peningkatan daya saing SDM untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi unggulan;
4. PD4, Penguatan infrastruktur konektivitas dan layanan publik pendukung pariwisata dan produktivitas wilayah;
5. PD5, Penguatan reformasi birokrasi dan transformasi tata Kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi dengan system perencanaan, penganggaran, dan evaluasi untuk mendukung penyehatan fiskal daerah;
6. PD6, Pembangunan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang berkarakter, inklusif dan berwawasan kebangsaan;
7. PD7, Penguatan lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan bencana di kawasan wisata dan permukiman.

Prioritas dimaksud akan dijabarkan pada rencana program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi dan janji politik kepala daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Pangandaran 2025-2029 serta daya dukung terhadap kebijakan pembangunan pemerintah yang tertuang pada RPJMN serta kebijakan teknis terbaru yaitu Peraturan Presiden RI nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rabana dan Jawa Barat Bagian Selatan serta kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2027

Belanja daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2027. Rencana pendanaan dan belanja pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2027 tertuang dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah

No	Uraian	2026
2	Belanja Daerah	1.457.386.598.144,00
2.1	Belanja Operasi	1.131.553.742.372,00
2.1.1	Belanja Pegawai	596.476.242.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	484.770.069.372,00
2.1.3	Belanja Bunga	28.000.028.000,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0
2.1.5	Belanja Hibah	20.242.789.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.064.614.000,00
2.2	Belanja Modal	230.188.761.772,00
2.2.1	Belanja Tanah	968.558.000,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	149.394.568.000,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	37.716.304.514,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan	36.505.095.257,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	171.361.000,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	5.432.875.000,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	10.674.375.000,00
2.4	Belanja Transfer	84.969.719.000,00
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	13.946.818.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	71.022.901.000,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 (Data Diolah)

Proyeksi belanja daerah selanjutnya dijabarkan dalam rencana program/kegiatan prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5.2. Rencana Pendukung Alternatif Pendanaan Pembangunan yang Bersumber dari APBN Tahun 2027

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah serta memperkuat kapasitas pendanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengupayakan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendanaan melalui DAK merupakan salah satu instrumen fiskal yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah.

Usulan DAK Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, kebutuhan pelayanan dasar, serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan kebutuhan pembangunan pada masing-masing sektor. Melalui dukungan pendanaan tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan lebih optimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana usulan kegiatan yang diharapkan memperoleh dukungan pendanaan melalui DAK Fisik dan DAK Nonfisik Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Daftar Rencana Usulan untuk Pendanaan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2027

NO	JENIS DAK	RENCANA USULAN PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dana Alokasi Khusus Non-Fisik	27.842.600.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		19.840.657.539,00	Dinas Kesehatan
		4.614.605.600,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		300.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian
		7.619.124.000,00	Dinas Pertanian
2.	Dana Alokasi Khusus Fisik	35.641.389.866,52	Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
		3.000.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		4.430.000.000,00	Dinas Pertanian

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027, SIPD Kabupaten Pangandaran diolah, 2027

- 5.3. Rencana Pendukung Alternatif Pendanaan Pembangunan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027
- Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengupayakan optimalisasi sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Pendanaan tersebut merupakan salah satu instrumen dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan pencapaian prioritas pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional.
- Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Rencana usulan kegiatan yang diharapkan memperoleh dukungan

pendanaan melalui Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut

Tabel 5.3
Daftar Usulan Kegiatan Prioritas yang bersumber dari
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

NO	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	JUDUL USULAN	ALAMAT LOKASI	ANGGARAN	
				USULAN	DISETUJUI PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DINKES	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	58,217,745,600	58,217,745,600
2	DINKES	Bantuan Pembiayaan Kesehatan Diluar Cakupan Layanan JKN Non Skema Ganda	Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Jl. Pasundan Nomor 42, Provinsi Jawa Barat	1,200,000,000	1,200,000,000
3	DINSOSPMD	Penyelenggaraan Pemerintah Desa (BKDes-Khusus)	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Bantuan Keuangan Khusus Desa) untuk 93 Desa di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	18,600,000,000	18,600,000,000
4	DLHK	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkutan dan Pengolahan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	6,795,868,607	3,535,156,350
5	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Drainase Cimanggu	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Drainase Cimanggu, Provinsi Jawa Barat	3,000,000,000	3,000,000,000
6	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Cilembu	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Cilembu, Provinsi Jawa Barat	3,000,000,000	3,000,000,000
7	DPUTRPRKP	Pembangunan TPT Sungai Cigugur	Pembangunan TPT Sungai Cigugur, Provinsi Jawa Barat	10,000,000,000	10,000,000,000
8	DPUTRPRKP	Pembangunan TPT Drainase Citunggilis Tahap II	Pembangunan TPT Drainase Citunggilis Tahap II, Provinsi Jawa Barat	5,000,000,000	5,000,000,000
9	RSUD	Pengadaan Alat Kesehatan Layanan Unggulan Kanker dan Jantung di RSUD Pandega Pangandaran	RSUD Pandega Pangandaran, Jl. Merdeka, Provinsi Jawa Barat	40,029,662,482	40,029,662,482
10	RSUD	Pengadaan Alat Kesehatan CT-SCAN 64 Slice dan Layanan Unggulan Kanker RSUD Pandega Pangandaran	RSUD Pandega Pangandaran, Jl. Merdeka, Provinsi Jawa Barat	22,462,528,588	14,164,314,530
11	DINSOSPMD	Bantuan Dana Operasional Posyandu di Kabupaten Pangandaran	Lembaga Posyandu Se-Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	1,077,250,000	
12	DINSOSPMD	Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Posyandu di Kabupaten Pangandaran	Lembaga Posyandu se-Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	1,644,000,000	
13	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Drainase Kaliage (Lanjutan) D.I Manganti	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Drainase Kaliage (Lanjutan) D.I Manganti, Provinsi Jawa Barat	1,500,000,000	

NO	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	JUDUL USULAN	ALAMAT LOKASI	ANGGARAN	
				USULAN	DISETUJUI PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Bendung D.I Jangraga Sungai Cikaso	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Bendung D.I Jangraga Sungai Cikaso, Provinsi Jawa Barat	5,000,000,000	
15	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Drainase Kamurang D.I Ciputrapinggan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Drainase Kamurang D.I Ciputrapinggan, Provinsi Jawa Barat	3,000,000,000	
16	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Tanggul Pengaman Banjir Sungai Ciputrapinggan D.I Ciputrapinggan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Tanggul Pengaman Banjir Sungai Ciputrapinggan D.I Ciputrapinggan, Provinsi Jawa Barat	5,000,000,000	
17	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Citonjong D.I Cijumleng II	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Citonjong D.I Cijumleng II, Provinsi Jawa Barat	5,000,000,000	
18	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Cibeureum Blok SMK D.I Cibeureum I	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Cibeureum Blok SMK D.I Cibeureum I, Provinsi Jawa Barat	5,000,000,000	
19	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Cikembulan Blok Bendung D.I Cikembulan	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Cikembulan Blok Bendung D.I Cikembulan, Provinsi Jawa Barat	5,000,000,000	
20	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Kedung Beo Blok Bendung D.I Cibeo	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Kedung Beo Blok Bendung D.I Cibeo, Provinsi Jawa Barat	2,500,000,000	
21	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Drainase Karang Honje D.I Cibeureum II	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Drainase Karang Honje D.I Cibeureum II, Provinsi Jawa Barat	3,000,000,000	
22	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Drainase Muara Karang Tirta	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Drainase Muara Karang Tirta, Provinsi Jawa Barat	7,000,000,000	
23	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Batumalang D.I Batumalang	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Batumalang D.I Batumalang, Provinsi Jawa Barat	3,000,000,000	
24	DPUTRPRKP	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Parungpaok D.I Parungpaok	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai Parungpaok D.I Parungpaok, Provinsi Jawa Barat	3,000,000,000	
25	DPUTRPRKP	Pembangunan TPT Tanggul Pengaman Banjir Bendung D.I Cibanjuran	Pembangunan TPT Tanggul Pengaman Banjir Bendung D.I Cibanjuran, Provinsi Jawa Barat	3,500,000,000	
26	DPUTRPRKP	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Desa Pananjung dan Desa Karangjaladri, Provinsi Jawa Barat	1,200,000,000	

NO	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	JUDUL USULAN	ALAMAT LOKASI	ANGGARAN	
				USULAN	DISETUJUI PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Sumber : Bappeda Kabupaten Pangandaran diolah oleh penyusun, 2026

5.4. Rencana Pendukung Alternatif Pendanaan Pembangunan yang Bersumber selain dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

Dalam rangka memperkuat kapasitas pendanaan pembangunan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan konvensional yang berasal dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN, Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mengupayakan berbagai alternatif pendanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alternatif pendanaan tersebut meliputi Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Pinjaman Daerah, serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

1) CSR (Corporate Social Responsibility)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan daerah yang dapat mendukung percepatan pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran. Pemanfaatan dukungan CSR/TJSL dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya yang memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dukungan pendanaan melalui program CSR/TJSL diarahkan untuk melengkapi sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN, khususnya pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan, penguatan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemanfaatan CSR/TJSL dilaksanakan dengan memperhatikan keselarasan antara program perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran secara efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2027, potensi dukungan pendanaan melalui CSR/TJSL akan terus diupayakan melalui penguatan koordinasi, komunikasi, dan kemitraan dengan berbagai pelaku usaha yang beroperasi maupun memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Pangandaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pinjaman Daerah (Portofolio)

Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain serta menimbulkan kewajiban bagi daerah untuk melakukan pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

Pemanfaatan Pinjaman Daerah diarahkan untuk mendukung pembiayaan program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan pelayanan publik secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah, kemampuan pengembalian pinjaman, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kebijakan Pinjaman Daerah juga menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperkuat stabilitas fiskal dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam proses pengajuan Pinjaman Daerah, Pemerintah Kabupaten Pangandaran wajib memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, termasuk memperoleh pertimbangan dan evaluasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu potensi sumber pembiayaan Pinjaman Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran berasal dari lembaga jasa keuangan daerah, yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pinjaman sesuai dengan kebutuhan, kemampuan fiskal, dan hasil evaluasi kelayakan keuangan daerah.

3) KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)

Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu skema alternatif pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Pelaksanaan KPBU dilakukan berdasarkan spesifikasi layanan dan kebutuhan infrastruktur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan Usaha serta menerapkan prinsip pembagian risiko secara proporsional di antara para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skema KPBU diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan, memperluas akses terhadap sumber pendanaan nonpemerintah, serta mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Melalui skema ini, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap kapasitas fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus mendorong pengembangan skema KPBU sebagai salah satu alternatif pendanaan pembangunan, khususnya pada sektor-sektor

infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi bagi masyarakat. Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menjalin kolaborasi dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Prabawa Mukti Kabupaten Pangandaran serta PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka mendukung penyediaan dan pengembangan infrastruktur daerah yang berkelanjutan.

Pada Tahun 2027, pemanfaatan skema KPBU masih merupakan potensi alternatif pendanaan yang akan terus dikaji dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, kesiapan proyek, kelayakan ekonomi dan finansial, serta hasil evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.4 Program dan Kegiatan Tahun 2027

Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2027 sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, selanjutnya dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 yang diharapkan juga untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran 2025-2029. Rencana program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2027, dapat dilihat pada lampiran II.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pembangunan daerah Tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan penajaman terhadap arah kebijakan dan program prioritas pada Tahun 2027. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah yang lebih terarah, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta selaras dengan capaian indikator kinerja utama daerah.

Rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan hasil capaian pembangunan tahunan, permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi, serta kebutuhan strategis masyarakat. Program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, serta memperkuat kontribusi Kabupaten Pangandaran terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025–2029).

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2027:

Tabel 5.4
Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2027

No	Prioritas Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Akselerasi perekonomian daerah berbasis pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor unggulan lokal	128	61.499.344.684,00
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pendidikan, kesehatan, PU-PR, ketertiban	941	616.308.087.182,00

No	Prioritas Daerah	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
	umum, perlindungan masyarakat, dan sosial		
3	Peningkatan daya saing SDM untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi unggulan	29	2.600.599.400,00
4	Penguatan infrastruktur konektivitas dan layanan publik pendukung pariwisata dan produktivitas wilayah	53	3.595.571.645,00
5	Penguatan reformasi birokrasi dan transformasi tata Kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi dengan system perencanaan, penganggaran, dan evaluasi untuk mendukung penyehatan fiskal daerah;	671	548.828.287.500,00
6	Pembangunan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat yang berkarakter, inklusif dan berwawasan kebangsaan	48	10.284.696.710,00
7	Penguatan lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan bencana di kawasan wisata dan permukiman.	22	4.969.783.388,00

Sumber: SIPD Kabupaten Pangandaran diolah, 2027

5.5. Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2027

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.5
Rencana Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2027

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
1. SPM PENDIDIKAN					
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3.	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan
2. SPM KESEHATAN					
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
		mendapatkan layanan kesehatan			Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. SPM PEKERJAAN UMUM					
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
				dan Kawasan Permukiman	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. SPM PERUMAHAN RAKYAT					
1.	Penyediaan dan reabilitasi rumah yang Layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
5. SPM TRANTIBUMLINMAS					
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
6. SPM SOSIAL					
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	SKPD	Program
	telantar di luar panti			Masyarakat dan Desa	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Sosial
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Rehabilitasi Sosial
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber: Permendagri No.59 Tahun 2021 (Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM),
Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) didukung oleh berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan dan kewenangannya masing-masing. Program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target pelayanan dasar, baik melalui penyediaan layanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, maupun dukungan penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Adapun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan pendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.6
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SPM BIDANG PENDIDIKAN					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Nilai Harapan Lama Sekolah	12,65 poin	53,770,250,000		DISDIKPORA
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			31,712,600,000		
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	20,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	30 Paket	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1550 Peserta Didik	600,000,000	PAD	DISDIKPORA
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	80 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	300,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	25 Satuan Pendidikan	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	56 Satuan Pendidikan	27,842,600,000	DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler	DISDIKPORA
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	282 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	40,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	150,000,000	PAD	DISDIKPORA
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	250,000,000	PAD	DISDIKPORA
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	282 Paket	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1 Buku	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2400 Paket	400,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	10,000,000	PAD	DISDIKPORA

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	10,000,000	PAD	DISDIKPORA
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	600,000,000	PAD	DISDIKPORA
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2500 Peserta Didik	500,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			18,853,650,000		
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	20,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	10,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	600,000,000	PAD	DISDIKPORA

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	-	PAD	DISDIKPORA
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2500 Peserta Didik	500,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1550 Peserta Didik	600,000,000	PAD	DISDIKPORA
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	75 Orang	300,000,000	PAD	DISDIKPORA

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	25 Satuan Pendidikan	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	54 Satuan Pendidikan	15,168,650,000	PAD	DISDIKPORA
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	54 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	-	PAD	DISDIKPORA
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	54 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	54 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	250,000,000	PAD	DISDIKPORA
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	37 Satuan Pendidikan	50,000,000	PAD	DISDIKPORA

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	37 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1 Buku	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4900 Paket	400,000,000	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	34 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	55 Paket	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			7,605,600,000		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1 Paket	-	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	10 Paket	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2500 Peserta Didik	300,000,000	PAD	DISDIKPORA
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	20 Orang	60,000,000	PAD	DISDIKPORA

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang	250,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	262 Satuan Pendidikan	4,995,600,000	PAD	DISDIKPORA
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	262 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	1 Unit	-	PAD	DISDIKPORA
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	1 Orang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	80 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	40,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	250,000,000	PAD	DISDIKPORA

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	40,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	-	PAD	DISDIKPORA
Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta didik	200,000,000	PAD	DISDIKPORA
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1 Buku	-	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	-	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	300,000,000	PAD	DISDIKPORA

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	-	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	5,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	10 Paket	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	100 Satuan Pendidikan	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	300,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4,298,400,000		
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	-	PAD	DISDIKPORA
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	4 Satuan Pendidikan	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	13 Satuan Pendidikan	3,048,400,000	PAD	DISDIKPORA
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	14 Orang	30,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	-	PAD	DISDIKPORA
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	1 Orang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	14 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	40,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	14 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	400,000,000	PAD	DISDIKPORA
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	30,000,000	PAD	DISDIKPORA

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	1 Orang	-	PAD	DISDIKPORA
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	-	PAD	DISDIKPORA
Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	100,000,000	PAD	DISDIKPORA
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1 Buku	-	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	-	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	-	PAD	DISDIKPORA
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	15 Orang	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	-	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	-	PAD	DISDIKPORA
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2000 Peserta Didik	50,000,000	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	-	PAD	DISDIKPORA
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	-	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	-	PAD	DISDIKPORA
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	-	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	-	PAD	DISDIKPORA
SPM BIDANG KESEHATAN					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			57,017,630,525		DINKES

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial	89 %	57,017,630,525		
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	70 %	57,017,630,525		
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	100 %	56,983,470,525		
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	100 %	34,160,000		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2,650,370,538		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	275,370,538	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINKES
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	40 Unit	200,000,000	PAD	DINKES
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	2,025,000,000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINKES
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	15 Paket	150,000,000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINKES
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			56,383,099,987		

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5654 Orang	164,500,000	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5370 Orang	287,500,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5064 Orang	112,500,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25384 Orang	117,500,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48956 Orang	249,500,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	287589 Orang	887,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	77235 Orang	130,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130911 Orang	212,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1659 Orang	1,062,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	650 Orang	115,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8758 Orang	1,650,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7625 Orang	250,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen	100,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	2 Dokumen	100,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	222,500,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	65,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			370,000,000		
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	370,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			5,000,000		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	5,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	200,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	50,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	47,459,579,987	PAD Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	DINKES
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	150,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	250,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	400,000,000	PAD	DINKES
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	17 Unit	75,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	50,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	50,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	100,000,000	PAD	DINKES
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1850 Orang	100,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55 Orang	100,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10 Orang	100,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	5 Tatanan	50,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	50,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	100,000,000	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1 Dokumen	100,000,000	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen	105,000,000	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	175,000,000	PAD	DINKES
Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	44 Paket	68,520,000	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	1 Laporan	100,000,000	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	150,000,000	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan	200,000,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			34,160,000		
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	17 Unit	34,160,000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	DINKES
SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	34,72%	5,127,158,000		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			5,127,158,000		
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	3 Unit	1,000,000,000	DAU PAD	DPUTRPRKP
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	127,158,000	PAD DAU	DPUTRPRKP
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3 Liter/Detik	2,000,000,000	PAD DAU	DPUTRPRKP
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1 Liter/Detik	1,000,000,000	PAD DAU	DPUTRPRKP

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR	1,000,000,000	PAD DAU	DPUTRPRKP
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	17,29	1,958,948,000		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,958,948,000		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	458,948,000	PAD DAU	DPUTRPRKP
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	30 M ³ /Hari	1,000,000,000	DAU PAD	DPUTRPRKP
Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah SPALD-Terpusat	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	40 Sambungan Rumah (SR)	500,000,000	DAU PAD	DPUTRPRKP
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	100%	173,932,000		
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			121,003,000		
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2 Dokumen	6,357,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PAD	DPUTRPRKP

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	20 Dokumen	114,646,000	PAD Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	DPUTRPRKP
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			42,929,000		
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah	22,929,000	PAD	DPUTRPRKP
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	20,000,000	PAD Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	DPUTRPRKP
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			10,000,000		
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	10,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PAD	DPUTRPRKP
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			10,000,000		

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	10 Laporan	10,000,000	PAD Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	DPUTRPRKP
SPM BIDANG KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT					
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100 %	4,061,653,062		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3,343,948,062		
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	5,000,000	PAD	SATPOL-PP
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	150,000,000	PAD	SATPOL-PP
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan	1,063,948,062	PAD	SATPOL-PP
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan	55,000,000	PAD	SATPOL-PP

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	5,000,000	PAD	SATPOL-PP
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 Unit	2,000,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	SATPOL-PP
Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	10,000,000	PAD	SATPOL-PP
Peningkatan Kapasitas SDM SATPOL-PP	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	30 Orang	55,000,000	PAD	SATPOL-PP
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			777,705,000		
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	205,000,000	Dana Bagi Hasil (DBH)	SATPOL-PP
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	19 Laporan	522,705,000	Dana Bagi Hasil (DBH) PAD	SATPOL-PP
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	50,000,000	PAD	SATPOL-PP
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			50,000,000		

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	2 Laporan	50,000,000	PAD	SATPOL-PP
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	100 %	1,040,087,000		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			10,000,000		
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 Orang	10,000,000	PAD	BPBD
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			740,000,000		
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	5,000,000	PAD	BPBD
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	225 Orang	75,000,000	PAD	BPBD
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	325,000,000	PAD	BPBD
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan	- Dokumen	-	PAD	BPBD

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4 laporan	20,000,000	PAD	BPBD
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	200,000,000	PAD	BPBD
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	80 Orang	115,000,000	PAD	BPBD
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			210,000,000		
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	3,000,000	PAD	BPBD
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	5,000,000	PAD	BPBD
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	360 Orang	47,000,000	PAD	BPBD
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	360 Orang	150,000,000	PAD	BPBD

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	5,000,000	PAD	BPBD
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100,087,000		
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	10,000,000	PAD	BPBD
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 Laporan	18,834,060	PAD	BPBD
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 Kegiatan	71,252,940	PAD	BPBD
SPM BIDANG SOSIAL					
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	92%	1,475,356,000		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1,433,356,000		
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	130,000,000	PAD	DINSOSPMD

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	1,273,356,000	PAD Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	DINSOSPMD
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1771 Orang	30,000,000	PAD	DINSOSPMD
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			42,000,000		
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	20,000,000	PAD	DINSOSPMD
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	22,000,000	PAD	DINSOSPMD
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	15%	907,000,000		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			907,000,000		
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	238000000 Orang	10,000,000	PAD	DINSOSPMD

SPM/PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2027	PAGU	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20,000,000	PAD	DINSOSPMD
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	327 Orang	367,000,000	PAD DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	DINSOSPMD
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	12000 Usulan	510,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PAD	DINSOSPMD
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	100%	13,101,688		
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			13,101,688		
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	61 Orang	13,101,688	PAD	DINSOSPMD

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027, SIPD Kabupaten Pangandaran diolah, 2027

5.6. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

Dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk mewujudkan sinergi pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Adapun program pembangunan Kabupaten Pangandaran yang mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Sinkronisasi Program Pembangunan Kabupaten Pangandaran terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2027

PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
PP 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	300.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	250.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	31.712.600.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.853.650.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	4.298.400.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.070.000.000,00	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.650.370.538,00	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.383.099.987,00	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.160.000,00	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	602.908.000,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	248.650.800,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	245.993.700,00	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PP 2 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.	178.979.950,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	50.199.800,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	63.859.650,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.690.080.000,00	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	165.000.000,00	Dinas Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian	5.430.000.000,00	Dinas Pertanian

PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2.950.000.000,00	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	7.518.647.839,48	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	849.164.400,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, dan Perindustrian
PP 3 : Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.958.948.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	740.111.766,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	885.000.000,00	Dinas Sosial, Peberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	2.155.344.700,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.433.356.000,00	Dinas Sosial, Peberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	42.000.000,00	Dinas Sosial, Peberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	907.000.000,00	Dinas Sosial, Peberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.326.804.223,00	Sekretariat Daerah
PP 4 : Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	350.797.400,00	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.035.297.753,00	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	55.873.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	74.355.300,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	9.994.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	137.496.095,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	231.499.505,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.731.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.512.500.000,00	Puskesmas Padaherang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.425.500.000,00	Puskesmas Sidangwangi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.876.300.000,00	Puskesmas Mangunjaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.961.250.000,00	Puskesmas Kalipucang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	7.303.588.782,00	Puskesmas Pangandaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.480.000.000,00	Puskesmas Sidamulih
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.700.000.000,00	Puskesmas Cikembulan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.687.000.000,00	Puskesmas Parigi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.259.719.771,00	Puskesmas Selasari
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	4.114.944.000,00	Puskesmas Cijulang
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.889.000.000,00	Puskesmas Cimerak

PRIORITAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.766.060.000,00	Puskesmas Legokjawa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.800.000.000,00	Puskesmas Cigugur
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.275.000.000,00	Puskesmas Langkaplancar
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.759.557.500,00	Puskesmas Jadikarya
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Peningkatan Pelayanan BLUD	80.000.000.000,00	RSUD PANDEGA

Sumber: Data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027, SIPD Kabupaten Pangandaran diolah, 2027

5.7. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Pangandaran Terhadap Kesepakatan Rakortekbang 2026

Sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Pangandaran terhadap kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2026 merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2027 yang bertujuan untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, serta sasaran pembangunan nasional. Melalui proses ini, program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran diupayakan memiliki keterkaitan yang kuat dengan prioritas pembangunan nasional, sehingga mampu mendukung pencapaian target pembangunan secara berjenjang pada tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

Sinkronisasi tersebut juga menjadi instrumen untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan antartingkatan pemerintahan, sekaligus memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian isu strategis dan kebutuhan pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, diharapkan terwujud efektivitas pelaksanaan pembangunan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan secara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Pangandaran terhadap kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 diuraikan berdasarkan kesepakatan Rakortekbang Bidang Urusan (Asta Cita) Tahun 2026 dan kesepakatan Rakortekbang Tematik (Program Strategis Nasional/ProSN) Tahun 202

5.7.1. Keselarasan Kesepakatan Rakortekbang Bidang Urusan (Asta Cita) Tahun 2026

Keselarasn Kesepakatan Rakortekbang Bidang Urusan (Asta Cita) Tahun 2026 merupakan wujud penyelarasan antara program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan Kabupaten Pangandaran dengan arah kebijakan, prioritas, serta sasaran pembangunan nasional yang telah disepakati dalam forum Rakortekbang. Penyelarasan tersebut dilakukan melalui pengintegrasian berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian Asta Cita sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan adanya keselarasn tersebut, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

TABEL 5.8

Keselarasn Kesepakatan Rakortekbang Bidang Urusan (Asta Cita) Tahun 2026

Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
1	PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	KM	0	0	-	DPUTRPRKP	
2	PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	0	0	-	DPUTRPRKP	
3	PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	1	127,158,000	1	DPUTRPRKP	
4	PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air	SR	200	1,000,000,000	200	DPUTRPRKP	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		nilai tambah di dalam negeri.	PENYEDIAAN AIR MINUM		Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						
5	PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	0	0	-	DPUTRPRKP	
6	PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	0	0	-	DPUTRPRKP	
7	PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	0	0	-	DPUTRPRKP	
8	PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	2	458,948,000	2	DPUTRPRKP	
9	PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	6.36	6,000,000,000	6	DPUTRPRKP	
10	PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	6.88	14,585,674,307	6.88	DPUTRPRKP	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.									
11	PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	0	10,000,000	1	DPUTRPRKP	
12	PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	0	0	-	DPUTRPRKP	
13	PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	36,000,000	1	DPUTRPRKP	
14	PENATAAN RUANG	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	0	0	-	DPUTRPRKP	Sub kegiatan baru akan dimasukkan di perubahan 2027 karena proses legalisasi peraturan terkait pengenaan sanksi administratif

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
15	PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	30,000,000	1	SETDA	
16	PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	1	30,000,000	1	SETDA	
17	LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	8	55,000,000	8	DLH	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
18	LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	0	0	-	DLH	Kabupaten Pangandaran tidak menyusun dokumen SLHD disebabkan tidak adanya anggaran untuk kegiatan ini.
19	LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	12	70,000,000	12	DLH	
20	LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	35	39,954,000	35	DLH	
21	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang	Unit Rumah	150	3,000,000,000	150	DPUTRPRKP	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
22	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	0	0	-	DPUTRPRKP	
23	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0	0	-	DPUTRPRKP	
24	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Lokasi	0	0	-	DPUTRPRKP	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	10	2,500,000,000	10	DKPKP	
26	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	1	0		DKPKP	sub kegiatan akan diakomodir untuk Ranhir Renja/RKPD 2027.

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
27	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	6	2,000,000	6	DKPKP	
28	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	6	2,000,000	6	DKPKP	
29	PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	615	4,252,404,000	321	DISHUB	
30	PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	2	435,000,000	2	DISHUB	
31	PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	74,802,000	20	DISHUB	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.									
32	PERHUBUNGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	2	82,546,000	20	DISHUB	
33	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Orang	215000	50,000,000	62	DKISP	
34	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	Dokumen	4	5,000,000	2	DKISP	
35	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Titik	30	2,392,417,336	30	DKISP	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
36	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1	50,000,000	1	DKISP	
37	STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	100	10,000,000	100	DKISP	
38	STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	%	100	7,500,000	100	DKISP	
39	PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang	Dokumen	1	10,000,000	1	DKISP	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
					digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian						
40	PERSANDIAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	25,000,000	1	DKISP	
41	SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	29	10,000,000	29	DINSOS PMD	
42	SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	100	50,000,000	-	DINSOS PMD	Subkegiatan yang dibahas dalam rakortekbang harus diampu dan digunakan oleh pemerintah daerah
43	SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	327	367,000,000	327	DINSOS PMD	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		penyangang disabilitas.									
44	SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	12000	510,000,000	12000	DINSOS PMD	
45	KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	5	2,000,000	50	DISPARBUD	terdampak efisiensi
46	KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Dokumen	1	1,000,000	1	DISPARBUD	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.									
47	KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Objek	1	1,000,000	1	DISPARBUD	
48	KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	2	2,000,000	2	DISPARBUD	
49	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	25	10,000,000	25	DISKOPDAGIN	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
50	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Orang	75	15,000,000	75	DISKOPDAGIN	
51	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	Kegiatan	1	25,000,000	0	DISKOPDAGIN	Sub Kegiatan belum terakomodir dalam renstra dan Ranwal RKPD Tahun 2027 serta Renja, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Bappeda Kab. Pangandaran dan Dinas KUKM Kab. Pangandaran agar sub kegiatan ini di akomodir dalam Rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah beserta Target dan Pagunya
52	PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ;	Kegiatan Usaha	60	66,261,350	60	DPMPTSP	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
					serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha						
53	PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	13	14,968,261	13	DPMPTSP	
54	PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	10,000,000	2	DISKOPDAGI N	
55	PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	3	1,080,000,000	1	DISKOPDAGI N	
56	PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal	Dokumen	1	10,000,000	10	DISKOPDAGIN	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
					Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat						
57	PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor Perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	4	10,000,000	10	DISKOPDAGIN	
58	PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar	Laporan	12	20,000,000	12	DISKOPDAGIN	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		nilai tambah di dalam negeri.		dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						
59	PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	5	25,000,000	10	DISKOPDAGIN	
60	PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1	701,900,000	1	DISPARBUD	
61	PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	1	53,198,000	1	DISPARBUD	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
62	PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	0	30,000,000	1	DISPARBUD	
63	PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	0	6,499,900	1	DISPARBUD	
64	PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	100,000,000	1	DINSOS PMD	
65	PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan	Dokumen	0	0	-	DINSOS PMD	Sub kegiatan ini khusus untuk provinsi papua, sehingga tidak ada kegiatan kerjasama antar kampung

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		pemberantasan kemiskinan.		pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota						
66	PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	186	15,000,000	186	DINSOS PMD	
67	PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	100,000,000	1	DINSOS PMD	
68	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan	Laporan	1	9,994,400	1	DISDUKCAPIL	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Pendaftaran Penduduk						
69	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	12	9,992,400	12	DISDUKCAPIL	
70	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	1	9,999,800	1	DISDUKCAPIL	
71	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	9,982,000	1	DISDUKCAPIL	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
72	TRANTIBUM LINMAS	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	10,000,000	12	SATPOL PP	
73	TRANTIBUM LINMAS	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	19	522,705,000	19	SATPOL PP	
74	TRANTIBUM LINMAS	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	70,000,000	12	SATPOL PP	
75	TRANTIBUM LINMAS	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1	5,000,000	1	SATPOL PP	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		mencapai masyarakat yang adil dan makmur.									
76	TRANTIBUM LINMAS - KEBENCANAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	150	10,000,000	200	BPBD	
77	TRANTIBUM LINMAS - KEBENCANAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	0	0	-	BPBD	Subkegiatan tidak teranggarkan karena keterbatasan fiskal Kab Pangandaran
78	TRANTIBUM LINMAS - KEBENCANAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	225	75,000,000	225	BPBD	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
					(per jenis ancaman) Kabupaten/Kota						
79	TRANTIBUM LINMAS - KEBENCANAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	0	0	-	BPBD	Subkegiatan tidak teranggarkan karena keterbatasan fiskal Kab Pangandaran
80	PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50	50,000,000	50	DISDIKPORA	
81	PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	37	50,000,000	37	DISDIKPORA	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		penyangang disabilitas.									
82	PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	25	250,000,000	25	DISDIKPORA	
83	PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	16	100,000,000	10	DISDIKPORA	
84	TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	6	10,000,000	6	DISNAKER	
85	TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang	Orang	0	0	-	DISNAKER	Kabupaten hanya memberikan penyuluhan kepada calon

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.			Mendapatkan Pelatihan						transmigran akan tetapi untuk terselenggaranya pelatihan diserahkan kepada pusat
86	PEMBEDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	35	123,885,000	15	DKBP3A	
87	PEMBEDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	4	21,950,000	4	DKBP3A	
88	PEMBEDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	Orang	20	123,885,000	20	DKBP3A	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
89	PEMBEDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	4	29,750,000	4	DKBP3A	
90	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	153	100,000,000	50	DISDIKPORA	
91	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi	53	50,000,000	1	DISDIKPORA	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
92	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	83	100,000,000	1	DISDIKPORA	
93	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	Orang	440	700,000,000	4	DISDIKPORA	
94	PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	18	14,587,034	11	DISPUSIP	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
95	PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	7	14,034,790	18	DISPUSIP	
96	PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	100	10,685,000	10	DISPUSIP	
97	PERPUSTAKAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	1	17,369,550	1	DISPUSIP	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
98	KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	37	23,317,800	37	DISPUSIP	
99	KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	1	3,300,000	1	DISPUSIP	
100	TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	20	20,000,000	20	DISNAKER	
101	TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	10	72,000,000	10	DISNAKER	
102	TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Orang	15654	1,264,569,769	15654	DISNAKER	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.			Kesejahteraan Pekerja						
103	KESATUAN BANGSA DAN POLITK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	7	1,073,256,800	7	BAKESBANG POL	
104	KESATUAN BANGSA DAN POLITK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Orang	7	35,500,000	7	BAKESBANG POL	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
				Situasi Politik di Daerah	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						
105	KESATUAN BANGSA DAN POLITK	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	58	492,000,000	0	BAKESBANG POL	
106	KESATUAN BANGSA DAN POLITK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	82	414,000,000	82	BAKESBANG POL	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
107	KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	8	0	-	DINKES	2027 anggaran di renja Perangkat Daerah tidak ada, karena sudah 15 puskesmas sudah BLUD jadi ada di sub kegiatan lain
108	KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1	0	-	DINKES	2027 anggaran di renja Perangkat Daerah tidak ada, sudah BLUD jadi ada di sub kegiatan lain
109	KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	2,025,000,000	3	DINKES	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
110	KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	0	0	-	DINKES	sub kegiatan ini di renja Perangkat Daerah 2027 tidak ada, tetapi ada di sub kegiatan lain yaitu pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sdmk
111	PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	10	6,000,000	10	DKPKP	
112	PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	1	255,000,000	1	DKPKP	
113	PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada	Dokumen	1	4,800,000	1	DKPKP	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
114	PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	12	7,300,000	12	DKPKP	
115	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kegiatan	2	54,750,000	1	DKBP3A	
116	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4	12,900,000	2	DKBP3A	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
117	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Laporan / Dokumen	5	15,000,000	15	DKBP3A	
118	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	45,300,000	1	DKBP3A	
119	PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	4,475,080,000	4	DISTAN	
120	PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	6	15,000,000	6	DISTAN	

NO	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	PROGRAM	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL RAKORTEK 2026	PAGU ANGGARAN	TARGET RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)		(12)	(13)
		pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru									
121	PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B yang dikelola	Dokumen	1	0	-	DISTAN	- Sub Kegiatan ini harus diakomodir didalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dikarenakan sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan yang langsung di monitoring oleh Pusat
122	PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	0	-	DISTAN	- Sub Kegiatan ini harus diakomodir didalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dikarenakan sub kegiatan ini merupakan sub kegiatan yang langsung di monitoring oleh Pusat

Sumber : Berita Acara Rakortekbang 2026, SIPD Kabupaten Pangandaran diolah, 2027

5.7.2. Keselarasan Kesepakatan Rakortekbang Tematik (ProSN) Tahun 2026

Keselarasan Kesepakatan Rakortekbang Tematik (Program Strategis Nasional/ProSN) Tahun 2026 merupakan upaya penyelarasan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan Kabupaten Pangandaran dengan agenda pembangunan nasional yang bersifat tematik dan strategis. Penyelarasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat mendukung pelaksanaan serta pencapaian target Program Strategis Nasional sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kewenangan daerah. Melalui keselarasan ini, diharapkan terwujud sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dan prioritas

pembangunan nasional sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara lebih terintegrasi, efektif, dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Tabel 5.8
Keselarasan Kesepakatan Rakortekbang Tematik (ProSN) Tahun 2026
Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

NO	PROSN	PROYEK/TEMATIK	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Satuan	TARGET HASIL KESEPAKATAN	PAGU ANGGARAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Ketahanan Pangan	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	Tingkat Kesiapan Teknis dan Operasi Pemeliharaan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	0	0.00	
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	1	2,217,397,648.00	
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Km			
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	0	0.00	
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan Tiga Juta Rumah	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	2	417,897,000.00	
					Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit	2	20,000,000.00	
					Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit	0	0.00	
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	10	1,528,661,000.00	
					Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Unit	0	0.00	

NO	PROSN	PROYEK/TEMATIK	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Satuan	TARGET HASIL KESEPAKATAN	PAGU ANGGARAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	-	Ekonomi Syariah	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Unit Usaha	4	25,000,000.00	
					Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Dokumen	100	25,000,000.00	
					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	12	150,000,000.00	
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	10	20,000,000.00	
				Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	4	9,999,950.00	
	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Laporan Pemantauan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	1	255,000,000.00	
					Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	12	0.00	
			Laporan Pemantauan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Kab/Kota	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	4	50,000,000.00	
3	Ketahanan Pangan	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Operasionalisasi BPP	Dinas Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Unit	10	30,444,000.00	
					Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Unit	0	0.00	
		Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	Luas Hasil Cetak Sawah yang Ditingkatkan IP-nya	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit	10	970,000,000.00	
					Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Unit	1		
				Dinas Pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Ha	400	140,000,000.00	
					Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Dokumen	0	0.00	
		Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Proporsi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		0	0.00	

NO	PROSN	PROYEK/TEMATIK	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Satuan	TARGET HASIL KESEPAKATAN	PAGU ANGGARAN	KET.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
					Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota						
				Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	36,000,000.00			
		Pangan Akuatik	Produksi Perikanan Tangkap		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	2	1,100,000,000.00			
			Produksi Garam		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	376	25,048,558,979.00			
					Pengawasan Ekstraksi Garam	Pelaku Usaha	1	1,000,000.00			
		Kampung Nelayan Merah Putih	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan		Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Orang	600	266,620,492.00		
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok	15	100,000,000.00				
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	376	25,048,558,979.00				
		4	-	Penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0.00	
							Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200,000,000.00	
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang						0	0.00			
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan						12	71,252,940.00			
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen						0	0.00			
Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem		Tingkat Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Orang	10	20,000,000.00			
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	327	367,000,000.00			
				Dinas Ketenagakerjaan	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Orang	15654	1,264,569,769.00			

NO	PROSN	PROYEK/TEMATIK	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Satuan	TARGET HASIL KESEPAKATAN	PAGU ANGGARAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Sekolah Rakyat	Tingkat Kemiskinan	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	60,000,000.00	
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Usulan	12000	907,000,000.00	
				Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dokumen	35		
	-	Masyarakat Adat	Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1		
					Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	75,000,000.00	
5	-	Pengarusutamaan Gender	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	50	50,000,000.00	
				Dinas Kesehatan	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	100,000,000.00	
				Dinas Ketenagakerjaan	Perluasan Kesempatan Kerja		0	0.00	
				Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Lembaga	20	36,250,000.00	
				Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang	200	300,000,000.00	
	-	Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1	50,000,000.00	
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		0	0.00	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Orang	1771	30,000,000.00	

NO	PROSN	PROYEK/TEMATIK	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Satuan	TARGET HASIL KESEPAKATAN	PAGU ANGGARAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				
				Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Orang	36	215,300,000.00	
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	141,805,000.00	
6	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	150,000,000.00	
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah						
		Digitalisasi Pembelajaran	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	50	50,000,000.00	
			Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional						
	Kesehatan Untuk Semua	Makan Bergizi Gratis	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga					
			Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, Dan SMA/Sederajat.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0.00	
				Dinas Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	50,000,000.00	
7	Kesehatan Untuk Semua			Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	230,000,000.00	

NO	PROSN	PROYEK/TEMATIK	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	NOMENKLATUR SUB KEGIATAN	Satuan	TARGET HASIL KESEPAKATAN	PAGU ANGGARAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	2,500,000.00	
				Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/detik	1	1,000,000,000.00	
				Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	10	6,000,000.00	
				Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		0	0.00	
	Kesehatan Untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	47,459,579,987.00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Dokumen	1	200,000,000.00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	1	7,500,000.00	
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		0	0.00	
	Kesehatan Untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	47,459,579,987.00	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Usulan	12000	510,000,000.00	
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		0	0.00	
	Kesehatan Untuk Semua	Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	Cakupan Penemuan Kasus TBC	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	8758	1,650,000,000.00	
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Orang	1850	100,000,000.00	
				Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	327	367,000,000.00	
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		0	0.00	
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Dinas Kesehatan	Pengembangan Rumah Sakit		0	0.00	
			Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		0	0.00	

Sumber : Berita Acara Rakortekbang 2026, SIPD Kabupaten Pangandaran diolah, 2027

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil atas penyelenggaraan pemerintah yang dihubungkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diimbangi suatu penyelenggara pemerintahan yang baik. Ukuran-ukuran keberhasilan inilah selanjutnya didefinisikan menjadi sebuah indikator yang mampu menggambarkan ketercapaian suatu kinerja yang telah dilaksanakan. Dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk mengetahui tingkat keberhasilannya diperlukan suatu indikator kinerja daerah yang mampu menggambarkan secara utuh terhadap pencapaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan setiap tahunnya. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja sasaran organisasi perangkat daerah serta program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Pangandaran dibagi menjadi dua kelompok yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan indikator makro rencana capaian kinerja Kepala Daerah, serta Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator yang menggambarkan rencana capaian indikator kinerja masing-masing urusan pemerintahan termasuk didalamnya program-program pembangunan prioritas. Rencana capaian masing-masing indikator kinerja tahun 2027 yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dan Indeks Gini. Target Indikator Kinerja Makro tahun 2026 tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. 1 Indikator Makro Daerah

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian			Target	
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,26	5,12	5,64	5,62	5,65
2.	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	32,62	35,65	38,39	41,75	43,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,52	1,58	1,91	1,47	1,39
4.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	70,57	71,03	71,66	71,77	72,53
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,98	8,75	8,03	7,78	6,98

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian			Target	
		2023	2024	2025	2026	2027
6.	Rasio Gini (Poin)	0,323	0,286	0,304	0,285	0,284
7.	Penurunan Intesitas Emisi GRK (Ton Co ₂ Eq/Milyar)	N/A	N/A	N/A	10,17	11,37

Sumber: BPS Kabupaten Pangandaran Target ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan capaian indikator makro daerah Tahun 2023–2025 serta target yang ditetapkan pada Tahun 2026 dan Tahun 2027, kinerja pembangunan Kabupaten Pangandaran menunjukkan perkembangan yang relatif baik pada sebagian besar indikator utama pembangunan. Hal tersebut mencerminkan adanya perbaikan kondisi perekonomian daerah, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta efektivitas berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan. Namun demikian, beberapa indikator masih memerlukan perhatian dan penguatan kebijakan agar target pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD dapat tercapai secara optimal.

Pada aspek perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran menunjukkan fluktuasi yang cenderung positif, yaitu sebesar 5,26 persen pada Tahun 2023, 5,12 persen pada Tahun 2024, dan meningkat menjadi 5,64 persen pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut mengindikasikan semakin pulih dan berkembangnya aktivitas ekonomi daerah, terutama yang didorong oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa pendukung lainnya. Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan tersebut, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,62 persen pada Tahun 2026 dan 5,65 persen pada Tahun 2027 dinilai realistis untuk dicapai melalui penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan investasi, serta pengembangan konektivitas dan infrastruktur wilayah.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, indikator PDRB per kapita juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari Rp32,62 juta pada Tahun 2023 menjadi Rp35,65 juta pada Tahun 2024 dan Rp38,39 juta pada Tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kapasitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, target PDRB per kapita sebesar Rp41,75 juta pada Tahun 2026 dan Rp43,50 juta pada Tahun 2027 diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan nilai tambah sektor ekonomi, penguatan daya saing usaha daerah, serta perluasan kesempatan kerja yang produktif.

Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan dari 1,52 persen pada Tahun 2023 menjadi 1,58 persen pada Tahun 2024 dan 1,91 persen pada Tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Untuk itu, target penurunan TPT menjadi 1,47 persen pada Tahun 2026 dan 1,39 persen pada Tahun 2027 diarahkan melalui pengembangan kewirausahaan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penguatan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

Pada aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan, yaitu dari 70,57 poin pada Tahun 2023 menjadi 71,03 poin pada Tahun

2024 dan 71,66 poin pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya capaian pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat. Dengan demikian, target IPM sebesar 71,77 poin pada Tahun 2026 dan 72,53 poin pada Tahun 2027 diharapkan dapat tercapai melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang lebih inklusif.

Sementara itu, tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dari 8,98 persen pada Tahun 2023 menjadi 8,75 persen pada Tahun 2024 dan kembali turun menjadi 8,03 persen pada Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Untuk mempercepat penurunan kemiskinan, ditetapkan target sebesar 7,78 persen pada Tahun 2026 dan 6,98 persen pada Tahun 2027 melalui penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta pengembangan kesempatan berusaha bagi kelompok rentan.

Pada indikator pemerataan pendapatan, Rasio Gini mengalami perbaikan pada Tahun 2024 menjadi 0,286 dibandingkan Tahun 2023 sebesar 0,323, namun kembali meningkat menjadi 0,304 pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, target Rasio Gini sebesar 0,285 pada Tahun 2026 dan 0,284 pada Tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui pemerataan akses ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan sektor ekonomi kerakyatan.

Selain indikator sosial dan ekonomi, pembangunan daerah juga mulai diarahkan pada aspek keberlanjutan lingkungan melalui indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Meskipun data capaian pada periode 2023–2025 belum tersedia, target penurunan intensitas emisi GRK ditetapkan sebesar 10,17 ton CO₂e per miliar rupiah pada Tahun 2026 dan meningkat menjadi 11,37 ton CO₂e per miliar rupiah pada Tahun 2027. Target tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mendukung pembangunan rendah karbon melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, serta penguatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Secara keseluruhan, target indikator makro daerah Tahun 2027 dirancang untuk mendukung tema pembangunan Kabupaten Pangandaran, yaitu “Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata”, dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan pelaksanaan program pembangunan yang konsisten, target-target tersebut diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus dipantau dalam rangka memenuhi penilaian kinerja Kepala

Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator kinerja tersebut dicapai dengan upaya dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Pangandaran baik yang dapat dihitung secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing perangkat daerah memiliki peran yang berbeda terhadap capaian indikator kinerja dari setiap misi pembangunan Kabupaten Pangandaran.

Capaian target Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Peningkatan upaya pemulihan ekonomi pasca penanganan pandemi Covid-19, mempengaruhi kinerja pembangunan di Kabupaten Pangandaran, sehingga Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran tahun 2025 dan 2026 mengalami penyesuaian dengan merujuk pada RPJMD Tahun 2021-2026, yang dirangkum pada tabel dibawah ini.

Tabel 6. 2 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran)	Satuan	Capaian	Target	
			2024	2026	2027
1	Indeks Kesehatan	Poin	84,78	85,49	85,85
1.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,11	75,57	75,80
2	Indeks Pendidikan	Poin	61,19	62,06	62,5
2.1	Capaian SPM pendidikan	Nilai	80	84	86
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	85,70	85,96	86,04
3.1	Persentase cakupan layanan infrastruktur	Persen	NA	40,47	42,80
3.2	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	1,73	1,77	1,79
3.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,99	66,26	66,51
3.4	Indeks resiko bencana	Poin	133,13	131,35	129,7
4	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	N/A	0,5	0,8
4.1	Indeks Kepuasan Wisatawan (IKW)	Poin	NA	72	74
4.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	10,13	10,43	10,69
4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Poin	N/A	53	55
5	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	N/A	82,34	82,54
5.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	NA	73,78	74,47
5.2	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Poin	NA	67,7	71,7
6	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Poin	83,86	84,06	
6.1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	5,22	5,02	
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,46	76,80	77,00
7.1	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Poin	67,98	71,99	74,00
7.2	Indeks Integritas Nasional	Poin	65,66	72,37	72,90
7.3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	N/A	59,69	60,51
7.4	indeks daya saing daerah	Poin	3,65	3,90	3,93
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	6,03	5,65
8.1	Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap PDRB	persen	NA	35,55	35,64
8.2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,75	7,78	6,98
8.3	Indeks Desa Membangun / Indeks Desa	Poin	0,84	0,8713	0,8813

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dan wakil bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk mencapai indikator utama bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. IKK Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 merupakan bagian dari capaian pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2026 (periode sebelumnya) dan untuk target IKK 2025-2027 merupakan rencana target dari pembangunan jangka menengah terbaru periode tahun 2025-2029.

Sebagai upaya menjaga konsistensi antara arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan pelaksanaan pembangunan tahunan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai turunan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam RKPD Tahun 2026.

IKK berfungsi sebagai panduan operasional dalam pencapaian kinerja tahunan perangkat daerah, yang mengarahkan program dan kegiatan agar berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 serta diselaraskan dengan arah pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029.

Dalam penyusunannya, IKK disusun berdasarkan prinsip keterukuran, relevansi, dan kesinambungan, sehingga setiap target tahunan dapat dimonitor dan dievaluasi secara efektif. Penetapan IKK juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah Tahun 2026 serta penguatan kinerja berbasis hasil (performance-based budgeting). Berikut Tabel 6.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pangandaran yang sudah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029.

Tabel 6. 3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pangandaran

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	78,58	78,39	79,90	80,39
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	5,22*	3,96	3,78	3,57
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	27,47*	34,72	38,35	38,35
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	77,7	66,26	66,51	67,77
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	N/A	11,92	17,29	22,67
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	26*	31,30	35,47	40,20
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persen	100*	100	100	100
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	ton CO2 eq	N/A	10,17	10,78	11,57
9	Indeks Risiko Bencana	poin	118,18	131,35	129,7	128,05
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0,61*	0,59	0,58	0,57
11	Indeks Kapasitas Daerah	Poin	0,69	0,72	0,73	0,74
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,07	5,62	5,65	5,78
2	Tingkat Kemiskinan	persen	8,03	7,78	6,98	6,02
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	35,65*	41,75	43,50	45,25
4	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	2,79*	2,98	3,04	3,10
5	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,24*	0,30	0,33	0,36
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,58*	1,47	1,39	1,38
7	Indeks Gini	Poin	0,286*	0,285	0,284	0,283

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
8	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,03*	71,77	72,53	73,03
9	Usia Harapan Hidup	tahun	75,45	75,57	75,80	76,03
10	Prevalensi Stunting	persen	17,2*	14,04	12,79	11,71
11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	8,24*	8,45	8,55	8,65
12	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,36*	12,49	12,56	12,62
13	Indeks Numerasi	Poin	N/A	49,55	50,1	50,65
14	Indeks Literasi	Poin	N/A	62,4	62,8	63,2
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	98,46*	98,61	98,69	98,77
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	N/A	73,78	74,47	75,16
17	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,337	0,38	0,37	0,36
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	4,66	5,22	5,31	5,41
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	10,30	10,49	10,56	10,62
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	25*	27	28	29
4	Indeks Inovasi Daerah	poin	45,19	49	49	50
5	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	N/A	17,55	19,05	20,96
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	N/A	22,17	22,25	22,33
8	Ekspor Barang dan Jasa (Persentase Produk Domestik Regional Bruto)	Persen	0,4	17,74	20,14	22,54
9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	poin	85,70*	85,96	86,04	86,12
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	58,09*	62,28	64,38	66,47

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
11	Persentase Desa Mandiri	Persen	100	52,69	61,29	73,12
12	Indeks Desa Membangun	Poin	0,84*	0,8713	0,8813	0,8913
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,7*	0,78	0,82	0,86
14	Tingkat Inflasi	Persen	6,15*	5,75	5,55	5,35
ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	98,24	73	76	79
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,52*	3,58	3,63	3,68
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,57	4,53	4,55	4,57
4	Indeks Integritas Nasional	Persen	N/A	72,37	72,90	73,42
5	Persentase Penegakan Perda	Persen	N/A	100	100	100
6	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Poin	96,07	67,7	71,7	75,7
7	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Poin	0,28*	0,32	0,34	0,36
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,65*	3,90	3,93	3,95
INDIKATOR KINERJA KUNCI						
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
Pendidikan						
1	Nilai Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,41	12,55	12,65	12,75
2	Persentase kelulusan siswa	Persen	100%	100%	100%	100%
3	Rasio jumlah guru dengan jumlah siswa pada tingkat Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio	1 : 16,54	1:12	1:12	1:12
4	Persentase Siswa yang menggunakan bahasa ibu dengan benar	Persen	N/A	89%	90%	91%

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
	Kesehatan					
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial	Persen	N/A	87%	89%	91%
2	Persentase SDM kesehatan yang meningkat kapasitasnya	Persen	100%*	100%	100%	100%
3	Peresentase Izin Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang tertangani	Persen	100%*	100%	100%	100%
4	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persen	100%*	100%	100%	100%
5	Persentase penerapan PHBS	Persen	85%*	85%	85%	85%
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	80%	1	84,64%	86,24%
2	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	65%	66%	69%	72%
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Persen	79%	66,30%	67,63%	38,35%
4	Persentase terbangunnya sarana persampahan	Persen	N/A	10%	11%	13%
5	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Persen	N/A	11,92%	17,29%	22,67%
6	Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi baik	Persen	0	10,50%	11%	13%
7	Jumlah Bangunan Gedung Sesuai Regulasi	Persen	N/A	51,00	52,02	53,06
8	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Persen	0	76,50%	78,03%	79,59%

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
9	Persentase penataan sesuai rencana tata ruang wilayah	Persen	48%	48,04%	53,04%	58,04%
	Sosial					
1	Presentase Keluarga Miskin yang Meningkatkan Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	Persen	15%	15,00%	15,00%	15,00%
2	Presentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	Persen	100%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Presentase Taman Makam Makam Pahlawan yang di Kelola	Persen	100%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persen	100%	91,00%	92,00%	93,00%
5	Presentase meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	90%	92,00%	94,00%	96,00%
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100	100	100
2	Response Time Rate	Persen	64,51	100	100	100
3	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persen	N/A	20	22	24
4	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	N/A	90	95	100
5	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	N/A	100	100	100
	Perumahan dan Kawasan Permukiman					

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
1	Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang ditangani	Persen	N/A	44,12%	46,32%	48,53%
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Persen	0	56,98%	57,03%	57,08%
3	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	Persen	35	100%	100%	100%
4	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen	0	52,50%	55,13%	57,88%
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
Tenaga Kerja						
1	Persentase Dokumen RTK yang Diselesaikan	Persen	80%*	0%	100%	100%
2	Persentase peserta pelatihan yang kompeten	Persen	70%*	100%	100%	100%
3	Persentase Tenaga Kerja yang diserap	Persen	70%*	55%	60%	65%
4	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	Persen	90%*	100%	100%	100%
Transmigrasi						
1	Presentase Masyarakat yang Memahami Program Transmigrasi	Persen	0%*	80%	85%	90%
2	Persentase Laju Kemandirian Transmigran	Persen	0%*	0%	100%	100%
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						
1	Nilai Penghargaan Parahita Ekapraya Daerah	Poin	N/A	501	601	601

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
1	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	20,00%*	35,71%	50,00%	6428,00
2	Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Persen	53,33%	31,50%	32,50%	33,50%
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	26%*	31,30%	35,47%	40,20%
4	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikelola	Persen	0	10%	15%	20%
5	Persentase Jumlah kegiatan dan/atau usaha dilakukan pengawasan yang memiliki izin lingkungan PPLH PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda	Persen	20%	85%	87,50%	88,90%
6	Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda	Persen	100%	100,00	100%	100%
7	Persentase Program Penghargaan yang diikuti	Persen	0	50%	75%	100%
8	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	Persen	2,87%	3,25%	3,25%	3,25%
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	Persen	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma	Persen	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Data Kependudukan yang dikelola secara Elektronik	Persen	N/A	100%	100%	100%

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
1	Presentase penataan desa	Persen	0	2%	2%	2%
2	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	Persen	0	4,00%	4,00%	4,00%
3	Presentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	Persen	65%	65,00%	65,00%	70,00%
4	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Persen	100%	100,00%	100,00%	100,00%
	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana					
1	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun	Poin	N/A	32,4	32,3	32,3
2	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	9,47	9,27	9,07	8,87
3	Persentase keluarga yang Mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	35,00	35,2	35,4	35,6
	Perhubungan					
1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten	Persen	33,68	45,00	52,00	65,00
2	Persentase Fasilitas Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan yang Layak Fungsi	Persen	N/A	15,00	20,00	25,00
	Komunikasi dan Informatika					
1	Indeks SPBE	Poin	3,52*	3,58	3,63	3,68
2	Persentase tata kelola layanan informasi publik	Persen	93,88	61%	62%	63%
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persen	69,23%	52,00%	53,00	54,00
2	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	Persen	5,78	14,66	14,76	14,86
3	Persentase SDM pengelola koperasi yang bersertifikat	Persen	5	4,90	5,88	6,86
4	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Persen	45,07	17,00	14,00	13,00
6	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	Persen	0,10	0,10	0,10	0,10
Penanaman Modal						
1	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen	0,0*	1,20	1,30	0,00
2	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Persen	1%*	-	-	1,40
3	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun	1,536*	0,72	0,72	0,73
4	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persen	100%*	100%	100%	100%
5	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	2,00%*	2,20%	2,30%	2,40%
Kepemudaan dan Olahraga						
1	Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi	Orang	22409*	22509	22609	22709
2	Jumlah atlet olahraga	Orang	200*	205	210	215
3	Jumlah pemuda yang aktif dalam kepramukaan	Orang	44792*	44892	44992	45000

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
	Persandian					
1	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	Persen	54	40%	45%	50%
	Statistik					
1	Persentase publikasi data statistik sektoral	Persen	74,62	45%	50%	55%
	Kebudayaan					
1	Persentase Warisan Budaya Yang Dilindungi	Persen	34.52%	29,76%	34,52%	39,29%
2	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	Persen	100%	100%	100%	100%
	Perpustakaan					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	8,64	19,95	20,24	20,53
2	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Persen	10	10%	10%	10%
	Kearsipan					
1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota	Poin	3080	4180 Nilai	4684 Nilai	5245 Nilai
2	Indikator Program Persentase Laporan Audit Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota	Persen	36,67	100%	100%	100%
Urusan Pemerintahan Pilihan						
	Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.035,50 ton	1905 Ton	1910 Ton	1915 Ton
2	Persentase Penanganan Laporan Tindak Pelanggaran di Sektor Perikanan	Persen	0	40%	45%	50%
3	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	382,77 Ton	328 Ton	336 Ton	344 Ton

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
4	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	639,42 Ton	940 Ton	960 Ton	980 Ton
Pariwisata						
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	5.192.287	4.400.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00
2	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,58 Hari	1,95 Hari	2,05 Hari	2,15 Hari
3	Persentase Produk Ekonomi Kreatif Yang Didaftarkan HKI	Persen	1,29	2,58%	3,86%	5,15%
4	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	12,71%	13,92%	14,96%	16,01%
Pertanian						
1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	223.951,11 Ton	222.079,59 Ton	225.410,79 Ton	228.791,95 Ton
2	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	16.908,90 Ton	9.030,99 Ton	9.166,46 Ton	9.303,96 Ton
3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	52.126,70 Ton	52.747,73 Ton	53.275,21 Ton	53.807,96 Ton
4	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	98%	83,00%	100,00%	100,00%
5	Jumlah Produksi Daging	Ton	6.448,61 Ton	5.312 Ton	5.338,9 Ton	5.365,57 Ton
6	Jumlah Produksi Telur	Ton	3.006,85 Ton	1.202 Ton	1.208,05 Ton	1.214,09 Ton
7	Jumlah Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	266 Ha	1.255 Ha	1.435 Ha	1.875 Ha
8	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	Persen	N/A	30,00	40,00	50,00

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
1	Persentase formasi sesuai dengan perencanaan kebutuhan ASN (Jumlah Formasi/Jumlah Perencanaan Kebutuhan ASN)	Persen	N/A	42%	44%	46%
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan (Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan/jumlah PNS)	Persen	N/A	0,82	0,83	0,84
3	Persentase layanan pengembangan karir ASN	Persen	N/A	78%	80%	82%
4	Nilai LHE AKIP Unsur Pengukuran Kinerja	Poin	19,81*	20,98	21,56	22,15
Pendidikan dan Pelatihan						
1	Persentase ASN yang mendapatkan Sertifikat dalam pengembangan kompetensi	Persen	1%*	2%	3%	4
Penelitian dan Pengembangan						
1	Indeks Inovasi daerah	Poin	45,19	49	49	50
2	Persentase Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik	Persen	50%*	100%	100%	100%
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
Inspektorat Daerah						
1	Persentase Hasil Pengawasan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00
2	Nilai LHE AKIP komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Poin	17,36*	18,38	18,90	19,41
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP	Persen	84,94*	85,14	85,24	85,34

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
1	Persentase masyarakat yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	81*	82	83	83
2	Presentase Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	Persen	73*	75	75	75
3	Presentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	Persen	75*	76	77	77
4	Presentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	60*	62	63	64
5	Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan daerah	Persen	80*	82	83	84
Unsur Kewilayahan						
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100%*	100%	100%	100%
2	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100%*	100%	100%	100%
3	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	N/A	100%	100%	100%
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100%*	100%	100%	100%
5	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	N/A	100%	100%	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1	Persentase sarana pasarana kantor yang terpenuhi	Persen	100%*	100%	100%	100%

NO.	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN		
				2026	2027	2028
2	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	Persen	100%*	100%	100%	100%
3	Cakupan layanan kepegawaian	Persen	100%*	100%	100%	100%
4	Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Persen	100%*	100%	100%	100%

Sumber: Data Evaluasi RPJMD Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029

*) Data belum update/ Data menggunakan tahun terakhir yang tersedia.

BAB VII PENUTUP

Dengan tersusunnya rancangan akhir RKPD Tahun 2027, diharapkan semua pihak dapat mengetahui gambaran tentang rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2027. Rancangan akhir RKPD Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan Pemerintah Daerah sebagai implementasi pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun dengan memperhatikan RPJPD Tahun 2025-2045. Selanjutnya, dokumen RKPD dipergunakan sebagai pedoman:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Tahun 2027;
2. Penyusunan KUA dan menentukan PPAS Daerah Tahun 2027;
3. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027;
4. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5. Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkatan pemerintah. serta menjaga kesinambungan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Rancangan akhir RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu mewujudkan akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2025-2029. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 dijabarkan melalui tema pembangunan daerah “Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata” yang ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui percepatan pengembangan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan sektor pendukung lainnya, peningkatan konektivitas dan infrastruktur wilayah, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan iklim investasi dan usaha daerah. Tema pembangunan ini diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kesenjangan wilayah, serta peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Rancangan akhir RKPD Tahun 2027 disusun selain untuk menjamin konsistensi dan keselarasan dengan kebijakan perencanaan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029, juga menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rancangan akhir RKPD Tahun 2027 ini juga disusun sebagai bahan pelaksanaan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat guna memastikan kesesuaian proses penyusunan dokumen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi bahan dalam proses fasilitasi Rancangan akhir RKPD dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Selain itu, Rancangan akhir RKPD Tahun 2027 akan digunakan sebagai dasar dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2027 sehingga substansi kebijakan, program, kegiatan, dan target pembangunan yang ditetapkan memiliki kesesuaian, konsistensi, serta kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2027, apabila terjadi adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan pembangunan dan sebagai media evaluasi pelaksanaan program/kegiatan supaya tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

CITRA PITRIYAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Triadi RD, SH., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820313 200012 1 002